

ND 8 P 2001
n. 10

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

JILID 2 UNTUK SMA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA

Untuk Revisi Perp 22/4/71

Milik Departemen P dan K

Tidak dijual-belikan

Diterima tgl. :

Dipakai tgl. :

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

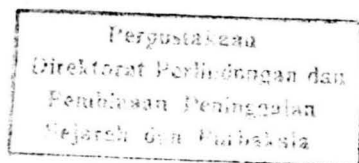
959.8

NUG

S

untuk SMA

II



Editor :

Nugroho Notosusanto

Yusmar Basri

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
1977

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta
I.B.M., Lay-out, Film-setting : N.V. "MASA BARU" Bandung.

PERPUSTAKAAN
Direktorat Perlindungan dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
NO. INDUK 4868
T G L. 4 - 7 - 1994

Team Redaksi :

Ketua : Nugroho Notosusanto
Sekretaris : Yusmar Basri
Anggota : A.B. Lopian
Bambang Sumadio
D.D. Bintarti
Djokosuryo
Edhie Wuryantoro
Hasan M. Ambary
Saleh A. Djamhari



P R A K A T A

Pada awal tahun 1975 telah terbit buku Sejarah Nasional Indonesia dalam enam jilid dan dengan tebal $\pm$ 2000 halaman. Buku itu dimaksudkan untuk menjadi *buku standard* yang dipakai pada semua perguruan tinggi di Indonesia. Lain daripada itu buku itu juga dianggap menjadi buku "babon" atau buku "induk" bagi buku-teks Sejarah Nasional Indonesia untuk sekolah lanjutan pertama maupun untuk sekolah lanjutan atas.

Pada akhir tahun 1975 itu juga telah terbit buku-teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMP dalam tiga jilid dengan tebal $\pm$ 500 halaman. Buku itu mulai tahun-pelajaran 1977 sudah dipakai pada sekolah-sekolah lanjutan pertama di seluruh Indonesia. Dan akhirnya telah terbit pula buku-teks Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA.

Dengan demikian telah lengkaplah buku-teks mengenai Sejarah Nasional Indonesia untuk perguruan-perguruan kita mulai dari sekolah lanjutan pertama sampai kepada perguruan tinggi. Dan untuk pertama kalinya putra-putri Indonesia selama masa belajarnya memperoleh penyajian fakta-fakta yang sama dan interpretasi yang sama mengenai kisah kehidupan dan perjuangan bangsanya. Dan dengan demikian generasi-generasi yang akan datang dapat memiliki persepsi yang sama mengenai perkembangan rakyatnya mulai jaman prasejarah sampai kepada jaman mutakhir sekarang ini.

Kita menyadari, bahwa pada perguruan-perguruan kita, pelajaran yang memperbedakannya secara tajam dari perguruan-perguruan di luar negeri, kecuali bahasa Indonesia, ilmu bumi Indonesia dan kewargaan-negara, adalah Sejarah Nasional Indonesia. Pelajaran-pelajaran lain seperti misalnya saja: matematika, kimia dan fisika, kiranya adalah sama dengan yang diajarkan di negeri-negeri lain. Karena itulah pelajaran Sejarah Nasional pada hakekatnya adalah sumber bagi pengertian akan kepribadian nasional.

Mengingat besarnya unsur pembinaan mental dalam pelajaran sejarah nasional, buku-buku sejarah yang baru ini tidak disusun sebagai kompilasi daripada buku-buku sejarah Indonesia karangan orang asing dengan hanya "membalik" interpretasinya, melainkan telah disusun sebagai suatu karya yang sedikit-banyak orisinal, dan sejauh mungkin

berdasarkan penelitian sarjana-sarjana Indonesia.

Pada akhirnya kami ingin menyatakan penghargaan kepada rekan-rekan para guru sejarah nasional di SMA yang telah memberikan penilaian kepada naskah buku ini dan menyampaikan saran-saran perbaikan yang positif. Tanpa bantuan mereka, pastilah buku ini akan mengandung banyak kecanggungan-kecanggungan yang hanya dapat diketemukan oleh guru-guru yang aktif mengajar. Selanjutnya kami tetap mengharapkan saran-saran perbaikan dari para pengajar sejarah nasional sesudah mereka mempergunakan buku ini dalam praktek.

Jakarta, 31 Januari 1977

TEAM REDAKSI

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I: PERKEMBANGAN AGAMA DAN KEBUDAYAAN ISLAM	11
A. KEADAAN MASYARAKAT PADA MASA KEDATANGAN ISLAM	11
1. Keadaan Sosial-Budaya	11
2. Keadaan Politik	12
B. PENYEBARAN AGAMA ISLAM	20
1. Golongan Pembawa dan Penerima Islam	20
2. Saluran-saluran dan Cara-cara Islamisasi	26
C. PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM	29
1. Mazhab dan Pengaruhnya	29
2. Tasawwuf dan Tarikat	33
D. SENI	38
1. Seni Bangunan	38
2. Cabang Seni Lain	40
BAB II: SISTEM PEMERINTAHAN DAN STRUKTUR MASYARAKAT	45
A. SISTEM PEMERINTAHAN	45
1. Kerajaan - Mataram Islam abad 17 - 18	45
2. Kerajaan Banjar	52
3. Kerajaan Aceh	55
4. Kerajaan Gowa	59
B. STRUKTUR MASYARAKAT	62
1. Golongan Raja dan Keluarganya	63
2. Golongan Elite	66
3. Golongan Non-elite	67
4. Golongan Hamba-sahaya	71

C. HUBUNGAN ANTAR-KERAJAAN	73
1. Hubungan Antar-kerajaan di Indonesia ...	73
2. Hubungan Kerajaan Dengan Negeri Asing.....	81
BAB III: PELAYARAN, PERDAGANGAN, DAN PER-	
KEMBANGAN KOTA	87
A. PELAYARAN	87
1. Tingkat Navigasi	87
2. Teknik Perkapalan	89
3. Pemilik dan Pelaksana Pelayaran	92
4. Jalan dan Pusat-pusat Pelayaran	95
5. Pelabuhan	98
B. PERDAGANGAN	101
1. Pola Perdagangan	101
2. Jenis Barang Dagangan	103
3. Tempat Penghasil Barang Perdagangan ...	105
C. PERKEMBANGAN KOTA	106
1. Kota dan Corak Kehidupan	106
2. Jumlah Penduduk Kota	110
3. Pasar Pusat Ekonomi Kota	113
4. Barang-barang Perdagangan	114
5. Sistem Jual-beli Barang	117
BAB IV: PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME ...	121
A. PENETRASI BARAT DAN REAKSI RAKYAT	
INDONESIA	121
1. Penetrasi Orang Barat	121
2. Reaksi Malaka dan Aceh Terhadap Portugis	
dan Belanda	128
3. Maluku Menghadapi Portugis, Spanyol dan	
Belanda	133
4. Banten dan Mataram Menghadapi Belanda..	
5. Banjar dan Gowa Menghadapi Kehadiran	
Belanda	136

PERKEMBANGAN AGAMA DAN KEBUDAYAAN ISLAM

A. KEADAAN MASYARAKAT PADA MASA KEDATANGAN ISLAM

1. *Keadaan Sosial-budaya*

Penduduk Indonesia terdiri dari beraneka ragam sukubangsa. Masing-masing mempunyai organisasi pemerintahan yang bersifat khusus kedaerahan, juga terdapat struktur ekonomi dan sosial-budaya yang berbeda-beda.

Sukubangsa yang hidup dan bertempat tinggal di pedalaman belum banyak mengalami percampuran dengan bangsa dan budaya dari luar. Ini berarti bahwa struktur sosial-ekonomi dan budayanya agak lebih murni jika dibandingkan dengan sukubangsa yang bermukim di daerah pantai.

Mereka yang berdiam di daerah pantai, terutama yang tinggal di kota-kota pelabuhan, menunjukkan ciri-ciri fisik dan sosial-budaya yang majemuk. Hal ini disebabkan karena adanya percampuran dengan bangsa dan budaya dari luar.

Pada masa kedatangan dan tersebarnya agama Islam di tanah-air kita, terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Indonesia-Hindu. Di Sumatra pada waktu itu terdapat kerajaan Sriwijaya dan Malayu. Di Jawa terdapat kerajaan Majapahit dan Sunda, sedangkan di Kalimantan terdapat kerajaan Nagara, Daha dan Kutai. Di Bali kerajaan yang bercorak Hindu bahkan masih ada hingga abad ke-20. Di lain pihak ada beberapa daerah lain yang kurang sekali atau tidak mendapat pengaruh Hindu. Kerajaan-kerajaan semacam ini terdapat di Sulawesi seperti kerajaan Gowa, Wajo dan Bone.

Seorang penulis asing Portugis, Tome Pires, yang mengunjungi Indonesia pada tahun 1512 - 1515, menyebutkan bahwa di Sulawesi terdapat 50 kerajaan yang masih menyembah berhala. Salah satu bukti bahwa beberapa kerajaan di Sulawesi pada waktu itu tidak mendapat pengaruh Hindu tapi masih memiliki adat-istiadat leluhur, ialah dalam cara penguburan. Cara-cara penguburan pada masyarakat kerajaan Gowa pada waktu itu masih mengikuti tradisi masa pra-

sejarah yaitu jenazah dikubur mengarah timur-barat dan pada makamnya disertakan sejumlah bekal kubur seperti mangkuk, cepuk, tempayan bahkan barang-barang impor buatan Cina, tiram dan lain-lainnya. Juga dalam cara penguburan ini terdapat kebiasaan untuk memberi penutup mata dari emas atau perak untuk jenazah bangsawan atau orang-orang terkemuka. Cara penguburan tersebut dapat dibuktikan dari hasil-hasil penggalian kepurbakalaan di beberapa tempat di Sulawesi Selatan, seperti di daerah Takalar, Pangkajene Kepulauan dan sebagainya.

Pada awal abad 16 di kepulauan Maluku terdapat kelompok masyarakat yang bukan Islam dan mungkin banyak di antaranya tidak memperoleh pengaruh budaya Hindu. Tome Pires ketika mengunjungi Maluku juga melihat adanya pemerintahan di pedalaman yang dipimpin oleh kepala-kepala suku atau *cabila*. Kepala suku yang menjadi kepala pemerintahan ini adalah orang tertua di daerahnya yang dianggap paling memiliki kemampuan dan wibawa daripada lainnya.

Pengaruh budaya India terutama yang dibawa oleh golongan brahmana (untuk agama Hindu) dan pendeta-pendeta agama Budha telah menarik perhatian golongan bangsawan dan pemimpin masyarakat pribumi. Masyarakat yang hidup jauh dari pusat-pusat masih banyak yang tetap pada budaya aslinya. Masyarakat Indonesia - Hindu menganggap rajanya sebagai dewa yang memerintah dunia. Gelar-gelar yang bersifat kedewaan diberikan kepada raja-raja yang telah meninggal. Pada masa pra-Hindu di Indonesia terdapat kepercayaan yang berupa pemujaan kepada arwah nenek-moyang yang biasanya diwujudkan dalam bentuk patung dan menhir yang ditempatkan di atas punden berundak. Pembuatan patung-patung megalit masih dilaksanakan oleh masyarakat sekarang, misalnya, di Nias dan Flores.

Pada abad-abad kedatangan dan penyebaran Islam di daerah Maluku masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membuat patung-patung untuk menghormati kepada nenek-moyangnya. Patung-patung tersebut dibuat dari kayu atau batu. Kepercayaan semacam ini juga terdapat pada suku-suku di Kalimantan, antara lain berupa upacara *Tiwah*.

Hari pasaran yang terdiri dari lima hari pada masa Indonesia-Hindu digabung dengan cara menghitung tujuh hari dalam seminggu. Istilah jumlah lima hari dalam seminggu ialah panca-warna yang banyak digunakan dalam prasasti jaman Indonesia-Hindu.

Bahasa-bahasa yang dipakai di Nusantara pada waktu masa penyebaran Islam bermacam-macam. Di Jawa terdapat bahasa Jawa-Kuno dan Sunda Kuno. Di daerah Sumatra dan Semenanjung Melayu dipergunakan bahasa Melayu di samping bahasa-bahasa daerah seperti Batak, Kubu, dan Nias. Di Sulawesi, bahasa yang dipakai antara lain bahasa Bugis, Makasar dan banyak lagi bahasa setempat. Di Kalimantan terdapat bahasa Banjar di samping bahasa Melayu dan Dayak. Di antara bahasa yang disebutkan di atas rupanya bahasa Melayulah yang paling memegang peranan penting.

Penggunaan bahasa Melayu dapat kita ketahui sejak abad 7. Hal ini dibuktikan oleh prasasti-prasasti jaman Sriwijaya. Rupa-rupanya bahasa Melayu makin lama makin berkembang. Penyebaran bahasa tersebut disebabkan oleh adanya hubungan lalulintas pelayaran dan perdagangan. Bahasa Melayu kemudian dipergunakan sebagai alat komunikasi antar sukubangsa hingga menjadi bahasa yang umum dipakai sebagai *lingua franca*. Kedatangan agama Islam telah memperkaya perbendaharaan bahasa Melayu dengan kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Bahasa Melayu kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia.

2. Keadaan Politik

Kedatangan Islam di beberapa daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Kerajaan-kerajaan dan daerah yang didatanginya pun mempunyai satuan politik dan sosial-budaya yang berlainan.

Ketika kerajaan Sriwijaya sedang mengembangkan kekuasaannya sekitar abad 7 dan 8 M, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim. Mereka berlayar melalui Selat Malaka untuk berdagang di daerah Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina dari jaman T'ang pada abad-abad tersebut sudah ada orang Muslim, baik di Kanton maupun di daerah Sumatra. Perkembangan perdagangan dan pelayaran yang bersifat internasional antara negeri barat dan timur Asia antara lain disebabkan oleh kegiatan Kerajaan Islam di bawah Banu Umayyah di bagian barat dan

Kerajaan Cina dinasti T'ang di Asia Timur, serta Kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Usaha-usaha Kerajaan Sriwijaya untuk meluaskan kekuasaannya ke Semenanjung Malaka erat hubungannya dengan usaha untuk menguasai Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional. Akibatnya ialah, bahwa kedatangan orang Islam di Asia Tenggara dan Asia Timur pada tahap pertama nampaknya belum terasa bagi kerajaan-kerajaan di kawasan tersebut. Apabila Kerajaan Sriwijaya dari abad 7 - 12 M memegang peranan penting di bidang ekonomi dan perdagangan untuk daerah Asia Tenggara, maka sejak abad 12 peranan tersebut mulai menunjukkan kemunduran. Bukti bahwa Kerajaan Sriwijaya sudah mundur di bidang ekonomi dan perdagangan dapat diketahui dari berita Chou Ku-Fei tahun 1178.

Berita tersebut menyebutkan bahwa harga barang perdagangan di Sriwijaya mahal-mahal, karena rupanya tidak lagi menghasilkan hasil-hasil alamnya. Untuk mencegah kemunduran ekonomi dan perdagangan, Kerajaan Sriwijaya kemudian membuat peraturan cukai yang lebih berat bagi kapal dagang yang singgah di daerah pelabuhannya. Usaha-usaha yang dilakukan Sriwijaya ternyata tidak menghasilkan pendapatan yang lebih menguntungkan tetapi malahan lebih merugikan. Kapal-kapal dagang seringkali menghindari pelabuhan-pelabuhannya, kadang-kadang menembus blokade dan menuju tempat-tempat lain yang banyak menghasilkan barang dagangan.

Kemunduran di bidang perdagangan dan politik kerajaan Sriwijaya telah dipercepat oleh usaha-usaha kerajaan Singhasari di Jawa yang mengadakan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Pengaruh politik Kertanegara terhadap Kerajaan Melayu merupakan usaha untuk menguasai kunci pelayaran dan perdagangan Sriwijaya. Usaha mengecilkan arti kekuasaan Sriwijaya oleh Kerajaan Singhasari telah dimanfaatkan oleh daerah-daerah lain untuk melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya.

Sejalan dengan kelemahan yang dialami Kerajaan Sriwijaya maka pedagang-pedagang Muslim yang mungkin juga disertai mubaligh-mubalighnya, menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dagang dan politik. Mereka mendukung daerah-daerah yang muncul dan menyatakan dirinya sebagai kerajaan yang bercorak Islam,

seperti Samudra-Pasai yang terletak di pesisir timur-laut Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Utara dekat Lok Seumawe.

Munculnya Kerajaan Samudra-Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, diperkirakan terjadi pada abad 13 M. Daerah lain yang sudah mempunyai masyarakat Islam pada periode yang sama, ialah Perlak. Hal ini dapat kita ketahui dari berita Marco Polo yang singgah di daerah tersebut pada tahun 1292. Kemunduran dan keruntuhan kekuasaan Sriwijaya itu, kecuali sebagai akibat politik Singhasari dan Majapahit, juga karena ekspansi Cina pada masa Kubilai Khan (abad 13) dan masa pemerintahan Dinasti Ming (abad 14 - 15) ke daerah Asia Tenggara. Sebaliknya, pengaruh politik kerajaan Majapahit ke Samudra-Pasai dan Malaka setelah keruntuhan Sriwijaya mulai kurang, terutama karena di pusat Kerajaan Majapahit sendiri timbul kekacauan politik akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja. Dengan demikian kerajaan-kerajaan yang jauh letaknya dari pengawasan Majapahit, seperti kerajaan Samudra-Pasai dan Malaka, berhasil mencapai puncak kekuasaan menjelang abad ke 16.

Tentang kedatangan Islam di Jawa, tidak dapat diketahui secara pasti. Bukti nyata bagi kedatangan Islam di Jawa dapat ditunjukkan dengan adanya batu nisan kubur Fatimah binti Maimun di Leran (Gresik) yang berangka tahun 475 H (1082 M). Meskipun demikian, ini belum berarti telah adanya proses Islamisasi di Jawa. Bukti-bukti berupa peringgalan purbakala dari abad 13 Masehi tentang adanya masyarakat beragama Islam, ditemukan di bekas ibukota Majapahit sekitar daerah Trowulan. Kecuali itu berita dari seorang musafir Cina beragama Islam bernama Ma Huan yang pada tahun 1416 mengunjungi Gresik, menceritakan bahwa banyak orang Muslim yang tinggal di Gresik.

Pertumbuhan masyarakat Muslim di sekitar Majapahit, terutama di kota-kota pelabuhannya, erat sekali hubungannya dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Islam. Pada tahap pertama, masuknya Islam di pesisir utara Jawa, mungkin belum dirasakan akibatnya di bidang politik. Kedua belah pihak waktu itu mementingkan usaha untuk memperoleh keuntungan dagang. Kelemahan-kelemahan yang dialami pusat Kerajaan Majapahit

(di antaranya akibat pemberontakan serta perang perebutan kekuasaan), telah mempercepat bentuk kekuasaan politik seperti munculnya Kerajaan Demak.

Sebenarnya sejak Jayanegara menggantikan Krtarajasa, di Majapahit telah terjadi serentetan pemberontakan. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggalawe di Tuban (1309 M) serta Sadeng dan Keta pada tahun 1331 M, walaupun berhasil ditumpas oleh Gajah Mada, telah memberi peluang bagi berkembangnya Islam di kota-kota pelabuhan yang dikuasai Majapahit. Ketika Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada masih berkuasa, situasi politik pusat Kerajaan Majapahit masih tenang. Raja-raja lain di berbagai daerah di Nusantara masih mengakui dan berlindung di bawah kekuasaan Majapahit. Tetapi setelah kedua tokoh tersebut meninggal, situasi politik Majapahit kembali menunjukkan kegoncangan dan kelemahan yang makin menjadi-jadi sehingga mengakibatkan keruntuhan.

Wikramawardhana yang menjadi menantu Hayam Wuruk karena perkawinannya dengan Kusumawardhani, naik tahta untuk menggantikan Hayam Wuruk. Hal tersebut menimbulkan ketidak-senangan saudara laki-laki Kusumawardhani yang bernama Bhre Wirabhumis. Bhre Wirabhumis ini lahir dari selir, sehingga ia tidak berhak atas takhta Majapahit. Lama-kelamaan rasa ketidak-puasan ini semakin memuncak, sehingga timbul perang saudara antara Wikramawardhana dengan Wirabhumis. Sengketa ini menjadi berlarut-larut, sehingga kerajaan Majapahit menjadi semakin lemah. Wikramawardhana kemudian diganti oleh Suhita, tetapi pertentangan berlangsung terus. Suhita meninggal pada tahun 1447 M dan digantikan oleh Krtawijaya. Setelah Krtawijaya meninggal pada tahun 1451 kekacauan politik semakin memburuk. Penggantinya, Bhre Pamotan yang bergelar Rajasawardhana atau Sinagara (1451 - 1453) berusaha mengembangkan pemerintahan, tetapi tidak berhasil, karena pada tahun 1453 tewas dalam perang. Akibatnya adalah munculnya Bhre Wengker atau Bhre Hyang Purwawisesa, yang memegang kekuasaan dari tahun 1456 sampai 1466. Ia digantikan oleh Girindrawardhana yang bergelar Bhatara ring Dhanapura dan mendudukkannya atas takhta kerajaan Keling.

Pada tahun 1468 ibukota Majapahit diserang oleh Girindrawardhana Bhatara ring Dhanapura, dan ia berhasil menyingkirkan kemenakannya Singhawikramawardhana yang bergelar Pandan Salas dari kraton Majapahit. Girindrawardhana meninggal pada tahun 1474 dan digantikan oleh putranya bernama Ranawijaya yang menyebutkan dirinya dengan gelar Sri Wilwatita Daha Janggala Kadiri yang menguasai Majapahit-Daha Kadiri. Tradisi menempatkan keruntuhan Majapahit pada tahun 1478.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa keruntuhan pusat Majapahit bukan semata-mata oleh kalangan Muslim, melainkan oleh adanya perpecahan di antara kalangan kraton Majapahit, seperti misalnya oleh Girindrawardhana dari Kadiri. Meskipun kerajaan Indonesia-Hindu yang berpusat di Kadiri sekitar 1526 sudah tumbang, namun kerajaan-kerajaan kecil seperti Pasuruhan, Panarukan dengan pusat kerajaan Blambangan, belum masuk Islam. Pasuruhan baru masuk kerajaan Islam sesudah tahun 1546. Hal itu terjadi karena serangan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono. Karena ancaman-ancaman dari kekuasaan Islam maka Blambangan terpaksa mencari kekuatan luar, yaitu dari Portugis. Permintaan Blambangan disambut baik oleh Portugis karena mereka sejak menguasai Malaka pada tahun 1511 sangat memerlukan hasil produksi Blambangan yang diharapkan dapat mengisi barang-barang keperluan kehidupannya. Dengan demikian kerajaan Blambangan tetap berdiri sampai pada masa serangan Sultan Agung dan Amangkurat pada abad ke 17.

Sejak Demak berdiri sebagai kerajaan dengan Raden Patah sebagai rajanya, daerah pesisir utara Jawa Barat seperti Cirebon telah berada di bawah pengaruhnya. Islam di Cirebon sudah mulai berkembang sejak tahun 1470 – 1475. Dari sudut ekonomi, pelabuhan-pelabuhan Sunda seperti Cirebon, Kalapa, dan Banten, mempunyai potensi besar dalam **mengexpor** hasil buminya. Di antara hasil bumi utama yang menjadi bahan **expor** penting ialah lada yang diambil dari daerah Lampung. Kalau Blambangan berhubungan dengan Portugis, demikian pula halnya dengan kerajaan Sunda seperti ternyata dari perjanjiannya dengan Portugis tanggal 21 Agustus 1522.

Usaha Kerajaan Sunda untuk membendung kekuatan Islam, dapat dipatahkan oleh Falatehan, seorang yang berasal dari Pasai,

yang mendapat perintah dari raja Demak serta Sunan Gunung Jati dan berhasil merebut Sunda Kalapa sekitar tahun 1527.

Banten merupakan pelabuhan yang penting, baik dilihat dari sudut geografi maupun ekonomi, karena letaknya yang strategis di sekitar Selat Sunda. Posisinya menjadi sangat penting ketika Selat Malaka sudah dikuasai Portugis. Meskipun sejak tahun 1526 – 1527 pelabuhan-pelabuhan Pajajaran sudah jatuh ke tangan Muslim, namun daerah pedalaman masih tetap bertahan. Namun akhirnya sekitar 1579 – 1580 praktis seluruh Kerajaan Sunda sudah jatuh karena serangan raja Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf.

Kedatangan Islam ke Indonesia bagian timur seperti ke Maluku bertalian erat dengan jalan perdagangan yang terbentang antara pusat lalulintas internasional di Malaka, Jawa dan Maluku. Tradisi setempat menyebutkan bahwa sejak abad 14 Islam sudah datang ke daerah Maluku.

Raja Ternate yang keduabelas bernama Malomatiya (1350 – 1357) telah bersahabat karib dengan orang Arab yang memberikan petunjuk bagaimana cara membuat kapal yang lebih baik. Raja yang dianggap benar-benar memeluk agama Islam, ialah Zainal Abidin (1486 – 1500). Ia mendapat ajaran agama Islam dari madrasah Giri Prabu Satmata. Sekembalinya dari Jawa, Zainal Abidin membawa seorang mubaligh yang bernama Tuhubahahul. Hubungan Ternate dan Hitu dengan Giri di Jawa Timur erat sekali. Hubungan antara Maluku dengan Giri terus berlangsung sampai abad 17. Hal itu dapat dilihat dari surat raja pendeta Giri yang diberikan kepada masyarakat Hitu yang oleh mereka dianggap magis dan sangat dihormati. Demikian juga banyak anak Maluku, terutama yang berasal dari Hitu, yang belajar dimadrasah Giri.

Situasi politik di daerah Kalimantan Selatan menjelang masa kedatangan Islam dapat diketahui dari Hikayat Banjar. Kerajaan yang bercorak Indonesia-Hindu di Kalimantan menjelang kedatangan Islam, berpusat di Nagara Dipa, Daha dan Kahuripan. Kerajaan tersebut sudah mempunyai hubungan dengan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Suryanata karena perkawinannya dengan putri Junjung Buih.

Menjelang kedatangan Islam ke daerah itu kerajaan Nagara diperintah oleh Maharaja Sukarama. Setelah Sukarama meninggal ia diganti oleh Pangeran Tumenggung. Beberapa tahun kemudian timbul perpecahan antara Pangeran Tumenggung dengan Raden Samudra, cucu Maharaja Sulaeman, yang lebih berhak atas takhta kerajaan. Raden Samudra sejak kecil telah mengasingkan diri dan setelah dewasa ia dinobatkan sebagai raja Banjar oleh Patih Masih. Kerajaan Banjar yang terletak di pantai dan Negara Daha yang terletak di hulu sungai kemudian berperang.

Untuk mengalahkan Kerajaan Negara Pangeran Samudra terpaksa minta bantuan Demak. Akhirnya dengan bantuan Demak Nagara dapat ditundukkan oleh Banjar. Raden Samudra akhirnya masuk Islam berkat bantuan Penghulu Demak. Setelah masuk Islam mendapat sebutan Sultan Suryanullah.

Di Kalimantan Timur situasi politiknya pada masa kedatangan Islam agak berbeda dengan di Kalimantan Selatan. Sebelum masuknya Islam, Kerajaan Kutai bercorak Indonesia-Hindu dan di daerah pedalaman rakyat masih menganut kepercayaan nenek-moyang. Islam dapat masuk ke Kutai dengan datangnya dua orang mubaligh yang bernama Dato'ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Kedua mubaligh ini datang ke Kutai setelah orang-orang Makasar masuk Islam. Raja Kutai yang bernama Raja Mahkota berkat ajaran kedua mubaligh tersebut akhirnya menyatakan dirinya masuk Islam.

Proses Islamisasi di daerah Kutai dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi sekitar tahun 1575. Pengislaman lebih jauh, terutama ke daerah pedalaman, terjadi pada masa putra Raja Mahkota yang bernama Aji di Langgar. Demikian pula para penggantinya meneruskan pengislaman daerah ini hingga ke daerah Muara Kaman.

Daerah Sulawesi, terutama bagian selatannya, telah didatangi pedagang-pedagang Muslim sejak abad 15. Mereka datang ke tempat ini melalui Sumatra, Malaka dan Jawa. Meskipun sejak abad 16 sudah banyak pedagang Muslim yang bermukim di Sulawesi Selatan, terutama di Gowa, namun raja-raja Gowa juga mengadakan hubungan dagang dengan orang Portugis.

Walaupun di Gowa dan Tallo raja-rajanya telah masuk agama Islam secara resmi pada tanggal 22 September 1605, namun ternyata

pada masa berikutnya hubungan dengan Portugis tetap berjalan dengan baik dan agama Kristen Katolik yang dianut oleh orang Portugis tidak mengalami kesulitan. Sultan Gowa Muhammad Said (1639 - 1653) dan putranya Sultan Hasanuddin (1653 - 1669), kedua-duanya memberikan bantuan kepada orang Portugis (di antaranya kepada Francisco Fiera yang pernah menjadi utusan raja Gowa ke Banten dan Batavia). Proses Islamisasi di daerah Sulawesi Selatan pada tahap-tahap permulaan berjalan dengan damai. Hal ini dapat diketahui dari hikayat setempat yang menceritakan bagaimana cara-cara yang ditempuh mubaligh Dato'ri Bandang dan Dato' Sulaeman dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat dan raja-raja. Walaupun kemudian karena keadaan politik, terjadi pertikaian antara raja-raja daerah dan sering pula terjadi perebutan kekuasaan sehingga raja tersebut mengadakan hubungan-hubungan dengan pedagang Muslim. Tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa masuknya dan cara penyebaran Islam ke daerah ini, baik kepada golongan bangsawan maupun kepada rakyat pada umumnya, tetap dilakukan dengan cara damai.

B. PENYEBARAN AGAMA ISLAM

1. Golongan Pembawa dan Penerima Islam

Berita yang menyebutkan adanya orang-orang Muslim yang berdagang dan singgah di Kepulauan Indonesia berasal dari berita Cina jaman dinasti T'ang. Dalam berita itu disebutkan bahwa ada orang-orang Ta-shih yang tadinya berusaha menyerang kerajaan Ho'ling tetapi membatalkan niatnya karena Ho'ling di bawah pemerintahan Ratu Sima (tahun 674) masih kuat. Sebutan Tashih dalam berita tersebut ditafsirkan oleh para ahli sebagai orang Arab. Berita yang lain kita dapatkan dari Jepang yang berangkat tahun 748 yang menceritakan tentang pendeta Kanshin. Dalam berita ini diceritakan bahwa pada masa itu di Kanton terdapat kapal-kapal Po-sse Ta-shih K-uo. Istilah Po-sse ditafsirkan sebagai jenis bangsa Melayu tetapi Tashih hanya untuk menunjukkan orang-orang Arab dan Persia dan bukan untuk orang Muslim India.

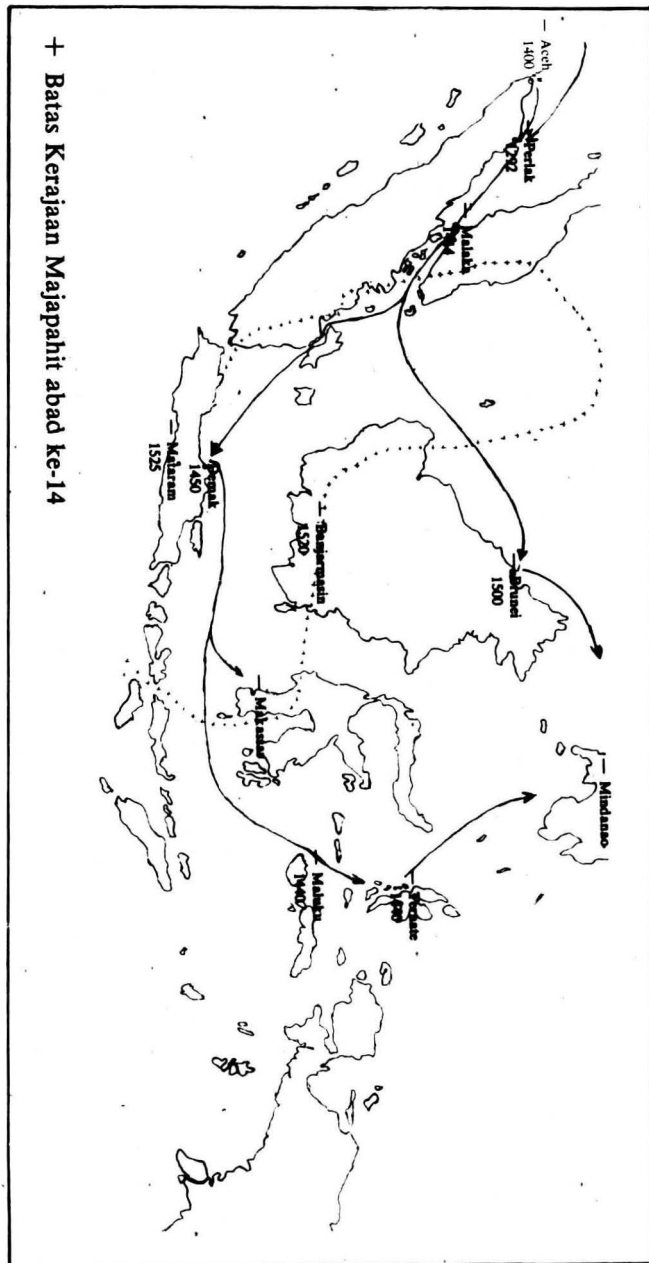
Pendapat beberapa ahli bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13, berdasarkan dugaan, karena keruntuhan Dinasti Abbasiyah oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Bukti tersebut diperkuat oleh

berita Marco Polo yang pada tahun 1292 berlayar di Selat Malaka dan Ibn Batutah yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai pada abad 14. Batu nisan kubur Sultan Malik as Shaleh yang meninggal pada tahun 1297 lebih memperkuat bukti-bukti di atas bahwa pada waktu itu sudah ada kerajaan Islam di Indonesia.

Karena itu abad 7 M dapat dianggap sebagai abad permulaan adanya hubungan pedagang Muslim dengan sebagian kecil daerah Indonesia. Kedatangan mereka ke daerah Indonesia barulah pada taraf hubungan dagang saja, sedangkan penyebaran agama baru berkembang 5 atau 6 abad kemudian.

Siapakah sebenarnya orang-orang Muslim yang mengenalkan agama Islam kepada bangsa Indonesia? Ahli-ahli yang memberi tafsiran seperti dikatakan dalam berita Cina abad 7, mengambil kesimpulan bahwa orang-orang Muslim yang datang ke Indonesia itu adalah langsung dari negeri Arab. Sebaliknya ahli yang berpendapat bahwa orang-orang Islam yang datang dan menyebarkan agama Islam ke Indonesia tidak langsung dari negeri Arab, melainkan melalui orang Islam dari Gujarat (India), mengemukakan alasan bahwa bukti adanya hubungan langsung kerajaan Indonesia dengan negeri Arab baru terjadi pada abad 17.

Pendapat bahwa Islam datang melalui Gujarat ini didapatkan pada unsur-unsur Islam di Indonesia yang menunjukkan persamaannya dengan di India. Hasil penelitian kepurbakalaan mengenai nisan kubur dari Samudra Pasai yang memuat nama Sultan Malik-as Shaleh yang berangka tahun 696 H (1297 M) serta beberapa batu nisan kubur lain di tempat yang sama, menunjukkan bahwa pembuat nisan berasal dari Cambay, Gujarat. Pendapat lain mengatakan bahwa orang-orang Muslim yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari Benggala. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menentukan dengan pasti bila dan dari mana datangnya pembawa Islam ke Indonesia. Karena itu akan lebih baik dikatakan, bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad 7 - 13 oleh orang Muslim dari Arab, Persia dan India (Gujarat, Benggala). Golongan pembawa Islam ke Indonesia pada umumnya melalui jalan perdagangan. Hal itu berarti bahwa pembawa agama Islam adalah pedagang juga. Golongan pedagang Muslim sangat berbeda



dengan golongan pedagang yang beragama Hindu. Pada agama Hindu hanya golongan Brahmanalah yang melakukan kegiatan upacara keagamaan dan membaca buku-buku suci, dan mereka pula yang menyebarkan budaya Hindu. Dalam pengertian Islam, setiap Muslim adalah pendakwah dari kepercayaan yang dianutnya dan oleh karenanya pedagang dalam dunia Islam merupakan tokoh misi agamanya.

Pendorong utama adalah faktor perdagangan. Hal ini bertalian dengan kegiatan perdagangan internasional antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara dan timur Asia. Mereka datang ke Indonesia untuk mendapatkan hasil bumi, terutama rempah-rempah yang pada saat itu sangat laku di pasaran Eropa.

Karena rempah-rempahlah maka pedagang dari berbagai negeri berlomba-lomba untuk mendapatkan monopoli perdagangan di Indonesia. Pedagang asing mencari simpati dari masyarakat, terutama raja-raja dan kaum bangsawan Indonesia yang memegang peranan dalam dunia perdagangan. Raja-raja dan golongan bangsawan banyak yang menjadi pemilik-pemilik saham dan kapal yang mendatangkan laba bagi mereka. Pedagang yang datang ke Indonesia ini mungkin disertai pula oleh beberapa orang mubaligh yang pekerjaannya lebih khusus mengajarkan agama. Turut-sertanya mubaligh atau guru agama Islam lebih memudahkan proses Islamisasi dan lebih memperdalam pengertian tentang agama Islam. Guru-guru agama dan para mubaligh dapat menyelenggarakan pesantren-pesantren untuk membentuk kader yang kelak menjadi ulama dan guru agama. Mereka nantinya secara langsung menyebarkan ajaran Islam sampai ke pelosok-pelosok.

Kecuali itu ada juga golongan yang mempunyai peranan khusus di bidang *tasawwuf*. Kedatangan golongan sufi tersebut ke Indonesia diperkirakan sudah sejak abad 13. Penyebaran Islam melalui tasawwuf lebih mudah diterima bangsa Indonesia terutama untuk orang-orang yang sebelumnya mempunyai dasar-dasar ajaran kebatinan.

Golongan pembawa agama Islam ke Indonesia tidak hanya terbatas pada orang yang berasal dari luar Indonesia. Banyak bukti bahwa orang Muslim bangsa Indonesia juga melakukan penyebaran agama. Contoh-contoh mengenai ini, antara lain, ialah tokoh Dato'ri Bandang, seorang mubaligh yang datang ke Gowa, dan kemudian

bersama Tuan Tunggang Parangan ke Kutai. Penghulu Demak dan sejumlah pengikutnya telah mengislamkan daerah Banjar. Ada hubungan yang sangat erat antara Sunan Giri dengan rakyat Hitu dan Maluku Utara. Kecuali itu pada abad 16 dan 17 ketika hubungan antara Indonesia dengan Mekah sudah lancar, ada beberapa orang Indonesia yang bermukim di Mekah. Sekembalinya mereka ke tanah-air di bawahnya ajaran-ajaran atau faham-faham yang telah mereka pelajari selama bermukim yang kemudian dikefalkan kepada rekan-rekannya di Indonesia.

Sudah tentu di samping golongan pembawa agama Islam akan ada pula golongan penerima Islam. Karena faktor hubungan dagang, maka golongan pembawa agama Islam yang terdiri dari para pedagang dapat berhadapan langsung dengan para raja dan kaum bangsawan yang juga memegang kunci utama perdagangan. Mereka bukan hanya menjadi penguasa di bidang pelayaran dan perdagangan saja, tetapi pada umumnya mereka juga pemilik saham atau pemilik kapal dagang. Perdagangan hasil pertanian yang sangat penting, seperti rempah-rempah, beras dan lain-lainnya biasanya menjadi hak monopoli negara di mana raja dan bangsawan berkuasa untuk menentukan harga.

Ketika pusat-pusat kerajaan Indonesia yang bercorak Hindu, seperti Majapahit dan Sriwijaya, mengalami kekacauan politik, maka adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dan mengadakan hubungan dengan langsung dengan pedagang Muslim. Mereka termasuk golongan pertama yang menerima agama Islam, bahkan kemudian melalui pengaruhnya mereka juga menjadi penyebar agama. Perubahan kekuasaan dan pergeseran di kota-kota pelabuhan di Jawa mempunyai pengaruh besar terhadap perpecahan politik yang sedang berlangsung di pusat kraton. Dengan demikian ada faktor yang saling pengaruh-mempengaruhi antara perkembangan masyarakat dengan perpecahan politik yang terjadi di pusat kerajaan Majapahit. Pedagang-pedagang golongan bawah yang terlibat dengan perdagangan Muslim, lambat-laun juga menerima agama Islam. Walaupun demikian, proses Islamisasi yang berjalan melalui tingkat raja dan bangsawan telah mempercepat berkembangnya Islam di Indonesia.

Menurut cerita tradisional dan sumber babad, yang dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Islam di tanah Jawa ialah

para *Wali*. Sumber itu juga mengatakan bahwa tidak semua wali berasal dari luar Indonesia. Mereka adalah keturunan Jawa. Di antara sekian wali yang paling terkenal ialah *Wali Sanga* yang jumlahnya (sesuai dengan namanya) 9 orang. Di antara para wali tersebut Sunan Bonang dan Sunan Drajat adalah putra Sunan Ampeldenta yang sebelumnya telah bertempat tinggal di kampung Ampeldenta (Surabaya). Sunan Kalijaga yang sebelumnya bergelar Jakasayid adalah putra seorang tumenggung Majapahit. Sunan Giri adalah putra seorang Muslim yang bernama Maulana Iskak yang kawin dengan seorang putri Blambangan. Sunan Gunung Jati menurut babad Cirebon adalah putra Syarif Abdullah yang menikah dengan Rara Satang atau Syarifah Modarin, putri prabu Siliwangi.

Jika ceritera dalam babad itu benar, maka para wali terutama Wali Sanga, adalah golongan penerima agama Islam yang kemudian dengan semangat dakwah yang sangat tinggi menyebarkan agama di kalangan masyarakat. Peranannya ternyata bukan hanya memberikan dakwah Islam saja, tetapi sekaligus bertindak sebagai penasehat dan pendukung raja-raja Islam yang memerintah. Bahkan di antara wali yang sembilan ini, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah tidak hanya pelopor dan penyebar Islam saja tetapi juga bertindak sebagai raja, sehingga mendapat gelar *pandita ratu*.

Selain Wali Sanga itu ada beberapa tokoh lain yang juga terhormat, seperti Wali Bayat (Klaten), Sunan Lawu Syaikh Bentong, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Sendang, dan sebagainya. Maka telah timbul anggapan bahwa nama *Wali Sanga* mungkin hanya merupakan julukan yang mengandung perlambang suatu dewa para wali. Angka sembilan sebelum kedatangan agama Islam dianggap sebagai angka keramat.

Di luar Jawa, Dato'ri Bandang dan Dato' Sulaeman dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Islam ke daerah Sulawesi. Dato'ri Bandang dan Tuan Tunggang ri Parangan dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Islam di Kutai (Kalimantan Timur), sedangkan penghulu Demak (seperti diceriterakan dalam hikayat Banjar) adalah pembawa dan penyebar agama Islam di Banjar.

Biasanya hubungan erat antara penerima dan penyebar Islam terus terpelihara dan merupakan sistim pembinaan calon-calon pem-

beri ajaran. Pendidikan semacam ini dapat dikaitkan dengan sistim pesantren yang hingga abad-abad kemudian masih tetap meneruskan pola yang sama. Biasanya murid atau santri yang pandai dan telah paham seluk-beluk Islam dari pesantren tertentu bilamana kembali ke daerahnya menjadi pembawa dan penyebar agama. Untuk abad 15 - 17 pondok pesantren yang terkenal ialah di Giri di bawah asuhan Sunan Giri yang kemudian diteruskan oleh putra dan cucunya, seperti Sunan Prapen yang dalam ceritera asing terkenal dengan sebutan Rajah Bukit. Sejak hubungan antara Indonesia dengan Mekah sudah berjalan baik, maka mereka yang telah menjadi haji setelah kembali ke Indonesia menyebarkan ajaran-ajaran yang diterimanya dari Syaikh-Syaikhnya. Lebih-lebih lagi mereka yang lama bermukim di Mekah, sekembalinya ke Indonesia mereka meneruskan ajaran yang diterima dari gurunya.

Selama mereka berada di Tanah Suci mereka telah bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang seagama, dan tidak jarang yang kembali ke Indonesia membawa pembaharuan dalam ajaran Islam. Misalnya yang terjadi pada abad 19 di Minangkabau. Tiga orang haji yang terkenal dalam gerakan Padri yang mendapat pengaruh gerakan Wahabi dari Arab, sekembalinya dari Tanah Suci, mengadakan gerakan untuk menghapuskan hal-hal dalam kehidupan masyarakat yang dianggapnya menyeleweng dari ketentuan Islam.

Golongan terakhir yang dianggap penerima agama Islam ialah rakyat umum. Proses Islamisasi di berbagai tempat di Indonesia dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu kehidupan keagamaan rakyat umum masih menunjukkan unsur-unsur percampuran dengan kehidupan kepercayaan sebelumnya.

2. Saluran-saluran dan Cara-cara Islamisasi

Telah kita ketahui bahwa pada taraf pertama saluran Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu sesuai dengan kegiatan lalulintas perdagangan abad 7 sampai abad 16 di mana pedagang-pedagang Muslim (Arab, Persia, India) turut mengambil bagian. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ternyata sangat menguntungkan karena dalam agama Islam tidak ada pemisahan antara manusia

sebagai pedagang dengan kewajibannya sebagai seorang Muslim untuk menyampaikan ajaran kepercayaannya kepada pihak lain. Kecuali itu pola perdagangan pada masa kedatangan Islam di Indonesia sangat menguntungkan karena golongan raja dan bangsawan banyak yang turut dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal-kapal dan saham saham.

Proses Islamisasi melalui saluran perdagangan ini dipercepat oleh keadaan politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Tentang cara Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan itu mungkin dapat digambarkan sebagai berikut mula-mula mereka berdagang di pusat-pusat perdagangan dan kemudian di antaranya ada yang tinggal, baik bersifat sementara maupun untuk menetap. Lambat-laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. Perkampungan pedagang golongan Muslim dari negeri asing itu disebut *Pekojan*, dari istilah "khoja" yang berarti pedagang.

Di antara golongan pedagang tersebut ada yang kaya dan pandai bahkan seringkali ada pula yang sampai menjadi syahbandar dalam suatu kerajaan. Dari sudut ekonomi jelas mereka mempunyai kedudukan sosial yang lumayan sehingga ada yang dapat memperistrikan anak orang pribumi, terutama anak-anak bangsawannya. Perkawinan dengan penganut berhala dianggap kurang baik jika mereka belum diislamkan terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menyuruh penganut bukan-Islam terlebih dahulu mengucapkan kalimat *Syihadat*. Hal itu berjalan dengan mudah karena tanpa memerlukan pentasbihan atau upacara-upacara yang panjang-lebar.

Perkawinan merupakan salah-satu saluran Islamisasi. Akibat perkawinan maka terbentuklah ikatan kekerabatan yang besar antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak wanita. Dalam ceritera babad, hikayat, dan tradisi setempat, sering kita dapatkan data-data mengenai perkawinan antara seorang pedagang atau anggota golongan Islam lainnya dengan anak bangsawan pribumi. Contoh tentang terjadinya perkawinan antara golongan pendatang dengan penduduk pribumi kita dapatkan dalam Babad Tanah Jawi, yakni tentang

perkawinan putri Campa dengan raja Brawijaya yang menghasilkan seorang putra yang kelak menjadi raja Demak bernama Raden Patah. Demikian juga dalam Babad Cirebon disebutkan bahwa seorang putri Prabu Siliwangi bernama Rara Santang kelak menikah dengan Syarif Abdullah dan berputra Syarif Hidayatullah atau lebih terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dalam cerita lain disebutkan seorang ulama terkenal bernama Maulana Ishak yang berhasil menyembuhkan putri raja Blambangan, menikah dengan putri tersebut, dan berputra bernama Raden Paku yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Giri.

Selain melalui perdagangan, proses Islamisasi di Indonesia juga banyak terjadi karena perkembangan ilmu *tasawwuf*. Cara ahli-ahli *tasawwuf* menyampaikan ajaran antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Para ahli *tasawwuf* adalah guru-guru agama yang menjelajahi berbagai negara sebagai pengembara dengan membawa aliran tertentu. Cara hidupnya yang sangat sederhana serta menghayati kemiskinan telah menarik banyak pengikut. Mereka juga mahir dalam soal-soal magis sihir dan pandai juga menyembuhkan orang sakit. Banyak di antara mereka juga akhirnya menikah dengan putri dari kalangan bangsawan Indonesia sehingga anak-anaknya yang kelak menggantikan kedudukannya sebagai raja atau pemimpin sudah menjadi Muslim.

Agama Islam juga banyak berkembang melalui pendidikan pesantren. Murid-murid tinggal menetap di suatu asrama yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Pesantren-pesantren ini diasuh oleh para ulama dan kyai yang memberi pelajaran pengetahuan agama, sehingga para pelajar yang keluar dari pesantren kembali ke daerah masing-masing menjadi seorang mubaligh yang meneruskan ajaran yang mereka terima di pesantren. Contoh pesantren pada masa dahulu ialah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampeldenta, dekat Surabaya, dan pesantren yang dibangun oleh Sunan Giri di Gresik yang banyak sekali pengikutnya. Mereka datang belajar dari berbagai daerah yang mendatangkan guru-guru atau ahli agama Islam untuk memberi pelajaran agama di kalangan kraton. Contohnya disebutkan dalam sejarah Banten tentang kyai Duku atau Pangeran Kasunyatan yang menjadi guru Maulana Yusuf, raja Banten yang kedua. Syekh Yusuf dari Makasar juga menjadi penasehat agama dari Sultan Agung Tirtayasa dari Banten. Para ulama yang telah masuk kalangan tinggi

kerajaan tentunya besar pengaruhnya di bidang politik melalui raja dan kaum bangsawan.

Seni juga dapat menjadi saluran dalam proses Islamisasi di Indonesia. Cabang-cabang seni yang sangat berpengaruh dalam proses Islamisasi itu antara lain adalah seni bangun, seni pahat, seni ukir, seni tari, dan sebagainya. Kita perhatikan bahwa perkembangan agama Islam di Indonesia juga sejalan dengan berkembangnya bangunan-bangunan seperti mesjid agung Demak, Banten, Cirebon, Banda Aceh yang kemudian menjadi pusat kegiatan syiar Islam ke daerah sekitarnya. Juga seni ukir dan seni hias telah berkembang secara khusus. Kita dapat melihat di museum kraton Cirebon misalnya seni ukir hasil kerajaan bercorak Islam dan berkembangnya kaligrafi (seni huruf). Di museum kraton Kanoman dan Kasepuhan, kita dapat melihat suatu lukisan yang menggambarkan binatang yang dilukis dari urtaian huruf Arab yang merupakan ayat-ayat al-Quran. Cabang seni lainnya ialah pertunjukan gamelan yang dihubungkan dengan upacara hari besar umat Islam seperti Garebeg atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad *s.a.w.* Pada hari Garebeg atau Panjang Jimat dibunyikan gamelan sekali. Juga dalam babad dan hikayat disebutkan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang sangat mahir dan sangat disukai rakyat. Beliau secara perlahan-lahan memasukkan unsur-unsur agama Islam dalam ceritera dan pertunjukan wayang sehingga akhirnya dapat menarik masyarakat untuk masuk Islam. Melalui kitab-kitab sastra para wali juga telah mengajarkan agama Islam walaupun kitab tersebut ditulis dalam bahasa Jawa dengan huruf Jawa. Melalui kitab sastra kita melihat adanya perpaduan antara adat setempat dengan agama Islam, seperti kitab Pepakem Cirebon, Undang-Undang Mataram, Adat Makota Alam dan sebagainya.

C. PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM

1. Mazhad dan Pengaruhnya

Dalam dunia Islam ada 4 mazhab yang terkenal dan sangat berpengaruh hingga masa kini. Keempat mazhab itu ialah: Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nama-nama tersebut didasarkan atas nama para pendirinya, yaitu: Muhammad Ibn Idris asy Syafi'i



Mesjid Indrapura, Aceh

(150H/767M–204H/855M), Abu Hanifah (wafat 150H/767M), Malik Ibn Annas (wafat 179H/795M), dan Ahmad Ibn Hambal (wafat 241H/855M). Di antara mazhab-mazhab tersebut di atas yang paling besar pengaruhnya di Indonesia ialah mazhab Syafi'i. Setiap mazhab biasanya mempunyai satu kitab fikih atau lebih. Buku-buku fikih yang ada sekarang sebenarnya cetakan baru, tetapi sumbernya diambil dari kitab fikih ahli-ahli yang terdahulu. Kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i yang dapat menjadi pedoman, berasal dari abad 16, antara lain kitab *at-Tuhfah* karangan Ibn Hajar (wafat 975H/1567M), dan *Nihayah* karangan ar-Ramli (wafat 1006H/1567M). Kedua-duanya menulis dalam bentuk tafsir dari kitab *Minhaj at-talibin* karangan Ibn Nawawi (676H/1277M). Sesudah itu masih banyak lagi kitab fikih yang diterbitkan kemudian yang pada umumnya tidak memuat hal yang baru. Karangan kerhudian kebanyakan hanya kompilasi dari isi kitab-kitab terdahulu.

Tentang asal dan awal masuknya mazhab Syafi'i ke Indonesia, tidak dapat dipastikan. Ada beberapa pendapat tentang masuknya

mazhab-mazhab ke Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa orang-orang Indonesia sudah sejak abad permulaan hijrah mengenal ideologi Islam langsung dari Mekah yang berintikan mazhab Syafi'i (ahli Sunnah wa'-l-jama'ah).

Pada umumnya dapat diambil kesimpulan bahwa mazhab Syafi'i masuk ke Indonesia sekitar abad 13M. Jelas bahwa walaupun banyak pedagang datang ke Indonesia sejak abad 7M, mereka tidak mungkin menganut mazhab Syafi'i karena dikatakan bahwa pendiri mazhab ini, Muhammad Ibn Idris Asy Syafi'i, hidup antara 150H/767M-204H/820M. Salah satu sebab mengapa mazhab Syafi'i sangat mudah diterima bangsa Indonesia adalah karena penganut mazhab Syafi'i mudah menyesuaikan syariat dengan adat-kebiasaan di negeri ini. Syari'at dititik-beratkan pada kelima dasar pokok atau Rukun Islam yaitu: syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Selain kelima dasar agama Islam itu syari'at juga mengatur masalah peraturan perkawinan, kekeluargaan, warisan, perdagangan, dan kegiatan-kegiatan politik.

Di Indonesia menjadi kenyataan bahwa adat masih memegang peranan penting. Yang dimaksud dengan adat ialah aturan dan kebiasaan, cara sejati pra-Islam yang telah lazim diturut atau dilakukan meskipun tidak semuanya itu dapat disesuaikan dengan syari'at. Untuk ibadah salat, atau lazim dikenal dengan sebutan sembahyang, perlu didirikan mesjid dan langgar. Mesjid didirikan di pusat kerajaan, seperti Mesjid Agung Banten, Cirebon, Merak, Baitul Rahman (Banda Aceh), di kota-kota besar dan kecil sampai di pelosok-pelosok. Dalam babad dan hikayat banyak disebutkan bahwa raja-raja dan bangsawan bersama-sama melakukan sembahyang, terutama sembahyang Jum'at, 'Idul Fitri dan 'Idul Adha, yang disebut "sembahyang raya". Mesjid-mesjid kuno seperti Mesjid Agung, Cirebon dan Demak disebutkan sebagai tempat bersembahyang berjama'ah. Sebagai buktinya pada mesjid-mesjid kuno terdapat bagian khusus untuk sembahyang kaum wanita yang disebut *pawestren* atau *pawadonan* (Dari *estri* dan *wadon*, yang berarti "wanita"). Suatu keistimewaan terjadi di daerah Lombok, yakni kebiasaan sembahyang *waktu telu*, yaitu melakukan sembahyang hanya tiga kali sehari. Kebiasaan ini tentu saja bertentangan dengan kewajiban sembahyang lima kali sehari semalam yang merupakan kewajiban bagi para ahli Sunnah wal

jama'ah. Zakat juga merupakan dasar pokok rukun Islam. Sangat lazim zakat diberikan kepada fakir miskin pada bulan Ramadhan. Zakat ini sebenarnya merupakan kewajiban yang disebut zakat fitrah. Zakat sebenarnya adalah kewajiban membayar sejumlah bagian tertentu dari kekayaan pribadi untuk kepentingan agama dan masyarakat.

Pada bulan Ramadhan umat Islam selama sebulan diwajibkan melakukan puasa. Bulan Ramadhan disebut pula bulan puasa atau dalam istilah Jawa *sagi siyam* atau *saum*. Pada malam hari selama bulan puasa disunahkan supaya melakukan sembahyang *tarawih* yang dikerjakan setelah lepas sembahyang *Isa*. Orang muslim yang shaleh selama satu bulan penuh benar-benar tidak makan minum dan menahan segala hawa nafsu serta perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan untuk orang Muslim.

Dalam *Adat Makota Alam* pada masa Sultan Iskandar Muda disebutkan pemberian karunia sultan pada hari sebelum puasa kepada hulubalang yang tidak berwilayah dan kepada fakir-miskin. Sembahyang 'Idul Fitri dan 'Idul Adha dilakukan para sultan Aceh di Mesjid Raya. Menjelang hari raya 'Idul Fitri biasanya orang-orang membuat pakaian baru untuk dipakai pada Hari Raya. Kejadian semacam ini telah menarik perhatian seorang musafir asing bernama Willem Lodewycysz yang datang ke Banten menjelang Hari Raya (1596). Ia melaporkan bahwa menjelang hari raya orang-orang sibuk membuat pakaian sehingga dikatakannya seolah-olah semua menjadi tukang jahit.

Menjelang Hari Raya, malam hari sebelum sahur, beduk dipukul bertalu-talu, suatu tanda pemberitahuan masa makan sahur dan bahwa Hari Raya 'Idul Fitri segera tiba. Memukul beduk itu adalah tradisi dari zaman dahulu. Bangsa Indonesia telah memiliki dan mempergunakan alat tersebut sebagai tanda pemberitahuan atau panggilan untuk mengumpulkan orang, baik dalam keadaan bahaya maupun untuk upacara-upacara keagamaan.

Tentang rukun Islam yang kelima yaitu *Ibadah Haji*, agaknya sudah berlangsung lama, yaitu sejak adanya hubungan langsung antara Indonesia dengan Mekah. Dalam buku-buku yang ditulis dalam hikayat dan babad disebutkan beberapa tokoh telah melakukan

ibadah haji. Rara Santang (ibu kandung Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah) dan Pangeran Cakrabuana telah berangkat ke Tanah Suci walaupun waktu itu ayahnya (Prabu Siliwangi) masih menganut agama Buddha. Ketika kembali, Rara Santang diberi gelar Syarifah Modaim dan Pangeran Cakrabuana menjadi Syekh Abdul Iman. Sultan Abdul Nasar Abdul Kahar dari Banten dua kali melakukan ibadah haji (pada tahun 1669-1670 dan 1674-1676), sehingga beliau kemudian bergelar Sultan Haji.

Pada dua atau tiga abad yang lalu jumlah orang yang menunaikan ibadah haji tidak sebanyak sekarang ini. Dapat dicatat saja bahwa sebelum tahun 1852-1858 yang melakukan ibadah haji dari Indonesia kira-kira 2000 orang, tahun 1888 mencapai 3.100 orang, dan tahun 1896 sudah mencapai 11.700 orang. Sejak abad 20 ini kaum muslimin Indonesia dari berbagai pelosok tanah-air yang menunaikan ibadah haji terus bertambah. Tahun 1930 orang Indonesia yang pergi ke Tanah Suci ada 30.000 orang.

Mengenai warisan berdasarkan syari'at disebut bahwa anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh hak dengan dua berbanding satu bagian. Kalau kita melihat keadaan di Indonesia tentang warisan, banyak yang dilakukan menurut adat kadang-kadang berbeda dengan syari'at. Bahkan adat yang umum berlaku ialah bahwa anak perempuan memperoleh bagian yang sama.

Di daerah Minangkabau hukum warisan menurut Syari'at tidak diikuti. Di daerah ini berlaku hukum kekeluargaan menurut garis ibu, karena harta kekayaan perorangan yang diperoleh sendiri oleh yang meninggal jatuh kepada kaum kerabatnya dari pihak ibu. Dengan demikian maka proses perkembangan agama Islam di Minangkabau tidaklah benar-benar mengancam landasan utama masyarakatnya. Maka dalam hubungan ini kita akan mengerti pepatah Minangkabau yang tertua yakni bahwa adat berdasarkan agama atau agama berdasarkan adat: *adaik basandi syarak-syarak basandi adaik*.

2. Tasawwuf dan Tarikat

Seperti sudah diuraikan di atas, tasawwuf dalam perkembangan agama Islam telah memegang peranan penting. Kata *tasawwuf* ialah

bentuk masdar dari kata *suf* yang artinya wol (bulu kambing). Istilah ini timbul karena ahli tasawwuf biasanya memakai baju (jubah) dari bulu domba. Orang-orang yang menjalankan kehidupan tasawwuf disebut *sufi*.

Tasawwuf sering dihubungkan dengan pengertian *suluk* (artinya perjalanan), karena para sufi sering mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Di Indonesia sendiri istilah *suluk* tersebut banyak dipakai dalam arti "karangan" oleh ahli tasawwuf. Kadang-kadang malahan arti kata *suluk* menjadi bermacam-macam. *Suluk* kadang-kadang dipergunakan untuk menyebutkan suatu karangan tertentu yang isinya banyak menguraikan mengenai mistik, baik dalam bentuk prosa maupun puisi. Sebagai contoh, kitab Bonang mengartikan *suluk* sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan mistik Islam. Hamzah Fansuri, seorang ulama terkenal dari Aceh, menyebutkan ajarannya sebagai '*ilm as suluk*'. Istilah *suluk* kadang-kadang juga dihubungkan dengan tindakan dalam *dhikr* atau *tarika*.

Kedatangan ahli tasawwuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke 13, yaitu masa berkembangnya dan tersebarnya ahli tasawwuf dari Persia dan India. Meskipun diperkirakan bahwa tasawwuf sudah dikenal sejak abad ke 13, namun aliran tasawwuf di Indonesia mulai nampak nyata baru sekitar abad 16 dan 17. Pada abad-abad itu di kerajaan Aceh muncul beberapa ahli tasawwuf terkenal, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Samatrani, Nuruddin ar-Raniri, Syekh Abdurrauf dari Singkel, dan sebagainya. Di Jawa pada sekitar abad 16-17 di antara Wali Sanga juga ada yang mengajarkan tasawwuf, seperti Syekh Siti Jenar, Sunan Bonang, Sunan Panggung, Sunan Kudus, dan sebagainya.

Jika kita melihat kitab-kitab yang dihasilkan oleh ahli-ahli tasawwuf serta tradisi-tradisi yang mereka anut, maka di dalam tasawwuf ada dua kelompok aliran. Aliran yang pertama disebut aliran *heterodox* dan aliran yang kedua aliran *ortodox*. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa ajaran yang bersifat heterodox menganggap bahwa antara pencipta dan yang dicipta, yaitu Allah dan makhluk, terdapat satu ikatan kesatuan yaitu bahwa Allah menciptakan makhluk dengan rohnya sebagai lambang keesaan Tuhan, bahwa makhluk yang diciptakan adalah sebagai perwujudan dari

pencipta. Sebaliknya aliran ortodox menganggap bahwa Allah adalah pencipta dan makhluk adalah hasil ciptaan Allah. Makhluk yang hidup dengan roh itu tidak dapat mengetahui keadaannya, karena hanya Tuhan saja yang tahu.

Di Aceh, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani yang menganut faham heterodox mendapat perlindungan dari Sultan Iskandar Muda. Dengan adanya dukungan dari Sultan, Hamzah Fansuri beserta muridnya Syamsuddin banyak menghasilkan karangan. Hamzah Fansuri banyak menuliskan ajarannya dalam bentuk prosa maupun puisi, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu.

Ajaran-ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin telah mendapat tantangan dari Nuruddin ar-Raniri (nama lengkapnya adalah Nuruddin bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Humaid ar-Raniri). Ia berasal dari **Ranir** yang sekarang bernama Rander di daerah Gujarat (India). Keluarganya berasal dari Hadramaut yang lama bermukim di India. Ia datang ke Aceh sejak masih muda pada masa Iskandar Muda, tetapi belum mendapat perhatian Sultan. Ia kemudian kembali ke India, dan ketika Sultan Iskandar Thani naik tahta menggantikan Iskandar Muda, ar-Raniri datang kembali ke Indonesia. Nama Nuruddin terkenal hingga keluar tanah Aceh. Dalam sejarah Kedah dikatakan bahwa ketika Sultan Aceh dan Nuruddin mendengar bahwa Kedah telah memeluk agama Islam karena jasa Syekh Abdullah dari Yaman, mereka segera mengirimkan karangan Nuruddin yang berjudul *Sirat al Mustakim*. Dari kitab karangannya yang berjudul *Asrar al-insan fi ma'rifa al-ruh wal rahman* dapat diketahui bahwa Nuruddin seorang ahli ketuhanan yang ulung yang mengetahui kitab filsuf yang terkenal, seperti Ibn 'Arabi, Abdurrazak, al-Kasyani, Najamuddin al Razi, Abu Syukur as-Salami, Alghazali dan sebagainya.

Setelah Sultan Iskandar Thani wafat pada tahun 1641, Nuruddin ar-Raniri kemudian pulang ke tanah-airnya di India. Ia kembali lagi ke Aceh pada masa pemerintahan Sultanah Taj-al'alam Syafiyatuddin.

Seorang ahli fikir lain yang juga sangat terkenal dari Aceh ialah Abdurrauf dari Singkel yang setelah wafatnya terkenal dengan sebutan Syekh Kuala atau Tengku di Kuala. Ia dilahirkan kira-kira 1620 di Singkel. Pada tahun 1642 ia pergi ke tanah Arab dan bermukim selama 19 tahun untuk mempelajari pengetahuan agama

Islam. Gurunya yang terkenal ialah Ahmad Kushashi. Pada tahun 1661 ia kembali ke Aceh dan kemudian mendirikan pesantren di muara sungai Aceh. Ajaran tasawwuf tarikat Syatariah menjadi pusat perhatiannya dan ajarannya kelak tersebar sampai ke Malaya. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Syeikh Burhannuddin dari Ulakan, Minangkabau, yang kelak juga dianggap sebagai pelopor Islam di daerah Minangkabau. Abdurrauf yang menganut tarikat Syataria dari mazhab Syafi'i menganut faham yang tidak berbeda dengan ar-Raniri. Ia juga menentang aliran heterodox. Kegiatan Abdurrauf sebagian besar terjadi pada masa Sultanah Syafiyatuddin. Syeikh Kuala juga telah membuat tafsir al-Qur'an dalam bahasa Melayu (Jawi).

Di Jawa ada dua naskah yang menggambarkan alam fikiran umat Islam daerah tersebut di masa abad 16 dan ditemukan pada pelayaran orang-orang Belanda di pesisir utara Jawa, yakni ketika mereka berlabuh di Sedayu, Jawa Timur pada tahun 1597. Naskah ini diterima oleh ahli museum Belanda dari seorang pedagang Belanda dan merupakan karangan Sunan Bonang, sehingga buku tersebut disebut "Kitab Bonang". Naskah yang masih dalam keadaan baik itu sekarang disimpan di museum Leiden, Belanda.

Kegiatan Sunan Bonang dapat ditentukan antara tahun 1475-1525. Naskah ini dibuat sebagai tandingan ajaran kesufian heterodox yang dianggapnya sesat. Sunan Bonang menyatakan bahwa Allah itu maha tinggi, maha luhur, dan maha suci yang tidak didahului oleh ketidak-adaan. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa sejak permulaan Islam di pulau Jawa renungan mistik sudah hidup baik dalam bentuk faham Tuhan yang ortodox maupun yang heterodox. Naskah tentang agama Islam lainnya yang berasal dari abad 16 ditulis dalam bahasa Jawa; nama pengarangnya tidak dikenal dan naskah ini disebut *primbon*. Naskah ini merupakan kumpulan karangan yang membahas masalah agama, doa-doa, jampi-jampi, firasat, tafsir mimpi, ramalan daripada tanda-tanda, dan sebagainya. Naskah ini merupakan catatan keagamaan, di antaranya mengenai susila, misalnya, mengenai lafal atau ucapan sebelum mengambil air untuk wudhu atau salat. Dalam naskah itu juga terdapat bagian yang isinya menentang ajaran yang heterodox, juga menyebutkan

peranan seorang ulama bernama Ibrahim Maulana dan petuah-petuhannya. Yang dimaksud mungkin Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 822 H (1419 M) dan makamnya ada di Gresik.

Dalam suluk dan primbon seringkali didapatkan paham mistik yang disebut Kawula Gusti. Paham seperti ini juga sebenarnya sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Menurut beberapa naskah, di Jawa sebelum perkembangan Islam, terlebih dahulu diadakan musyawarah di kalangan para wali. Diskusi antara wali ini sering membahas soal iman, tauhid dan marifat. Dalam musyawarah para wali terdapat juga kritik-kritik terhadap mistik tentang siapa dan apakah wujud Allah itu. Pernyataan seorang wali bernama Siti Jenar atau Syeikh Lemah Abang tentang Kawula Gusti yang menganggap dirinya adalah penjelmaan Tuhan, telah mendapat sanggahan hebat dari kalangan wali-wali lainnya. Dewan para wali akhirnya memutuskan agar Syeikh Lemah Abang dijatuhi hukuman mati.

Menurut ceritera dalam babad setelah Lemah Abang meninggal dan dimakamkan, maka ketika makamnya dibuka kembali jasadnya telah berubah menjadi bunga melati. Karena itu nama tempat pemakamannya disebut kampung *Kemlaten* atau *Pamlaten* yang terletak dipinggiran selatan kota Cirebon.

Ajaran tasawwuf berhubungan erat dengan tarikat, yaitu jalan yang disebut oleh kaum Sufi dalam mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Di Indonesia tarikat-tarikat yang mempunyai pengaruh ialah tarikat Qadariah, Naqsyabandiah, Sammaniah, Qusyasyiah, Syattariah, Syaziliah, Khalwatiah dan Tianiah. Tarikat Qadariah tidak banyak mendapat pengaruh, akan tetapi pendiri tarikat ini adalah Syeikh Abdulqadir al-Jaelani yang telah mendapat penghormatan tinggi dari umat Islam Indonesia. Hal ini ternyata dari kalimat pembukaan naskah-naskah yang menyebutkan pemangku jabatan turun-temurun yang terpenting lengkap dengan gelar kebangsawanannya. Juga dalam doa-doa diucapkan berkat Allah, Rasulullah, para wali, dan Qadir Jaelani. Hamzah Fansuri dan pembesar-pembesar Aceh mendapat pengaruh tarikat Qadariah. Di Banten Sultan Abdul Mufakhirmahmud Abdulkadir juga mendapat pengaruh aliran Qadariah.

Tarikat Rafai terkenal dengan ajarannya berupa penyiksaan

diri. Dalam Bahasa Indonesia mereka mendapat julukan "tukang dabus", karena yang mengikuti aliran ini dalam berdzikir dan melakukan gerakan badan tertentu di bawah syekh atau gurunya, mencoba menyiksa dirinya di dada atau di bahu dengan dabus, sebilah belati besi. Di Banten nama senjata untuk melukai diri itu disebut *gedebus* dan masih tersimpan di museum-persiapan Banten lama. Pada perayaan khitanan dan pada kesempatan lainnya, gedebus dipakai dalam olahraga. Pada waktu ini permainan dabus masih ada pada upacara keramaian seperti mauludan, khitanan, dan sebagainya. Selain di Banten permainan dabus juga dikenal di Sumatra Barat, Aceh dan Maluku.

Tarikat Sammaniah dapat dibedakan dari aliran lainnya karena dikirinya dibunyikan dengan suara nyaring. Pendiri Tarikat Sammaniah ialah Syekh Muhammad Samman yang juga terkenal di Jakarta.

Tarikat Syattariah diperkirakan merupakan aliran yang pertama masuk di tanah Jawa. Aliran ini mengenal tujuh tingkat keadaan Allah, yakni ilmu mengenai hakekat. Di antara ahli-ahli tasawwuf yang memperkenalkan Tarikat Syattariah ialah Abdurrauf dari Singkel dan Syekh Yusuf dari Banten. Kedua nama itu sering disebut-sebut oleh Ibrahim Al-Kurani, murid Ahmad Qushashi, pendiri tarikat Syattariah. Syekh Yusuf adalah seorang ulama terkenal berasal dari Sulawesi Selatan yang pernah menjadi penasihat agama Sultan Agung Tirtayasa di Banten. Karena perjuangannya melawan Belanda, ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Srilangka dan akhirnya ke Tanjung Harapan dan meninggal di sana.

Tarikat Naqsyabandiah masuk ke Minangkabau dari Mekah. Tarikat ini telah menaikkan derajat aliran ortodox. Hal-hal yang menjadi bahan pertentangan antara aliran Naqsyabandiah dengan tarikat lainnya ialah masalah ucapan bahasa Arab, penempatan kiblat, permulaan dan akhir bulan Ramadhan.

D. SENI

1. Seni Bangunan

Budaya Islam di Indonesia telah mempengaruhi pula bidang seni. Aspek-aspek seni yang berkembang kemudian meliputi seni

sastra, seni bangunan, seni pahat, kaligrafi, gamelan, dan sebagainya. Dalam hal ini pola dasar budaya setempat yang tradisional masih tetap kuat, sehingga terdapat suatu peraduan seni tradisional dengan budaya Islam. Kita ambil sebagai contoh bangunan mesjid dan kraton. Mesjid sebagai tempat peribadatan biasanya terletak di sebelah barat alun-alun dan tidak terpisah dari pusat kota, baik yang berupa kraton, kabupaten, ataupun kota kecil dan desa. Mesjid yang terletak di sebelah barat alun-alun sebagai pusat kota adalah Mesjid Jami', atau lazimnya disebut mesjid agung. Di tempat-tempat lain dalam kota terdapat pula mesjid lain dalam ukuran yang lebih kecil, atau tempat ibadat yang lebih kecil seperti musalla atau langgar. Dari sudut arsitektur, mesjid di Indonesia, terutama mesjid kuno berasal dari masa berdirinya suatu kerajaan, menunjukkan ciri-ciri khusus sangat berbeda dengan arsitektur mesjid di negeri-negeri lainnya. Kekhususan gaya arsitektur ini dinyatakan dalam bentuk atapnya yang bertingkat lebih dari satu; ada yang 2,3,4, bahkan ada yang lima tingkat. Denahnya berbentuk bujur sangkar yang biasanya ditambah dengan bangunan serambi di depan atau di samping. Fondasinya kuat dan agak tinggi dan di bagian depan atau samping terdapat kolam parit berair. Beberapa contoh mesjid kuno dengan atap bertingkat ialah Mesjid Agung Cirebon yang bertingkat dua, dibangun pada abad 16; mesjid Katangka di Sulawesi Selatan dari abad 17. Juga di Jakarta mesjid yang dibangun pada abad 18 bertingkat dua, seperti mesjid Angke, Tambora, Marunda. Mesjid yang beratap tiga tingkat ialah antara lain Mesjid Agung Demak dari abad 16, mesjid Baiturrahman yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda, mesjid Japara, mesjid di Ternate, dan sebagainya. Mesjid yang beratap lima tingkat ialah Mesjid Agung Banten yang dibangun pada abad 16.

Persoalan apa sebabnya mesjid-mesjid kuno Indonesia mempunyai atap bertingkat telah mengundang pemikiran para ahli. Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa mesjid yang bertingkat ini adalah kelanjutan dari seni bangunan tradisional Indonesia lama. Bahkan kalau kita melihat bangunan-bangunan Hindu di Bali, bangunan yang disebut wantilan juga bertingkat atapnya. Juga pada relief candi dari masa Majapahit terdapat ukiran yang menggambarkan bangunan dengan atap bertingkat. Keserasian dari arsitektur mesjid

kuno ini sesuai pula dengan gaya bangunan kraton dengan bagian-bagiannya.

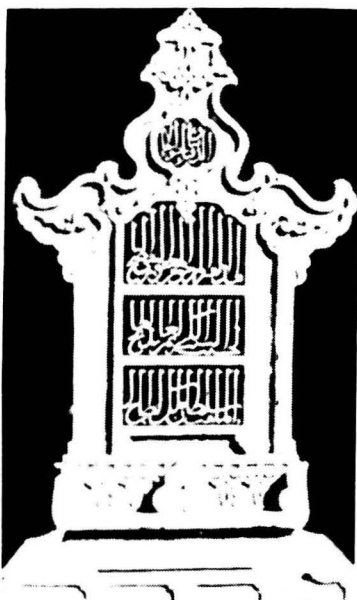
Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa bangunan mesjid dan kraton mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan bentuk arsitektur di negeri Islam lainnya. Pembuat bangunan ini tentu saja adalah orang Indonesia yang sudah menganut Islam, namun memiliki kemahiran membangun secara tradisional. Dari berbagai kitab hikayat dan babad kita dapat mengetahui bahwa tukang dan pekerja yang membuat bangunan mesjid dan kraton adalah orang Indonesia sendiri. Umpama saja, Babad Cirebon menyebutkan Raden Sepat, seorang yang berasal dari Majapahit yang telah membangun mesjid dan kraton Cirebon. Bangunan kraton dan mesjid di Banjarmasin, Kutai dan Sulawesi menurut buku hikayat setempat juga dibuat oleh tukang dari daerah itu. Pembuatan bangunan ibadah dan kraton dilakukan dengan semangat gotong-royong yang merupakan modal utama dalam pembangunannya.

2. Cabang Seni Lain

Salah satu cabang seni lain yang berkembang ialah seni ukir dan seni lukis. Kalau kita sekarang mengunjungi mesjid dan bangunan kraton, kita akan melihat ukiran-ukiran yang sangat indah. Ukiran itu dipahatkan pada tiang-tiang, tembok atap dan sebagainya. Memang agak susah menentukan, apakah seni ukir ini berasal dari masa Islam atau masa sebelumnya. Ukiran ini diberi pula tatawarna yang sangat bagus sehingga menambah semaraknya seni ukir tersebut. Tradisi seni ukir pada bangunan kayu jelas telah berkembang sejak lama jauh sebelum adanya pengaruh Hindu dan pengaruh Islam di Indonesia. Di beberapa daerah Nusantara kita akan menjumpai seni ukir kayu yang dipahatkan pada tiang, dinding, atap dan sebagainya.

Dalam perkembangan kemudian di samping seni ukir ini telah diperkembangkan juga cabang seni ukir yang disebut kaligrafi. Di kraton Kasepuhan, Kanoman, dan beberapa kraton lain, terdapat suatu ukiran kayu yang menggambarkan suatu tokoh atau binatang tapi merupakan komposisi huruf-huruf Arab. Sepintas lalu ukiran ini menggambarkan suatu mahluk, tetapi bila diteliti lebih dalam, lukisan atau ukiran ini merupakan suatu komposisi huruf-huruf

Arab yang merupakan rangkaian ayat-ayat al-Qur'an. Tidak jarang pula komposisi ukiran ini terdiri dari rangkaian huruf Arab yang menggambarkan tokoh wayang tertentu. Disini jelas adanya perpaduan budaya dalam menerima dan mengembangkan Islam dengan cara tradisionil.



Kaligrafi

Sumber: S.Q. Fatimi, *Islam Comes to Malaysia*

Cabang seni lain yang mempunyai kaitannya dengan perkembangan agama Islam ialah seni tari. Di beberapa daerah ada beberapa jenis tarian yang berhubungan dengan nyanyian atau pembacaan tertentu yang berupa selawat atau lainnya. Pada permainan Dabus (suatu jenis tarian yang agak mengerikan di mana pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke badannya tetapi tidak tembus) tarian diawali oleh nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Qur'an atau Selawat nabi. Permainan Dabus berkembang di bekas pusat kerajaan seperti Banten, Minangkabau, Aceh dan sebagainya. Di Aceh juga terdapat permainan yang disebut *seudati*. Asal kata *seudati* mungkin dari *syaidati*,

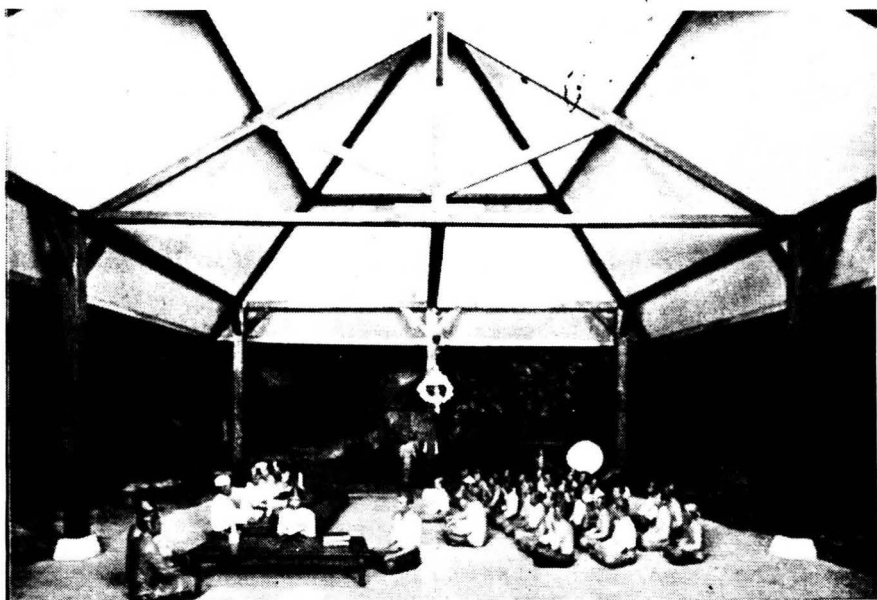
artinya permainan orang-orang besar. Seudati sering juga disebut *saman* (artinya delapan), karena permainan itu asalnya dilakukan oleh delapan pemain. Dalam permainan seudati para pemain juga menyanyikan lagu tertentu yang sebenarnya isinya antara lain berupa selawat (pujian) kepada nabi.

Pada upacara muludan, yaitu peringatan untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. juga sering dinyanyikan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad s.a.w., baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia, ataupun menceritakan kelahiran Nabi Muhammad. Upacara Muludan ini pada umumnya di seluruh Indonesia dirayakan dengan cukup hidmat. Di bekas pusat kerajaan Islam di Jawa seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon terdapat upacara besar yang disebut *Garebeg Maulud* (di Cirebon disebut *Pajang Jimat*). Upacara Maulud ini selain untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. di beberapa tempat ditambah dengan acara khusus. Misalnya di Yogyakarta terdapat acara gegunungan yaitu membawa makanan berbentuk gunung, dalam tampah besar dari alun-alun ke mesjid. Di Cirebon terdapat upacara pembagian nasi yang dibuat dari beras yang tidak ditumbuk, melainkan dilepas satu persatu dan memakan waktu berbulan-bulan sebanyak satu periuk dan dimasak khusus pada hari Maulud.

Acara lain dalam rangka Maulud ialah pertunjukan gamelan dan mencuci benda-benda keramat. Pada hari-hari menjelang Garebeg Maulud biasanya beberapa benda yang dianggap keramat dimandikan atau dicuci seperti pada upacara panjang jimat di Cirebon. Yang dimaksud *panjang jimat* adalah seperangkat piring dan baki yang hanya dipergunakan sekali setahun, yaitu pada hari Maulud untuk wadah makanan yang dibagi-bagikan berupa nasi kebuli. Tengah malam menjelang 12 Maulud, benda ini diarak dari kraton menuju mesjid diiringi oleh Sultan dan seluruh kerabat kraton. Di mesjid dilakukan upacara oleh penghulu kraton dan setelah upacara selesai panjang jimat dan para pengiring kembali ke kraton. Pada waktu itulah dibunyikan gamelan yang disebut *Sekaten* dan diramaikan lagi oleh pertunjukkan umum untuk masyarakat.

Beberapa pujangga kerajaan, seperti Syekh Yusuf dari Banten, Abdurrauf, Hamzah Fansuri, bahkan para pemuka agama seperti para

wali, juga sangat mahir dalam sastra dan telah menghasilkan karya sastra yang penting. Sunan Bonang telah mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam Kitab Bonang. Hamzah Fansuri telah menghasilkan beberapa karya sastra dalam bentuk puisi yang mengandung unsur agama, seperti Syair Perahu, Syair Dagang. Syeikh Yusuf, seorang ulama Makasar yang diangkat menjadi pujangga kerajaan Banten, telah menghasilkan beberapa buku tentang tasawwuf. Pujangga kraton Mataram, seperti Ronggowarsito telah membuat karya sastra yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran agama, di antaranya buku bernama *Serat Wirid*.



Pesantren sebagai pemersatu Bangsa Indonesia
 Sumber : Diorama Museum Sejarah Tugu Nasional, Jakarta.

Dapatlah dikemukakan di sini bahwa seni Indonesia Islam masih banyak berakar pada pola seni tradisional. Berbagai upacara dan kejadian yang berhubungan dengan kegiatan agama telah dipadukan sedemikian rupa, sehingga telah menghasilkan suatu corak budaya

Indonesia khusus yang dapat diterima oleh masyarakat tanpa banyak pertentangan.

Salah satu cabang seni lain ialah sastra. Melalui seni sastra pengaruh Islam dapat dikembangkan dengan instant.

SISTEM PEMERINTAHAN DAN STRUKTUR MASYARAKAT

A. SISTEM PEMERINTAHAN

1. Kerajaan Mataram-Islam abad 17 - 19

Kerajaan Mataram-Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575 mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645). Pada masa pemerintahan Sultan Agung, raja ketiga di Mataram, wilayah kekuasaan kerajaan telah meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat. Pada masa pemerintahan raja-raja penggantinya kekuasaan itu nampaknya mengalami kemunduran. Berangsur-angsur wilayah kerajaan makin menyempit akibat anexasi yang dilakukan oleh Belanda sebagai imbalan dari intervensi Belanda dalam pertentangan intern di kalangan kerajaan. Setelah Perang Trunojoyo berakhir pada tahun 1678, Mataram harus melepaskan daerah Karawang, sebagian Priangan, dan Semarang. Demikian juga akibat perlawanan Untung Surapati yang berakhir pada tahun 1705, daerah Cirebon, sebagian Priangan, dan sebagian daerah Madura dianexasi Belanda. Setelah terjadi pemberontakan Cina yang berakhir tahun 1743 seluruh daerah pantai utara Jawa dan pulau Madura dikuasai Belanda. Setelah berakhirnya Perang Giyanti tahun 1755 kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian: kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Malahan tahun 1757 dan 1813 wilayah ini terpecah lagi dengan munculnya kekuasaan Mangkunegara dan Pakualam.

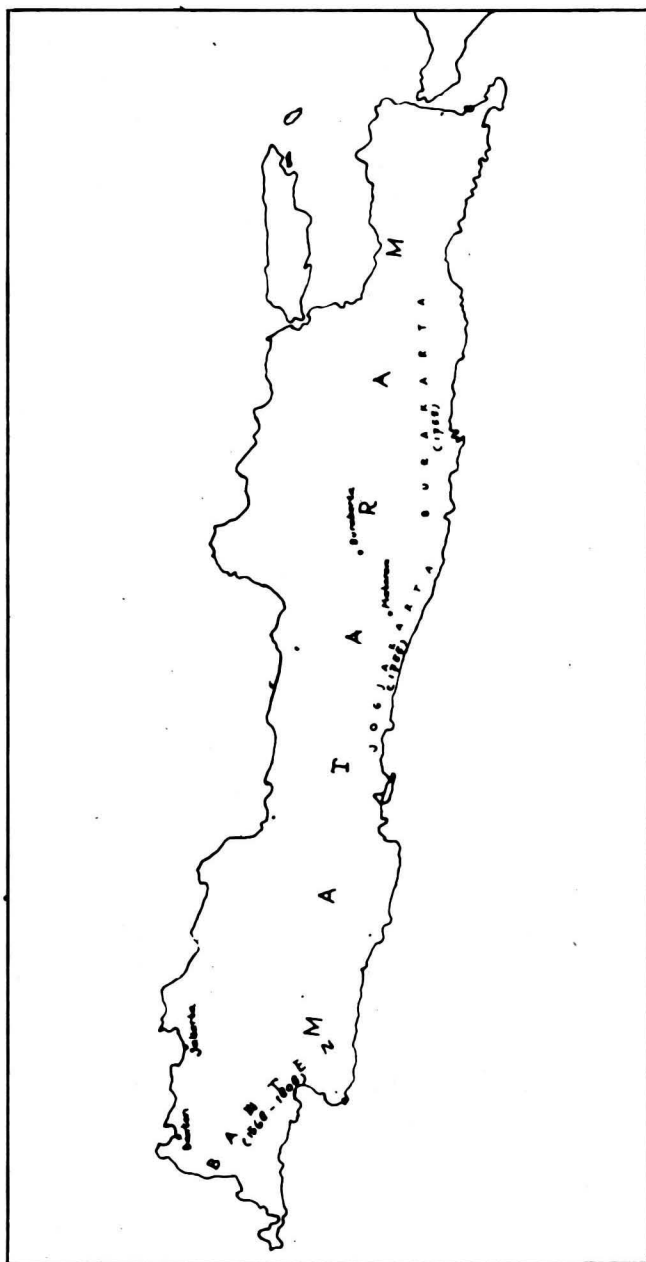
a. Sistem pembagian wilayah

Sejak akhir abad 17 kerajaan Mataram dibagi dalam beberapa satuan wilayah besar dengan kraton sebagai pusatnya. Urutan pembagian wilayah adalah sebagai berikut: Istana atau kraton merupakan pusat kerajaan yang disebut "Kutanegara" atau "Kutagara". Wilayah yang mengitari ibukota kerajaan disebut "Negara Agung". Pada masa kerajaan Mataram-awal, Negara Agung terdiri dari empat wilayah, masing-masing: Kedu, Siti Ageng atau Bumi Gede, Bagelen dan Pajang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, masing-masing di antara empat wilayah ini dipecah menjadi dua bagian. Daerah Kedu

dibagi menjadi Siti Bumi dan Bumijo, Siti Ageng menjadi Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tengen, daerah Bagelen menjadi daerah Sewu dan Numpak Anyar, sedangkan daerah Pajang menjadi daerah Panumping dan Panekar. Selain itu di luar wilayah Negara Agung masih terdapat dua kelompok wilayah lagi, yaitu wilayah yang berada di pantai dan wilayah yang tidak termasuk kelompok Negara Agung yang letaknya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wilayah yang bukan daerah pantai ini ialah wilayah "Mancanegara" yang terbagi menjadi dua: yang ada di kawasan Jawa Tengah disebut "Mancanegara Kilen" sedang yang ada di kawasan Jawa Timur disebut "Mancanegara Wetan". Wilayah kerajaan yang terletak di sepanjang pantai utara disebut wilayah "Pasisiran", yang juga dibagi menjadi dua bagian, ialah "Pasisiran Wetan" dan "Pasisiran Kilen", masing-masing dibatasi oleh sungai Tedunan atau sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara. Penggunaan batas alam seperti sungai, gunung, hutan, dan lain-lainnya, untuk memisahkan kesatuan-kesatuan wilayah, adalah tradisi yang lazim pada masa itu dan sampai sekarang masih berlaku di beberapa tempat.

b. Susunan Pemerintahan

Dalam pemerintahan kerajaan Mataram sudah jelas bahwa raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat-pejabat kerajaan yang diserahi tugas-tugas tertentu. Adapun jabatan-jabatan di bawah raja ada hubungannya dengan pembagian wilayah seperti diuraikan di atas, terbagi menjadi dua jabatan pokok, yaitu jabatan pemerintahan di dalam istana (pemerintahan lebet) dan jabatan pemerintahan di luar istana (pemerintahan jawi). Untuk pemerintahan dalam istana ada empat orang pejabat penting yang disebut "wedana lebet" (wedana dalem). Mereka adalah "wedana gedong kiwa", "wedana gedong tengen", "wedana keparak kiwa" dan "wedana keparak tengen". Di atas jabatan wedana yang empat ini ada lagi jabatan yang lebih tinggi yang mengkoordinasi keempatnya yang dipegang oleh seorang pejabat tinggi bernama patih lebet (patih dalam). Pada masa pemerintahan Sultan Agung yang menjabat patih lebet adalah Adipati Mandaraka sedang pada masa pemerintahan Amangkurat I yang menjadi patih lebetnya adalah Tumenggung Singaranu. Jabatan patih lebet dihapuskan sejak 1755.



Mataram : Kutagara, Negara Agung, Mancanegara, Pesisiran

Untuk mengurus pemerintahan di Kutagara, raja Mataram mengangkat dua orang pejabat penting yang disebut tumenggung. Kedua tumenggung ini bertanggungjawab langsung kepada raja. Keempat wedana dan dua tumenggung merupakan pejabat penting kerajaan dan mereka itu menjadi anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Wilayah Negara Agung masih termasuk pusat kerajaan. Sudah disebutkan bahwa wilayah ini terbagi menjadi delapan yang masing-masing dikepalai oleh "wedana jawi". Sesuai dengan nama-nama daerah Negara Agung maka mereka adalah Wedana Bumi, Wedana Bumijo, Wedana Sewu, Wedana Numbak Anyar, Wedana Siti Ageng Kiwa, Wedana Siti Ageng Tengen, Wedana Panumping, dan Wedana Panekar. Umumnya wedana-wedana Negara Agung bertempat tinggal di Kutagara.

Mancanegara Wetan maupun Mancanegara Kilen masing-masing dikepalai oleh seorang bupati atau lebih. Bupati kepala daerah ini biasanya memakai gelar "tumenggung" atau raden arya. Jumlah bupati yang mengepalai tiap daerah tidak sama, tergantung dari luas daerah yang diurusnya. Sebagai contoh, tanah cacah seluas 4000 karya atau bau (3000 hektar) cukup dikepalai seorang bupati, tetapi tanah cacah yang luasnya sampai 16000 karya (= 11 - 12000 hektar) dikepalai oleh dua orang bupati, bahkan daerah yang tidak begitu luas cukup dikepalai oleh seorang "kliwon" atau "mantri".

Untuk wilayah Mancanegara Wetan dan Kilen diangkat seorang koordinator yang dijabat oleh seorang wedana bupati yang mengkoordinasi para bupati kepala daerah yang ada di wilayahnya. Kedua wedana bupati ini bertanggungjawab langsung kepada raja atas keberhasilan pemerintah daerah dan kelancaran pengumpulan penghasilan yang harus diserahkan kepada pusat. Daerah Pasisiran Wetan dan Kilen masing-masing dikepalai oleh seorang wedana bupati. Untuk wilayah Pasisiran Wetan kedudukan wedana bupati ada di Jepara, sedangkan untuk Pasisiran Kilen kedudukan wedana bupati adalah di Tegal. Wedana Bupati Pasisiran bertugas mengawasi dan mengkoordinasi bupati-bupati kepala daerah yang ada di bawah wewenangnya.

Selain jabatan kepala daerah tersebut di atas masih terdapat lagi jabatan-jabatan lainnya, baik tingkat tinggi, menengah, maupun

tingkat bawah yang disertai tugas-tugas tersendiri dalam pemerintahan kerajaan. Pada jaman Mataram Kartasura (sekitar 1744) terdapat jabatan khusus untuk mengepalai golongan rakyat tertentu. Jabatan ini dipegang oleh empat orang tumenggung, ialah tumenggung yang mengepalai 6000 orang "kalang", tumenggung yang membawahi 1000 "gowong", tumenggung dari 12000 "tuwaburu" dan tumenggung dari 1400 orang "adipaten". Orang kalang diberi tugas sebagai tukang kayu, pengangkut barang, kusir pedati, dan sebagainya. Tugas orang gowong antara lain adalah sebagai pembuat kerangka rumah dan bangunan lain. Orang tuwaburu adalah punggawa raja yang ditugaskan menangkap binatang buas.

Di bidang keagamaan terdapat jabatan penghulu, katib, modin, naib dan suranata. Pejabat-pejabat keagamaan ini disebut "abdi dalem pametakan" atau "abdi dalem pamutihan". Penghulu istana merupakan jabatan tertinggi dalam bidang keagamaan. Penghulu diberi tugas untuk memimpin upacara-upacara keagamaan, doa selamat, menguatkan dalam upacara pelantikan raja baru, memberi pelajaran kepada anggota kerajaan, dan sebagainya. Tempat kediamannya biasanya dekat mesjid besar yang berada dekat alun-alun. Di tingkat administrasi daerah juga terdapat jabatan keagamaan yang serupa, baik tingkat kawedanaan, kabupaten, kalurahan, dan sebagainya. Penghulu istana disebut Penghulu Ageng (penghulu besar). Ada pula ulama yang mengepalai daerah perdikan (bebas pajak). Ulama yang mengepalai desa "perdikan mutihan" ditugaskan untuk memelihara tempat ibadat seperti mesjid dan langgar, dan memberi pelajaran agama di daerahnya. Ulama yang mengepalai desa "pedikan kuncen" mendapat tugas untuk memelihara kuburan keluarga raja.

Perlu disebutkan di sini juga jabatan khusus yang lain, yaitu "Pujangga". Pujangga adalah pejabat yang mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang pengetahuan seperti dalam sastra, adat tradisional, seni, sejarah, bahkan mempunyai pengetahuan cukup tentang agama. Ia diberi tugas menulis seluk-beluk yang berhubungan dengan raja, kraton, dan kerajaan, termasuk pula menyusun silsilah raja. Mereka menyusun syair tentang peristiwa dalam kraton, menyusun ceritera sejarah (babad), menulis ramalan, filsafat ceritera pewayangan dan sebagainya.

Di bidang pengadilan dalam istana terdapat jabatan "Jeksa". Jabatan ini di bawah wewenang wedana-wedana keparak. Di dalam sidang pengadilan istana, jeksa mengemukakan bukti-bukti dari kesalahan pesakitan (terdakwa) dan mengajukan tuntutan-tuntutan. Sidang pengadilan diadakan di bangsal istana yang disebut bangsal Pancaniti. Yang berhak mengadili adalah raja sendiri setelah mendengar segala kesaksian dan bukti-bukti. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan oleh "mertalulut" dan "singanegara".

Dalam menguraikan jabatan-jabatan pemerintahan perlu juga disinggung jabatan militer. Susunan jabatan militer kerajaan Mataram sebelum ada pengaruh Belanda menggunakan nama-nama tradisional. Gelar kepangkatan menurut hierarki dari atas ke bawah dari yang tertinggi sampai terendah ialah senapati, panji, lurah dan bekel prajurit. Sesudah ada pengaruh Belanda muncullah pangkat kolonel, letnan kolonel, mayor, kapten, dan seterusnya. Raja mempunyai prajurit tetap yang terutama bertugas sebagai penjaga istana. Di antara prajurit itu ada yang dipilih sebagai pengawal raja. Mereka mendapat gaji dan jaminan hidup dari istana. Apabila diperlukan, raja dapat mengerahkan rakyat umum untuk membentuk laskar secara milisi di seluruh wilayah kerajaan. Pasukan daerah biasanya dipimpin oleh kepala daerah atau orang lain yang ditunjuk. Pejabat kerajaan seperti wedana, bupati, dan sebagainya tidak mendapat imbalan berupa gaji, tetapi mereka mendapat hak tanah "gäduhan" atau pinjaman sebagai tanah "lungguh" (tanah yang diberikan sebagai imbalan kepada pejabat). Dari hasil tanah tersebut para pejabat mendapat biaya keperluan hidupnya. Sebagian hasil harus diserahkan kepada kas kerajaan.

c. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Salah satu syarat penting untuk menciptakan hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah adanya kewibawaan raja di satu pihak dan kesetiaan penguasa daerah di pihak lain. Dalam pengangkatan kepala daerah terlebih dahulu diadakan seleksi terhadap pejabat yang diangkat. Loyalitas terhadap raja menjadi syarat mutlak untuk setiap pengangkatan.

Sudah tentu dapat terjadi dalam kurun sejarah Mataram ini adanya ketidak-serasian atau kurangnya hubungan baik antara pusat

dan daerah. Keadaan seperti itu dapat kita ambil contohnya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pada suatu waktu Adipati Pragola dari Pati berusaha melepaskan diri dari pusat dengan mengadakan tantangan terhadap raja. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya penentangan dari penguasa daerah semacam itu raja mengadakan sistim pengawasan yang teliti. Keharusan bupati-bupati daerah untuk menghadap raja pada hari-hari upacara garebeg merupakan suatu cara untuk mengetahui loyalitas mereka. Ketidak-hadiran dalam upacara tersebut tanpa alasan yang jelas akan menimbulkan kecurigaan pada diri raja. Jika terjadi demikian, raja biasanya segera mengirim "gandek" (utusan) untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan mengenai ketidak-hadirannya. Di samping itu raja juga mengirim "telik sandi" (pengamat khusus) untuk menyelidiki tingkah laku pejabat yang dicurigai.

Di samping adanya keharusan bagi penguasa daerah untuk hadir pada upacara tertentu yang diselenggarakan oleh raja, para penguasa daerah diharuskan untuk memberi upeti kepada raja. Penyerahan upeti ("glondong pengareng-areng") merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Untuk menghindarkan timbulnya kekuasaan yang kuat dari kepala daerah tertentu, pemindahan tugas seringkali dilaksanakan oleh raja.

Penguasa-penguasa daerah biasanya mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar di daerah wewenangannya. Kehidupan penguasa daerah adalah mirip dengan kehidupan raja dalam ukuran kecil. Mereka mempunyai lambang-lambang kebesaran dan mempunyai prajurit bersenjata. Pemindahan tugas adalah cara yang paling efektif untuk menghalangi makin besarnya kekuasaan bupati daerah. Fakta-fakta historis sangat jelas memberikan bukti, justru karena masa itu pengaruh Belanda terhadap kebijaksanaan politik raja belum terasa. Pemindahan tugas kerap kali dilakukan terhadap penguasa daerah Japara. Di sini jelas bahwa pelbagai cara akan dilakukan oleh raja untuk menjaga hubungan yang stabil antara pusat dan daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa daerah dapat menggoyahkan hubungan pusat dengan daerah dan akan mendapat hukuman dari raja.

Untuk memelihara tatatertib di seluruh kerajaan diciptakan

"angger-angger" (peraturan-peraturan) yang harus ditaati oleh seluruh penduduk. Sebagai contoh disebutkan dalam angger-angger bahwa setiap orang yang bepergian harus membawa "layang padang" (surat keterangan). Usaha ini tidak lain untuk menertibkan dan memudahkan pengawasan penduduk yang melancong dari daerah satu ke daerah lainnya. "Abdi dalem gunung" disertai tugas kepolisian yang menangani kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan penduduk.

2. Kerajaan Banjar

Dari Hikayat Banjar kita mengetahui bahwa kerajaan beribukota di Banjarmasin. Kraton yang didirikan di Banjarmasin merupakan kraton yang ketiga. Kraton ini didirikan oleh Pangeran Samudra setelah berhasil menghalau serangan Nagaradaha berkat bantuan Demak. Kraton didirikan sekitar permulaan abad 16 M. Sebelum kerajaan Banjarmasin berdiri, terdapat Nagaradipa yang berada di sekitar Tanjungpura, kemudian ke Muara Bahan sebagai ibukota Nagaradaha. Daerah Banjarmasin yang terletak di muara sungai, memungkinkan kapal-kapal besar dari pantai berlabuh di sana. Raja yang pertama ialah Pangeran Samudra yang setelah menjadi raja dan dinobatkan menjadi Sultan bernama Sultan Suryanullah atau Suryansyah.

a. Sistem pemerintahan

Dalam urusan pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh seorang mangkubumi atau patih yang bertindak sebagai kepala pelaksana pemerintahan. Jabatan ini biasanya dipegang oleh seorang bangsawan keluarga dekat dari raja. Di bawah jabatan mangkubumi terdapat jabatan-jabatan "mantri panganan", "mantri pangiwa", "mantri bumi" dan sejumlah 40 orang "mantri sikap". Tiap-tiap mantri sikap ini mempunyai bawahan sebanyak 100 orang. Mantri panganan dan mantri pangiwa mempunyai tugas di bidang militer. Mantri bumi dan mantri sikap bertugas mengurus perbendaharaan istana dan pemasukan pajak sebagai penghasilan kerajaan. Umumnya mereka memakai gelar tumenggung atau kyai. Mangkubumi mempunyai pembantu yang mempunyai tugas khusus. Mereka digolongkan dalam kelompok "pengapit mangkubumi". Tugas-tugas-

nya khusus ialah sebagai pemuka agama dengan jabatan penghulu, sedang petugas-petugas pengadilan dan hakim istana adalah "patih balit" "patih kuwin" dan "patih muhur".

Selain pejabat-pejabat tersebut di atas untuk istana masih diangkat juga petugas-petugas khusus yang disebut kelompok "sara-wisa". Kelompok ini beranggotakan 50 orang dan dikepalai oleh seorang pejabat dengan sebutan "sarabaja". Petugas yang mengurus dan membersihkan istana disebut petugas "mandungan", juga beranggotakan 50 orang dikepalai oleh "raksayuda". Pada saat dihadap oleh pembesar kerajaan, raja dikawal oleh kelompok pasukan pengawas yang digolongkan ke dalam kelompok "margasari" yang berjumlah 40 orang dan dikepalai oleh pejabat dengan sebutan "sarayuda". Kelompok petugas yang disertai pekerjaan mengurus alat senjata api adalah "saragani". Tugasnya selain memelihara alat-alat senjata api, seperti meriam dan bedil, juga senjata-senjata lain, seperti tombak, keris, parang, panah, perisai dan sebagainya. Kepala kelompok saragani adalah "saradipa" atau "wangsanala". Tugas untuk upacara-upacara kerajaan diserahkan : pada kelompok khusus yang dipimpin oleh "mangumbara". Pembawa alat-alat upacara seperti payung dipikul oleh petugas yang disebut "payungbawat". Pelayan raja dan pesuruh yang beranggotakan 50 orang diserahkan kepada "pamarakan".

Para petugas yang mengurus keperluan-keperluan istana bertempat tinggal di perkampungan dekat istana. Petugas di luar istana, seperti yang mengurus pasar, mengurus pelabuhan, dan mengurus keperluan makanan, juga diserahkan kepada pejabat-pejabat tertentu. "Singantaka" atau "singapati" adalah pejabat-pejabat yang mengawasi dan menjaga keamanan pasar. Pejabat yang mengurus bidang ekonomi disebut "wargasari" dan yang mengurus bahan makanan ialah "juru gedong". Petugas yang mengepalai pelabuhan termasuk mengumpulkan cukai ialah "anggamarta", sedang petugas lokalnya adalah "juru bandar". Pejabat yang mengurus bidang perdagangan ialah "wiramartas". Pada abad 17 terdapat jabatan "mufti" yang berfungsi sebagai hakim tertinggi kerajaan yang mengepalai hakim-hakim tingkat bawahan. Penghulu istana adalah pemuka agama yang juga menjadi kepala mesjid besar di kota kerajaan.

Pejabat-pejabat tingkat daerah juga ditetapkan oleh sultan atau raja. Kadang-kadang ada daerah apanase yang dikepalai oleh bangsawan yang diberi wewenang mengurus daerah apanase tersebut (apanase adalah sebidang tanah yang diserahkan kepada para pejabat sebagai pengganti gaji, karena pada jaman itu sistim gaji belum lazim). Kesatuan wilayah yang semasa Belanda setingkat distrik, dikepalai pejabat yang disebut "lalawang". Lalawang masih membawahi sejumlah wilayah yang kecil-kecil setingkat onderdistrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang "lurah". Tiap-tiap lurah membawahi sejumlah desa yang dikepalai oleh seorang "pembekel" dan sejumlah kampung dikepalai oleh seorang "tertuha" kampung.

b. Kedudukan raja dan pengganti-penggantinya

Raja adalah penguasa tertinggi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya kekuasaan raja masih dibatasi oleh apa yang disebut "Dewan Mahkota" yang anggotanya terdiri dari para bangsawan yang paling dekat kepada raja dan sejumlah pejabat tingkat atas seperti mangkubumi, mantri, dan kyai. Dewan ini berfungsi sebagai penasihat raja untuk memecahkan berbagai persoalan penting dalam pemerintahan, penggantian tahta, permakluman perang dan damai, hubungan dengan dunia luar, dan sebagainya. Perlu dikemukakan bahwa pengaruh para bangsawan sangat besar dan pengaruh Dewan Mahkota terhadap sikap dan tindakan raja sangat besar pula. Meskipun demikian raja mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, memindahkan, ataupun memecat pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan kerajaan. Untuk pengangkatan pejabat-pejabat tingkat atas raja masih meminta nasehat Dewan Mahkota. Pengangkatan didasarkan atas jasa kecakapan seseorang. Pengangkatan seseorang pejabat biasanya disertai pemberian gelar tertentu.

Pengganti raja adalah putra mahkota, yaitu putra sulung raja dari permaisuri yang berasal dari golongan bangsawan. Dengan demikian putra raja yang ibunya bukan bangsawan, tidak berhak menggantikan kedudukan sebagai raja. Dalam pengangkatan putra mahkota, kadang-kadang terjadi ketidak-sepakatan di kalangan bangsawan tinggi sehingga menimbulkan keruwetan. Pernah terjadi hal semacam itu ketika Sultan Adam meninggal pada tahun 1857. Ratu Komala Sari, istri raja bukan bangsawan tinggi, menginginkan putra-

nya yakni Pangeran Tamjidillah menjadi raja dan ia mendapat dukungan Belanda. Bangsawan lain tidak setuju dan mengharapkan Pangeran Hidayatullah menjadi raja. Karena dukungan Belanda, maka Pangeran Tamjidillah yang berhasil menggantikan raja sedang Pangeran Hidayatullah tersisihkan. Apabila raja yang menggantikan masih belum dewasa biasanya dibentuk dewan perwalian yang anggota-anggotanya terdiri dari saudara-saudara raja yang sudah meninggal. Perwalian dihapuskan apabila raja yang diwalikan menjadi dewasa dan mampu memerintah sendiri.

c. Penghasilan kerajaan

Penghasilan kerajaan sebagian besar diperoleh dari pungutan pajak yang dibebankan kepada rakyat di wilayah kerajaan. Juga diperoleh penghasilan dari hasil perdagangan. Pada dasarnya pungutan pajak dibebankan kepada semua penduduk kerajaan, baik bangsawan maupun golongan rakyat biasa. Hasil tanah apanase kaum bangsawan, sebagian harus diserahkan kepada kas kerajaan. Ada beberapa macam pajak yang dikenakan kepada penduduk baik petani maupun pedagang, ialah pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulungan emas dan berlian, pajak barang dagangan, dan pajak bandar. Pajak itu masuk ke kas kerajaan untuk keperluan roda pemerintahan kerajaan.

3. Kerajaan Aceh

Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad 17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan mencapai kemakmuran yang luarbiasa. Bandar Aceh dibuka luas menjadi bandar internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya dilakukan terhadap tanah Aceh sekitarnya, tapi juga meluas jauh ke luar Aceh. Pada masa Sultan Iskandar Muda inilah disusun suatu undang-undang tentang tatapemerintahan yang disebut Adat Makota Alam.

a. Sistem pemerintahan

Wilayah Kesultanan Aceh Raya dibagi dalam tiga wilayah "sagi" dan wilayah pusat kerajaan. Tiap sagi terdiri dari sejumlah "mukim".

Berdasarkan jumlah mukim yang disatukan menjadi wilayah sagi, maka ketiga sagi di kerajaan Aceh disebut Sagi XXV Mukim, Sagi XXII Mukim dan Sagi XXVI Mukim. Sagi XXV mukim terletak di daerah bagian timur. Wilayah pusat kerajaan terletak di bagian tengah sebelah utara sampai ke pantai utara. Sesungguhnya tiap-tiap sagi dibagi dalam kesatuan-kesatuan wilayah kecil setingkat distrik. Tiap-tiap distrik dibagi lagi dalam mukim. Misalnya wilayah sagi XXV mempunyai distrik IV mukim, distrik VI mukim, distrik IX mukim, dan lain-lainnya. Tiap-tiap sagi dikepalai oleh "Panglima Sagi" atau lazim disebut "Hulubalang Besar", sedang tiap distrik dikepalai oleh seorang "uleebalang" (hulubalang). Pada hakekatnya hulubalang dalam wilayah sagi mempunyai kekuasaan yang otonom.

Raja atau sultan adalah lambang pemersatu yang diakui oleh para hulubalang. Kedudukan hulubalang tidak tergantung kepada sultan dan jabatan tersebut dapat juga diwariskan jabatannya kepada keturunannya tanpa sepengetahuan dan seizin sultan. Hulubalang diangkat oleh sultan dengan "sarakata" (surat ketetapan) yang dibubuhi "halilintar" (cap kerajaan). Di daerah pantai timur terdapat juga wilayah yang diperintah oleh empat orang "tuha peuet" (kepala) yang masing-masing mempunyai wilayah dengan wewenangnya tersendiri. Mereka juga disebut "hulubalang cut" (hulubalang kecil). Gelar yang dipakai oleh kepala wilayah ini berbeda-beda. Ada yang memakai gelar "keujruen", "meuntroe", "Ci", "pakeh" atau "ben". Di Lo'seumawe kepala tersebut diberi gelar "mbah raja", sedang di Teunom bergelar "imeum". Ada juga wilayah yang diperintah oleh uleebalang limong (lima hulubalang) dan masing-masing mempunyai batas wilayah kekuasaan tersendiri. Di daerah pantai barat kepala pemerintahan disebut "rigaih keuci" sedang wilayahnya disebut "sagoe". Seperti diketahui tiap mukim dikepalai oleh seorang imam yang biasanya juga seorang ulama. Tiap mukim terdiri dari beberapa "gampong" yang masing-masing dikepalai oleh seorang keuci. Gampong dibagi lagi dalam wilayah lebih kecil yang mempunyai tempat ibadah sendiri. Kepala dari wilayah kecil tersebut bernama "tengku meunasah". Di beberapa daerah kesatuan gampong dikepalai oleh seorang "datu". Pada dasarnya keuci hanya mengurus soal-soal keduniawian sedang urusan keagamaan dipegang oleh tengku meunasah. Ada juga pejabat-pejabat keagamaan dipegang oleh tengku.

meunasah. Ada juga pejabat-pejabat keagamaan seperti "kali", "imeum masjid", "hatib" dan "bileue". Kalau di Jawa ada pejabat sekretaris desa yang disebut carik, maka dalam gampong jabatan sekretaris tidak ada, tetapi keuci biasanya mempunyai pembantu yang disebut "waki".

b. Sistem penggantian tahta

Pada dasarnya pengganti raja yang meninggal adalah putra laki-laki raja yang lahir dari istri pertama. Umumnya menjadi pengganti adalah putra sulung, namun apabila hal tersebut tidak mungkin, dapat juga diambilkan dari putra laki-laki yang lain. Jika tidak ada putra laki-laki seorang putripun masih mungkin memangku jabatan raja (sultanah). Apabila putra raja yang naik tahta masih belum dewasa, pemerintahan sementara dapat juga dipegang oleh ibu atau pamannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat memerintah sendiri. Sebagai contoh kejadian penggantian tahta dalam kerajaan Aceh, antara lain, waktu Sultan Ali Ri'ayat Syah meninggal pada tahun 1607 beliau digantikan oleh kemenakannya bernama Darmawangsa Tun Pangkat yang kelak bergelar Iskandar Muda. Demikian juga ketika Iskandar Muda meninggal yang menggantikannya ialah putra angkatnya bernama Sultan Iskandar Thani Alauddin Mughayatsyah. Waktu Sultan Iskandar Thani meninggal yang menggantikannya ialah istrinya bernama Putri Sri Alam Permaisuri yang kemudian bergelar Sultanah Tajulalam Syafiatuddin Syah. Ia adalah putri dari Sultan Iskandar Muda.

Dengan demikian kita melihat dengan jelas bahwa penggantian tahta raja di Aceh tidak selalu kepada putra laki-laki, tetapi dapat juga putri, kemenakan, ataupun istri raja yang meninggal. Dalam pengangkatan raja baru peranan panglima sagi sangat besar, terutama panglima sagi XXII mukim. Sebagai contoh, misalnya, pada waktu Sultan Jauhar Alam meninggal pada tahun 1833, menurut wasiat yang ditunjuk sebagai penggantinya ialah putranya yang baru berumur kira-kira tujuh tahun. Panglima Polim Sagi XXII mukim tidak menyetujui dan tidak mengakui raja baru menurut yang ditunjuk testamen dan dipilihnya putra yang lain dari almarhum bernama Tuanku Darid.

Kepala-kepala daerah selain mempunyai penghasilan dari hasil sawah dan kebun yang dimilikinya juga memperoleh penghasilan tambahan dari penarikan pajak dan cukai, seperti pajak penjualan candu, cukai bandar, dan cukai barang dagangan. Tentu saja sebagian hasil cukai dan pajak harus diserahkan ke istana.

4. Kerajaan Gowa

Pada pertengahan abad 17 Gowa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh daerah Indonesia bagian timur mulai pulau-pulau Sangir-Talaud sebelah utara, Kutai di bagian barat serta daerah Marege (Australia) di bagian selatan, sudah merasakan pengaruh kekuasaan kerajaan Gowa. Pemerintahan kerajaan Gowa mencapai puncaknya terutama di bawah pemerintahan Sultan Malikussaid. Beliau memerintah dari tahun 1639 sampai tahun 1653. Tentang kehebatan armada kerajaan Gowa dikatakan, bahwa apabila Gowa berperang maka samudra menjadi penuh oleh kapal atau jung yang datang dalam jumlah ratusan buah, bahkan adakalanya ribuan. Kapal-kapal jung itu ada yang dua kali lebih besar daripada ukuran perahu pinisi sekarang. Pada tahun 1605 Sultan Alauddin mengucapkan secara resmi kalimat syahadat dan itu berarti bahwa sejak itu kerajaan Gowa pun resmi menjadi kerajaan Islam.

Orang-orang Belanda pada permulaannya tidak tertarik kepada kerajaan Gowa yang terletak di kaki barat Sulawesi Selatan. Pentingnya kerajaan Gowa baru mereka ketahui setelah mereka berhasil menangkap sebuah kapal Portugis di dekat perairan Malaka. Ternyata di kapal ini terdapat seorang awak kapal dari Makasar dan dari dialah mereka mendapat informasi tentang keadaan kerajaan Gowa. Ternyata pelabuhan kerajaan Gowa di Sombaopu merupakan sebuah pelabuhan transito yang penting bagi kapal-kapal yang berlayar ke atau dari Maluku.

a. Sistem pemerintahan

Di Sulawesi Selatan yang terdiri dari beberapa kerajaan, sebutan untuk raja dapat ditemukan dari beberapa buku tradisional yang bersifat kronik yang memuat silsilah raja-raja. Kitab-kitab tersebut antara lain adalah Lontara (himpunan ceritera yang memuat silsilah

raja-raja Wajo, Gowa, Bone, Luwu, dan sebagainya), Sanggala (memuat silsilah raja-raja Toraja) dan I Lagaligo (memuat silsilah raja-raja Bugis). Dari sekian kerajaan yang ada di Sulawesi dapat disebut tiga kerajaan besar yaitu:

1. Kerajaan Gowa, rajanya bergelar "Sombaya" (yang disembah), sebutannya "Sombaya ri Gowa".
2. Kerajaan Luwu, rajanya bergelar "Pajunge" atau "Mapajunge" (yang berpayung atau yang dipayungi) sebutannya "Pajunge ri Luwu"
3. Kerajaan Bone, sebutan rajanya Mangkau'E ri Bone (yang bertahta di Bone).



Cap Sultan Gowa.

Sumber : *Verhandelingen ... (deel 52)*

Dari kitab-kitab sejarah setempat kita masih dapat menentukan lagi gelar lain untuk raja, seperti: datu, batara, tomanurung, karaeng, arung dan matowa. Sebutan sultan untuk gelar raja baru lahir beberapa lama kemudian setelah raja-raja di Sulawesi Selatan menganut Islam.

b. Jabatan-jabatan dalam pemerintahan

Dari Sejarah Gowa dapat diketahui bahwa raja dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari dibantu oleh suatu dewan yang disebut "Kasuwiyang Salapanga" (pengabdian sembilan). Dalam perkembangan kemudian majlis tersebut diubah namanya menjadi "Bate Salapanga" (bendera sembilan). Sebagai pembantu raja yang menjalankan undang-undang pemerintahan, majlis diawasi oleh seorang pemimpin yang disebut "Paccallaya" (arti sebenarnya hakim atau yang menghukum).

Jabatan tertinggi sesudah raja adalah "Pabbicarabutta" yang dibantu oleh "Tumailalang Matowa" dan "Tumailalang Malolo". Tugas dari Tumailalang Matowa adalah sebagai pegawai tinggi yang menyampaikan perintah raja kepada majelis Bate Salapanga. Tumailalang Malolo adalah pegawai tinggi urusan istana. Panglima yang memimpin tentara dalam perang disebut "Anrong Guru Lompona Tumakajannang". Sebenarnya dewan majelis Bate Salapanga adalah suatu federasi dari kepala-kepala daerah dalam lingkungan kerajaan Gowa. Mereka bergelar "Gallarang" atau "Karaeng". Di antara mereka diangkat seorang tokoh yang paling berpengaruh dan paling berwibawa untuk menjadi ketua majelis yang disebut Paccallaya.

Di kerajaan Luwu' putra raja yang kelak akan menjadi putra mahkota sudah didudukkan dalam pemerintahan. Ia diberi gelar "Opu Caning". Bendahara kerajaan adalah seorang pejabat yang disebut "Opu Bali Rante". Selain sebagai bendaharawan ia juga bertugas rangkap sebagai pengurus soal perdagangan dan hubungan keluar. Dalam pemerintahan kerajaan masih terdapat lagi beberapa pejabat khusus, seperti "Opu Lalantoro" (petugas yang mengurus rumahtangga putra mahkota), "Opu Wagie" (petugas kerajaan yang membawakan sirih dan pinang raja) dan "Opu cenrana" (kepala kawal istana). Soal-soal yang berhubungan dengan keagamaan diurus oleh "Kadhi" yang dibantu oleh imam, katib dan bilal.

B. STRUKTUR MASYARAKAT

Struktur masyarakat di Indonesia pada masa permulaan kedatangan Islam dalam beberapa hal masih melanjutkan tradisi masa sebelumnya, terutama masih dalam tradisi budaya Indonesia pra-Hindu. Hal ini dapat diketahui karena budaya Hindu di Indonesia hanya menyentuh lapisan kaum bangsawan dan raja-raja, itupun hanya mengambil beberapa aspek kehidupan saja.

Dapat dikatakan bahwa masyarakat pedesaan dan masyarakat yang hidup di luar tembok kraton masih tetap berpegang pada tradisi Indonesia yang telah mereka miliki sebelum kedatangan pengaruh Hindu di Indonesia. Pola kehidupan mereka itu ialah masyarakat desa yang hidup bertani bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman, dan masyarakat pedagang untuk kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Dengan datangnya pengaruh Islam yang banyak dilaksanakan secara aktif oleh para ulama dan di Jawa dilakukan oleh para wali, sedikit demi sedikit mereka mendapat simpati dari kalangan rakyat biasa yang secara bertahap mulai dapat menggoncangkan kekuasaan para raja dan kaum bangsawan. Perubahan sosial dari masa Indonesia Hindu ke masa Indonesia Islam pada umumnya mulai terjadi di pesisir. Keadaan geografi Indonesia yang berpulau-pulau yang ribuan jumlahnya itu menyebabkan beberapa daerah pantai memegang peranan penting di bidang ekonomi dan politik.

Pada masa permulaan berdirinya kerajaan Islam baik di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, maka daerah pesisirlah yang menjadi pusat kekuasaan Islam. Salah satu perubahan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia ialah pertumbuhan kota-kota, baik kota pelabuhan maupun ibukota kerajaan. Daerah pedalaman yang terdiri dari desa-desa atau kampung-kampung pada umumnya merupakan bagian dari wilayah suatu kerajaan. Untuk golongan masyarakat yang hidup di kota, maka kelompok masyarakat dapat dibagi dalam empat golongan yaitu:

- a. Golongan raja dan keluarganya,
- b. Golongan elite,
- c. Golongan non-elite,
- d. Golongan hamba sahaya.

1. Golongan Raja dan Keluarganya

Tempat tinggal raja-raja, baik yang berkedudukan sebagai maharaja maupun raja-raja kecil ialah di istana atau kraton. Kraton adalah tempat melaksanakan pemerintahan dan kekuasaannya. Gelar raja juga masih lebih umum dipakai walaupun kemudian gelar itu diganti menjadi sultan. Gelar atau sebutan bagi raja di beberapa daerah tertentu berbeda-beda, umpamanya saja di Sulawesi gelar yang setingkat dengan raja adalah "karaeng", "arung", "batara"; dan di Maluku adalah "kolano".

Gelar sultan yang pertama kali dipakai di Indonesia ialah oleh Malikussaleh seperti ternyata dari batu nisannya yang terdapat di kampung Samudra, bekas kerajaan Pasai, di kabupaten Aceh Utara dekat Lho'Seumawe. Pada batu nisannya tertulis bahwa Sultan Malikussaleh meninggal pada tahun 696 H (1297 M).

Gelar yang setingkat dengan raja di Jawa juga bermacam-macam, sesuai dengan kebiasaan setempat. Gelar-gelar itu ialah senapati (misalnya Senapati Jimbun untuk Raden Patah yang menjadi raja Demak yang pertama), pangeran, susuhunan, sunan atau panembahan. Gelar pangeran, panembahan dan susuhunan dipakai untuk raja-raja Muslim pada masa peralihan Hindu ke Islam. Gelar ini masih bersifat kerohanian, karena pada umumnya raja juga dianggap sebagai pemimpin umat Islam. Bahkan di Banten raja yang pertama memakai gelar maulana yang berarti tuan atau penguasa. Raja Banten yang pertama bergelar Maulana Hasanuddin, juga raja Banten kedua masih bergelar maulana, yaitu Maulana Yusuf.

Jabatan raja biasanya bersifat turun-temurun dari ayah kepada anak atau cucunya. Di dalam sejarah sering terjadi beberapa kekecualian dimana seseorang dapat menjadi raja karena hal-hal lain. Di Indonesia masih ada unsur demokrasi dalam struktur pemerintahan kerajaan dimana ada pemilihan dalam pengangkatan seorang raja. Sebagai contoh yang pasti ialah kerajaan Wajo. Pada mulanya Wajo merupakan suatu kerajaan, tetapi ketika seorang raja bernama La Patedungi to Samallangi (1466-1469) bertindak sewenang-wenang, oleh Dewan Pemangku Adat kerajaan Wajo, raja dipecat dan dihukum mati. Sejak itu gelar raja yang disebut batara untuk kerajaan Wajo dihapuskan dan raja dipilih. Raja diberi gelar baru yakni Arung

Matowa (raja yang dituakan) dan kemudian ditentukan bahwa jabatan raja tidak boleh diwariskan. Unsur demokrasi juga terdapat pada beberapa kerajaan di Maluku di mana raja yang bergelar kolano dalam pemerintahan sehari-hari dibantu oleh dewan 20 yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan kerabat raja.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, raja atau sultan akan selalu erat berhubungan dengan pejabat-pejabat kerajaan yang ada di pusat, terutama dengan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, seperti mangkubumi (perdana menteri atau wazir), menteri-menteri, kadhi, senapati, atau panglima, laksamana, syahbandar dan pejabat-pejabat penting lainnya. Audiensi yang dilakukan para raja dengan pejabat kerajaan, lebih-lebih dengan masyarakat umum, tidak dilakukan setiap hari.

Kebiasaan raja untuk melakukan audiensi atau sidang kerajaan dilakukan pada masa-masa tertentu, misalnya pada masa permulaan musim hujan atau masa peralihan, ada pula yang dilakukan setiap hari Sabtu. Audiensi dilakukan di bangsal istana dimana Sultan duduk dan para hadirin juga duduk mengelilinginya. Audiensi ini sifatnya berupa laporan dari pejabat-pejabat kerajaan, baik bersifat keamanan, politik, maupun perdagangan. Sedangkan raja atau sultan bertanya tentang keadaan daerah-daerah dari pejabat yang berwenang. Sultan juga kadang-kadang menanyakan persoalan-persoalan hukum yang belum diselesaikan oleh para kadhi. Pada akhir audiensi sultan juga memberikan uraian tentang situasi kerajaan secara umum.

Tempat audiensi ini di Banten disebut "dipangga", di Aceh disebut "balairung", di Mataram disebut "sitiHINGGIL" atau "sitinggil", dan di Banjarmasin disebut "sitilohor". Selain audiensi dengan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, Sultan juga melakukan audinesi untuk masyarakat umum. Menurut catatan seorang pembesar Belanda dari VOC atau Kompeni bernama Rijckloff van Goens yang diutus sebagai duta ke kerajaan Mataram, raja menampakkan dirinya di hadapan umum tiga kali dalam seminggu, yaitu untuk melihat pertunjukan, untuk menjalankan peradilan, dan untuk memimpin sidang dewan pemerintahan. Sitinggil dipergunakan untuk tempat duduk sultan apabila menyaksikan keramaian yang diselenggarakan di alun-alun. Pada waktu ada keramaian yang dapat menyaksikan

bukan hanya sultan dan keluarganya serta para bangsawan saja, tetapi juga rakyat umum, baik penduduk kota maupun penduduk desa.

Pada waktu tertentu sultan juga melakukan perjalanan dalam kota, ke luar kota, bahkan ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Contoh perjalanan sultan ke daerah diceriterakan dalam kitab *Bustanussalat* karangan Nuruddin ar-Raniri tentang perjalanan Sultan Iskandar Thani dari Darussalam ke Samudra Pasai. Diceriterakan dalam buku tersebut perjalanan menuju Samudra harus ditempuh beberapa hari dan sultan terpaksa harus menginap di tengah jalan. Biasanya kendaraan sultan yang dipakai ialah kereta yang ditarik oleh lembu atau kerbau.

Suatu golongan yang erat hubungannya dengan raja karena pertalian darah biasanya tinggal di kraton atau setidaknya-tidaknya di dekat kompleks kraton. Di Kalimantan, keluarga raja dinamakan "kadanghaji". Kecuali itu juga golongan yang disebut "wargahaji" atau "sakaparek" ialah keluarga yang berasal dari perkawinan dengan turunan raja atau anggota-anggota keluarga raja. Keluarga raja yang berasal dari anak-anak raja dari dinasti sebelumnya disebut "prawangsa". Di Mataram keluarga raja atau kerabat raja yang dianggap tinggi derajatnya ialah mereka yang menjadi kerabat dari raja yang terakhir, jadi putra-putra raja, menantu serta ipar raja yang sedang memerintah. Keluarga dari raja-raja sebelumnya menduduki derajat kedua yang disebut "sentana dalem".

Pendidikan putra-putra raja dilakukan dalam kraton oleh guru agama yang khusus untuk keluarga raja. Dalam sejarah ada juga terjadi keluarga raja yang dididik jauh di luar kerajaan, seperti yang terjadi dengan putra raja Banten bernama Pangeran Arya yang dididik oleh Ratu Kalinyamat di Japara. Putra dan putri raja yang tinggal di kraton mempunyai tempat tinggal khusus. Putra ditempatkan di "kaputran" sedang para putri ditempatkan di "kaputren". Untuk kerajaan Islam yang bersifat maritim, selain keluarga raja, para pedagang dan syahbandar memegang peranan penting dan mereka biasanya merupakan tokoh yang dekat dengan raja. Fungsi syahbandar sangat diperlukan raja karena pengetahuannya tentang perdagangan dan bahasa asing. Syahbandar dalam kerajaan-kerajaan Islam sangat dekat dengan raja karena mereka umumnya orang-orang Islam dan

sangat erat hubungan pula dengan pedagang asing, sehingga mereka menjadi penghubung yang penting.

2. Golongan Elite

Yang dimaksud dengan golongan "elite" ialah sekelompok lapisan masyarakat yang mempunyai kedudukan terkemuka di lingkungan kerajaan dan mempunyai martabat tinggi dalam masyarakat. Mereka terdiri dari golongan bangsawan, tentara, kaum keagamaan maupun pedagang. Kaum bangsawan yang menduduki jabatan tertentu merupakan golongan elite pegawai disamping golongan bangsawan yang tidak menduduki jabatan khusus dalam kerajaan. Golongan elite pegawai ini di kalangan kerajaan Mataram disebut kaum priyayi sedang kaum bangsawan biasa disebut "bendoro". Sesuai dengan jabatannya, kaum priyayi terdiri dari "priyayi gede" dan "priyayi cilik". Sudah menjadi kebiasaan dari raja-raja pada masa dahulu untuk menempatkan kaum keluarga atau kerabatnya dalam struktur pemerintahan. Usaha semacam ini tidak lain daripada cara untuk memperkokoh kedudukan raja yang bersangkutan di bidang politik dan ekonomi. Tidak hanya kerabat raja saja yang dapat menempati kedudukan elite pegawai, tetapi juga orang asing. Biasanya jabatan untuk mereka ialah jabatan syahbandar.

Di beberapa kerajaan beberapa syahbandar berasal dari orang asing; misalnya, di Aceh ada syahbandar orang India, di Selebar orang Cina, di Banten orang Cina dan Gujarat, di Cirebon seorang Belanda, dan di Kutai ada syahbandar orang Aceh. Pengangkatan orang asing menjadi syahbandar ini mungkin didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang ini mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang perdagangan dan hubungan internasional. Soalnya syahbandar tidak hanya berfungsi sebagai petugas pelabuhan saja; tugasnya mencakup soal-soal yang berhubungan dengan orang-orang asing dalam rangka hubungan antar-negara. Hubungan antar-negara ini mencakup kegiatan internasional, misalnya, masalah hukum, kepolisian, administrasi, perjanjian antar-negara, dan sebagainya. Pengetahuan bahasa juga memegang peranan penting karena syahbandar umumnya mahir mempergunakan berbagai bahasa asing sehingga memudahkan transaksi perdagangan dengan pihak asing.

Julukan "orang kaya" sering kita dapatkan dalam masyarakat Aceh, Minangkabau, Malaka, Maluku, Jambi, Indragiri, dan Jakarta. Mereka termasuk golongan elite pegawai ataupun elite pedagang. Di Aceh yang disebut orang kaya termasuk golongan bangsawan yang turut serta melaksanakan administrasi kerajaan.

Dalam masyarakat kota seringkali kita ketahui adanya golongan agama yang menempati kedudukan sosial yang tinggi. Mereka adalah para ulama dan para wali. Di antara mereka ada yang menjadi penasehat raja, bahkan diantara para wali banyak yang menjadi penasehat utama, bahkan salah seorang wali, yaitu Sunan Gunung Jati, menjadi raja Cirebon. Para wali memang menduduki kedudukan sosial yang sangat penting di kerajaan-kerajaan kita masa itu. Sunan Kudus adalah penasehat politik kerajaan Demak, Sunan Kalijaga menjadi penghulu kerajaan Demak dan imam di Mesjid Agung Demak.

Golongan elite ini dapat membedakan dirinya dari lapisan lain (seperti golongan non-elite) terutama dalam kehidupan ekonomi dan sosial-budayanya. Mereka mempunyai corak dan gaya berpakaian sendiri, juga bahasa dan gaya rumahnya berlainan dengan golongan lain. Rumah para elite ini biasanya besar dan kuat, dan di rumahnya ditempatkan para penjaga. Di depan rumahnya dibuat paseban, ialah sebuah ruangan untuk menerima para tamu. Kehidupan ini mencontoh kehidupan raja dalam skala yang lebih kecil. Selain pegawai yang bekerja di rumahnya, banyak di antara golongan elite ini mempunyai hamba-sahayanya. Jumlah golongan elite ini tidak banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk non-elite. Pada masa itu hubungan antara golongan elite dengan golongan non-elite yang terdiri dari penduduk biasa, sangat terbatas, setidaknya mereka membatasi diri dalam pergaulan karena perbedaan status sosialnya.

3. Golongan Non-elite

Jika kita melihat uraian di atas tentang golongan elite sebagai lapisan masyarakat yang jumlahnya sangat kecil dan terbatas, maka sebaliknya golongan non-elite merupakan lapisan masyarakat yang paling besar. Golongan yang termasuk non-elite ialah rakyat kebanyakan yang di Jawa pada masa itu disebut kelompok "wong cilik". Mereka ini terdiri dari para pedagang, golongan petani, pekerja-

pekerja ahli atau tukang, dan kaum nelayan. Selain itu yang termasuk dalam golongan non-elite ialah pejabat-pejabat pemerintah tingkat rendah, prajurit, para seniman dan golongan lainnya yang termasuk lapisan bawah.

Dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di pantai, maka para pedagang adalah kelompok masyarakat non-elite yang paling berpengaruh. Mereka umumnya merupakan kelompok pedagang bukan penduduk setempat. Misalnya saja di Banten abad 17 di ibukota kerajaan telah tinggal dan bermukim banyak sekali pedagang yang berasal dari luar Banten. Mereka berasal dari Tanah Semenanjung, Benggala, Gujarat, Abesinia, Siam dan lain-lain. Juga di Aceh sekitar abad 17 banyak sekali pedagang asing yang bermukim. Di sini pedagang Cina merupakan mayoritas di antara pedagang dari negeri lain, seperti dari India, Turki, Venesia, Benggala, Koromandel, Pegu, Malabar, Malaka, Kedah, Arab, dan masih banyak lagi pedagang dari negeri lain. Kedatangan golongan pedagang ini, baik untuk sementara waktu, tetapi lebih-lebih lagi kalau untuk bermukim, memang sangat diharapkan oleh raja karena hal itu berarti masuknya penghasilan tambahan. Mereka hanya terbatas berdagang di sekitar ibukota kerajaan, sedangkan hasil dagangan dan hasil bumi yang mereka beli dibawa oleh pedagang pribumi. Biasanya pedagang asing dilarang membeli hasil bumi dengan masuk ke daerah pedalaman, karena penduduk pribumi yang melakukannya. Faktor keuntunganlah yang menjadi pokok dalam perdagangan. Para pedagang perlu mendapat perlindungan dari golongan penguasa dan golongan elite, khususnya golongan elite politik. Selain mereka memperoleh untung dari bea-cukai, mereka juga mendapat penghasilan tambahan dari mengawasi harta-kekayaan para pedagang.

Golongan petani rupanya tidak banyak yang bertempat tinggal di kota. Mereka lebih banyak tinggal di daerah pedalaman untuk menggarap tanah. Mereka memang kadang-kadang sekali-sekali datang juga ke kota untuk menjual hasil bumi, atau untuk berbelanja, seperti berbelanja pakaian, perhiasan dan keperluan sehari-hari yang tidak terdapat di desa seperti garam, alat-alat rumahtangga, dan lain-lain.

Para petani ini ada yang memiliki sawah dan ladang yang dikerjakan sendiri untuk keperluan hidupnya, tetapi ada juga petani

yang hanya mengerjakan sawah atau ladang orang lain. Di Banten banyak sekali kaum bangsawan dan golongan elite yang memiliki sawah dan dikerjakan oleh para petani penggarap. Sultan Aceh, seperti Sultan Iskandar Muda, mempunyai persawahan di sekitar kota yang dikerjakan oleh petani-petani. Setelah panen sebagian dari hasilnya diserahkan kepada sultan dan disimpan dalam gudang. Di daerah Maluku petani cengkeh dalam musim panen yang biasanya terjadi tiga tahun sekali membawa hasil panen buah cengkeh ke kota pelabuhan untuk dijual kepada pedagang. Para kolano dan kaum bangsawan di daerah Maluku juga turut aktif berdagang, karena mereka juga biasanya memiliki kebun-kebun cengkeh, bahkan mereka juga turut menentukan besarnya cukai jika terjadi transaksi dagang antara penduduk dengan pedagang-pedagang. Di kota-kota pesisir terdapat golongan nelayan yang pekerjaan pokoknya mencari ikan. Mereka juga termasuk kelompok masyarakat yang penting, karena hasil ikan tersebut dijual kepada masyarakat kota, terutama kepada lapisan atas yang memerlukan makan lebih baik. Tempat tinggal para nelayan biasanya di tepi pantai. Para nelayan ini banyak juga yang tidak memiliki perahu sendiri dan alat penangkap ikan, sehingga mereka hanya menjual tenaganya saja. Mereka yang tidak memiliki perahu dan alat penangkap ikan menyewa perahu dari para pemilik modal yang biasanya terdiri dari lapisan atas dan golongan bangsawan. Di kerajaan Demak diceriterakan bahwa para raja memiliki armada perahu dagang dan menjadi pemilik modal.

Golongan tukang banyak yang tinggal di kota-kota dan hanya sedikit sekali yang hidup di desa atau daerah pedalaman. Dalam kelompok tukang termasuk pula tukang gerabah, tukang kayu, tukang ukir. Tukang-tukang yang mengerjakan perkakas atau perhiasan dari logam disebut "pande", seperti pande mas, pande besi, dan sebagainya. Para tukang ini pada umumnya tinggal mengelompok pada daerah tertentu, misalnya di Aceh ada kampung pande (tempat tinggal orang-orang yang mengerjakan perkakas dari logam). Ada juga Panjunan seperti di Cirebon, yaitu kampung tempat tinggal tukang membuat gerabah, Pengukiran, dan Pagongan (tempat membuat gong, gamelan).

Di kalangan kraton biasanya terdapat kelompok tukang yang khusus. Misalnya saja di Aceh masa dahulu diceriterakan ada 300

orang tukang emas yang bekerja untuk istana. Tukang-tukang pernah didatangkan khusus dari Demak untuk membuat kraton Cirebon, seperti disebutkan dalam babad Cirebon. Dalam Hikayat Banjar malahan disebutkan bahwa yang membuat patung berhala adalah tukang dari Cina. Kerajaan Mataram mempunyai petugas-petugas khusus yang membuat pekerjaan kayu, batu dan lain-lain. Mereka disebut orang kalang, gowong, undagi dan dianggap sebagai pegawai kerajaan.

Beberapa tukang ahli yang terdiri dari orang asing juga pernah dipakai oleh beberapa raja kita, sehingga dengan demikian ada pengaruh arsitektur asing kepada seni bangunan kita. Pada jaman VOC di Jakarta yang membuat bangunan kantor dan membuat pekerjaan alat rumahtangga, seperti meja, kursi, dan sebagainya, adalah tukang-tukang Belanda dan Cina, sehingga kita dapat melihat perpaduan langgam bangunan Barat dan Timur, seperti mesjid Angke, mesjid Kebon Jeruk, dan beberapa bangunan lain. Sultan Banten pada abad 17 pernah mengangkat seorang Belanda bernama Lucas Cardeel menjadi arsitek yang membangun menara serta gedung Tiamah yang terletak di dekat Mesjid Agung Banten. Karena jasanya itu Lucas Cardeel oleh Sultan Banten diberi gelar Pangeran Wiraguna. Raja-raja dan golongan elite jelas memerlukan para tukang untuk membuat rumah atau istana yang lebih indah untuk membedakannya dengan bangunan milik orang biasa.

Bagi raja dan keluarganya pande besi sangat diperlukan untuk membuat senjata. Di samping ahli-ahli pembuat senjata yang terdiri dari orang pribumi ada juga tukang yang berasal dari luar negeri, misalnya orang Turki yang oleh sultan Aceh disuruh membuat meriam.

Segolongan masyarakat non-elite yang biasanya tinggal di kota-kota ialah para seniman di bidang seni tari, seni drama, penabuh gamelan, dan sebagainya. Di antara mereka malahan ada yang tinggal di istana dan menjadi seniman istana. Mereka diperlukan untuk melaksanakan pertunjukkan pada upacara-upacara kerajaan dan upacara umum.

Golongan non-elite yang lain ialah kaum agama yang terdapat tidak hanya di pusat-pusat kerajaan saja tetapi juga sampai tingkat

desa dan kampung. Di kota mereka termasuk kaum putihan yang di Jawa tinggal di dekat mesjid, sehingga daerah tempat tinggal mereka disebut "kauman". Mereka ini mempunyai pengaruh sangat besar di kalangan masyarakat karena pada umumnya sangat dihormati sebagai guru agama. Lebih-lebih kelak pada masa kolonial, pengaruhnya sangat kuat kepada rakyat yang membentuk gerakan-gerakan politik. Golongan non-elite yang lain ialah pegawai-pegawai kerajaan tingkat bawahan, seperti prajurit, mantri, lurah yang biasanya tinggal di luar tembok kraton.

4. Golongan Hamba-sahaya

Kelompok masyarakat yang menduduki lapisan paling bawah ialah golongan hamba-sahaya atau golongan budak. Golongan ini termasuk orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Adanya golongan-golongan hamba-sahaya ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: Dapat terjadi misalnya seseorang yang tidak dapat membayar utang memberikan anaknya atau kerabatnya sebagai pembayar utang. Dapat juga terjadi bahwa dalam suatu perang para tawanan dari pihak yang kalah perang dijadikan hamba-sahaya oleh pihak pemenang. Ada pula budak diperoleh dari perdagangan budak untuk dipekerjakan di rumahnya. Di kota Waringin (Kalimantan) para budak terdiri dari dua golongan ialah "orang berutang" dan budak yang berasal dari tawanan perang atau karena dibeli.

Perbudakan tidak hanya terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam saja, melainkan sudah terjadi pada masa Indonesia-Hindu. Pada masa Majapahit dikenal istilah "bertya" yang artinya budak. Ketika duta Majapahit berkunjung ke Negeri Cina, mereka membawa upeti, antara lain budak-budak. Walaupun golongan budak menempati kedudukan sosial yang rendah sekali, namun tenaga mereka sangat diperlukan oleh para raja, kaum bangsawan dan golongan elite untuk melayani kepentingan-kepentingannya. Pembuatan kraton, bangunan-bangunan kota, pembuatan jalan, dan pekerjaan lain yang berat dan kasar biasanya memakai tenaga budak. Golongan bangsawan dan pedagang besar mempunyai budak-budak untuk menjaga rumahnya, seperti yang disaksikan oleh seorang asing yang mengunjungi Banten pada abad 16. Pada

waktu orang Belanda berlayar menuju Banten (1596) mereka melihat bahwa kapal-kapal Banten mempunyai emperan belakang (buritan) di mana terdapat budak-budak yang menjadi pendayung. Mereka duduk diikat dengan kuat dan di atas geladak ditempatkan tentara untuk menjaga mereka. Mungkin budak-budak ini adalah tawanan perang karena mereka diikat dan dijaga tentara. Pada abad 17 di kerajaan Aceh pintu gerbang menuju istana dijaga oleh 150 orang budak. Budak-budak itu pada umumnya dari orang asing. Ada pula di antara mereka yang dipergunakan sebagai prajurit dalam perang.

Masalah perbudakan juga menjadi masalah umum bagi kompeni Belanda. Setelah ibukota Batavia didirikan (1619), Belanda merasa perlu memakai tenaga budak. Mereka mengambil tenaga budak yang berasal dari Benggala, Arakan, Malabar, Kurmandel, dan juga budak penduduk pribumi. Dalam buku *Oud Batavia* karangan De Haan terdapat lukisan yang menggambarkan seorang pembesar Belanda dengan bertolak-pinggang diiringi seorang budak pribumi yang membawakan payung tuannya.

Pada masa Kompeni Belanda, perdagangan budak menjadi salah-satu obyek perdagangan. Jumlah perdagangan budak pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Van der Parra agak jelas, yaitu setiap tahun terjadi transaksi perdagangan 4.000 orang budak. Mereka didatangkan ke Jakarta untuk dijadikan pembantu Kompeni, pekerja pada pertukangan, pelayan toko, buruh pelabuhan. Di antara budak-budak ini ada juga yang menjadi tentara Kompeni.

Status sosial golongan budak berada di luar lapisan masyarakat lainnya. Mereka dapat diperjual-belikan seperti hewan. Nasib mereka tergantung kepada pemiliknya karena jika tidak disenangi, mereka akan dijual kepada orang lain. Di antara budak-budak ini ada juga yang nasibnya agak kurang buruk. Misalnya, jika menjadi tukang dan menghasilkan pekerjaan yang baik, maka lambat-laun mereka mendapat kepercayaan majikannya dan akhirnya status mereka diubah menjadi orang merdeka. Contoh daripada budak-prajurit adalah Untung Surapati. Ia seorang budak belian yang berhasil mencapai pangkat letnan dalam tentara Kompeni Belanda. Tetapi jiwa kemerdekaannya menyebabkan ia memberontak terhadap Belanda.



Hukum gantung, Banten.

C. HUBUNGAN ANTAR - KERAJAAN

1. Hubungan Antar-kerajaan di Indonesia

Dalam babad dan hikayat kita sering menjumpai cerita perang antara kerajaan-kerajaan pribumi. Perang ini mencerminkan persaingan antara kerajaan-kerajaan Indonesia. Para raja pada umumnya mempunyai ambisi untuk memperluas daerah kekuasaannya, terutama untuk memperoleh sawah-ladang yang lebih luas untuk dijadikan tanah lungguh, dan untuk menambah jumlah rakyat yang dapat dikerahkan sebagai tenaga kerja. Perluasan wilayah kekuasaan juga mungkin disebabkan keinginan untuk menguasai suatu tempat strategis, baik dilihat dari sudut perdagangan, pelayaran atau pertahanan. Juga masih banyak terdapat pertimbangan-pertimbangan lain untuk mengadakan ekspansi yang tidak terbatas hanya pada faktor-faktor ekonomi, dan pertahanan, tetapi mungkin juga didasarkan atas faktor psikologis, misalnya untuk mempertahankan prestasi negara.

Akan tetapi selain adanya persaingan yang menimbulkan bentrokan antar-kerajaan, dari hikayat dan babad pula kita menjumpai berita tentang adanya hubungan antar-kerajaan atas dasar persahabatan. Ada alasan yang membuat kerajaan-kerajaan memilih jalan damai daripada mengadakan perang. Alasan itu bisa berbeda-beda: mungkin dua kerajaan yang berbatasan itu mempunyai kedudukan yang sama kuat, mungkin tidak ada pemimpin yang mempunyai ambisi politik ekspansi, dan mungkin juga karena masing-masing sedang menantikan saat yang baik untuk mengadakan penyerangan dan untuk sementara terpaksa mengadakan hubungan persahabatan dulu. Mungkin juga negara tetangga yang nampaknya lemah mempunyai sekutu yang lebih kuat sehingga kalau diserang maka sekutunya akan membantunya. Pendeknya banyak faktor lagi yang menyebabkan kerajaan yang bersangkutan lebih suka mengambil jalan damai antar-tetangga daripada berperang satu sama lain.

Pada akhir abad ke-16, kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati Ingalaga (1588-1601) merupakan kerajaan yang terkuat di Tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah, yang dibuktikan dengan penaklukan demi penaklukan terhadap daerah sekitarnya. Pajang dan Demak ditaklukkan pada tahun 1588, disusul dengan Madiun (1590), dan Japara. Tuban diserang pada tahun 1598 dan 1599 akan tetapi dapat bertahan dan baru diduduki pada tahun 1619 oleh Sultan Agung. Sebelum itu daerah-daerah lain lebih dahulu telah ditaklukannya juga, seperti Wirasaba (1615), Lasem (1616) dan Pasuruhan (1617). Pendudukan Jawa Timur diselesaikan dalam beberapa tahap: Madura jatuh pada tahun 1624, Surabaya pada tahun 1625, Giri pada tahun 1636 dan Blambangan pada tahun 1639.

Dengan demikian hanya bagian barat pulau Jawa saja yang tidak menjadi wilayah Mataram, yakni Banten, Jakarta dan Cirebon. Kita ketahui bahwa Sultan Agung menyerang benteng Batavia (Jakarta) tempat pertahanan Belanda sampai dua kali, yakni tahun 1628 dan 1629. Sayang sekali kedua serangan itu mengalami kegagalan. Usaha untuk menyerang Banten tidak sempat dilaksanakan karena kegagalan ekspedisi ke Jakarta.

Anehnya Cirebon tidak pernah diserang, malahan tidak pernah ada rencana untuk menyerang kerajaan ini. Baik pada masa peme-

rintahan Panembahan Senopati maupun Sultan Agung tidak pernah ada rencana untuk menaklukkan Cirebon. Malahan sebelum Senopati wafat, ia sempat berpesan kepada putranya supaya tetap memelihara hubungan yang baik dengan Cirebon.

Mengapa Cirebon tidak pernah diserang Mataram? Mungkin karena Cirebon telah terlebih dahulu menerima agama Islam dan raja Cirebon dianggap sebagai orang suci. Seperti diketahui raja-raja Cirebon adalah keturunan Sunan Gunung Jati, sehingga dapat dimengerti bahwa Mataram menghormati Cirebon sebagai kerajaan yang lebih tua. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, yang memerintah di Cirebon adalah Panembahan Ratu, yang usianya lebih tua dari raja Mataram dan dianggap sebagai guru Sultan Agung. Pada tahun 1636 Panembahan Ratu berkunjung ke Mataram untuk menunjukkan penghormatan beliau kepada sultan yang telah menguasai sebagian besar pulau Jawa.

Di lain pihak Cirebon semakin khawatir juga akan kekuasaan Mataram yang semakin besar, sehingga ketika terjadi pertentangan antara Mataram dan Kompeni, Cirebon memilih jalan tengah. Walaupun ada suasana perdamaian antara Cirebon dan Mataram, ada hal-hal yang tersembunyi di balik persahabatan ini. Hal ini terbukti ketika salah seorang utusan Kompeni bernama De Haan dalam perjalanan ke Mataram terlebih dahulu singgah di Cirebon. Kejadian ini telah menimbulkan kegusaran hati Sultan Agung. Maka ketika pada tahun 1629 kapal Kompeni berlayar di pantai utara, mereka diundang oleh Cirebon untuk menembakkan meriamnya tanpa peluru untuk menimbulkan kesan bahwa Belanda memusuhi Cirebon. Cirebon tidak mau dianggap oleh Mataram sebagai kawan Kompeni.

Di lain pihak Cirebon dipergunakan oleh Sultan Agung untuk menjadi penghubung antara Mataram dan Banten. Seringkali terjadi Cirebon dijadikan perantara dalam hubungan antara kedua kerajaan tersebut dan ketika terjadi pertentangan tajam antara Mataram dan Banten, hal itu telah mempersulit kedudukan Cirebon. Lebih-lebih lagi ketika kerajaan Cirebon sudah dipecah menjadi dua Kesultanan, yakni Kasepuhan dan Kanoman, maka kedua bagian itu lebih suka memilih proteksi (perlindungan) Belanda (pada tahun 1681).

Berita tentang ekspansi kerajaan Mataram yang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan menggantikan kedudukan Demak, telah pula terdengar hingga ke seberang lautan. Utusan-utusan dari Palembang, Jambi, dan Banjarmasin datang mengunjungi Mataram dengan membawa persembahan. Hubungan ini dianggap oleh Sultan Agung sebagai hubungan dengan negara-vasal, seperti halnya dahulu pada zaman Demak dan Majapahit. Palembang memerlukan perlindungan Mataram untuk memperkuat kedudukannya terhadap Banten yang sedang berusaha mengadakan ekspansi ke Sumatera. Jambi dan Banjarmasin juga melihat Mataram sebagai kerajaan yang besar dan kuat yang patut dicontoh. Dari Hikayat Banjar kita berulang kali mendapatkan bagian ceritera yang mengagung-agungkan budaya Jawa; tatacara dan tatapemerintahan Jawa dipakai sebagai teladan untuk membina kerajaan Banjarmasin.

Pada tahun 1642 golongan pro Mataram berkuasa di Jambi. Pada masa itu para pembesar kerajaan Jambi berorientasi ke Mataram. Di kraton Jambi orang-orang berbahasa Jawa dan berpakaian cara Jawa. Orang yang datang dari desa jika hendak menghadap ke kraton Jambi tidak lagi diperkenankan berpakaian Melayu seperti dahulu tetapi harus mengenakan pakaian Jawa. Baru sesudah Sultan Agung meninggal (1645) pengaruh budaya dan politik Jawa di Jambi berkurang, tetapi akibatnya Kompeni Belanda berhasil menguasai daerah itu. Hanya Palembang yang masih setia sampai pada akhir pemerintahan Sunan Amangkurat I Tegalwangi (1677).

Utusan-utusan yang datang dari Makasar nampaknya juga dianggap oleh Mataram sebagai utusan dari daerah vasal. Menurut catatan Belanda, kunjungan orang Makasar pada tahun 1658 telah diatur sedemikian rupa oleh Sunan Amangkurat I, sehingga misi duta-duta dari Sulawesi Selatan ini seolah-olah datang menyembah kepadanya, walaupun sebenarnya mereka bukan bermaksud demikian.

Kunjungan utusan Gowa sudah dimulai sejak pemerintahan Sultan Agung. Pada tahun 1630 seorang utusan Gowa tiba di Mataram dengan membawa dua ekor kuda, masing-masing berwarna hitam dan coklat, dan sebuah tempat tidur dari emas untuk Sunan. Kunjungan ini dibalas pada tahun 1633. Mataram mengirim Ki Ngabei Sarabula datang ke Gowa. Pada tahun itu juga diadakan perjanjian

persahabatan antara kedua kerajaan ini. Tetapi pada tahun 1654 Amangkurat I menyatakan kekesalannya bahwa kapal-kapal Makasar tidak lagi datang seperti sediakala. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, utusan Gowa hanya dua kali datang ke Mataram masing-masing pada tahun 1656-1657 dan 1658-1659.

Gowa waktu itu sedang menghadapi kesulitan dengan Kompeni. Mereka sedang berusaha menahan Kompeni yang sedang memaksakan kehendaknya sebagai pemegang monopoli tunggal di Ujungpandang dan Maluku. Karena itu Gowa memerlukan bantuan kerajaan-kerajaan pribumi lainnya. Dalam pada itu Mataram menghargai usaha Gowa dan berharap agar supaya mereka mengakui Susuhunan sebagai yang dipertuannya, seperti halnya Palembang, Jambi dan Banjarmasin.

Ternyata Mataram agak kecewa karena utusan-utusan Gowa yang datang membawa persembahan menganggapnya sebagai hadiah dan bukan upeti, lagi pula mereka tidak bersedia memberi penghormatan sebagai negara takluk. Kedua misi Gowa ini dapat dianggap gagal, karena kedua keputusan itu tidak diakui oleh Mataram. Masalahnya adalah karena yang diutus bukan orang Makasar asli tetapi orang Melayu yang bernama Koja Ibrahim dan Encik Muhammad. Bagaimanapun juga delegasi ini tidak diperkenankan pergi ke ibukota dengan alasan bahwa mereka tidak pantas untuk menghadap Sunan. Misi kedua yang tiba pada tahun 1658 mendapat perlakuan yang lebih baik, karena diperoleh keterangan bahwa pemimpin delegasi adalah paman dari raja Gowa. Mula-mula mereka diterima di dalam istana, tetapi ketika diketahui bahwa duta tersebut tidak tergolong bangsawan tinggi, perhatian Sunanpun mulai berkurang. Namun sempat pula dalam pertemuan itu diadakan perjanjian pertahanan bersama, di mana Sunan memerintahkan supaya di Surabaya disiapkan 20 jung untuk membantu Gowa. Walaupun bantuan itu tidak kunjung tiba, tetapi persahabatan Gowa-Mataram tetap terjalin.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan kerajaan Gowa adalah persekutuan kerajaan Gowa-Tallo. Penduduk Sulawesi Selatan dari suku Makasar dan Bugis telah membentuk kerajaan-kerajaan kecil-besar yang tergabung dalam persekutuan. Persekutuan itu dinyatakan dalam satu perjanjian yang khusus. Hubungan antar-kerajaan di Sulawesi Selatan berada dalam tingkat yang berbeda-beda. Kerajaan

Wajo hubungannya dengan kerajaan lain di sekitarnya dibagi dalam tiga kategori. Yang pertama ialah hubungan antara kerajaan yang sederajat dan hubungan semacam itu dianggap sebagai hubungan antara saudara yang sama derajatnya, atau hubungan antara adik dan kakak. Jenis kedua ialah hubungan antara anak dan ibu. Biasanya hubungan kekeluargaan ini terjadi karena keinginan kerajaan yang bersangkutan: kerajaan yang lebih kecil atau lebih lemah bergabung kepada yang besar dan kuat dalam satu persekutuan, entah sebagai anak terhadap ibu, atau adik terhadap kakak. Apabila kekuatannya sama, maka diadakan persahabatan yang setingkat. Hubungan antara kerajaan adik dengan kerajaan kakak ini bisa juga dianggap sebagai hubungan vasal. Persekutuan dengan kerajaan besar untuk mendapatkan perlindungan disebut "pa'dao tarara", artinya merangkul tanahnya, yang dirangkul oleh kerajaan yang lebih besar. Hubungan antara kerajaan anak dengan sekutunya sebagai ibu bisa terjadi karena kerajaan anak ditaklukkan oleh kerajaan ibu, sehingga jelas sekali hubungan vasalnya. Apabila kerajaan anak memberontak kepada kerajaan ibu dan menimbulkan kekalahan pada pihak penyerang maka statusnya turun, yaitu antara budak dengan tuannya.

Hubungan-hubungan antar-kerajaan ini dikukuhkan dalam perjanjian resmi disertai sumpah keagamaan. Perumusan dinyatakan dengan jelas, artinya dalam hubungan sebagai vasal, daerah takluk akan menurut tanpa syarat. Untuk persekutuan yang sama tingkatannya, perjanjian ditekankan pada persamaan kedudukan, bantuan timbal-balik, dan kerjasama dalam waktu damai dan perang. Dalam perjanjian kerajaan budak dan kerajaan tuan, titikberat perumusan ialah penetapan jasa-jasa yang harus diberikan kepada kerajaan yang dipertuan.

Selain itu dalam kitab lontara terdapat aturan yang menyebutkan kewajiban kerajaan induk atau yang dipertuan untuk tetap menghormati adat dan hukum kerajaan vasal, dan kerajaan vasal akan mendapat dukungan penuh dalam pertikaian dengan kerajaan tetangga. Mereka harus memberi bantuan apabila negara vasal mendapat serangan musuh dari dalam maupun dari luar.

Wajo adalah kerajaan induk yang membawahi beberapa kerajaan kecil, walaupun Wajo sendiri merupakan vasal dari kerajaan Luwu.

Ekspansi Wajo dengan mempersatukan kerajaan kecil dalam satu federasi harus mendapat izin dari kerajaan Luwu. Karena kerajaan Wajo menjadi semakin besar, maka diadakan perjanjian baru dengan Luwu dimana ditentukan bahwa status Wajo diubah menjadi kerajaan adik, bukan lagi sebagai anak. Dengan kedudukan baru ini Wajo kemudian terlibat dalam pertikaian dengan beberapa kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Perhatian dua kerajaan besar, Gowa dan Bone yang telah bersatu dalam satu perjanjian, mulai ditujukan ke utara di mana kerajaan Luwu memegang hegemoni. Operasi ke utara oleh kerajaan Gowa dan Bone ini berhasil memisahkan beberapa daerah vasal dari Wajo. Karena itu Wajo dianggap lalai, tidak melindungi negara vasal, sehingga kerajaan Luwu menghukum Wajo menjadi negara-takluk. Ketika Luwu juga kemudian tunduk kepada Gowa, maka dengan demikian Wajo juga otomatis menjadi vasal Gowa. Wajo diharuskan membayar denda.

Sukses demi sukses Gowa ini mencemaskan Bone. Hegemoni Gowa makin meluas saja di semenanjung Sulawesi Selatan ini. Ibukota kerajaan Gowa di Sombaopu letaknya sangat menguntungkan untuk menjadi pusat perdagangan. Pedagang Melayu datang dan menetap di sana dan Gowa bisa mengambil keuntungan dari bea-cukai yang dipungut syahbandar di pelabuhan. Akhirnya hubungan Gowa-Bone semakin renggang, dan pada tahun 1565 pecahlah perang yang pertama antara kedua kerajaan besar ini. Untuk menambah kekuatan, Bone mencari persekutuan baru dengan mengajak Wajo dan Soppeng bersatu dengan Bone melawan Gowa. Persekutuan ini terkenal dengan nama *Tellumpocco E* dan merupakan satu aliansi yang penting sekali dalam sejarah Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1582. Karena ketiga unsur ini merupakan unsur Bugis, maka persekutuan ini dapat dianggap sebagai solidaritas Bugis menghadapi Gowa-Tallo yang terdiri dari suku Makasar.

Perjanjian Tellumpocco E dilakukan di desa Bunne. Upacara pembentukan federasi diawali upacara sumpah sambil menghancurkan telur dengan batu. Sesuai dengan luas wilayahnya, maka Bone diakui sebagai saudara tertua, Wajo saudara tengah, dan Soppeng sebagai saudara bungsu. Perjanjian ini disertai jaminan federasi untuk membantu Wajo jika Gowa masih mau memperlakukan Wajo sebagai budak.

Semenjak itu Tellumpocco E bertindak ke luar sebagai satu badan, dan diikrarkan untuk tidak diadakan ekspansi ke dalam. Aliansi telah dibuktikan kekompakannya ketika ada serangan Gowa. Pada satu pertempuran yang sangat terkenal di Pakonnya (awal abad 17), Gowa dipukul mundur oleh Tellumpocco E, Mangkubumi kerajaan Gowa dapat lolos dari pertempuran hanya karena bernasib mujur.

Ekspansi Gowa ini dapat pula dihubungkan dengan Islamisasi daerah Sulawesi Selatan, karena Karaeng Matoaya adalah raja Gowa yang pertama masuk Islam pada tahun 1605. Di antara Tellumpocco E ini maka kerajaan Soppenglah yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Soppeng dan Gowa memerangi kerajaan Bugis lain yang belum Islam. Wajo kemudian menyusul dan akhirnya Bone juga masuk Islam pada tahun 1611. Usaha Gowa meluaskan hegemoninya kini dikaitkan dengan proses peng-Islaman di Sulawesi Selatan, sehingga solidaritas Bugis Tellumpocco E tidak seampuh solidaritas Islam. Soppeng yang merupakan anggota aliansi, setelah masuk Islam bersama Gowa turut mengislamkan Wajo, dan demikian juga ketika Wajo masuk Islam, mereka (Gowa, Soppeng dan Wajo) bersama-sama menyerang Bone supaya masuk Islam. Perang ini agak berbeda dengan perang sebelumnya yang dititik beratkan kepada hegemoni, karena ternyata ketika kerajaan yang ditaklukkan Gowa masuk Islam, kepada mereka tidak dituntut denda apa-apa. Hanya kepada raja-raja yang ditaklukkan, Mangkubumi kerajaan Gowa Karaeng Matoaya meminta mereka mengucapkan kalimat syahadat. Malahan kemudian Gowa menganjurkan agar Tellumpocco E ini tetap terpelihara dan supaya mereka memerangi kerajaan yang merugikan agama saja. Musuh yang datang dari seberang lautan supaya diserahkan kepada Gowa saja untuk menghadapinya.

Sayang sekali sesudah Karaeng Matoaya yang terkenal sangat alim dan saleh itu wafat, antara Gowa dan Bone kemudian timbul pertikaian lagi yang berakhir dengan keruntuhan Bone. Akibatnya adalah bahwa Aru Palaka (dari Bone) meminta bantuan Belanda yang sudah lama mengincar Ujungpandang untuk dimasukkan dalam cengkeramannya. Pada 18 Nopember 1667 Gowa harus mengaku kalah terhadap Belanda dan menandatangani perjanjian Bungaya yang terkenal itu.

2. Hubungan Kerajaan Dengan Negeri Asing

Dari berbagai sumber kita mendapat keterangan tentang hubungan kerajaan Indonesia dengan negeri asing. Juga dalam uraian di muka sudah pula disinggung tentang banyaknya pedagang-pedagang asing yang berlabuh bahkan bermukim di beberapa kota pelabuhan Indonesia. Pedagang-pedagang Cina, umpamanya, memang sudah lama berlayar di perairan Indonesia. Bukti-bukti tertua tentang hubungan tersebut sudah didapatkan dari jaman Dinasti Han. Banyak sumber Cina memuat berita tentang kunjungan duta dari kerajaan Indonesia yang mengantarkan persembahan ke negeri Cina. Tentang bagaimana caranya pengiriman duta dari sesuatu negara ke negara lain, kita ambil contohnya dari Hikayat Banjar. Hikayat Banjar menuturkannya sebagai berikut: "Raja hendak menggantikan berhala yang dibuat dari kayu cendana dengan patung berhala dari logam gangsa, akan tetapi di seluruh negeri tidak ada yang pandai membuat berhala gangsa. Hanya diketahui bahwa Cinalah yang bisa membuatnya. Maka diutuslah oleh sang raja seseorang yang bernama Wiramartas ke negeri Cina untuk meminjam tukang yang tahu membuat berhala gangsa itu, karena hanya Wiramartas yang tahu bahasa Cina. Demikianlah maka Wiramartas berangkat, "membawa intan sepuluh, membawa mutiara empatpuluh, membawa mirah empatpuluh, membawa biduri empatpuluh dan lilin empatpuluh pikul dan damar seribu kindai, pekat seribu galung dan air madu seratus gantang, orang hutan sepuluh ekor, serta membawa surat meminjam orang yang tahu membuat berhala gangsa". Duta Wiramartas selanjutnya dengan seperangkat barang persembahan tadi disertai 50 orang pengiring, dan sebagai duta ia memakai pakaian adat yang patut, lalu berangkat ke negeri Cina. Syahdan setelah beberapa lamanya berlayar dengan pergata, tibalah mereka di Bandar Cina dan segera mereka mengibarkan tunggul putih dan menghiasi kepala sebagai pertanda bahwa mereka membawa surat sebagai "suruhan raja besar". Ketika ditanya siapa gerangan yang datang dalam pergata itu, maka dijawablah "Ini suruhan raja Nagara Dipa, membawa layang serta bingkis pada raja Cina ini. Nama raja-dutanya Wiramartas". Maka mereka diterima dengan tembakan bedil serta bunyi-bunyian, yang dijawab oleh kapal dengan tembakan bedil pula. Kemudian setelah beberapa hari sang Duta bermukim di negeri asing dan diterima dengan upacara

negara, maka Wiramartas dihadapkan lagi kepada Raja dalam suatu upacara, surat jawaban untuk raja Nagara Dipa diserahkan dan diberikan kepadanya” orang ampatpuluh, pandai berhala sepuluh, kimka (brokat) merah sekodi, air mas sepuluh gandang, sawarna-warna sutra sepuluh gandang, pinggan sawarna-warna pinggan saribu, cupu sawarna-warna saribu-saribu, atal sepuluh pikul, manyan sepuluh pikul”. Semuanya adalah bingkisan untuk raja, untuk sang duta sendiri raja Cina memberi ”baju bertulis air mas dan kain sutra merah dan pedang jampun satu dan cindai ampat lembar. Para pengiring duta juga tidak dilewatkan begitu saja karena merekapun mendapat hadiah berupa pakaian kumplit jenis ”tapih cindai serta kain sarasah”.

Fragmen ceritera yang dituturkan di atas tadi yang memakai pula banyak ungkapan lama yang sangat sukar dimengerti maknanya, mungkin sekali tidak seluruhnya menyampaikan apa yang benar-benar telah terjadi. Meskipun demikian kita tetap dapat menarik keterangan daripadanya. Dari ceritera itu dapat kita gambarkan bagaimana sebenarnya orang-orang di Kalimantan Selatan pada waktu itu memikirkan tatacara yang layak untuk mengirimkan dan menerima seorang utusan raja. Bingkisan-bingkisan yang dihadiahkan itu sekaligus juga memberikan gambaran yang jelas tentang barang-barang penghasilan Kalimantan-Selatan (yakni intan dan emas, batu permata, hasil hutan seperti rotan, damar, madu, lilin, bahkan sampai binatang). Demikian juga bingkisan dari Cina sekaligus memberikan gambaran barang-barang perdagangan negeri Cina.

Soal pemberian bingkisan ini mengungkapkan aspek lain dalam hubungan antar-kerajaan. Melihat kenyataan bahwa bingkisan yang dibawa oleh duta negara asing selalu dibalas pula dengan memberikan bingkisan dari negara yang dikunjungi, dapat kita simpulkan bahwa pengiriman duta ke negeri asing selain untuk tujuan-tujuan politik juga ada aspek perdagangannya, yakni untuk memperkenalkan hasil produksi masing-masing. Sehingga misi diplomatik yang dikirimkan itu sekaligus juga bertindak sebagai misi dagang.

Biasanya pengiriman bingkisan bagi seorang raja dianggap sebagai persembahan upeti dari seorang raja vasal. Raja Cina juga menganggap kedatangan semua utusan yang menghadapnya sebagai penghormatan negara vasal. Bahwa raja-raja lain tidak menganggapnya demikian

itu sudah jelas. Walaupun begitu, keinginan negara-negara tetangga Cina, terutama yang berasal dari Asia Tenggara untuk mengirimkan duta, mempunyai segi politik pula. Hadiah-hadiah yang mewah seperti kain sutra, porselin dari negeri Cina dianggap suatu kebanggaan tersendiri dari negara yang bersangkutan dan ikut mempertinggi martabatnya di mata negara-negara tetangga. Aspek lain dari pengiriman duta ke negeri Cina ialah untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman negeri lain.

Kunjungan orang asing umumnya disambut dengan sikap curiga oleh raja-raja Indonesia. Contoh yang jelas ialah suatu kejadian di Maluku, ketika seorang nahkoda kapal Inggris bernama Francis Drake beserta kapalnya *Golden - Hind* berlabuh di pelabuhan Ternate. Mereka segera mengirim utusan ke darat dengan membawa beludru untuk raja sebagai tanda kunjungan damai. Sebaliknya mereka oleh kerajaan diberi bekal makanan, seperti ayam, tebu, ikan, beras, pisang, dan sebagainya. Walaupun hubungan ini berjalan baik, namun saling curiga-mencurigai masih tetap ada. Buktinya ketika Francis Drake diundang singgah ke kraton, ia tidak memenuhi undangan itu. Demikian pula ketika raja diundang untuk berkunjung ke kapal, undangan dari nahkoda itu tidak dipenuhi juga.

Kehadiran Portugis di perairan Malaka telah ditentang oleh penduduk, walaupun akhirnya kehadiran Portugis diterima sebagai suatu kenyataan. Pernah terjadi dalam sejarah bahwa ketika kerajaan Hindu di Jawa Barat dan kerajaan Blambangan merasa terancam oleh kerajaan Islam, mereka telah minta bantuan kepada Portugis. Setelah kerajaan-kerajaan Islam mulai menghadapi kekuatan Belanda, malahan mereka mencari persekutuan dengan Portugis. Pada tahun 1628 ketika Sultan Agung sedang mempersiapkan serangan ke Batavia, ditulisnya surat ke Malaka (Portugis) untuk minta bantuan. Walaupun bantuan itu tidak kunjung datang, tetapi permintaan serupa dikirimkan lagi oleh Mataram melalui bupati Japara pada tahun 1630.

Kedatangan misi Portugis ke Mataram pada tahun 1631 dicatat dalam babad. Utusan Portugis ini diberi pakaian kebesaran Jawa (dodotan batik), suatu kejadian yang jarang terjadi dengan utusan-utusan asing lainnya. Pada waktu itu Mataram sedang berselisih dengan Belanda, sehingga hubungan baik perlu dilakukan dengan

Portugis. Demikian juga Portugis saat itu sedang berselisih dengan Aceh, dan mereka menganggap perlu bersahabat dengan Mataram.

Malaka (Portugis) mengirimkan seorang duta istimewa bernama Jorge d'Acunha untuk memberitahukan kepada Mataram bahwa Portugis akan membantu menghalau Belanda dari pulau Jawa dan sementara menunggu kedatangan bala-bantuan, Portugis mengharapkan sejumlah besar pasukan Mataram untuk membantu Portugis. Sebenarnya saat itu Portugis sudah tidak mampu lagi untuk mengirimkan armada yang besar. Ketika pada tahun 1636 utusan Portugis tiba di Mataram dan sekali lagi mengulangi janjinya, reaksi Sultan Agung yang menerima utusan tersebut di hadapan para pembesar kerajaan hanya tertawa mengejek. Sebagai bingkisan balasan terhadap pemberian Portugis (yang terdiri dari lonceng, bedil, jubah, payung, budak wanita, permadani, mangkuk perak dan kain-kain), Mataram hanya membalas dengan pemberian berupa taring badak dan sebuah mangkuk mas, sehingga tidak memadai dengan hadiah-hadiah yang diterima. Dengan demikian jelas bagi Portugis bahwa Mataram tidak puas dengan janji-janji yang belum pernah ditepati. Surat balasan kepada raja-muda Portugis di Malaka dari Mataram singkat saja dan tidak disertai kalimat penghormatan. Surat tegas dengan ultimatum dari Sultan Agung kepada raja Portugis yang disertai bingkisan-bingkisan kecil menunjukkan jelas bagaimana sikap Mataram. Mungkin karena tidak yakin akan datangnya bantuan Portugis, Mataram mulai mencari hubungan dengan Belanda untuk menghentikan permusuhan.

Pada tahun 1630, sesudah ekspansi kedua untuk menyerang Batavia gagal, pengiriman utusan-utusan dari Mataram ke Batavia dimulai. Hasilnya tidak memuaskan dan sikap kedua belah pihak masih tetap diliputi permusuhan. Walaupun Jan Pieterszoon Coen dan pemimpin pasukan Mataram, Tumenggung Baureksa (dari Kendal), sudah sama-sama meninggal, ajakan damai dari Mataram belum dilayani secara sungguh oleh Belanda. Belanda hanya mengirim utusan bernama Peter Franssen dengan seorang pengiring, dan hal ini dianggap Mataram kurang layak sebagai satu utusan.

Maka Mataram menjawab dengan surat kepada Belanda bahwa misi perdagangan harus diberi wewenang penuh dan berkedudukan tinggi, kalau tidak, serangan ke Batavia akan menyusul. Pesanan

kepada Franssen dianggap Belanda sebagai ultimatum dan sebagai jawabnya mereka mengirim sebuah eskader yang terdiri dari 8 kapal dibawah pimpinan Pieter Vlack berangkat dari Batavia pada tanggal 16 Mei 1631. Awak kapal seluruhnya berjumlah kira-kira 700 orang dan tujuannya untuk merusak kapal-kapal Mataram yang dijumpainya. Maksudnya untuk mencegah Mataram dalam mengumpulkan persediaan beras dan sekaligus untuk membatalkan Mataram menyerang Batavia. Hasil ekspansi Belanda tidak banyak. Mereka yang datang di Japara tanggal 9 Juni 1631 tidak menghasilkan apa-apa, karena kapal-kapal Mataram sudah diselamatkan dan pertahanan Japara sangat baik, sehingga Vlack tidak jadi mendaratkan pasukannya.

Tentunya tindakan Belanda ini dianggap sebagai tindakan permusuhan sehingga ketika Belanda pada tahun 1632 mengirim utusan lain, masuk akal bahwa delegasi ini diterima dengan penuh kecurigaan. Duta sendiri tidak bersedia turun ke darat, sehingga surat yang dikirimkan Kompeni Belanda untuk Sultan Mataram diterima melalui dua pembesar Mataram, Putra Menggala dan Kartayuda. Pada waktu jawaban dari Sunan telah tiba di pelabuhan, utusan Belanda mengirimkan dua perahu dengan 24 Belanda ke darat untuk menerimanya. Rombongan Belanda yang turun ke darat tidak diizinkan kembali. Mereka dijadikan sandera dan dibawa ke ibukota. Dari berbagai peristiwa tersebut di atas jelas bahwa usaha untuk mengadakan perdamaian antara Mataram dan Belanda terhenti. Korespondensi melalui tahanan yang disandera terus dilakukan dan Mataram tetap minta supaya utusan Belanda yang datang harus yang layak dengan mandat penuh. Sebaliknya Belanda menuntut pembebasan sandera yang 24 orang itu sebagai syarat untuk dimulai perundingan damai. Sampai dengan Sultan Agung wafat (tahun 1645) keadaan tidak berubah.

Dari uraian di atas kita melihat pula bagaimana tatacara hubungan luar negeri waktu itu. Ketika Kompeni masih dalam keadaan lemah, ia masih menghormati tatacara yang berlaku dalam tukar-menukar duta.

Kekuasaan Belanda pada abad 17 dan awal abad 18 sedemikian kuatnya, sehingga usaha kerajaan-kerajaan Indonesia untuk bersekutu dengan kekuatan lainnya, seperti Portugis dan Inggris, tidak membawa hasil yang nyata.

B A B III

PELAYARAN, PERDAGANGAN, DAN PERKEMBANGAN KOTA

A. PELAYARAN

1. Tingkat Navigasi

Kita melihat bahwa sejak dahulu kala telah ada hubungan antar-pulau. Pengaruh budaya Hindu dan Buddha, kemudian penyebaran agama dan budaya Islam, demikian pula hubungan dagang serta hubungan antara kerajaan-kerajaan Indonesia yang tersebar di berbagai pulau, semuanya telah dimungkinkan oleh karena penduduknya telah memiliki sistim pelayaran yang telah maju. Hal ini bisa tercapai karena budaya bahari yang telah dikembangkan oleh penduduk Indonesia pada usaha itu didukung oleh kemajuan teknologi perkapalan, keahlian navigasi, serta jiwa berusaha yang pantang mundur. Setiap kegagalan disusul dengan usaha yang baru sampai akhirnya maksud dan tujuan tercapai juga. Demikian menonjol unsur kebaharian pada jaman itu sendiri, sehingga jaman itu dikenal pula sebagai jaman bahari.

Pengetahuan pelayaran dan perkapalan yang diperoleh sejak berabad-abad lamanya diteruskan dan dikembangkan secara turun temurun. Misalnya, pengetahuan tentang sistim angin setempat sehingga pelaut bisa memanfaatkan tenaga angin dalam perjalanannya. Penduduk daerah pantai mengetahui bahwa angin laut mulai bertiup pagi hari, sedangkan pada sore hari angin merubah haluannya sehingga akhirnya menjadi angin darat. Oleh sebab itu para nelayan berangkat kelaut pagi-pagi dan kembali ke kampung pada sore hari.

Tradisi bahari sudah lama menggunakan sistim angin muson yang menguasai wilayah Indonesia. Sistim angin muson ini disebabkan oleh lokasi Indonesia antara dua benua Asia dan Australia, masing-masing terletak di sebelah utara dan selatan khatulistiwa. Dengan demikian, apabila benua Asia mengalami musim panas, maka Australia mengalami musim dingin, atau sebaliknya. Musim panas di satu tempat menyebabkan udara yang rendah, sehingga menarik angin ke arah ini. Jika musim berubah menjadi musim dingin, maka angin berubah ke arah yang bertentangan.

Dengan memanfaatkan perubahan arah angin ini kapal-kapal berangkat dalam bulan Oktober dari Maluku ke pusat-pusat perdagangan Ujung Pandang, Gresik, Demak, Banten, sampai ke Malaka dan Aceh. Sedangkan dalam bulan Maret perjalanan pulang ke sebelah Timur dapat dilakukan lagi. Dalam bulan Juni sampai dengan Agustus angin di laut Cina Selatan bertiup ke arah Utara sehingga memudahkan pelayaran ke Negeri Cina. Angin mulai berubah haluan lagi pada bulan September, dan dalam bulan Desember sudah berbalik sedemikian rupa sehingga perjalanan ke Selatan dapat dimulai lagi.

Jadi dengan adanya sistim angin muson ini maka kepulauan Indonesia terlebih bagian sebelah barat berada dalam posisi istimewa. Kapal-kapal dari semua penjuru bertemu di sini, sehingga tidaklah mengherankan apabila kerajaan besar pertama berpusat di sini, Kedudukan ini sangat menguntungkan karena dapat menguasai tempat pertemuan jalan pelayaran dan perdagangan.

Di samping pengetahuan tentang sistem angin dan penggunaannya, para pelaut harus mengenal alur pelayaran yang aman (menghindari tebingkarang dan tempat-tempat yang dangkal), keadaan arus air dan lain-lain keistimewaan setempat. Kemahiran berlayar ini dibuktikan oleh laporan-laporan perjalanan pengunjung-pengunjung Eropa yang memerlukan bantuan mualim Indonesia dalam pelayarannya di perairan kita.

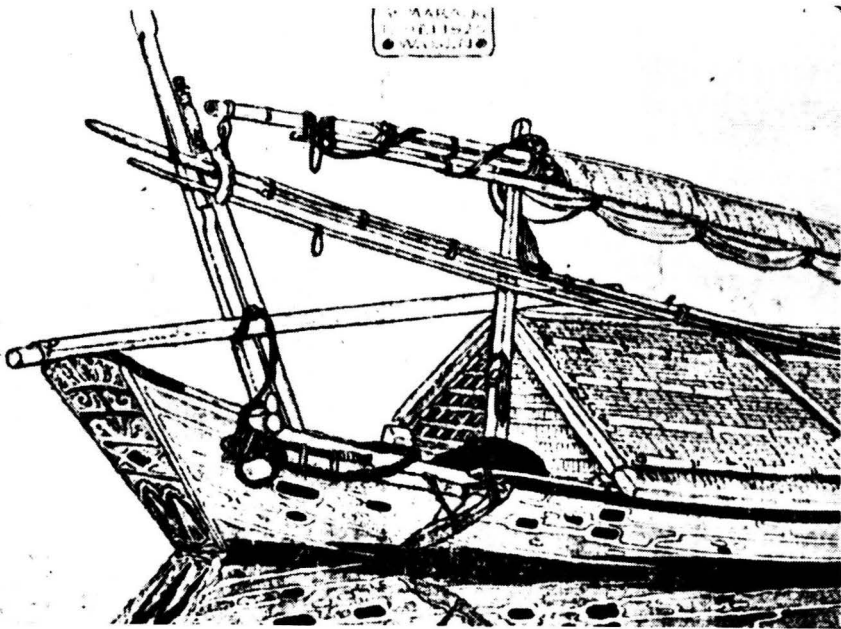
Peta-peta pertama yang dibuat di Eropa mengenai kepulauan Indonesia didasarkan atas pengetahuan yang diperolehnya dari pelaut-pelaut setempat. Ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa pelaut Indonesia pada waktu itu telah mengenal peta, meskipun demikian, pada waktu berlayar mereka tidak banyak memerlukan apa-apa atau peta-peta. Gunung-gunung yang tinggi serta tanjung dan pulau menjadi penunjuk jalan yang baik bagi mereka yang telah mengenalnya. Dan pada malam hari arah pelayaran dapat ditentukan dengan mengamati kedudukan bintang-bintang.

Alat-alat navigasi yang dipakai dalam kapal-kapal Eropa, seperti pedoman (kompas) dan astrolabe juga telah dikenal. Pedoman adalah alat untuk menentukan arah, dan astrolabe dipakai untuk menentukan posisi ditengah laut menurut pengukuran tinggi matahari. Bukti bahwa alat-alat ini telah dikenal dalam pelayaran di perairan kita

diperoleh dari laporan perjalanan Vasco da Gama, pemimpin ekspedisi Portugis yang pertama kali berhasil mengunjungi pantai Afrika Timur dan Asia Selatan. Ketika orang Portugis memperlihatkan alat-alat navigasi kepada pelaut-pelaut setempat mereka tidak menunjukkan keheranan, karena memang alatnya sudah dikenal mereka.

2. Teknik Perkapalan

Teknik pembuatan kapal pada jaman bahari ini telah mencapai taraf yang tinggi pula. Walaupun tidak ada peninggalan nyata pada masa ini, ada beberapa tulisan orang Portugis dan Belanda dari abad ke 16 dan 17 yang menunjukkan bahwa tingkat teknologi kapal pada waktu itu sudah maju. Dalam lukisan prasejarah yang terdapat pada dinding gua terdapat pula gambar sampan. Hiasan pada nekara perunggu juga ada yang berbentuk perahu. Tetapi masih sukar untuk menentukan jenis perahunya.



Contoh sebuah perahu

Data yang lebih banyak lagi ditemukan pada candi Borobudur yang berasal dari abad ke 8. Di sini tidak kurang dari sepuluh relief melukiskan perahu atau kapal. Ada tiga jenis yang diperhatikan, yakni (1) perahu lesung, (2) kapal besar yang tidak bercadik, dan (3) kapal besar yang mempunyai cadik.

Perahu lesung adalah sampan yang dibuat dari satu batang kayu yang dikeruk bagian dalamnya seperti lesung, tetapi dalam bentuk memanjang. Untuk memperbesar isi ruangnya maka dinding "lesung" ini ditinggikan dengan papan, sedangkan biasanya diberi cadik sebelah menyebelah perahu untuk menjaga keseimbangan. Penggunaan cadik adalah khas bagi jenis perahu dan kapal Indonesia dan Polinesia, suatu bentuk yang tersebar sampai ke pantai Afrika Timur dan pulau Madagaskar di sebelah barat dan ke pulau-pulau Polinesia di sebelah timur.

Selain kapal lesung, sudah dikenal pula jenis kapal papan. Jenis ini tidak tergantung pada sebuah batang kayu saja, sehingga kemungkinan untuk membuat kapal yang lebih besar tidak di batasi oleh besarnya batang kayu yang dipakai sebagai lunasnya.

Kapal yang besar pada relief Borobudur mempunyai dua tiang layar yang dimiringkan ke depan. Sedangkan layar yang dipakai pada jaman itu jelas berbentuk segi empat. Hanya di bagian buritan layar berbentuk segi tiga (layar sudu-sudu).

Dari naskah Portugis kita mendapatkan pula keterangan-keterangan mengenai pembuatan kapal, khususnya mengenai korakora Maluku Utara. Jenis kapal ini dibuat seringan mungkin, supaya bergerak dengan cepat dan lincah, jadi lebih banyak digunakan sebagai kapal perang atau mengangkut orang daripada untuk transport barang muatan. Kayu di bagian haluan dan buritan diberi hiasan. Ada haluan yang diukir seperti kepala naga, sedangkan bagian buritan menyerupai ekor. Kapal besar, menurut tulisan orang Portugis, bisa membawa 200 orang pengayuh pada tiap lambung, sehingga bila kapal sedang berlayar dengan gerak irama pendayung di sebelah-menyebelahnya kelihatan seperti lipan raksasa yang mengapung di laut. Kapal yang sebesar itu bisa memuat - selain pendayungnya - seratus "orang baileo". Mereka disebut demikian karena mereka menempati "baileo" yaitu tingkat atas atau geladak. Lantai geladak dibuat dari pada rotan,

ditutup dengan sebuah atap tikar untuk melindungi terhadap panas matahari, dan dibagi dalam beberapa bilik. Kalau kolano (raja) ikut berlayar, ia menempati bilik tersendiri, yakni semacam tenda bersegi empat. Pada setiap sudut tenda ini dikibarkan bendera dan hiasan dari bulu ayam dan burung beranekawarna. Bendera raja dikibarkan di tengah-tengah kapal.

Biasanya korakora tidak sebesar kapal tersebut tadi. Pada umumnya korakora hanya membawa 40 - 50 pengayuh dengan 25 orang baileo. Ada kapal yang lebih kecil lagi, seperti "rorehe" yang mempunyai 15 - 30 pengayuh dan 6 - 10 orang baileo.

Orang-orang Belanda yang tiba di Banten pada tahun 1596 menyaksikan pula berbagai jenis kapal dan perahu di pelabuhan Banten. Di antara gambar kapal-kapal Banten yang dilukiskan dalam salah satu jurnal dari ekspedisi Belanda yang pertama ini ada sebuah kapal yang menyerupai galai dengan dua tiang layar. Keistimewaan nya ialah serambi yang sempit, merupakan emperan yang mengikuti bagian buritan kapal. Ruang bawah hanya ditempati oleh pengayuh dan para budak. Tentara berada di atas geladak kapal supaya mereka dapat bergerak dengan lebih leluasa jika harus menghadapi musuh. Kapal ini juga mempunyai atap dari haluan sampai ke bagian belakang. Di bagian buritan ini terdapat anjungan untuk nakhoda. Ruang di bagian bawah dibagi-bagi dalam sejumlah petak untuk tempat barang-barang.

Sumber-sumber sejarah memberitakan pula bahwa kapal-kapal dibuat di galangan Indonesia. Ada pula yang dipesan dari Pegu (Birma Selatan) yang menghasilkan kayu jati yang baik. Tetapi sumber-sumber menyebut pula bahwa di daerah Lasem (di pantai Utara Jawa Tengah) menghasilkan perahu dan kayu yang baik. Daerah ini terkenal sebagai penghasil kayu jati pula. Pusat pembuatan kapal di bagian timur terdapat pula di Sulawesi Selatan dan kepulauan Kei. Di samping pusat-pusat tersebut ini tentu tidak boleh dilupakan bahwa di tempat-tempat lain rakyat setempat sanggup membuat kapalnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Kemajuan teknologi perkapalan disebabkan pula karena budaya bahari kita bisa menerima unsur-unsur asing yang disesuaikan menurut kepentingan sendiri. Pengaruh asing ini dilihat, misalnya, pada tiang -

kapal yang tidak didirikan tegak lurus melainkan agak miring ke depan – suatu ciri teknologi kapal Arab. Kata-kata seperti kelasi dan laksamana dan beberapa istilah maritim lainnya berasal dari bahasa Persia. Demikian pula dalam hikayat buku Banjar kita bertemu dengan nama jenis-jenis kapal yang berasal dari Eropa Barat, seperti gali (galley), galiung (galleon), galiut (galliot), dan pergata (fregate).

3. Pemilik dan Pelaksana Pelayaran

Untuk membuat kapal yang besar dan mengisi ruangnya penuh dengan barang dagangan, sudah tentu diperlukan modal yang tidak sedikit. Peranan raja dan pembesar kerajaan dalam menyediakan modal sangat penting. Sumber-sumber sejarah memberitakan bahwa ada kapal-kapal Malaka yang merupakan milik penuh dari sultannya. Ada pula kapal yang dimiliki bersama oleh orang-orang terkemuka (memang dikenal sebagai orang kaya).

Dalam hal ini nakhoda hanya bertindak sebagai pelaksana. Tetapi dalam beberapa hal nakhodapun mempunyai saham atas kapal yang dipimpinnya. Kata "juragan" bisa berarti pemilik maupun pemimpin kapal.

Nakhoda tidak menerima gaji, melainkan mendapat sebagian dari hasil penjualan barang muatan. Demikian pula awak kapal lainnya. Mereka menerima sebagian yang telah disepakati dari laba yang akan dihasilkan. Jumlah awak kapal tergantung dari pada besar kecilnya kapal. Sebuah "padewakkang" (kapal Bugis) yang berukuran sedang biasanya mempunyai 10 sampai 20 orang anak buah. Pemimpinnya disebut nakhoda (anakoda dalam bahasa Bugis dan Makasar). Ia mengepalai semua urusan yang berhubungan dengan kapal dan muatannya. Kapal yang mengadakan perjalanan yang jauh-jauh biasanya mempunyai dua nakhoda, yakni nakhoda laut (bertanggung jawab atas urusan pelayaran) dan nakhoda darat mengepalai perdagangan dan urusan-urusan lain selama berada di darat. Jurumudi bertanggung jawab atas kemudi, tempatnya di bagian belakang. Juru batu duduk di haluan. Ia bertanggung jawab atas sauh dan harus menjaga jangan sampai kapal menubruk karang atau menyentuh gosong. Apabila kapalnya besar, diperlukan dua orang juru batu, masing-masing untuk haluan kiri dan kanan. Mualim adalah pandu laut yang mempunyai keahlian navigasi. Dalam kapal yang berukuran

besar ia dibantu oleh seorang mualim kecil, jadi dalam hal ini ia dikenal pula sebagai mualim besar. Pembantunya bertugas untuk layar dan tali-temali kapal, dengan kata lain, ia harus mengetahui sistim angin. Oleh sebab itu mualim kecil ini bergelar pula mualim angin.

Semua petugas tersebut ini tergolong pimpinan kapal. Di bawahnya lagi terdapat golongan "menengah". Mereka disebut tukang. Para tukang dikepalai oleh tukang agung. Pembagian tugas adalah demikian : tukang tengah bekerja di bagian tengah kapal, tukang kiri dan tukang kanan kapal masing-masing membawahi pekerja di bagian kiri dan kanan kapal, tukang petak, mengawasi petak-petak tempat barang di ruang kapal. Ada pula tukang gantung layar, tetapi petugas ini berada langsung di bawah mualim angin.

Golongan paling bawah adalah awak kapal (dalam arti kata sempit) atau anak kapal. Mereka dikepalai oleh seorang kepala mandor yang disebut serang. Awak kapal ini bisa dibagi lagi dalam orang banyak (orang merdeka), orang abdi (budak), dan orang berhutang. Yang terakhir ini dianggap sebagai budak selama hutangnya belum dilunasi.

Kemudian ada pula sekelompok muda-muda, semacam "kadet" kapal yang ikut berlayar untuk mencari pengalaman. Mereka mendampingi nakhoda apabila ia turun ke darat, ikut mengawasi orang abdi, dan selama berlayar mereka membantu orang yang mendapat giliran jaga dan petugas yang bekerja di anjungan.

Syarat untuk menjadi nakhoda sangat berat, dalam hukum laut yang disusun oleh Amanna Gappa syarat-syarat ini telah diperinci. Amanna Gappa adalah seorang "matoa" pemimpin Bugis dari suku Wajo yang telah menghimpun para "matoa" Wajo dalam suatu pertemuan di Ujung Pandang pada abad ke-17 untuk menetapkan peraturan-peraturan pelayaran dan perdagangan.

Di antara syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nakhoda, hukum laut Amanna Gappa mengatakan bahwa nakhoda harus mampu mempersenjatai kapalnya, artinya ia harus sanggup mempertahankan kapalnya bila ada serangan. Ia harus tahu kekuatan dan kemampuan kapalnya. Ia harus rajin dan teliti dalam pelayaran. Para kelasi (dalam bahasa Bugis disebut "sawi") harus diawasinya dan diberi nasehat.

Kepentingan mereka harus dibelanya jika mereka benar. Ia tidak boleh jemu dalam memberi pelajaran tentang alat-alat pelayaran. Ia harus tahu sabar dan disegani oleh kelasinya. Ia harus jujur terhadap kelasi dan terhadap orang lain, terutama terhadap Tuhan. Akhirnya kepada nakhoda dikatakan bahwa ia harus mengetahui benar-benar tentang jalan pelayaran : "Jikalau ia tidak mengetahui jalan, dicarinyalah seorang penunjuk jalan, yang mengetahui benar-benar jalan pelayaran itu. Diupahkannya lah si penunjuk jalan itu, atau menolongkah ia dengan percuma, tergantung dari persetujuan mereka. Apa-apa saja yang mereka sukai, itulah yang menjadikan supaya terlaksana".

Hukum laut Amanna Gappa menyebut adanya empat macam orang kapal (sawi), yakni "sawi puli" (kelasi tetap), "sawi loga" (kelasi bebas), "sawi manumpang" (kelasi menumpang), dan "toma-numpang (orang yang menumpang).

Kelasi tetap merupakan awak kapal yang sebenarnya. Mereka dilarang meninggalkan kapal di tengah perjalanan. Jikalau kapal pulang dengan selamat, barulah mereka dibebaskan dari kewajiban ini. Selama berlayar mereka membantu dalam pekerjaan perbaikan bagian-bagian kapal yang rusak dan mereka wajib pula "timba ruang", yaitu menimba air dari ruang kapal. Kalau berlayar sebagai kelasi bebas, kewajiban-kewajiban ini, seperti timba ruang dan perbaikan-perbaikan tadi, tidak usah dipenuhi. Demikian pula bagi kelasi menumpang dan orang penumpang lainnya. Kalau berlayar sebagai penumpang saja, maka ia tidak boleh menempatkan barang-barangnya di dalam ruang, ia tidak berhak mengambil petak. Semua barang diletakan di atas-atas saja.

Apabila ada bahaya di tengah laut, maka semua barang muatan diperiksa. Kalau ternyata ada yang membawa muatan lebih dari yang diberi tahukan, maka yang lebih itu harus dibuang ke laut. Bila masih kesaratan, semua barang yang tidak berada di petak harus dibuang pula. Kalau masih perlu lagi, barang kelasi penumpang (di dalam petak) yang dibuang. Demikianlah berturut-turut. Kalau perlu sekali, barang muatan nakhodapun harus dikeluarkan dari kapal untuk menyelamatkannya.

Peraturan yang ditetapkan di bawah pimpinan Amanna Gappa menyebutkan pula bahwa kalau pemilik kapal tidak ikut bertayar dan hanya mengharapkan sewa kapal saja, maka penghasilan sewa kapal itu dibagi dua: separoh untuk pemilik, separoh untuk nakhoda bersama juru mudi dan juru batu. Adakalanya pemilik mengikutsertakan teman atau saudaranya dalam pelayaran yang bertugas sebagai jurumudi atau jurubatu. Dalam hal demikian sewa kapal dibagi tiga : dua bagian untuk yang empunya kapal, dan satu bagian dibagi sama oleh nakhoda, jurumudi dan jurubatu.

4 Jalan dan Pusat-pusat Pelayaran

Seperti telah diuraikan di atas, pelayaran pada masa ini – yang lebih banyak menggunakan tenaga angin – mengikuti arah angin muson dari timur ke barat, atau sebaliknya. Dengan jalan demikian rempah-rempah dari Maluku (terutama pala dan cengkeh) diangkut ke bagian barat, yakni ke pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara pulau Jawa, pantai timur Sumatra, dan Selat Malaka. Pada akhir abad ke-15 bandar Malaka merupakan pusat terpenting di daerah ini. Dari Malaka pengangkutan hasil-hasil dari kepulauan Indonesia diteruskan ke India, terutama Gujarat yang mempunyai hubungan dagang langsung dengan Malaka dan Sumatra pada waktu itu.

Pelayaran lebih ke barat melintasi laut Arab dan di sini jalan pelayaran bercabang dua: yang pertama memilih jalan Utara menuju Teluk Oman dan melalui Selat Ormuz ke Teluk Persia. Oleh sebab itu Syah Ormuz yang mengenal lalu lintas di selat yang senama ini sangat penting kedudukannya. Jalan kedua melalui Teluk Aden dan laut Merah. Kedua-duanya menuju wilayah laut – Mediteranea dan dari sini barang-barang dagangan dari Indonesia diangkut ke dunia Maghribi dan sampai ke Spanyol, Portugis dan pelabuhan-pelabuhan di laut Utara.

Melalui jalan ini kapal-kapal Arab, Persia, dan India telah mondar-mandir dari barat ke timur. Dari Malaka kapal-kapal menggunakan angin muson pula untuk mengunjungi Negeri Cina.

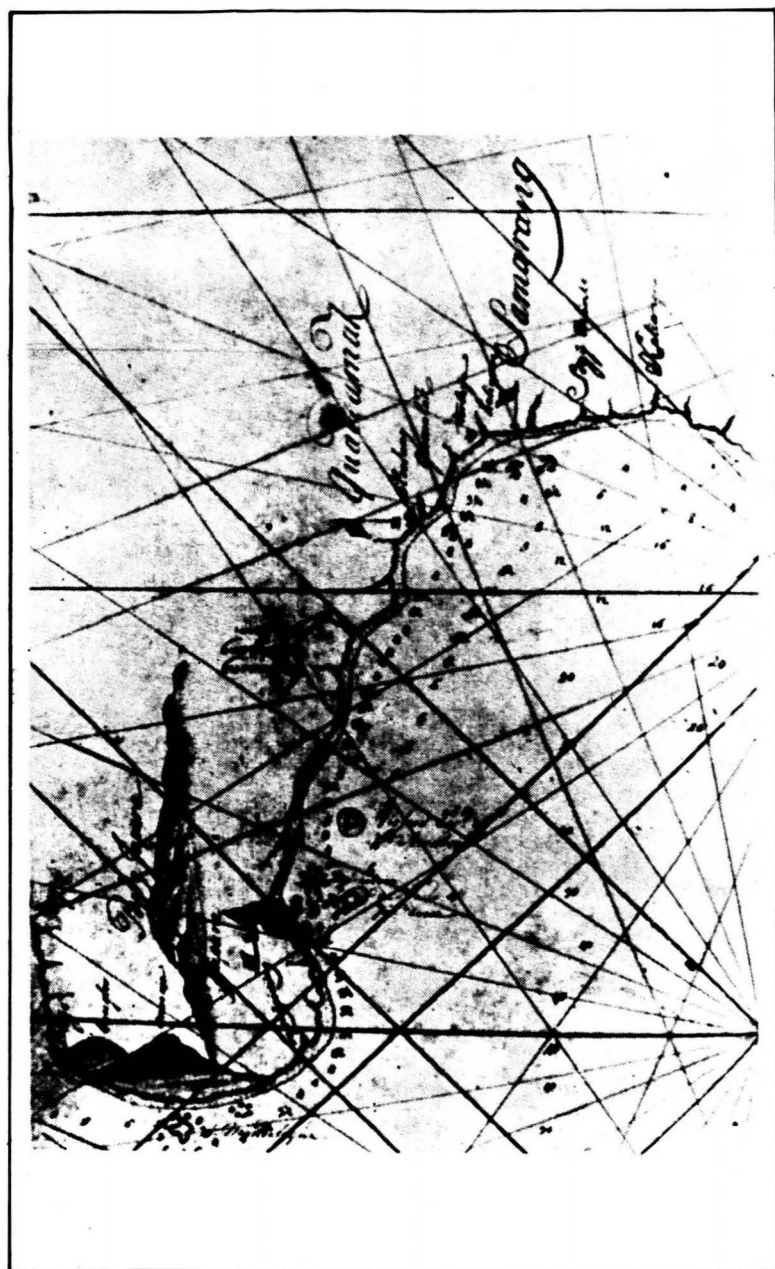
Hubungan yang baru dengan Eropa dicapai setelah orang Portugis berhasil melakukan pelayaran melalui ujung selatan benua Afrika. Hal ini terlaksana pada tahun 1498 di bawah pimpinan Vasco da

Gama. Ketika orang-orang Portugis berhasil menduduki Goa (1510) dan Malaka (1511), keadaan seolah-olah menguntungkan baginya. Mereka dapat menguasai pusat-pusat perdagangan penting dan jalan pelayaran internasional. Segala daya-upaya dikerahkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengalihkannya ke jalan pelayaran yang baru, yakni melalui Afrika Selatan.

Akan tetapi menurut perkiraan seorang pegawai Portugis pada tahun 1585, Aceh bisa mengexport antara 40.000 – 50.000 kwintal rempah-rempah setiap tahun ke Jedah, terutama dengan menggunakan kapal Gujarat. Ini berarti orang Portugis tidak berhasil menguasai seluruh perdagangan rempah-rempah. Sebab setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, pusat-pusat perdagangan baru, mulai bermunculan di daerah ini, yang terpenting adalah Aceh, Banten, Johor, Jambi, dan Brunai. Lebih-lebih Aceh dan Banten mengalami kemajuan besar, karena kapal-kapal memilih jalan pelayaran menyusur pantai barat Sumatra dan melalui Selat Sunda untuk menghindari kapal-kapal Portugis yang menjelajahi Selat Malaka.

Pada abad ke-16 telah berkembang pula jalan pelayaran yang baru, yakni antara Asia Tenggara dengan Amerika, khususnya dengan Mexico. Perjalanan lintas – Pasifik ini telah dipelopori oleh beberapa ekspedisi Spanyol. Yang pertama dilakukan di bawah pimpinan Magelhaes (1519–1521). Pada ekspedisi-ekspedisi pertama kapal Spanyol hanya dapat berlayar dari timur ke barat saja, semua usaha pelayaran untuk menyeberangi Samudra Pasifik dari barat ke timur menemui kegagalan. Baru pada tahun 1565 hal ini dapat dilaksanakan, dan sejak itu orang Spanyol mulai memikirkan untuk menduduki kepulauan yang mereka beri nama "Filipina". Pelayaran lintas – Pasifik diadakan setiap tahun, artinya satu kali dari Manila ke Acapulco (pelabuhan Mexico di pantai Pasifik) dan sekali dari Mexico ke Filipina. Ekspedisi tahunan ini dikenal sebagai *Manila Galleon* (Galai Manilla), dan sejak orang Spanyol berhasil mendirikan benteng di Maluku Utara (1606) sebagian hasil rempah-rempah Indonesia pun ikut diangkut oleh Galai Manila tersebut.

Pada awal abad ke-17 ini terjadi pula perkembangan baru dalam dunia pelayaran dan perdagangan Indonesia. Yakni setelah kapal-kapal Belanda muncul di perairan kita. Kapal-kapal ini tidak mengikuti



Peta Pelabuhan Jepara dan sekitarnya, abad ke 17.
 Sumber : De Vijt Gezantschapsreizen van Rijklop van Goens naar het hof van Mataram 1648 - 1654

jalan pelayaran Portugis yang memilih route sepanjang pantai timur Afrika lalu ke Srilangka dan India untuk kemudian masuk ke perairan Indonesia, atau route Spanyol melintasi samudera Pasifik. Kapal-kapal Belanda menyeberangi Samudera Indonesia langsung dari ujung selatan Afrika dan menuju ke Selat Sunda. Itulah sebabnya kota pertama yang dikunjungi Belanda pada ekspedisi yang pertama dan kedua (1596 dan 1598) adalah Banten. Kadang-kadang kapal-kapal Belanda ini berlayar dibawa angin terlalu ke timur, sehingga tidak sedikit kapal-kapalnya yang karam di pantai barat Australia.

Jalan pelayaran ke pantai utara Australia telah dibuka pula oleh pelaut-pelaut Bugis dan Makasar. Kita tidak mengetahui bilamana route ini diketemukan, namun ada bukti bahwa pada pertengahan abad ke 17 pelayaran Bugis dan Makasar ke Australia sudah dikenal.

Di samping jalan pelayaran internasional tersebut, sudah tentu telah diperkembangkan pula jalan pelayaran lokal yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia. Pada abad ke 17 ada berita-berita bahwa pelayaran Selat Makasar sering digunakan, dan kapal-kapal pribumi berlayar sampai ke pulau-pulau Sulu dan Manila. Juga pelayaran melalui pantai utara Kalimantan yang menghubungkan Malaka dengan Maluku, serta jalan pelayaran dari Maluku ke Irian, telah dikenal. **Selain perjalanan arah timur barat ini pelayaran lintas-Laut Jawa** yang menghubungkan pelabuhan pesisir Jawa (Tuban, Gresik, Jepara, dan lain-lain) dengan Kalimantan Selatan (Tanjungpura, Lawe, Banjar, dan lain-lain) telah dilaksanakan, malahan hubungan ini sudah ada pada jaman Majapahit dan jauh sebelumnya.

Route pelayaran orang Makasar dan Bugis pada abad ke-17 dapat direkonstruksikan dari buku hukum laut Amanna Gappa. Di sini disebutkan tempat-tempat tujuan pelayaran, sehingga kita mengetahui bahwa kapal-kapalnya mengadakan pelayaran sampai ke Aceh, Kedah, Kamboja, pulau-pulau Sulu, dan ke timur sampai ke Ternate dan pulau-pulau Kei.

5. Pelabuhan

Letak pelabuhan sangat menentukan pertumbuhannya. Ramai tidaknya pelabuhan tergantung dari berbagai faktor, diantaranya

yang penting adalah faktor ekologi. Pelabuhan bukan tempat berlabuh saja, tetapi tempat di mana kapal bisa berlabuh dengan aman, terlindung dari ombak besar, angin ribut, dan arus yang kuat. Tempat yang baik adalah di tepi sungai agak jauh ke tengah. Tetapi dalam hal ini lebar sungai membatasi perkembangan pelabuhan, oleh sebab itu banyak pelabuhan terletak di muara yang agak terbuka, atau di sebuah teluk.

Pelabuhan adalah penghubung antara daerah pedalaman dengan dunia luar. Pada masa lampau ketika jalan komunikasi dengan pedalaman hanya melalui sungai, maka letak pelabuhan di muara sungai sangat menguntungkan. Sebaliknya, tempat ini mempunyai kelemahan. Sebab tanah yang diangkut sungai dari daerah pegunungan mengendap di muara dan menciptakan timbunan dan gosong yang mendangkalkan muara, jadi merupakan penghalang bagi kapal-kapal besar.

Harus ada daya penarik besar terhadap pelabuhan supaya kapal-kapal dari luar mau mengunjunginya. Ada hubungan timbal-balik antara ramainya bandar yang memperdagangkan hasil pertanian dan kerajinan rakyat setempat dan jumlah kunjungan kapal yang menyinggahinya. Selain untuk menjual beli kapal-kapal datang pula untuk mengambil bahan makanan dan air minum untuk persediaan perjalanan yang jauh, atau untuk memperbaiki bagian-bagian kapal yang rusak.

Suasana bandar dan fasilitas-fasilitas yang disediakan di sini merupakan faktor yang sangat penting. Apabila bisa mendapat **keuntungan besar**, maka penghalang alamiah seperti batu karang, gosong pasir, muara yang dangkal, dan sebagainya, diatasi dengan mengirimkan perahu kecil, seperti yang dilakukan oleh perahu-perahu Cina yang mengunjungi Palembang pada abad ke-15, menurut berita Ma Huan. Dengan menggunakan perahu kecil pedagang Cina masuk ke sungai dan tiba di ibukota yang merupakan pusat dari daerah yang amat makmur yang apabila "padi dihamburkan untuk satu musim, dipetik hasil beras untuk tiga musim". Berita Ma Huan ini mengatakan pula bahwa pelabuhan Surabaya harus didatangi juga dengan perahu kecil. Berita dari Beaulieu, seorang Perancis yang mengunjungi Banda Aceh pada abad ke-17, menggambarkan betapa sulitnya kapal

mendekati pelabuhan, namun banyak kapal yang mengusahakan singgah ke Aceh.



Tanjung Priok, sekitar tahun 1753

Sumber : Dr. D.A. Rinkes (et-al), *Het Indische Boek der Zee*

Kalau sudah berhasil memasuki pelabuhan, maka kapal didatangi oleh syahbandar. Petugas ini merupakan pegawai terpenting dalam suatu bandar. Tugasnya adalah untuk mengawasi perdagangan, menjaga agar takaran dan timbangan dilakukan dengan baik, dan lain-lain. Misalnya, apabila tidak ada persesuaian paham antara nakhoda dan pedagang tentang pembelian, maka syahbandar yang menjadi penengahnya. Hubungan dengan pedagang-pedagang asing ini mengharuskan syahbandar menguasai bahasa asing. Tidak mengherankan apabila raja mengangkat syahbandar dari kalangan orang-orang asing itu sendiri, biasanya pedagang yang terkemuka dan paling berwibawa dan yang sudah lama bermukim di pelabuhan sehingga sudah mengenal keadaan dan adat-istiadat setempat. Sumber Belanda mengatakan bahwa syahbandar di Martapura (Kalimantan Selatan) pada tahun 1635 seorang turunan Gujarat, tetapi pada tahun 1692 jabatan ini dipegang

oleh seorang keturunan Cina. Di Jepara syahbandar pada tahun 1619 juga keturunan Cina, dan syahbandar di Banten pada tahun 1604 berasal dari tanah Keling. Di Malaka pada masa jayanya, perdagangan yang ramai mendorong Sultan untuk mengangkat empat orang syahbandar. Masing-masing mengawasi perdagangan dari satu wilayah. Ada yang khusus mengurus perdagangan Gujarat; seorang lain mengawasi perdagangan orang Keling, Benggala, Pegu, dan Pasai; seorang lagi untuk pedagang dari Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Brunai, dan Filipina; dan seorang untuk perdagangan dengan Negeri Cina.

Jadi peranan syahbandar sangat penting, terlebih karena ia harus menentukan jumlah bea cukai yang harus dibayar untuk dagangan yang keluar masuk pelabuhan, pajak timbangan, pajak berlabuh, dan lain-lain macam pajak dipungut. Adanya organisasi yang baik di pelabuhan membuat kapal-kapal asing sering mengunjunginya. Sebaliknya, apabila pelabuhan tidak beraturan lagi, maka kapal-kapal segan datang, seperti yang terjadi dengan pelabuhan Palembang dan Tuban pada abad ke-16.

B. PERDAGANGAN

1. Pola Perdagangan

Kerajaan-kerajaan Indonesia dapat kita golongan dalam dua jenis: kerajaan pedalaman yang mempunyai masyarakat yang sebagian besar hidup dari pertanian, dan kerajaan pesisir yang kehidupannya berdasarkan pada perdagangan dan pelayaran. Sultan Agung dari Mataram (1613-1645) mengatakan bahwa Sultan Banten adalah seorang pedagang, dan Beaulieu (pelaut Perancis) yang berada di Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda mengatakan pula bahwa Sultan adalah pedagang. Ucapan-ucapan ini tidak berarti bahwa sultan sendiri melaksanakan perdagangan. Ia bersama keluarganya hidup dari perdagangan, tetapi yang melaksanakannya orang lain. Menurut sumber Portugis (dari Tome Pires), raja-raja Pahang, Kampar dan Indrapura mempunyai kantor dagang di kota Malaka.

Kecuali raja, pembesar-pembesar kerajaan pun mendapat keuntungan dari perdagangan. Mereka ini menyediakan modal atau

menyediakan barang untuk diperjual-belikan. Pada waktu kota Malaka baru saja jatuh ke tangan Portugis, kapal-kapal Portugis berhasil menangkap sebuah kapal milik sultan Malaka, yang antara lain membawa barang dagangan kepunyaan sultan, terutama terdiri dari tenunan Kurmandel yang ditaksir berharga antara 12.000 sampai 15.000 *cruzados*. Selain kain dagangan milik sultan, kapal tersebut membawa pula kain kepunyaan pedagang-pedagang Kurmandel yang berdiam di Malaka.

Jikalau perdagangan dilaksanakan ke daerah seberang laut, biasanya barang dagangan dititipkan kepada nakhoda. Kemudian diperhitungkan keuntungan atas dasar bagi-laba. Masing-masing menerima sebagian sesuai dengan sahamnya. Perjanjian tentang bagi-laba ini biasanya dikukuhkan secara tertulis.

Sumber Portugis mengatakan pula bahwa ada pedagang yang mengikuti kapal. Mereka disebut "kiwi" dan tidak diwajibkan untuk membantu dalam pekerjaan berlayar, tetapi hanya ikut untuk kepentingan dagang. Pemimpinnya disebut "maula kiwi".

Seperti dikatakan di atas, barang dagangan ditempatkan dalam petak. Pembagian petak juga diatur menurut hukum laut Melayu. Dalam hal ini nakhoda dan pemilik kapal mendapat prioritas. Kemudian para kiwi diberi petak, tetapi tidak boleh melebihi 7 atau 8 petak. Mualim berhak mengambil $\frac{1}{2}$ petak, tetapi ia boleh juga memberi uang kepada nakhoda sebagai penambah modal berdagang. Kalau mualim meninggalkan kapal sebelum perjanjian ditepati, ia harus membayar uang tebusan, sedangkan nakhoda tidak usah membayar bagian hasil yang diperoleh dari modal yang ditambah oleh mualim. Awak kapal lainnya tidak berhak mengambil petak.

Peraturan ini menetapkan pula urutan daripada perdagangan. Apabila kapal tiba di pelabuhan, maka nakhoda mendapat giliran pertama untuk menawarkan dagangannya selama empat hari. Sesudahnya para kiwi diberi kesempatan berdagang selama dua hari, kemudian baru awak kapal lainnya diperbolehkan berdagang. Tetapi harga yang diminta tidak boleh melebihi harga yang diminta nakhoda.

Dalam hukum laut Amanna Gappa tertera pula beberapa macam perjanjian perdagangan. Ada jenis perjanjian yang disebut "berkongsi sama banyak". Dalam cara berdagang demikian pedagang dan pemilik

barang atau pemilik modal memikul bersama untung-ruginya. Tetapi kerugian yang dipikul bersama hanya terbatas pada tiga kemungkinan, yaitu (1) barangnya rusak di laut, (2) dimakan api, (3) dicuri orang. Dalam hal-hal lainnya, seperti diperjudikan atau dipinjamkan kepada orang lain, maka kerugian harus ditanggung oleh pedagang sendiri.

Ada pula jenis perjanjian yang menetapkan bahwa dalam hal kerugian yang mempunyai barang yang menanggungnya. Jadi risiko terbesar dipikul oleh pemilik barang. Tetapi jika berhasil dan mendapat untung, maka duapertiga laba jatuh ke tangannya sedangkan pelaksana hanya menerima sepertiga bagian saja.

Peraturan Amanna Gappa menetapkan pula cara-cara menyelesaikan hutang-piutang. Apabila yang dipinjam berbentuk uang, uang juga yang harus dibayar kembali. Kalau yang dipinjamkan barang jualan, maka haruslah dilunasi dengan barang jualan juga. Selanjutnya naskah tersebut mengatakan bahwa "Jikalau uang yang dipinjam dan jualan yang dibayarkan, maka itu atas putusan orang penengah yang menaksir harga barang itu. Jikalau jualan yang dipinjam dan uang yang dibayarkan, maka itu tergantung pada persetujuan mereka". Apabila jualan yang dipinjamkan dan yang diterima kembali berlainan jenis, maka harus diselesaikan menurut persepakatan. Penyelesaian seperti ini dikiaskan bagaikan seorang anak yang diberi berbaju sempit tetapi tidak sampai robek.

2. Jenis Barang Dagangan

Usaha dagang dahulu dan sekarang harus berani menanggung risiko. Lebih-lebih lagi pada masa lampau ketika perdagangan seberang lautan hanya berharap kepada tenaga angin. Perjalanan dagang memerlukan waktu berbulan-bulan lamanya. Apabila penjualan terlambat dijalankan sehingga tidak sempat lagi menggunakan angin muson, terpaksa pedagang harus menunggu sampai musim yang berikut. Angin ribut, bajak laut, dan banyak macam bahaya yang harus dihadapi pedagang untuk mendapat hasil yang diharapkannya. Petak dalam ruang kapal sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan pedagang membawa barang dalam jumlah besar-besaran. Oleh sebab itu biasanya barang yang dibawa tidak memerlukan ruangan besar tetapi berharga mahal. Misalnya, matauang, emas dan perak, batu

permata, kain sutra, kemenyan, dan barang porselin. Sekalipun demikian, ada pula kapal yang membawa muatan yang mengambil tempat yang luas dan tidak begitu mahal harganya, seperti beras, garam, kapas, rotan, tembakau, gambir, agar-agar, dan kayu.

Pada awal abad ke-16 Banda mengimport kain dan tenunan halus dari negeri-negeri Asia bagian barat yang diangkut oleh kapal Portugis. Pedagang dari Jawa dan Tanah Malayu membawa tenunan kasar. Tetapi, menurut catatan Portugis, raja Gresik juga memborong kain halus dan sutra yang didatangkan dari sebelah barat dan Negeri Cina ke pelabuhannya, dengan maksud untuk mengexportnya kembali ke Banda dan tempat-tempat lain di Maluku. Kain-kain halus dipakai oleh raja dan kaum bangsawan, tetapi rakyat pun membelinya untuk dijadikan sebagai harta pusaka yang disimpannya bersama dengan tembaga, gading, dan tembikar halus. Tenunan kasar sangat laku di Banda karena bisa ditukar dengan rempah-rempah dan sagu. Sagu sangat penting, bukan hanya sebagai makanan orang Maluku, tetapi untuk dibawa dalam perjalanan yang jauh-jauh. Sebab sagu bisa disimpan untuk waktu yang lebih lama daripada bahan makanan lain seperti beras. Pada abad ke-16 sagu dianggap begitu penting di Banda sehingga dipakai pula sebagai standard jual-beli. Dalam abad kemudian sumber-sumber mengatakan bahwa lada dipakai sebagai standard bayaran.

"Barang dagangan" yang penting pula pada waktu itu adalah budak belian. Mereka dipakai sebagai buruh kasar di pelabuhan, sebagai pendayung kapal, dan sebagai pekerja di perkebunan rempah-rempah. Ada juga yang dipekerjakan di istana raja dan rumah-rumah bangsawan. Pemilik budak sudah tentu termasuk golongan hartawan, karena selain harganya seorang budak mahal, ia harus mampu memberi makan secukupnya. Oleh sebab itu pemilikan budak berhubungan erat dengan kedudukan (status) seseorang di masyarakat.

Orang bisa menjadi budak karena kalah perang. Ada juga yang menjadi budak karena tidak sanggup membayar hutangnya sehingga untuk menebus hutangnya ia memperhambakan dirinya sebagai budak. Anak seorang budak dianggap sebagai budak juga. Tetapi pada umumnya budak-budak diambil dari tanah pedalaman, terutama dari sukubangsa yang dianggap "terbelakang". Sering kali diadakan

ekspedisi ke pedalaman untuk mengambil (menculik) budak. Juga diadakan ekspedisi laut, dan banyak budak yang berasal dari hasil pembajakan laut ini.

3. Tempat Penghasil Barang Perdagangan

Pada halaman-halaman di atas telah disinggung beberapa tempat yang menghasilkan barang export untuk perdagangan internasional maupun perdagangan lokal. Perdagangan internasional pada waktu itu terutama berkisar pada perdagangan rempah-rempah. Lada dihasilkan dari pulau Sumatra dan Jawa, pala dari Maluku Tengah, cengkeh dari Maluku Utara. Pelabuhan di pesisir utara pulau Jawa berfungsi sebagai tempat pengumpulan beras dari daerah pedalaman-nya untuk diangkut ke Malaka di sebelah barat dan ke Maluku di sebelah timur.

Bahan export lain yang penting pula ialah kayu-kayuan dan hasil hutan, seperti damar, madu, dan sebagainya. Kayu cendana dari Nusatenggara, kayu gaharu dan kelembak dari Sumatra dan Kalimantan, kayu besi dan kayu hitam dari Sulawesi dan Maluku, kayu jati dari Jawa.

Pada waktu jalan laut menyusur pantai barat Sumatra menjadi penting (sesudah Malaka diduduki Portugis), Tikus dan Pariaman di pantai ini muncul sebagai penghasil lada yang penting. Perluasan perkebunan lada disebabkan oleh karena kebutuhan di pasaran dunia meningkat. Hal demikian dapat kita lihat di Banten pula. Kalau permintaan lada bertambah, penduduk mengalihkan pertaniannya kepada penanaman lada. Sebaliknya, kalau permintaan berkurang, penduduk menanam bahan makanan. Ketika Belanda mengadakan blokade terhadap Banten sehingga kapal pedagang lada yang datang mulai berkurang, maka penduduk menanam padi. Malahan ada yang mulai menanam tebu karena gula bisa dijual kepada orang Inggris yang berdiam di Banten.

Jambi merupakan pusat perdagangan lada pula. Petani lada di pegunungan tanah Minangkabau membawa hasil kebunnya dengan perahu ke Jambi. Biasanya antara 100 dan 150 perahu kecil datang dari pedalaman setiap tahun, masing-masing membawa 150 pikul lada.

Hasil pertambangan yang telah dikenal adalah timah dari Bangka dan Belitung. Emas dan intan terdapat pula di pulau-pulau besar walaupun tidak dalam jumlah besar-besaran, seperti Sumatra dan Kalimantan. Raja-raja Ternate dan Tidore mendapatkan emas dari Sulawesi Utara, tetapi pada abad ke 17 pelaut Bugis, Makasar dan Mandar sudah menjadi saingan yang besar di daerah ini.

Pada abad ke-17 mulai dirasakan pengaruh dari kehadiran pedagang-pedagang Eropa, terutama Belanda. Sebab mereka hendak memaksakan hak perdagangan tunggal (monopoli), malahan pelayaran hendak dikuasainya. Di tempat-tempat yang telah didudukinya diadakan larangan berdagang dengan pedagang asing lainnya, hanya boleh berdagang dengan Kompeni Belanda. Kapal-kapal pribumi yang keluar berlayar diharuskan membawa pas izin berlayar. Modal Kompeni Belanda (VOC) yang lebih besar yang ditunjang oleh teknologi perkapalan yang maju, dan organisasi perdagangan yang baik dan teratur, terlebih pula persenjataan yang lengkap, menyebabkan usaha-usaha Belanda bisa berhasil. Mereka juga bisa memanfaatkan persaingan dan perpecahan antara kerajaan-kerajaan pribumi sehingga akhirnya hak monopoli perdagangan dapat dipaksakannya di beberapa tempat yang penting, terutama di Malaka, di pantai utara pulau Jawa, di Ujungpandang, dan di Maluku.

C. PERKEMBANGAN KOTA

1. Kota dan Corak Kehidupannya

Jika kita memperhatikan kota-kota pusat kerajaan bercorak Islam, maka pada umumnya letaknya di pesisir atau di muara sungai besar. Sebagai contoh dapat dikemukakan ibukota kerajaan Demak, Banjar, Cirebon, Banten, Malaka, Samudra-Pasai, Aceh, Ternate, Tidore, Gowa (Makasar). Semuanya terletak di pesisir atau di muara sungai. Kota-kota tersebut merupakan pusat dari kerajaan yang bercorak maritim. Kerajaan yang mempunyai ibukota di pedalaman menitikberatkan penghasilannya pada pertanian, seperti kerajaan Pajang dan Mataram. Antara dua corak kerajaan, yang agraris dan yang maritim, akan terlihat perbedaan dalam sistim ekonomi dan pertahanannya.

Masyarakat kota dari pusat kerajaan yang bersifat maritim menggantungkan kehidupannya kepada perdagangan dan pelayaran. Mereka menitikberatkan sistim pertahanannya kepada kekuatan angkatan laut. Sebaliknya, masyarakat agraris menitikberatkan kegiatan sehari-hari kepada pertanian, sedangkan kekuatan militernya lebih mereka pentingkan angkatan darat. Suatu corak kerajaan yang merupakan perpaduan dari segi maritim-agraris ialah kerajaan Majapahit.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota-kota pusat kerajaan di Indonesia. Kota-kota yang terletak di pesisir dan di muara sungai biasanya sangat penting sebagai pusat lalu lintas. Pada waktu itu hubungan lalu lintas melalui sungai atau laut dengan mempergunakan perahu atau kapal layar dianggap lebih tepat, cepat, dan mudah. Karena faktor perdagangan, hubungan antar-kota ini menjadi lebih ramai.

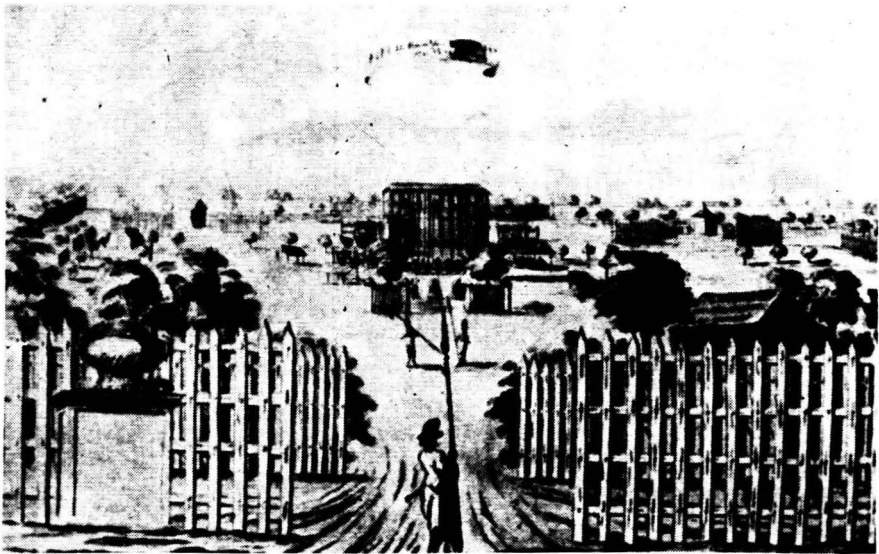
Di samping faktor ekonomi, keadaan politik juga ikut menentukan pertumbuhan dan perkembangan kota. Kita lihat, misalnya, kota-kota yang terletak di pesisir utara pulau Jawa. Demak muncul sebagai kota pusat kerajaan, antara lain, karena jasa Raden Patah yang berhasil menghimpun kekuatan masyarakat yang akhirnya dapat menundukkan Majapahit.

Kota Cirebon baru muncul pada abad ke-16 bersamaan dengan perkembangan agama Islam di Jawa Barat. Tokoh besar dalam penyebaran Islam ialah Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Pada masa berdirinya, Cirebon hanya sebuah pelabuhan kecil, tetapi kemudian dapat tumbuh menjadi kota pusat kerajaan.

Hampir bersamaan dengan tumbuhnya Cirebon, telah muncul pula kota-kota pelabuhan lainnya di Jawa Barat, yakni pelabuhan Jayakarta dan Banten. Memang sejak masa kerajaan Sunda-Pajajaran, pelabuhan Sunda Kalapa dan Banten juga telah cukup ramai, tetapi keduanya berkembang dengan lebih pesat lagi sejak berdirinya kerajaan Islam.

Pertumbuhan beberapa kota sebagai pusat kerajaan tidak dapat dilepaskan pula dari faktor yang berhubungan dengan kosmologi dan kepercayaan magis-religius masyarakatnya. Unsur kepercayaan ini

dapat kita ketahui dari beberapa babad dan hikayat tua. Menurut Babad Tanah Jawi tumbuhnya kota kerajaan Demak di Bintara ialah atas petunjuk Sunan Ampel kepada Raden Patah. Dalam sejarah Wajo dikatakan bahwa pusat kerajaan Wajo ada hubungannya dengan ceritera seorang raja dari Soppeng yang berhikmat di bawah sebuah pohon yang keramat, yaitu tempat putrinya dimakamkan. Ada juga yang menghubungkan pertumbuhannya dengan tiga orang pendirinya, anak-anak raja dari kampung Cinnotabi, keturunan dewa. Kota pusat Nagara Dipa di Kalimantan Selatan (sebelum Islam), menurut Hikayat Banjar, didirikan atas petunjuk Saudagar Mangkubumi kepada anaknya, Ampu Jatmaka. Setelah ia menjumpai tanah yang rasanya hangat dan harum, barulah pusat kerajaan Nagara Dipa didirikan.



Kraton Jogya di Jawa

Cara penempatan kraton atau istana sebagai pusat dari sebuah ibukota kerajaan juga dihubungkan dengan hal-hal kepercayaan tradisional. Kraton pada umumnya menghadap ke utara. Di hadapannya terdapat alun-alun, di sisi luar sebelah barat alun-alun terdapat mesjid, dan di sebelah timur alun-alun terdapat pasar. Contoh letak

kraton semacam ini dapat dilihat pada kraton Cirebon, Banten, dan Mataram.

Bangunan-bangunan yang berada di dalam kraton dipisahkan dari bangunan lainnya oleh sebuah tembok keliling, parit atau sungai buatan. Untuk mencapai tempat yang terpenting, yang biasanya dinamakan "dalem" di Jawa atau "dalam" di Aceh, tidak mudah. Karena halaman-halaman diberi batas dengan tembok atau pagar pemisah, yang dapat dimasuki hanya melalui pintu gerbang saja. Susunan halaman sampai ke bagian yang dinamakan "dalam" itu biasanya ada tiga lapis. Hal ini mengingatkan kita kepada tradisi seni dari zaman akhir Indonesia-Hindu, yakni dalam pembuatan kompleks candi-candi, dan juga bangunan pura di Bali.

Di dalam kota, selain kraton, terdapat pula tempat beribadah, pasar, bangunan untuk para pejabat, dan perkampungan-perkampungan. Pembagian perkampungan ini didasarkan atas status sosial, ekonomi, agama, dan juga atas dasar kedudukan dalam pemerintahan. Selain itu masih ada perkampungan yang khusus untuk orang asing. Tempatnya ditentukan oleh penguasa kerajaan. Kota Malaka, misalnya, mempunyai kampung-kampung khusus untuk pedagang dari Gujarat, Kurmandel, Persia, Arab, dan Cina. Juga terdapat perkampungan untuk orang-orang yang berasal dari Kepulauan Indonesia. Kota-kota pelabuhan di Aceh, Gowa, Banjarmasin, dan Banten juga mempunyai kampung untuk orang asing. Sekitar abad 17 kota Banten mempunyai perkampungan yang khusus untuk orang asing dan orang dari luar Banten, seperti Melayu, Ternate, Banda, Banjar, Bugis, dan sebagainya. Perkampungan semacam ini ada yang ditempatkan di dalam pagar tembok kota dan ada pula yang terletak di luarnya.

Di samping itu ada perkampungan yang tidak didasarkan atas jenis bangsa yang mendiaminya, tetapi atas jenis pekerjaan penghuni kampung. Misalnya, kampung Panjunan dimaksudkan untuk kelompok penduduk yang khusus bekerja membuat gerabah. Kampung Sunggingan khusus untuk penduduk yang pekerjaannya mengukir. Kademangan adalah tempat tinggal pejabat tingkat demang beserta keluarganya. Ksatria adalah tempat para senapati, perwira, dan prajurit istana. Di bidang keagamaan, para ulama dan para santri mempunyai perkampungan sendiri yang dinamakan kampung Kauman.

Ada kota yang mempunyai tembok-keliling. Berita Portugis dari abad 16 mengatakan bahwa Tuban mempunyai pagar tembok dari batu bata, tetapi berita Cina dari abad sebelumnya mengatakan bahwa Tuban, Gresik, dan Surabaya tidak atau belum dikelilingi tembok. Brunai, menurut berita Cina, adalah kota yang mempunyai pagar keliling yang dibuat dari kayu dan batu. Berita Cina dari Dinasti Ming (1368-1644) mengatakan bahwa kota Banjarmasin memiliki pagar keliling yang terbuat dari kayu, dan salah satu sisinya terletak di pinggir sebuah bukit. Malaka mempunyai tembok keliling dengan empat pintu gerbang. Masing-masing pintu gerbang diberi menara penjaga. Kota Tidore pada abad 16 diberi pagar tembok, parit, benteng, dan lubang perangkap, sehingga sukar dimasuki musuh dari sisi manapun juga (menurut berita Portugis). Menurut catatan Belanda (tahun 1596) kota-kota yang berpagar tembok dari batu bata adalah Banten, Cirebon, Demak, dan Tuban. Ada juga kota dengan pagar dari kayu atau bambu, seperti Jayakarta, Japara, dan Blambangan.

Pagar keliling kota erat hubungannya dengan sistim pertahanan. Dengan memiliki tembok, maka kota sekaligus berfungsi seperti benteng. Di samping itu pintu gerbang kota dimanfaatkan untuk memungut bea-cukai dari para pedagang yang mau memasuki kota.

2. Jumlah Penduduk Kota

Dari sumber-sumber sejarah yang serba terbatas, kita belum bisa memastikan berapa jumlah penduduk kota-kota pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Catatan-catatan yang bersifat statistik dan angka-angka sensus belum lazim digunakan. Jumlah penduduk yang akan dikemukakan di sini sudah tentu berdasarkan perkiraan saja yang didasarkan atas berita-berita asing serta babad dan hikayat yang mencatat jumlah penduduk kota menurut perkiraan pula.

Dari catatan Tome Pires kita memperoleh keterangan tentang jumlah penduduk beberapa kota. Kota Pasai dikatakannya berpenduduk 20.000 orang. Jumlah ini sebenarnya tidak terlalu berlebihan, apabila kita membandingkan dengan berita Portugis lain yang mengatakan bahwa di dalam kompleks kraton saja sudah terdapat 3000 penghuni.

Kota Palembang yang pada waktu itu berada di bawah pengaruh Demak, menurut Tome Pires, berpenduduk 10.000 orang. Kota Demak sendiri dikatakan mempunyai penduduk antara 8.000 dan 10.000 keluarga, jadi bisa berjumlah seluruhnya antara 40.000 dan 50.000 jiwa. Sedangkan kota Cirebon pada awal abad 16 itu baru berjumlah 1.000 keluarga saja, atau kira-kira antara 4.000 dan 5.000 orang.

Tuban pada masa Tome Pires berpenduduk 1.000 orang. Kira-kira satu abad sebelumnya, yaitu tahun 1430, jumlah penduduk Tuban, Gresik, dan Surabaya bersama-sama kira-kira 1.000 keluarga, atau 4.000-5.000 orang. (Kalau dipukul rata masing-masing mempunyai penduduk sekitar 1.500 orang). Tetapi pada tahun 1523 penduduk Gresik saja sudah dikatakan mencapai 30.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk kota Gresik pada abad ke 16 ini jelas ada hubungannya dengan kedudukannya sebagai kota pelabuhan yang banyak dikunjungi pedagang.

Ternate oleh Tome Pires belum disebut sebagai kota, melainkan sebagai desa yang besar. Penduduknya lebih kurang 2.000 orang, orang-orang Islam hanya kira-kira 200 orang. Perkiraan jumlah 2.000 orang ini tidak begitu jauh dari catatan Portugis duapuluh tahun kemudian (dari Antonio Galvao) yang mencatat bahwa penduduknya tidak lebih dari 2.000 orang. Tetapi meskipun demikian, kata Galvao, ini tidak berarti bahwa kerajaan tersebut kurang penduduknya.

Sangat menarik perhatian kita bahwa dari kerajaan Banten kita mempunyai angka-angka sensus penduduk dari abad ke 17, yaitu khusus tentang penduduk kota Surosowan. Sensus yang diadakan pada tahun 1694 M pada masa pemerintahan Sultan Abdul Mahasin Jenul Ngabidin mencatat bahwa jumlah penduduk kota Surosowan adalah 31.848. orang. Pada tahun 1708 diadakan perhitungan penduduk lagi dan menghasilkan 36.302 orang. Jadi dalam kurun waktu 12 tahun tidak ada tambahan penduduk yang berarti.

Kota Surabaya pada awal abad ke 17 berjumlah lebih kurang 50.000-60.000 jiwa. Jika dibandingkan dengan angka pada abad ke-15, maka penduduknya menunjukkan pertambahan kira-kira enam kali.

Catatan Belanda dari abad ke 17 memberi banyak data tentang jumlah penduduk beberapa kota di Jawa. Berita ekspedisi Hurd dari Japara ke Kediri pada tahun 1678 telah mencatat jumlah penduduk beberapa tempat antara lain: Kaduwang (di selatan gunung Lawu) berpenduduk 500 cacah, pada hal sebelum tahun 1678 pernah tercatat penduduknya sebanyak 2.000 cacah; Panaraga mempunyai 5.000 cacah, sedang sebelumnya pernah tercatat 12.000 cacah; selanjutnya Caruban 600 cacah, Blitar 2.000 cacah, dan Malang 2.000 cacah.

Mengenai penduduk Aceh pada abad 17 ada catatan dari Thomas Bowrey. Ia mencatat bahwa di kota Aceh terdapat 7.000 – 8.000 rumah yang diperkirakan seluruhnya mempunyai antara 35.000 – 40.000 jiwa. Penduduk kerajaan Aceh sangat banyak, sehingga pada waktu Sultan Iskandar Muda hendak berperang ia dikatakan berhasil menghimpun tentara sejumlah 40.000 orang.

Francois Valentijn, penulis Belanda pada awal abad 18, telah mencatat penduduk beberapa tempat di Sulawesi. Ia mengatakan bahwa pada tahun 1665 raja Gowa dapat menghimpun pasukan sebanyak 10.000 orang untuk menyerang Buton, dan pada tahun 1666 ia berhasil mengirim armada dengan 25.000 orang.

Sebagai bahan perbandingan betapa besarnya sebuah kota berdasarkan jumlah penduduknya, kita dapat melihat angka-angka penduduk di luar negeri pada waktu yang hampir bersamaan. Sudah kita ketahui bahwa penduduk kota Pasai sekitar 20.000 jiwa, Aceh sekitar 40.000, Surosowan (Banten) sekitar 31.848, Demak 40.000. Gresik 30.000, dan Surabaya 50.000. Pada pertengahan abad 15 Frankfurt berpenduduk 8.700 jiwa, Nurnberg 20.000, Strassbourg 26.000, Brussel 40.000. Pada masa itu kota yang berpenduduk lebih dari 20.000 sudah dianggap kota besar.

Dengan perbandingan jumlah penduduk kota di Eropa dan di Indonesia tidaklah berarti bahwa kota-kota ini sama corak kehidupannya dan struktur sosialnya. Baik corak hidup maupun struktur masyarakatnya sangat berbeda.

Adanya lapisan-lapisan penduduk kota sudah diuraikan di atas, yakni ada empat lapisan: golongan raja dan keluarganya, golongan

elite, golongan non-elite, dan golongan hamba-sahaya. Dari keempat golongan itu golongan raja dan keluarganya serta golongan elite, jika dilihat dari jumlah penduduknya, merupakan kelompok yang kecil. Meskipun demikian mereka adalah golongan yang mempunyai kedudukan sosial yang sangat penting. Mereka berkuasa terhadap golongan non-elite dan hamba-sahaya yang jumlahnya lebih besar.

3. Pasar Pusat Ekonomi Kota

Kota memerlukan pasar untuk melayani keperluan penduduk sehari-hari dan melayani arus barang yang datang dan keluar, lebih-lebih lagi untuk kota pelabuhan. Pasar ialah suatu tempat jalinan hubungan tukar-menukar antara pihak penjual, pembeli, dan produsen. Sudah tentu pasar tidak hanya terdapat di kota-kota besar saja. Sampai jauh ke pedalaman ada kegiatan pasar.

Antara kota-kota besar dengan desa-desa di sekitarnya ada hubungan yang erat, karena kepentingannya saling berkaitan. Golongan petani yang hidup di desa-desa sekitar kota menjual hasil bumi kepada golongan pedagang. Golongan pedagang ini menyalurkan hasil bumi tersebut kepada penduduk kota yang memerlukannya. Selain perdagangan lokal, pedagang di kota pusat kerajaan dan kota pelabuhan juga giat dalam perdagangan internasional. Kota-kota yang memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional pada zaman perkembangan kerajaan-kerajaan Islam ialah Pasai, Aceh, Gowa/Makasar, Palembang, Malaka, Banten, Demak, Ternate, Tidore, dan beberapa kota pelabuhan yang lain.

Penyelenggaraan hari-hari pasar berhubungan erat dengan kegiatan arus barang yang diperdagangkan, baik barang-barang yang berasal dari luar Indonesia ataupun barang-barang yang datang dari daerah Indonesia lainnya. Barang-barang yang dibawa dengan kapal dari berbagai tempat sampai datang ke tangan konsumen tergantung, antara lain, dari kondisi arus dan angin yang memungkinkan cepat atau lambatnya keberangkatan dan datangnya kapal ke satu pelabuhan. Barang-barang dagangan yang berasal dari daerah Indonesia lainnya bergantung pula kepada musim panen. Hasil-hasil pertanian dan perkebunan, seperti padi, cengkeh, pala, lada, dan hasil bumi lainnya akan masuk ke pasaran jika musim panen hasil bumi tiba.

Pada umumnya untuk kota-kota pelabuhan besar serta kota pusat kerajaan, pasar diselenggarakan setiap hari. Seorang Belanda yang berkunjung ke Banten pada tahun 1596 telah melukiskan keadaan pasar Banten pada waktu itu sebagai berikut :

Di pasar sebelah timur kota (Karangantu) baik pagi maupun siang pedagang-pedagang dari berbagai bangsa berkumpul, seperti Portugis, Gujarat, Arab, Turki, Cina, Keling, Pegu, Melayu, dan pedagang dari daerah Indonesia lainnya. Pasar yang kedua terletak di Paseban. Di sini diperdagangkan pelbagai keperluan sehari-hari, dan pasar tetap ramai sejak pagi hari sampai petang. Setelah siang hari terdapat juga sebuah pasar lagi di kampung Cina (Pecinan).

Penyelenggaraan hari-hari pasar secara bergiliran mungkin disebabkan oleh arus barang yang datang ke desa-desa di luar kota pusat kerajaan pada masa itu belum begitu lancar. Barang-barang datang dari luar kerajaan hanya pada saat-saat tertentu. Sarana perhubungan yang belum begitu maju dapat juga menyebabkan arus barang dari pusat kerajaan ke desa-desa tidak berjalan lancar. Alat-alat pengangkutan pada abad 15 sampai 17 masih berupa pedati-pedati yang ditarik kerbau yang tentu tidak mungkin dapat mencapai semua tempat di pedalaman, sedangkan kuda beban dan tenaga **orang juga terbatas dalam kemampuannya mengangkut** barang-barang dagangan. Perahu digunakan untuk perhubungan antara tempat-tempat di dekat sungai yang besar.

Jadi ada pasar yang diselenggarakan setiap hari dan ada yang hanya diadakan pada hari-hari tertentu saja berdasarkan giliran. Di kota-kota pusat kerajaan maritim, kota-kota pelabuhan, lebih-lebih yang memainkan peranan sebagai kota pelabuhan internasional seperti Banda Aceh, Pasai, Malaka, Banten, Jakarta, Demak, Makasar, Ternate, Banjarmasin, Palembang, dan lain-lainnya, kegiatan pasar adalah setiap hari. Kota-kota kecil, baik yang terletak di pesisir maupun di pedalaman, menyelenggarakan pasar pada hari-hari tertentu saja. Hingga kini tradisi tersebut masih tetap berlangsung pada pasar-pasar di beberapa desa dan kecamatan.

4. Barang-barang Perdagangan

Telah disebutkan di atas jenis-jenis barang yang diperdagangkan

di pasar-pasar. Barang-barang dagangan ini dapat kita bedakan antara barang yang berasal dari luar negeri, dan barang-barang dari daerah-daerah Indonesia sendiri. Barang-barang yang berasal dari Kepulauan Indonesia dapat lagi dibagi berdasarkan tempat asalnya, yakni barang-barang dari kota dan desa sekitarnya, dan barang-barang yang diperdagangkan antar-kerajaan.

Pedagang Cina merupakan kelompok pedagang asing yang memegang peranan yang penting sekali dalam perdagangan dengan luar Indónesia. Mereka yang sudah lama menetap di beberapa tempat di Indonesia sering kali bertindak pula sebagai pedagang perantara yang kadang-kadang tidak segan-segan mengunjungi kampung dan desa-desa terpencil jauh di pedalaman. Jika kembali ke kota, mereka juga sekaligus membeli barang-barang hasil bumi dari petani seperti beras, palawija, dan sebagainya.

Barang-barang yang diperdagangkan oleh orang Cina di Malaka antara lain kesturi, kapur barus, sutra tenunan, mutiara, emas, perak, dan juga barang pabrik tenunan seperti kain satin, brokat, dan pakaian jadi. Porselin dan tembikar dari negeri Cina merupakan barang perdagangan yang sangat laku di pasaran Malaka.

Catatan orang Belanda pada tahun 1596 memperinci barang-barang yang diperdagangkan orang Cina di Banten, yaitu sutra bermacam-macam, kain laken, beludru, satin, benang emas, piring porselin, bejana-bejana dari tembaga, panci-panci berukuran besar dan kecil yang dibuat dari tembaga coran dan tempaan, air raksa, peti-peti yang indah-indah, kertas bermacam warna untuk menulis, almanak, emas tempaan, cermin, sisir, kacamata, belerang, pedang buatan Cina, sarung pedang dengan lak, akar-akaran Cina, kipas, dan payung.

Di pasar kota pusat kerajaan Aceh, orang Cina memperdagangkan juga peti-peti, laci-laci, lemari, dan mainan anak-anak. Barang yang paling laku dari negeri Cina adalah barang keramik. Barang-barang tersebut beredar pula di kota pelabuhan di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Beberapa piring keramik berasal Cina disimpan sebagai harta-pusaka. Piring yang disebut "panjang jimat" yang dimiliki oleh kesultanan Kasepuhan dan Kanoman di kota Cirebon dianggap keramat.

Pedagang asing lainnya, seperti pedagang yang berasal dari Gujarat, Benggala, Keling, dan Malabar juga aktif dalam perdagangan di beberapa kota pelabuhan. Pedagang-pedagang dari India ini bahkan mempunyai kios-kios di Banten yang menjual barang-barang dari bahan kaca, gading, dan permata yang biasanya berasal dari Cambay. Barang-barang yang berasal dari Gujarat antara lain, bahan tekstil (dikatakan sampai ada duapuluh jenis), permata, sabun, mentega, dan lain-lainnya. Pedagang dari Malabar dan Kurmandel datang ke Aceh dengan membawa barang dagangan berupa mentega, minyak, guci, pepadani, bantal, emas, dan perak. Orang-orang Benggala biasanya membawa barang-barang seperti beras, gandum, minyak, gula, pakaian sutra, saputangan, kain-kain, bahkan juga budak belian.

Pedagang asing yang datang dari daratan Asia Tenggara terutama dari Siam (Muang Thai), Pegu (Birma), dan Campa (Vietnam). Mereka memperdagangkan kayu gaharu, emas, perak, keramik dan beberapa barang buatan Cina. Campa merupakan pula pasaran emas asal Minangkabau.

Pada jaman ini pedagang-pedagang dari negeri Arab dan Persia banyak pula yang mengunjungi Indonesia. Di Banten dan Aceh mereka malah bermukim dalam satu kampung yang khusus disediakan. Di Banten orang-orang Arab dan Persia menjual bermacam-macam batu perhiasan dan obat-obatan. Mereka kadang-kadang juga bertindak sebagai pedagang perantara, misalnya membeli barang-barang asal Cina dan kemudian dijualkan di pasar setempat. Sampai di pelabuhan-pelabuhan Maluku pedagang Arab dan Persia diketemukan.

Pedagang-pedagang Portugis yang mengunjungi Banten, Malaka dan Jambi membawa pula bahan-bahan pakaian tenunan. Kedatangan mereka membawa masalah-masalah baru, karena kunjungan mereka juga bertujuan politik dan penyebaran agamanya. Melalui perjanjian-perjanjian dengan kerajaan pribumi mereka mencoba menguasai perdagangan setempat, dan cara-cara demikian ditiru oleh pedagang-pedagang Eropa yang datang kemudian, ialah Belanda dan Inggris. Barang-barang yang diexport dari Indonesia, terutama rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis yang pada zaman itu sangat laku di pasaran Eropa.

Dari daerah Sumatra melalui pelabuhan-pelabuhan besar seperti

Pasai, Pedir, Aceh, Palembang, dan Jambi diexport barang-barang seperti emas, lada, lilin, damar, rotan, dan kayu gaharu.

Pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa mengexport pula bahan-bahan keperluan sehari-hari, seperti minyak, beras, garam, dan lain-lainnya. Di pasar diperdagangkan pula perkakas rumah tangga dari bambu, senjata, peluru, dan juga gula, madu, sayuran, dan hewan seperti ayam, kambing, lembu, dan kerbau.

Kota-kota di Maluku, terutama Ternate, Tidore, Hitu, dan Banda merupakan pasaran rempah-rempah cengkeh dan pala. Daerah inilah yang kelak menjadi rebutan antara pedagang-pedagang asing dari Eropa yang berakhir dengan kemenangan Kompeni Belanda.

Daerah Makasar, salah satu pusat lalu lintas pelayaran dan perdagangan, banyak dikunjungi pedagang-pedagang asing. Dari daerah ini beras dibawa ke Maluku. Juga keperluan kehidupan sehari-hari seperti ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya.

5. Sistem Jual-beli Barang

Cara penjualan dan pembelian yang berlaku pada masa itu lebih banyak didasarkan atas sistem tukar-menukar barang. Di samping sistem barter ada pula sistem atas dasar alat penukar yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Umumnya sistem barter dilakukan oleh pedagang-pedagang dari pesisir dengan daerah pedalaman, biasanya langsung dengan para petani. Di antara barang-barang yang dibawa dari daerah pesisir ialah garam dan barang-barang import dari luar seperti pakaian, keramik Cina, dan lain-lainnya. Sebaliknya, masyarakat pesisir memerlukan hasil-hasil pertanian seperti beras dan buah-buahan dari daerah pedalaman. Hasil hutan dan pertanian untuk keperluan export biasanya juga diborong oleh pedagang pesisir untuk dijual lagi kepada pedagang asing. Tradisi jual-beli secara tukar-menukar hingga sekarang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat di daerah terpencil dari kota.

Dalam perkembangan kemudian mulailah diadakan transaksi dagang dengan mempergunakan matauang. Bahkan di beberapa kota pusat kerajaan, matauang asing beredar pula, seperti *real* dan *yuán* yang biasanya dibuat dari emas. Pada awal abad 16 Tome Pires menceritakan bahwa di Pedir terdapat matauang dari timah, *cetti*,

dan matauang emas yang disebut *drama*. Jika dibandingkan dengan matauang Portugis yang berlaku waktu itu, yaitu *cruzado*, 9 drama sama dengan 1 *cruzado*. Di Pedir terdapat pula matauang dari perak yang disebut *tanga*. Mungkin yang dimaksud oleh Pires dengan drama adalah *dirham*. Berita asing ini diperkuat pula oleh penemuan beberapa buah matauang di kabupaten Aceh Utara sekarang. Pada matauang dirham emas dari Samudra-Pasai tercantum nama Sultan Alaudin, Sultan Mansur Malik az-Zahir, Sultan Abu Zaid, dan lain-lain, ialah raja-raja Pasai yang dikenal pada abad ke 14 dan 15.

Sekitar abad 16 di Banten juga sudah beredar matauang sebagai alat tukar dalam perdagangan. Seorang pedagang Belanda, Jan Jansz Karel, melaporkan bahwa ia setiap hari pergi ke pasar Banten untuk membeli lada dengan membayar kontan (*caxa*, ejaan Portugis, dibaca kasya). Diceriterakan lebih lanjut bahwa harga 58 pon lada pada tanggal 9 Agustus 1596 di pasar Banten berharga 1.000 *caxa*. Dua karung lada ditukar dengan satu elo pakaian yang harganya berkisar 7 *shilling*.

Emas dan perak, meskipun tidak berupa uang, juga dipergunakan sebagai alat tukar-menukar. Menarik perhatian pula bahwa pengunjung-pengunjung asing memberitakan bahwa di kota-kota pelabuhan terdapat orang-orang penukar matauang. Biasanya kaum perempuan yang duduk di sudut-sudut jalan dan di pasar yang menyediakan matauang untuk ditukar.

Matauang kerajaan biasanya dibuat sendiri oleh pihak penguasa. Di Cirebon sesudah diadakan perjanjian dengan Belanda (tanggal 8 September 1688) diperlukan transaksi perdagangan yang memakai matauang. Kedua Sultan Cirebon, yakni Sultan Sepuh dan Sultan Kanoman, mengeluarkan larangan untuk membuat matauang picis yang terlalu kecil. Atas persetujuan sultan, matauang picis hanya boleh dibuat oleh Raksa Negara dari pihak Sultan Sepuh, dan Suradi Mata dari pihak Sultan Kanoman. Setelah kedua pembesar meninggal, maka pembuatan matauang diborongkan kepada orang-orang Cina.

Di Sulawesi pada masa pemerintahan Tumabicara atau perdana menteri Gowa dibuat matauang emas yang disebut *dinara* untuk ukuran besar, dan *kupa* untuk ukuran kecil. Matauang dari timah

disebut *benggolo*.

Setelah Kompeni berkuasa dan berpusat di Batavia dengan perwakilannya di kota-kota pelabuhan lain, seperti Surabaya dan Makasar, mereka mengeluarkan matauang tersendiri yang dipergunakan dalam transaksi perdagangannya.

PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME

A. PENETRASI BARAT DAN REAKSI RAKYAT INDONESIA

1. Penetrasi Orang Barat

Ada faktor yang mendorong orang-orang Portugis mencari sendiri jalan yang menuju ke kepulauan rempah-rempah. Pertama adalah faktor ekonomi, kedua adalah faktor agama, dan yang ketiga ialah faktor petualangan. Usaha untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan rempah-rempah telah menjadi bagian penting dalam kegiatan perdagangan di Eropa. Sudah semenjak lama rempah-rempah menjadi bahan berharga dalam kehidupan sehari-hari orang Eropa. Ungkapan "semahal lada" di Barat, menggambarkan betapa tingginya nilai rempah-rempah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian barangsiapa yang berkesempatan menjadi penyalur barang perdagangan itu akan menikmati laba yang besar. Lebih-lebih apabila orang dapat memperolehnya langsung dari tempat asalnya, maka keuntungan yang berlipat-ganda akan dapat diraihinya. Sebagai penyalur rempah-rempah yang datang dari Dunia Timur ke Dunia Barat, orang Portugis merasa tertarik untuk mencari sendiri jalan yang menuju ke tempat yang menggiurkan itu. Itulah asal-mula penetrasi atau penerobosan orang Barat ke Dunia Timur melalui kesukaran-kesukaran yang sangat hebat.

Dengan dilandasi oleh semangat Perang Salib dan jiwa petualangan, keinginan orang Portugis untuk mengejar keuntungan ekonomi itu dapat terlaksana. Dengan jalan menyusuri pantai barat Afrika ke selatan, kemudian membelok ke pantai timur Afrika dan diteruskan ke arah utara, orang Portugis mulai menemukan jalan terbuka yang menuju ke Dunia Timur. Pada waktu mereka sampai di Malindi (pantai timur Afrika) mereka berjumpa dengan pedagang-pedagang Islam yang telah berabad-abad menguasai perdagangan antara Kepulauan Indonesia, daerah Persia dan daerah Laut Merah. Mereka mengetahui bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang ada dalam jalur perdagangan itu menjadi kaya oleh karena menguasai rempah-rempah dari Indonesia.

Semangat perang salibnya mendorong Portugis untuk berusaha mematahkan pedagang-pedagang Islam dalam menguasai bahan perdagangan dari daerah Indonesia ke daerah Laut Merah. Mereka tidak kenal kompromi. Setiap kali berjumpa dengan kapal pedagang-pedagang Islam, orang-orang Portugis berusaha untuk menghancurkannya. Oleh karena itu bentrokan bersenjata antara kedua golongan yang berbeda agama maupun berlawanan kepentingan itu tidak dapat dihindarkan. Dalam menghadapi lawannya yang tangguh itu, orang Portugis mencari persekutuan dengan raja-raja Asia yang tidak beragama Islam.

Di Goa (India) orang Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya. Setelah mendengar berita tentang kemakmuran bandar Malaka, pimpinan orang Portugis yang bernama Albuquerque bermaksud untuk mengadakan hubungan dengan penguasa bandar tersebut. Malaka pada waktu itu sudah merupakan bandar transito yang ramai dan rajanya telah beragama Islam. Berbagai bangsa ada dalam bandar itu, termasuk pedagang-pedagang Islam dari Gujarat dan Arab. Mereka itu datang mengambil rempah-rempah dan menukarnya dengan bahan pakaian. Rempah-rempah dan hasil bumi lainnya dibawa ke bandar itu oleh pedagang-pedagang pribumi yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya dari Kepulauan Indonesia.

Berita kehadiran orang Portugis telah sampai pula di bandar Malaka. Sikap-terjang dan tujuan orang Portugis sudah diketahui pula. Dengan demikian bahaya yang mengancam bandar Malaka apabila orang Portugis datang juga sudah disadari oleh Sultan Malaka maupun oleh pedagang-pedagang Islam umumnya. Oleh karena itu utusan Portugis yang datang ke Malaka pada tahun 1509 untuk menyampaikan surat-surat kepercayaannya kepada Sultan, tidak diterima. Sultan Mahmud Syah enggan berhubungan dengan orang Portugis setelah mempertimbangkan untung ruginya. Dengan penolakan itu, orang Portugis memutuskan untuk memaksakan kehendaknya dengan kekerasan senjata. Mereka mengirimkan armada yang unggul dan pada tahun 1511 Malaka berhasil direbut.

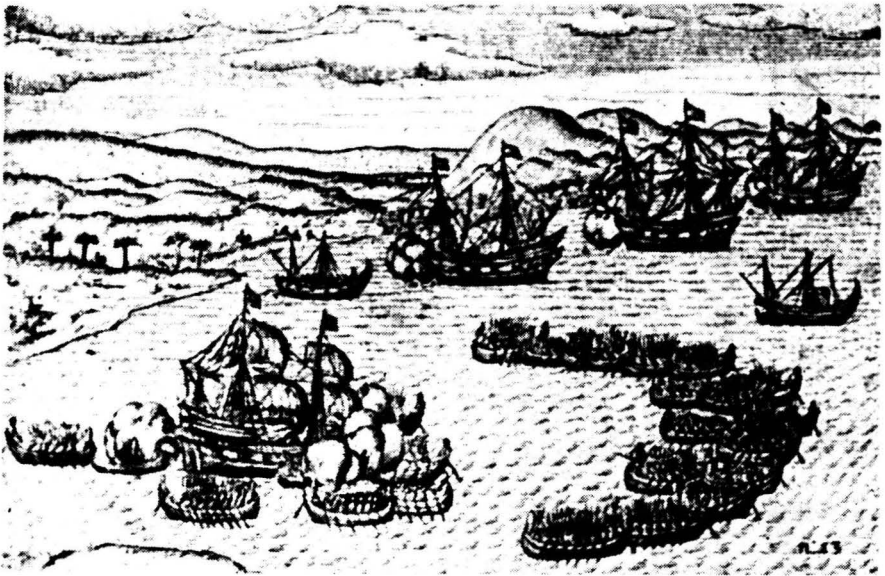
Sejak Malaka jatuh ke tangan musuhnya, orang Portugis, pedagang-pedagang Islam memindahkan kegiatannya ke pelabuhan-pelabuhan lain. Dengan jalan demikian mereka dapat melanjutkan

usaha perdagangannya secara aman. Penyaluran rempah-rempah dari daerah Indonesia ke daerah Laut Merah tetap dapat dikuasai, sekalipun harus menghadapi serangan-serangan orang Portugis.

Petualangan orang Portugis tidak berhenti di Malaka. Mereka meneruskan usahanya untuk sepenuhnya menguasai perdagangan rempah-rempah dengan mengadakan pelayaran ke arah timur yaitu ke kepulauan rempah-rempah (Maluku). Dalam perjalanannya ke Maluku, mereka singgah di pelabuhan Gresik. Dan akhirnya tiba di Banda, di sana mereka membeli pala, cengkeh dan fuli. Bahan-bahan itu ditukar dengan bahan pakaian dari India. Kedatangan Portugis di Maluku merupakan faktor baru dalam hubungan-hubungan di antara daerah-daerah Indonesia. Mereka dapat memanfaatkan persaingan-persaingan setempat untuk memperkuat kedudukannya sendiri. Misalnya ketika orang Portugis datang ke Maluku, Hitu dan Seram sedang bersengketa dan orang Portugis memihak Hitu. Kedatangan mereka ke Ternate diterima baik, sebagai sekutu menghadapi kerajaan Indonesia lainnya. Hubungan perdagangan antara Portugis dan Ternate terjalin untuk beberapa lama. Tetapi karena orang Portugis diminta untuk membantu Ternate dalam menghadapi musuhnya, maka mereka menuntut imbalan. Mereka mengajukan tuntutan untuk mendapat ijin monopoli perdagangan cengkeh. Dengan ijin monopoli itu maka semua cengkeh dari rakyat Ternate harus dijual kepada mereka. Dengan demikian rakyat kehilangan kebebasannya untuk menjual hasil tanamannya dengan harga yang lebih baik. Rempah-rempah harus dijual kepada Portugis dengan harga murah, sedangkan penjualan kepada pedagang lain dilarang. Barangsiapa menentang, ditindak dengan kekerasan senjata.

Pada tahun 1521 orang Spanyol juga tiba di Maluku. Dengan dua buah kapalnya mereka datang melalui Filipina dan Kalimantan Utara terus menuju ke Tidore, Bacan dan Jailolo. Di daerah itu mereka diterima dengan baik. Tetapi bagi orang Portugis mereka dianggap saingan yang akan mengancam monopoli perdagangan rempah-rempah yang telah dipegangnya. Karena itu orang Spanyol diserang oleh mereka. Karena kalah kuat, maka orang Spanyol tidak lama berdagang di Maluku. Kapal-kapal mereka berlayar di kepulauan itu hanya sampai tahun 1534. Baru pada awal abad 17 ketika ke-

kuatan Portugis telah mundur, kapal Spanyol berlayar kembali di perairan Maluku.



Kapal-kapal Belanda pertama sampai di Banten tahun 1596

Sumber : Dr. D.A. Rinkes (et-al), *Het Indische Boek der Zee*

Karena sikapnya yang kasar, orang-orang Portugis tidak umum disukai. Selain di Maluku, mereka hanya dapat memperoleh pangkalan di beberapa tempat lain saja di Indonesia. Keinginannya untuk memperoleh tempat di Sumatra, terutama di daerah-daerah penghasil lada, tidak berhasil. Pengaruh kerajaan Aceh sangat kuat, sehingga dapat mengawasi sebagian besar daerah Sumatra. Dan pada waktu itu orang Portugis belum dapat menandinginya. Demikian juga di Jawa, karena kuatnya pengaruh Kerajaan Demak, maka orang Portugis hanya diterima dengan baik di Pasuruan dan Blambangan. Di Jawa Barat-pun hanya untuk beberapa lama mereka diterima baik. Pengaruh Demak yang beragama Islam juga sampai di daerah Jawa Barat. Pengalaman Demak pada tahun 1513 dengan orang Portugis, membuat mereka enggan menerima kehadiran orang Portugis di daerahnya.

Hanya di Timor saja orang Portugis dapat berhasil menetap. Di Ternate pun akhirnya mereka kehilangan simpati orang Indonesia. Bahkan telah pecah beberapa kali perbenturan senjata antara orang Ternate dan orang Portugis. Sikap Portugis yang serakah, yang memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah, membuat rakyat Maluku dan di tempat lain tidak menyenangkannya. Selain faktor ekonomi tersebut, orang Portugis di Maluku juga tidak disenangi karena faktor agama. Mereka selalu berusaha mendesakkan agamanya di samping memaksakan monopoli dagangnya. Di Ternate dan Tidore, penduduk merasa bahwa menerima agama baru berarti mengakui kekuasaan asing yang merugikan. Di lain pihak, orang Portugis menganggap bahwa mereka dapat lebih aman di daerah yang telah seagama daripada daerah-daerah yang beragama Islam. Karena itu tidak mengherankan kalau di pelbagai tempat lain kedatangan Portugis mendapat tantangan. Pada akhirnya orang Portugis merasa tidak aman lagi tinggal di daerah Maluku dan memutuskan untuk mengalihkan kegiatannya ke daerah Nusantara. Lebih-lebih setelah orang Belanda datang, kedudukan orang Portugis makin lama makin terdesak.

Jejak orang Portugis ke Indonesia pada akhirnya diketahui pula oleh orang-orang Eropa lainnya. Pada akhir abad ke 16 dan awal abad ke-17 orang Belanda, Inggris, Denmark dan Perancis telah datang pula ke Indonesia. Tidak berbeda dengan orang Portugis, mereka juga mempunyai maksud-maksud yang sama. Mereka masing-masing juga bermaksud untuk memaksakan monopoli perdagangan, menguasai bahan-bahan perdagangan yang penting di Indonesia seperti rempah-rempah. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kedatangan mereka menambah ketegangan-ketegangan. Selain mengadakan persaingan di antara mereka sendiri, mereka semuanya mencoba memaksakan kehendaknya kepada para penguasa pribumi.

Di samping adanya persamaan dalam nafsu angkara murkanya, terdapat juga perbedaan-perbedaan di antara orang-orang Eropa tersebut. Apabila kedatangan orang Portugis di Indonesia didorong oleh tiga faktor, yaitu agama, ekonomi, dan petualangan, maka kedatangan orang Belanda hanya didorong oleh dua faktor, yaitu ekonomi dan petualangan. Mereka tidak berminat kepada usaha

penyebaran agama. Kesulitan-kesulitan ekonomi yang dialami oleh orang-orang Belanda, telah memaksa mereka untuk melakukan petualangan mencari jalan yang menuju ke pusat produksi rempah-rempah. Semula Belanda secara bebas mengangkut bahan-bahan itu dari pelabuhan-pelabuhan Portugis. Tetapi sejak tahun 1580 daerah Portugis dikuasai oleh Spanyol. Karena orang Belanda sedang berperang melawan Spanyol, maka tertutuplah daerah Portugis bagi mereka. Karena itulah mereka terpaksa mencari dan membeli bahan-bahan itu langsung ke Indonesia.

Pada tahun 1596 orang Belanda berhasil tiba di Banten. Mereka berangkat pada tahun 1595 dengan empat buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, dan selama empatbelas bulan mengarungi lautan. Semula kedatangan mereka, di Banten disambut baik oleh para penguasa setempat. Pada waktu itu Banten telah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan bahan-bahan perdagangan lainnya yang datang dari pelbagai daerah Indonesia. Kedatangan orang asing itu dianggap akan dapat meningkatkan perdagangannya sehingga akan menambah laba yang diperoleh. Orang Belanda mula-mula menunjukkan sikap bersahabat dan kemudian melakukan perjanjian dagang dengan Banten. Hubungan perdagangan dapat dilakukan dengan lancar. Tetapi akhirnya orang Belanda memperlihatkan keserakahannya dan ingin mengejar keuntungannya sendiri. Hal itu menyebabkan mereka dimusuhi oleh orang Banten sehingga terpaksa menyingkir. Dalam pelayaran yang pertama itu orang Belanda hanya sampai ke Bali. Dalam pelayarannya yang kedua kalinya mereka mencoba untuk merubah sikapnya. Antipati sebagai akibat kekerasannya dalam pelayaran yang pertama telah menjadi pelajaran. Dengan sikap yang baik dalam menghadapi orang-orang Indonesia dalam pelayaran yang kedua, mereka diterima dengan baik. Pada tahun 1598, mereka tiba untuk kedua kalinya di Banten. Karena sikap yang baik, mereka diterima dengan baik pula di daerah-daerah lain, seperti di Tuban dan di daerah Maluku. Di Ternate malah an mereka diterima baik sekali, karena kebetulan Ternate sedang bermusuhan dengan orang Portugis dan Spanyol. Dengan modal sikap yang baik kehadiran mereka yang kedua itu telah membawa keuntungan yang besar, karena dapat memuat kapalanya dengan bahan-bahan perdagangan yang banyak sekali.

Untuk dapat menang dalam persaingannya dengan orang Eropa lainnya, maka pada tahun 1602 orang Belanda mendirikan serikat dagang yang disebut *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) yang berarti Kompeni Serikat Hindia Timur. Serikat dagang itu antara lain bertujuan untuk mencapai monopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dengan serikat dagangnya itu orang Belanda setapak demi setapak mampu menyaingi orang Portugis dalam monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada mulanya VOC menunjukkan sikap bersahabat terhadap penguasa-penguasa pribumi, sehingga hubungan mereka baik. Lebih-lebih dalam menghadapi saingannya, yaitu Portugis, sikap baik terhadap penguasa-penguasa pribumi bagi orang Belanda penting. Tetapi keadaan yang demikian itu tidak berlangsung lama, karena pada akhirnya sikap orang-orang VOC berubah dan mereka mulai membuka kedoknya. Maksud-maksudnya juga semakin jelas. VOC tidak lagi puas dengan keuntungan biasa dalam perdagangan, melainkan ingin melaksanakan monopoli perdagangan untuk menggaruk laba secara maksimal. Usaha untuk memperoleh kekuasaan mutlak dalam perdagangan perlu didukung oleh kekuasaan politik. Untuk mencapai itu perlu dipergunakan kekuasaan militer. Mereka tidak segan-segan menanamkan kekuasaannya secara fisik terhadap kerajaan-kerajaan Indonesia yang tidak mau mengakui monopolinya. Arah politik yang demikian itu mulai tampak dengan jelas semenjak J.P. Coen menjadi Gubernur Jenderal (1619).

Sudah barang tentu raja-raja Indonesia tidak tinggal diam. Mereka mengadakan reaksi. Sejumlah kerajaan Islam telah sejak lama mengadakan perlawanan terhadap orang Portugis. Ketika VOC mulai melaksanakan monopolinya, maka merekapun dilawan. Tetapi di mana-mana modernitas orang Barat dalam persenjataan dan taktik berhasil mengalahkan orang Indonesia yang masih kalah modern itu.

Jayakarta direbut oleh VOC dari tangan Pangeran Wijayakrama dalam perang yang berlangsung pada sekitar tahun 1618-1619. Banten dan Mataram tidak tinggal diam, karena wilayahnya terancam juga, terlebih-lebih Sultan Agung dari Mataram yang pada saat itu sedang meluaskan kekuasaannya atas seluruh Jawa. Tindakan VOC dianggap mengancam kekuasaannya. Reaksi Mataram semakin meningkat setelah VOC mulai berusaha untuk memaksakan monopolinya di daerah

pesisir utara Jawa. Pada tahun 1628 dan 1629 Mataram melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap VOC di Batavia (yaitu nama yang diterima orang Belanda setelah Jayakarta didudukinya).

Reaksi yang sama juga diberikan oleh daerah-daerah lain. Pada tahun 1666-1669 di Sulawesi Selatan timbul pula perlawanan terhadap VOC. Di Jawa pada tahun 1686-1703 berkobar perang melawan musuh yang sama di bawah Untung Surapati. Banten di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682) mengobarkan perang melawan VOC. Pendek kata selama abad ke-17 dan 18 usaha-usaha VOC untuk memperluas kekuasaannya di daerah Indonesia tidak berlangsung dengan tenang, melainkan dengan menghadapi tentangan dan perlawanan.

Perembesan dan perluasan dilakukan dengan berbagai cara. Selain dengan cara kekerasan, ditempuh juga politik campur-tangan. Dengan campur-tangan dalam pertikaian-pertikaian yang sedang terjadi di dalam lingkungan keluarga kraton, maka VOC dapat memetik keuntungan yang besar. Biasanya dengan memberikan bantuan pada pihak yang lemah, VOC dapat memaksakan kehendaknya. VOC dapat menuntut penyerahan-penyerahan tidak saja yang berupa bahan-bahan hasil bumi yang berharga, tetapi juga daerah yang dimiliki oleh penguasa pribumi yang dibantu itu.

2. Reaksi Malaka dan Aceh Terhadap Portugis dan Belanda

Hubungan antara orang Indonesia dengan orang Asia lainnya telah berlangsung semenjak lama. Hubungan itu tidak saja melalui perdagangan, melainkan juga melalui pergaulan politik antar-kerajaan. Pada abad 16, beberapa kerajaan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara juga mengadakan hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Islam yang terkemuka di Asia, diantaranya ialah dengan kemaharajaan Turki. Memang Turki waktu itu merupakan salahsatu negara Islam yang terkemuka; kebesaran Turki terkenal sampai di Indonesia pada waktu itu.

Berbeda dengan orang Asia, kehadiran orang Portugis di perairan Malaka menimbulkan kecurigaan. Orang-orang Portugis datang tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk penyebaran agama. Mereka datang bukan atas nama perorangan, melainkan atas nama negara. Karena itu tindak-tindakannya lebih bersifat politik dari pada sifat

dagangnya. Kapal-kapalnya juga bukan merupakan kapal dagang, tetapi lebih berupa kapal perang. Tiap kapal diperlengkapi dengan meriam-meriam yang siap untuk melakukan pertempuran. Orang-orang Portugis yang pertama kali datang ke Malaka dipimpin oleh Diego Lopez de Sequeira. Ia diperintah oleh raja Portugis untuk melakukan perjanjian-perjanjian dengan pembesar-pembesar di Malaka. Yang sangat diinginkan ialah ijin perdagangan. Sultan Mahmud Syah dan rakyatnya menolak kedatangan mereka, karena tahu bahwa maksud Portugis yang sebenarnya adalah ingin menguasai perdagangan yang lewat Selat Malaka. Oleh sebab itu orang-orang Portugis diserangnya.

Serangan rakyat Malaka terhadap orang Portugis dijadikan alasan bagi Albuquerque untuk mengadakan serangan balasan. Sebelum serangan balasan datang, Mahmud Syah mengadakan persiapan untuk menghadapinya. Albuquerque beserta pasukannya tiba di Malaka pada tahun 1511. Ketika kedua belah pihak tidak mau berunding lagi, perang meletus. Perang berkobar sangat dahsyat sehingga menimbulkan korban yang tidak sedikit. Dalam pertempuran itu orang Melayu menggunakan senjata-senjata sederhana seperti pedang, tombak, perisai, panah, bola-bola besi dan senjata-senjata kecil. Bola-bola besi diimport dari Cina, sedangkan senjata-senjata kecil yang dipakai itu adalah buatan Pegu dan Siam. Selain itu dipergunakan juga meriam-meriam yang dibeli dari Kalikut. Di lain pihak orang Portugis menggunakan senjata-senjata berat yang paling mutakhir. Kekuatan menjadi tidak seimbang, sehingga akhirnya Malaka jatuh dan diduduki oleh Portugis. Keberanian prajurit-prajurit Malaka tidak mampu menghadapi persenjataan Portugis yang lebih modern. Sultan Malaka terpaksa menyingkir ke pulau Bintang. Untuk mempertahankan kedudukannya Portugis membangun benteng yang kuat di kota Malaka itu. Penyebaran agama segera dilakukan sejalan dengan ekspansi ekonomi.

Sekalipun Malaka telah diduduki oleh Portugis, perlawanan orang Malaka tidak berhenti. Pertempuran-pertempuran sengit masih sering terjadi di luar kota Malaka. Ada perlawanan yang dipimpin oleh seorang Jawa yang bernama Katir. Taktiknya agak menonjol, sehingga orang Portugis menderita kerugian. Sering orang Portugis mengalami kekuarangan makanan, karena kota Malaka diblokade

oleh Katir. Beras yang datang dari Jawa ditahan di luar kota. Bila keadaan lawan kelihatan lemah, Katir segera melancarkan serangan-serangan. Katir pernah juga minta bantuan ke Jepara, yaitu tempat-asalnya. Pada tahun 1513 Pati Unus mengirim bantuan dari Jepara sebanyak 100 kapal dan 10.000 prajurit untuk menyerang orang Portugis di Malaka, tetapi dalam pertempuran itu armada Jawa mengalami kekalahan. Kebetulan orang Portugis mendatangkan armada yang kuat dengan kapal-kapal yang lebih besar dan meriam-meriam yang jangkauannya jauh.

Sesudah orang-orang Portugis merasa aman dari gangguan Katir, maka mereka mulai memperluas perdagangannya ke daerah lain. Mereka juga bermaksud untuk menundukkan Jawa, karena orang Jawa telah membantu musuh-musuh orang Portugis di Malaka. Di Pasai orang Portugis berhasil menanamkan pengaruhnya. Walaupun demikian usahanya untuk memonopoli perdagangan lada di bagian utara Sumatra itu belum berhasil. Berita-berita didudukinya Malaka oleh Portugis sebelumnya telah sampai pula ke Pasai. Oleh sebab itu kedatangan orang Portugis di Pasai disambut dengan antipati. Pasai ditinggalkan oleh para pedagang yang lalu mencari tempat yang lain. Daerah Aceh yang semula menjadi wilayah Pedir, mulai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan menjadi kerajaan yang lepas dari kekuasaan Pedir. Perdagangan yang semula banyak singgah di Malaka, kemudian memusatkan kegiatannya di Aceh.

Pasai kemudian dikuasai oleh Aceh, sehingga orang Portugis kehilangan tempat berdagang. Kemudian Aceh bersekutu dengan Johor untuk melawan Portugis di Malaka. Tidak jarang kerajaan-kerajaan di pantai utara Jawa memberikan bantuannya kepada Aceh itu. Namun Aceh dan Johor mengalami kekalahan, karena sebab umum perlengkapan dan kapal-kapal Portugis lebih unggul daripada yang mereka miliki. Dengan demikian Portugis dapat mempertahankan kedudukannya di kota Malaka, sampai orang Belanda merebutnya pada tahun 1641. Di luar kota ini, yaitu di daerah Semenanjung Malaya dan pulau Sumatra, orang Portugis belum dapat memperluas pengaruhnya.

Pada waktu orang Belanda berhasil menduduki Malaka, kota itu telah mengalami kemunduran yang besar sebagai kota perdagangan.

Sejak diduduki Portugis, Malaka tidak lagi disinggahi oleh para pedagang. Kota itu menjadi tidak aman karena terus-menerus menjadi tempat pertempuran dan permusuhan. Pedagang-pedagang menghindarkan diri dari Selat Malaka. Mereka memindahkan kegiatan perdagangannya ke Sumatra atau pelabuhan-pelabuhan di tempat lain yang jauh dari jalur lalu lintas di Selat Malaka. Belanda bermaksud untuk memulihkan kembali kota Malaka itu menjadi bandar yang ramai seperti sebelum direbut oleh orang Portugis. Untuk itu Belanda memberikan ijin dagang kepada para pedagang yang datang dari daerah lain. Tetapi karena orang Belanda mementingkan monopolinya dalam bahan perdagangan tertentu, seperti lada, rempah-rempah, cendana dan bahan pakaian yang bermutu, maka para pedagang tidak tertarik untuk berdagang di kota itu.

Belanda menganggap perlu pula untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan penguasa-penguasa yang ada di Semenanjung Malayu untuk mendapatkan monopoli beberapa jenis bahan perdagangan. Di antara bahan yang penting dari daerah itu ialah timah. Selain itu pedagang dari India diusahakan pula untuk dibatasi kedatangannya ke daerah itu. Perjanjian yang demikian itu berhasil diadakan antara lain dengan Sultan Kedah pada tahun 1642. Perjanjian monopoli perdagangan juga berhasil diadakan dengan penguasa di Jung Ceylon. Dalam persyaratan perjanjian itu antara lain disebutkan bahwa orang-orang Jawa, Perak, Kedah, Kurmandel, Bengal dan lainnya, tidak boleh berdagang di tempat itu bila tidak seijin orang Belanda. Usaha yang semacam juga dilakukan dengan daerah lain. Dengan cara demikian orang Belanda dapat menegakkan kekuasaannya.

Aceh sebagai kerajaan pantai pada waktu itu masih mampu mempertahankan diri terhadap desakan orang Barat. Perdagangan lada masih dikuasainya untuk waktu yang cukup lama. Orang Aceh membawa lada itu sampai ke India dan Laut Merah. Beberapa kali kapal-kapal Portugis dikirimkan ke Laut Merah untuk membajak kapal-kapal Aceh dan Gujarat, tetapi tidak banyak berhasil. Orang Aceh pada waktu itu telah dikenal sebagai prajurit yang ulung. Orang Portugis mengakui ketangkasan prajurit Aceh yang selama seabad mengganggu keamanan lalu lintas di Selat Malaka bagi orang Barat. Pada pertengahan abad ke-16 Aceh merupakan kekuatan yang cukup mengancam Portugis yang bercokol di Malaka. Orang

Portugis tahu bahwa Aceh memiliki hubungan erat dengan Turki. Banyak bantuan militer yang dikirimkan oleh Turki ke Aceh. Pada tahun 1566 atau 1567, Aceh mendapat bantuan 500 orang Turki, terdiri dari ahli-ahli senjata api, penembak-penembak dan ahli tehnik lainnya. Selain dari Turki, Aceh juga memperoleh bantuan dari tempat lain, misalnya dari Kalikut dan Jepara. Dengan bantuan-bantuan itu Aceh mampu mengimbangi kekuasaan Portugis di Malaka.

Orang Portugis juga pernah mencoba mengadakan blokade terhadap Aceh untuk mencegah hubungannya dengan luar. Akan tetapi sebaliknya Aceh-pun mampu mengadakan penyerangan dan pengepungan terhadap mereka. Keinginan Portugis untuk menyerang Aceh secara besar-besaran tidak dapat dilaksanakan karena mereka tidak memiliki armada yang cukup besar. Lebih-lebih pada akhir abad ke-16 keadaan di Eropa menyebabkan orang Portugis tidak dapat mengambil tindakan terhadap Aceh. Orang Portugis tidak mampu membendung kegiatan perdagangan rempah-rempah oleh Aceh ke Laut Merah. Dalam perangnya di laut orang Aceh menggunakan perahu kecil tetapi gesit yang dapat melakukan gerakan-gerakan dengan lincah. Selain perahu-perahu kecil yang didayung atau mempunyai layar, terdapat juga kapal-kapal atau jung yang lebih besar. Dengan kapal-kapal yang semacam itulah mereka mengarungi samudra sampai Laut Merah. Ukuran kapal itu ada yang 500 sampai 2.000 ton. Kapal-kapal tersebut berasal dari India, Arab dan ada juga yang dari Turki.

Pada masa pemerintahan 'Alauddin Ri'ayat Syah, Aceh mengalami kesulitan, karena bersaing dengan kerajaan Johor. Pada waktu itu Aceh tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan serangan ke Malaka. Baru kemudian setelah Sultan Iskandar Muda memerintah (1607 - 1636) kemampuan perangnya meningkat lagi, sehingga mampu mengembalikan daerah-daerah yang pernah lepas dari pengaruhnya, ketika Aceh mengalami kemunduran selama akhir abad ke-16. Di bawah Iskandar Muda malahan berhasil memperluas daerahnya ke Sumatra Timur dan Semenanjung Melayu. Selain itu Aceh juga menguasai daerah Sumatra Barat yang menghasilkan lada dan emas. Bahan perdagangan itu merupakan bahan yang berharga, karena banyak dicari oleh pedagang dari Gujarat, Cina, Belanda

maupun Inggris. Untuk mengamankan jalan perdagangan itu Iskandar Muda menempatkan pengawas-pengawasnya di pelabuhan-pelabuhan Tiku atau Pariaman. Mereka itu kebanyakan adalah para panglima-panglimanya, yang diangkat untuk mengurus soal pengawasan tersebut.

Di antara pedagang-pedagang asing itu, Aceh lebih menyukai orang-orang Gujarat, yang datang ke daerah itu dengan membawa bahan pakaian. Pedagang-pedagang asing lainnya paling-paling hanya diperbolehkan sampai di Kutaraja. Lebih-lebih terhadap pedagang Eropa, Aceh tidak begitu suka. Cornelis de Houtman pada tahun 1599 dan James Lancaster pada tahun 1602 pernah diijinkan untuk singgah di Aceh, karena Aceh membutuhkannya sebagai sekutu melawan Portugis dan Johor. Orang Inggris pernah juga mendapat ijin untuk berdagang di beberapa pelabuhan Aceh tetapi tidak lama. Setelah itu orang Belanda juga mendapat ijin, tetapi dengan syarat yang berat. Pendek kata Iskandar Muda mempersulit orang-orang Eropa untuk melakukan perdagangan di daerahnya. Tetapi setelah ia mengalami kekalahan dalam serbuannya ke Malaka pada tahun 1629, Iskandar Muda memberikan ijin dagang kepada Belanda untuk beberapa tahun. Aceh mulai mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Iskandar Muda berakhir dan setelah Belanda merebut Malaka dari tangan Portugis.

3. Maluku Menghadapi Portugis, Spanyol dan Belanda

Pada tahun 1519 orang Spanyol mengirimkan kapal-kapal ke Maluku melalui route Barat. Kapal-kapal Spanyol itu dipimpin oleh Fernao Magelhaes. Setelah mengarungi Samudra Atlantik dan Pasifik, mereka sampai di Mactan di kepulauan yang kemudian disebut Filipina, sesuai dengan nama rajanya, yakni Felipe. Malang bagi Magelhaes, setelah mendarat di Mactan ia terbunuh dalam suatu pertempuran dengan penduduk. Perjalanan menuju ke Maluku, diteruskan oleh anakbuahnya, yang tiba di Maluku pada tahun 1521. Pada waktu itu orang Portugis telah lebih dahulu berada di Maluku.

Orang Spanyol dan Portugis yang sedang bersaing itu tiba ketika dua kerajaan Indonesia di sana sedang bermusuhan, yakni Ternate dan Tidore. Untuk memperoleh sekutu Ternate menerima baik kedatangan orang Portugis. Malahan orang Portugis diperkenankan

mendirikan benteng di Ternate. Sebaliknya Tidore menerima baik kehadiran orang Spanyol. Tetapi Spanyol harus mundur dari Maluku berdasarkan perjanjian Tordesilas.

Pertikaian itu merugikan Ternate dan Tidore sendiri. Pengaruh Portugis menjadi lebih besar, Portugis berhasil memaksakan kehendaknya untuk monopoli bahan rempah-rempah. Sebaliknya orang Maluku kehilangan kebebasan untuk melakukan perdagangan dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Sifat kasar dan motif penyebaran agama dari orang Portugis menimbulkan kebencian orang Maluku.

Ternate yang semula menjadi sekutu Portugis akhirnya juga memusuhi mereka. Dalam suatu pertempuran orang Ternate berhasil membakar benteng Portugis. Perlawanan juga timbul dari orang-orang Tidore dan Bacan terhadap orang Portugis. Maka tepatlah apabila dikatakan bahwa pada waktu itu seluruh Maluku bangun melawan Portugis. Secara berulang-kali pertempuran antara kedua belah pihak terjadi. Pada tahun 1577, rakyat Ternate berhasil mengusir samasekali orang Portugis dari wilayahnya. Orang Portugis terpaksa pindah ke pulau lain, yang tidak jauh dari Tidore. Tetapi di tempat itupun pada akhirnya orang Portugis diganggu terus-menerus oleh orang Jawa dan Melayu yang biasa mengangkut cengkeh dari sana, di samping oleh orang-orang Ternate sendiri. Ketika Portugis dan Spanyol dipersatukan di bawah seorang raja (1580), orang Spanyol yang berkedudukan di Filipina berusaha untuk merebut kembali daerah Ternate. Tidak lama kemudian datanglah orang Belanda ke Maluku, dan berhasil menduduki benteng Portugis di Amboina pada tahun 1605. Kehadiran orang-orang Belanda di Maluku itu tidak saja mengandung pertikaian dengan sisa-sisa orang Portugis yang masih ada di daerah itu, tetapi juga dengan orang Spanyol. Pertempuran-pertempuran yang terjadi di Maluku antara orang Belanda dan Spanyol diakhiri dengan kekalahan di pihak orang Spanyol. Tetapi baru pada tahun 1663 Spanyol mengundurkan diri dari Maluku untuk memperkuat kedudukannya di Manila karena merasa terancam oleh Koxinga yang telah berkuasa di Taiwan.

Setelah orang-orang VOC (atau Kompeni) tiba di Maluku, mereka segera berusaha melaksanakan maksudnya untuk menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Oleh sebab itu kehadirannya

itu mengundang reaksi yang sama dari orang Maluku seperti yang dilakukan terhadap orang Portugis dan Spanyol. Pedagang-pedagang Jawa dan Melayu yang telah menjadi langganan dalam pengangkutan cengkeh dari daerah ini berdasarkan prinsip perdagangan bebas juga bersikap sama dengan penduduk setempat. Perlawanan berkobar di mana-mana. Pada tahun **1635-1646 rakyat Hitu** melakukan perlawanan terhadap Kompeni di bawah pimpinan Kakiali dan Telukabesi. Perlawanan juga terjadi secara meluas dari daerah **Amboina sampai ke Ternate pada tahun 1650**. Perang itu dipimpin oleh Saidi. Kompeni juga harus menghadapi serangan-serangan gerilya dari **rakyat Jailolo pada tahun 1675**. Setelah Kompeni berhasil mematahkan perlawanan rakyat Maluku, barulah ia dapat menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menanamkan kekuasaannya. Sekalipun demikian tidak berarti perlawanan rakyat samasekali berhenti.



Perang Makassar

Sumber : *Diorama Museum Sejarah Tugu Nasional, Jakarta*

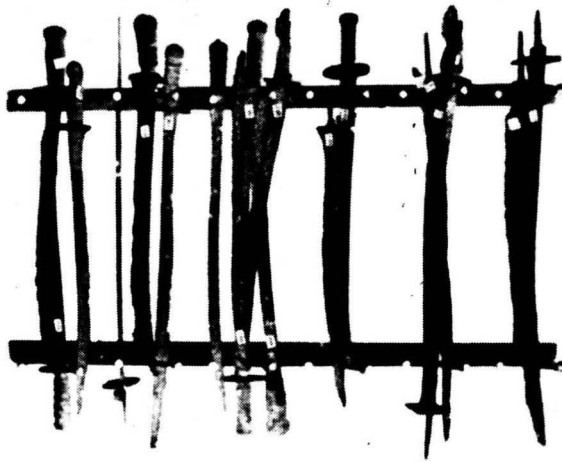
4. Banten dan Mataram Menghadapi Belanda

Pada abad ke-16 Banten sebagai kerajaan Islam telah mempunyai pelabuhan yang ramai didatangi oleh pedagang-pedagang dari berbagai tempat. Terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, pelabuhan Banten bertambah ramai. Pedagang-pedagang dari India, Persia dan Arab tidak lagi singgah ke Malaka, tetapi langsung memindahkan jalur pelayarannya ke Banten.

Ketika orang Belanda untuk pertama kalinya datang di Banten pada tahun 1596 mereka dicurigai. Tetapi kemudian mereka diterima baik setelah mereka menerangkan bahwa maksud kedatangannya hanyalah akan berdagang saja. **Perjanjian persahabatan antara penguasa di Banten dan Belanda pernah diadakan. Belanda diijinkan berdagang dengan bebas di Banten.** Tetapi suasana persahabatan itu tidak berlangsung lama, karena di antara orang-orang Eropa yang berdagang di Banten timbul persaingan. Orang Belanda kemudian bersikap kasar sehingga menimbulkan keonaran. Akibatnya beberapa orang Belanda ditangkap oleh penguasa Banten. Di antaranya termasuk juga de Houtman sendiri sebagai pemimpinnya. Orang-orang Belanda membalas dengan menembaki Banten dari kapal-kapal mereka, sehingga menimbulkan suasana permusuhan. Setelah memberi uang tebusan untuk membebaskan teman-temannya yang disekap di Banten, mereka kemudian pergi meninggalkan Banten.

Pada masa berikutnya orang-orang Belanda datang kembali ke Banten untuk menjalin hubungan dagangnya. Tetapi karena orang Belanda, Portugis, dan Inggris ada persaingan satu sama lain, maka akibatnya masing-masing mencoba untuk merusak hubungan-hubungan lawannya dengan Banten. Portugis mula-mula berhasil merusak hubungan antara Belanda dan Banten. Demikian pula Belanda juga mencoba merusak hubungan antara Banten dengan orang Eropa lainnya, dan juga dengan kerajaan lain. Jan Pieterszoon Coen, yaitu pemimpin VOC di Indonesia telah berhasil mengadu-domba Banten dengan Jayakarta. Demikian pula hubungan antara Banten dengan orang Inggris dapat dirusak. Sering terjadi pula pertentangan antara Banten dengan Kompeni.

Pertentangan memuncak setelah Kompeni menduduki Jayakarta pada tahun 1619. Pecahlah permusuhan terbuka antara Banten dengan



Senjata dari Kraton Kesepuhan Cirebon

Kompeni. Perlawanan Banten ditingkatkan setelah Sultan Ageng Tirtayasa naik takhta kesultanan Banten pada tahun 1651. Pada tahun 1656 sejumlah kapal Kompeni berhasil dirampas oleh orang Banten, dan dilakukan pula pengrusakan perkebunan tebu milik Kompeni. Akhirnya dengan susah-payah Kompeni berhasil menundukkan Banten setelah mereka berhasil mempengaruhi putra mahkota supaya melawan ayahandanya pada pihak Kompeni. Selanjutnya Sultan Ageng Tirtayasa dapat ditawan oleh Kompeni. Pada tahun 1682 putra mahkota yang telah menjadi Sultan dipaksa untuk menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan daerahnya kepada VOC.

Usaha menanamkan monopoli perdagangan dan kekuasaan Kompeni juga membangkitkan reaksi dari Mataram di bawah Sultan Agung. Pada tanggal 18 Agustus 1618 kantor dagang VOC di Japara diserbu oleh Mataram. Serbuan itu merupakan reaksi pertama yang dilakukan Mataram terhadap Belanda. Setelah melihat usaha-usaha Kompeni untuk memperkuat kedudukannya di Jayakarta (Batavia), ketegangan antara Mataram dan Kompeni makin meningkat antara tahun 1620 dan 1628.

Pengepungan itu tidak berhasil mematahkan orang Belanda, karena kesalahan dalam persiapan. Perbekalan yang sudah disiapkan di pelbagai tempat di pantai utara Jawa, tidak dilindungi dari laut, sehingga dapat dibinasakan oleh armada Belanda. Karena itu tentara ekspedisi Mataram menderita kelaparan, sehingga pengepungan terpaksa diurungkan, karena para prajurit sudah tidak berdaya lagi. Ketegangan itu akhirnya memuncak dengan terjadinya pengepungan besar-besaran yang dilakukan oleh Mataram terhadap Kompeni di Batavia pada bulan Agustus 1628.

Usaha pengepungan kedua terhadap Batavia juga mengalami kegagalan. Hubungan antara VOC dan Mataram tetap buruk sampai meninggalnya Sultan Agung pada tahun 1645, dan masing-masing pihak tidak dapat menghancurkan pihak lawannya. Juga sesudahnya Mataram mengadakan perlawanan, terutama di bawah pimpinan Trunojoyo (1674–1678) dan Surapati.

5. Banjar dan Gowa Menghadapi Kehadiran Belanda

Banjar sebagai suatu kerajaan telah berdiri pada sekitar pertengahan abad ke-16. Pengaruh Jawa pada kerajaan Islam ini besar. Selain sistem pemerintahan, beberapa unsur budaya Jawa diambil pula oleh kerajaan yang terletak di pantai Kalimantan Selatan ini. Daerah pengaruh Banjar meliputi Sukadana, Kotawaringin dan Lawei. Semula kerajaan ini harus mengirimkan upeti ke Demak. Setelah Demak mundur, pengiriman upetinya berhenti, sekalipun hubungannya dengan Jawa tetap berlangsung. Pertentangan sekali-sekali juga pernah terjadi antara kerajaan Banjar dengan Tuban dan Surabaya yang hendak memaksakan kekuasaannya terhadap Banjar. Demikian juga dengan Mataram. Tetapi pertikaian ini kemudian hilang dan terjadi hubungan yang baik, ketika VOC mulai muncul.

Di pelabuhan kerajaan Banjar tersedia bahan perdagangan hasil-hasil bumi setempat, seperti kapur barus, berlian, batu bezoar, dan juga lada. Orang Portugis dan Belanda pada akhir abad ke 18 juga datang ke daerah itu. Pada masa berikutnya ancaman Kompeni mulai terasa. Praktek-praktek yang telah dilakukan Kompeni di daerah lain juga dicoba dilakukan di Banjar. Setelah berhasil membuat kontrak untuk melakukan perdagangan dengan Raja Banjar, Kompeni

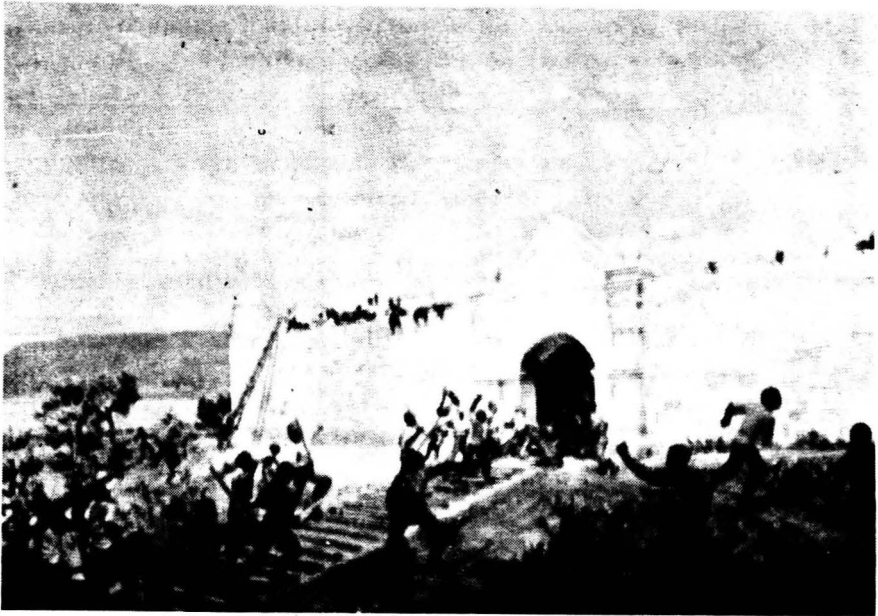
mulai melakukan perluasan pengaruhnya dengan jalan ikut campur dalam urusan rumahtangga kraton Banjar. Akibatnya orang Belanda dapat mengambil di air keruh. Kompeni berhasil memaksakan kehendaknya untuk memonopoli perdagangan lada setelah berhasil mencampuri pertentangan yang terjadi dalam negeri itu. Reaksi-reaksi mulai timbul, karena kebebasan rakyat dalam perdagangan terancam. Keadaan yang sama juga terasa di kerajaan Gowa yang terletak di daerah Sulawesi Selatan bagian barat.

Kerajaan Gowa menempati kedudukan yang baik dalam jalur perdagangan yang datang dan pergi dari daerah Maluku. Dalam lalulintas perdagangan itu Gowa menduduki kedudukan sebagai bandar transito bagi kapal-kapal yang mengangkut bahan perdagangan yang berlayar ke atau dari Maluku. Belandapun memandang Gowa penting karena letaknya yang baik sekali dalam jalur pelayaran antara Malaka, Batavia, dan Maluku. Oleh sebab itu Kompeni mengadakan hubungan dagang dengan Raja. Dan di sanapun mereka berusaha untuk membujuk Raja agar supaya melarang orang asing lain berdagang. Dengan perkataan lain, mereka menuntut kedudukan monopoli. Seperti halnya di Banjar maupun di tempat lain, Kompeni mengadakan paksaan-paksaan untuk mencapai kehendaknya. Kapal-kapal orang Makasar yang biasa hilir-mudik antara Gowa dan Maluku diganggu dan diserang. Akibatnya timbullah ketegangan yang meningkat sampai pada bentrokan-bentrokan bersenjata antara kedua belah pihak. Dengan segala kekuatannya VOC mencoba melumpuhkan kekuatan orang Makasar di laut. Gowa dikepung, bajak membajak antara kedua pihak terjadi, baik di laut maupun di darat. Akhirnya perang terbuka pecah pada awal tahun 1654 dan berlangsung sampai 1655.

Dalam permusuhanannya dengan Gowa itu, Kompeni juga menggunakan taktik lamanya, yaitu mengambil kesempatan dalam kericuhan yang ada dalam negeri itu. Aru Palaka yang sedang bersengketa dengan Gowa dibantu oleh Kompeni, sehingga Kompeni memperoleh sekutu di pihak pribumi. Perang pecah kembali dalam bulan Juli 1667. Kompeni menyerbu Gowa di bawah pimpinan Speelman. Pecahlah pertempuran-pertempuran sengit sehingga banyak korban jatuh, bahkan Speelman sendiri hampir saja tewas. Akhirnya Gowa harus mengakui keunggulan senjata Kompeni dan menanda-

tangani Perjanjian Bongaya yang merugikan bagi orang Makasar.

Orang Makasar yang tidak tahan di bawah telapak Kompeni, kemudian banyak yang meninggalkan Gowa untuk mengembara serta memberikan bantuan kepada rakyat-rakyat di daerah lain yang sedang melawan Kompeni. Mereka ini antara lain dipimpin oleh Karaeng Bontomarannu dan Karaeng Galesung. Mereka itulah yang ikut membantu Trunojoyo dari Madura yang melawan Kompeni di Jawa.



Perlawanan Pattimura

Sumber : *Diorama Museum Sejarah Tugu Nasional, Jakarta*



Peta Indonesia akhir abad ke-18

B. PROSES PERLAWANAN BESAR

1. Perlawanan Umum Pada Abad ke-19

Runtuhnya VOC pada akhir abad ke-18, menyebabkan bekas daerah kekuasaannya di Indonesia diambil-alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Semenjak awal abad ke-19 daerah itu secara langsung ada di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Perluasan kekuasaan yang telah dilakukan oleh VOC pada abad ke-18 diteruskan oleh penguasa kolonial. Bagi Indonesia pergantian dari pemerintahan VOC ke pemerintahan kolonial yang baru, hanyalah merupakan penggantian baju belaka. Orangnyanya tetap sama yaitu Belanda. Tujuannya pada dasarnya adalah sama, hanya caranya yang mungkin berbeda. Keduanya mempunyai tujuan untuk mengeduk kekayaan bumi Indonesia tanpa memperhatikan rakyat yang mempunyai tanahair. Oleh karenanya keduanya mempunyai akibat yang buruk terhadap rakyat Indonesia.

Dalam kehidupan selama abad ke-18 dan 19 tampak adanya dua perkembangan yang berbeda. Di satu pihak, kekuasaan pemerintah Belanda makin meluas dan mendalam di Indonesia. Di lain pihak, kekuasaan para penguasa pribumi makin lama makin merosot. Pengaruh yang dibawa masuk dari Barat melalui kekuasaan kolonial Belanda, telah membawa perubahan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pada dasarnya perubahan itu terjadi dalam tiga segi kehidupan, yaitu segi-segi kehidupan politik, sosial-ekonomi dan budaya.

Dalam bidang politik pengaruh kekuasaan Belanda makin kuat. Penguasa-penguasa pribumi (sultan, dan sebagainya) makin kecil kekuasaannya dan semakin tergantung pada kekuasaan asing. Kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan makin hilang. Secara langsung penguasa Belanda mencampuri urusan pemerintahan pribumi. Misalnya, dalam penggantian takhta, pengangkatan pejabat-pejabat kraton, dan juga dalam menentukan jalannya pemerintahan kerajaan. Banyaknya wilayah kerajaan yang telah diambil-alih oleh penguasa Belanda, menyebabkan ciutnya wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa pribumi. Hak-haknya sebagai penguasa pribumi diperkecil dan kemudian ada yang dihapus. Penghasilan yang semula

Ilumih at Perancis — Inggris

Dandels menjadi Gubernur Belanda-Perancis

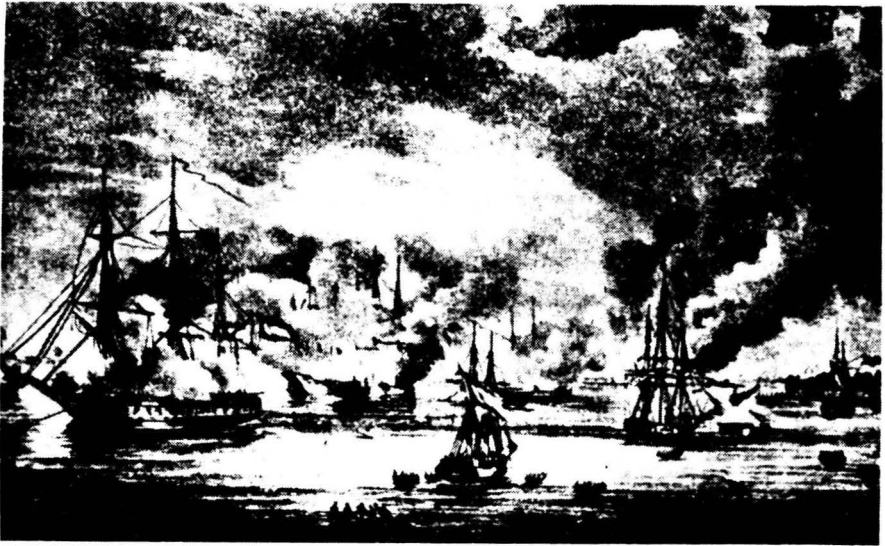
diperoleh dari tanah-tanah jabatan atau lungguh, upeti, atau hasil-hasil bumi yang dikuasai, semuanya makin lama makin hilang. Pendapatan mereka kemudian diganti dengan gaji berupa uang, karena kedudukan mereka kemudian telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. Sudah barang tentu banyak yang merasa penghasilannya menjadi semakin kecil.

Tugas-tugas penguasa pribumi yang ada di bawah pemerintahan Belanda lebih banyak dikerahkan untuk membantu pemerintah kolonial dalam menggali kekayaan bumi Indonesia, seperti memungut pajak, mengurus tanaman milik pemerintah dan mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah. Para petani juga memiliki beban yang berat. Mereka dibebani untuk menanam tanaman yang menguntungkan pemerintah, dan menyerahkan tenaganya untuk kepentingan pemerintah kolonial secara paksa. Sudah barang tentu banyaknya bahan perdagangan dan kegiatan perdagangan yang dijadikan monopoli bagi pemerintah kolonial, telah menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian penduduk, seperti di daerah Maluku dan di daerah-daerah pantai yang semula dilalui oleh lalu lintas perdagangan.

Turunnya kedudukan penguasa-penguasa pribumi yang hanya menjadi alat pemerintah Belanda, mengakibatkan turunnya derajat dan kehormatannya sebagai pemuka rakyat pribumi. Mereka tidak lebih daripada singa yang telah kehilangan kuku dan taringnya. Mereka bukan lagi orang yang berkuasa, melainkan orang yang dikuasai. Di lain pihak dalam abad ke-19 sedikit demi sedikit mulai terasa masuknya pengaruh tatahidup Barat dalam masyarakat Indonesia. Cara pergaulan Barat, gaya hidup Barat, bahasa Barat, cara berpakaian Barat, mulai dikenal di kalangan-kalangan atas. Demikian juga beberapa tradisi kehidupan di lingkungan kraton mulai luntur akibat dicampuri langsung oleh kekuasaan Belanda. Di beberapa lingkungan penguasa pribumi mulai timbul kekhawatiran akan rusaknya tradisi kehidupan mereka. Demikian pula di lingkungan kehidupan agama timbul kecurigaan terhadap pengaruh Barat yang dianggap bertentangan dengan ajaran atau tradisi agama.

Dengan singkat dapatlah dikatakan bahwa penetrasi kekuasaan kolonial Belanda pada abad ke-19 telah menyebabkan runtuhnya

kekuasaan politik, merosotnya kehidupan sosial ekonomi, dan goyangnya tradisi bagi penduduk pribumi. Kegelisahan, kekecewaan dan kebencian tidak hanya timbul di kalangan penguasa pribumi saja, tetapi juga terjadi di lingkungan rakyat pribumi pada umumnya.



Serangan Belanda terhadap Palembang tahun 1821

Sumber : D.J.M. Tate, *The Making of Modern South-East Asia*,

Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila timbulnya perlawanan terhadap pemerintah kolonial, tidak hanya dikobarkan oleh para penguasa atau pemuka pribumi saja, tetapi juga didukung oleh rakyat banyak. Tidak jarang kericuhan-kericuhan yang semula timbul di lingkungan rumah tangga kraton, atau pertentangan antar-golongan, merembet menjadi perlawanan besar, karena dicampuri oleh pihak ketiga, yaitu penguasa Belanda. Perlawanan itu sendiri kemudian tertuju kepada pihak pemerintah kolonial Belanda. Praktek-praktek penindasan dan pemerasan yang timbul sebagai akibat dari pada peraturan-peraturan yang dibawa oleh pemerintah kolonial, sering menjadi alasan bagi para petani untuk mendukung setiap perlawanan terhadap pihak yang berkuasa.

Mengapa perlawanan yang timbul pada abad ke-19 hampir terjadi di seluruh daerah Indonesia ? Karena pada abad itu pemerintah kolonial Belanda mengadakan perluasan kekuasaan di seluruh daerah Indonesia. Secara paksa pemerintah Belanda mengadakan penaklukan terhadap daerah-daerah di seluruh Nusantara untuk dimasukkan segera langsung ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah kolonialnya. Dengan perluasan kekuasaan kolonial tersebut, maka kebebasan penduduk semakin hilang. Perlawanan besar atau kecil yang timbul di daerah-daerah selama abad itu pada dasarnya adalah perlawanan penduduk terhadap penguasa asing yang membawa kegoncangan dalam tata hidupnya.

2. Perlawanan Rakyat Maluku di bawah Thomas Matulessi (1817)

Semenjak VOC berhasil menanamkan kekuasaannya di daerah Maluku, maka rempah-rempah yang dihasilkan daerah itu menjadi bahan monopoli Kompeni. Kebebasan untuk menjual rempah-rempah kepada pedagang selain VOC, tidak diberikan. Harga penjualan telah ditentukan oleh pihak VOC, yang biasanya sangat murah. Kompeni melakukan pengawasan ketat terhadap penduduk dan tidak jarang menggunakan kekerasan. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk Maluku dengan pedagang Jawa, Melayu atau lainnya dianggap gelap. Untuk mencegah jangan sampai harga cengkeh di pasaran menurun karena kebanyakan produksi, maka Kompeni memaksa rakyat untuk menebang pohon cengkehnya. Dengan cara ini keuntungan dapat dipertahankan. Untuk mencegah perdagangan "gelap" antara penduduk dengan pedagang lain dan untuk mencegah produksi lebih, diadakan pelayaran hongi, untuk membinasakan pohon-pohon rempah-rempah yang dianggap berlebih. Karena tindakan kejam itu rakyat kehilangan matapencahariannya dan tenggelam ke dalam kesengsaraan dan kelaparan.

Beban hidup yang berat itu menimbulkan sikap nekad di kalangan rakyat. Pada masa pemerintahan Inggris di Maluku timbul harapan bagi rakyat. Untuk menarik hati rakyat, penguasa Inggris mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban rakyat, penyerahan paksa dihapus, dan pekerjaan rodi dikurangi. Pemasukan barang-barang dagangan dilakukan. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Setelah daerah ini kembali ke tangan Belanda praktek-

praktek lama dijalankan kembali. Tekanan-tekanan berat kembali membebani kehidupan rakyat. Selain sistem penyerahan paksa, masih terdapat beban kewajiban lain yang berat, antara lain : kewajiban kerja blandong, penyerahan atap dan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng dan kopi.

Akibat dari penderitaan itu maka rakyat Maluku pada tahun 1817 angkat senjata di bawah pimpinan Thomas Matulessi, yang kemudian termashur dengan sebutan Pattimura. Perlawanan dimulai dengan penyerbuan benteng Belanda yang bernama *Duurstede* di Saparua. Tidak sedikit penduduk dari daerah pulau sekitarnya yang ikut serta dalam perlawanan itu baik yang beragama Kristen maupun Islam. Setelah terjadi pertempuran yang sengit akhirnya benteng *Duurstede* jatuh ke tangan rakyat. Banyak korban pihak Belanda yang jatuh. Residen Belanda sendiri ikut terbunuh dalam pertempuran tersebut. Perlawanan meluas ke Ambon, Seram dan tempat-tempat lainnya. Berulang kali Belanda mengerahkan pasukan untuk menumpas perlawanan di daerah itu, tetapi berulang kali mendapat pukulan berat dari pasukan Maluku.

Pertempuran-pertempuran pada akhirnya makin berkurang setelah banyak di antara para pemimpin rakyat Maluku tertawan. Thomas Matulessi sendiri dengan beberapa orang kawan-kawannya tertangkap dalam suatu pertempuran. Pada tanggal 16 Desember 1817 Matulessi dan kawan-kawan seperjuangannya menjalani hukuman mati di tiang gantungan sebagai pahlawan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Dalam perlawanan ini terkenal pula seorang tokoh wanita Martha Christina Tiahahu.

3. Perlawanan Kaum Padri (1821 - 1837)

Penyebaran agama Islam di Minangkabau telah berlangsung lama. Salah seorang ulama yang dianggap berjasa dalam pengembangan Islam di daerah ini adalah Syeh Burhanuddin. Ia dikenal juga sebagai murid Abdurrauf, tokoh ulama Islam di Singkel. Sekalipun masyarakat Minangkabau telah cukup lama memeluk agama Islam tetapi sebagian besar dari mereka masih memegang teguh adat dan menjalankan kebiasaan lama. Kebiasaan seperti minum minuman keras, berjudi dan menyabung ayam masih banyak yang melakukannya, sekalipun dalam ajaran Islam termasuk perbuatan yang terlarang. Keadaan

semacam itu terutama terjadi dilingkungan golongan masyarakat yang memang kepercayaan Islamnya masih belum tebal. Sampai beberapa lamanya tata hidup menurut Islam dan kebiasaan menurut adat masih dapat hidup berdampingan dalam masyarakat Minangkabau.

Pada awal abad ke-19 itu terjadilah perubahan. Pada waktu itu mulai banyak orang Minangkabau yang kembali dari Mekah setelah bermukim beberapa lama di sana sesudah menunaikan ibadah haji. Kedatangan para haji itu membawa pandangan baru. Selama di Mekah mereka telah menyaksikan adanya gerakan kaum Wahabi yang sedang berusaha keras untuk mengadakan pembersihan dalam masyarakat Islam terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran Qur'an dan Hadith. Sekembali di tanahair, mereka menganggap bahwa banyak hal dalam kehidupan masyarakat Minangkabau waktu itu yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu mereka bertekat untuk mengadakan pembersihan terhadap kebiasaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Tokoh dari golongan pemurni ini diantaranya ialah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka berasal dari daerah Pantai Sikat, VII Kota dan Tanah Datar. Dalam kegiatannya itu golongan mereka kemudian dikenal sebagai "kaum Padri". Tujuan dari gerakan yang dilancarkan mereka terutama ialah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikannya kepada kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

Ajaran baru yang dibawa oleh kaum Padri itu ada yang menyambut baik dan sebaliknya ada pula yang menolaknya. Kebanyakan kaum ulama yang telah lama bergerak dalam penyiaran agama dan beberapa kepala negeri menerima baik dan menyetujui gerakan tersebut. Tetapi di pihak lain golongan kaum adat yang masih memegang teguh kebiasaan kehidupan lama menentang usaha-usaha pembaharuan tersebut. Mereka tidak menghendaki terganggunya adat-kebiasaan lama yang telah berakar dalam masyarakat. Dengan demikian lahirlah dua golongan masyarakat yang berbeda pandangannya, yaitu kaum Padri dan kaum adat.

Dalam kegiatan-kegiatannya kaum Padri banyak menunjukkan sikap yang keras. Berbagai kebiasaan lama, seperti menyabung ayam berjudi dan minum minuman keras mereka tentang dengan lantang

dan terbuka. Cara menjalankan agama juga mulai ditertibkan sebagaimana mestinya. Akibat dari tindakan-tindakan yang keras tersebut maka akhirnya timbullah ketegangan-ketegangan. Kaum adat melakukan reaksi terhadap kaum Padri. Ketegangan-ketegangan yang terjadi antara kedua kelompok tersebut pada akhirnya meningkat menjadi bentrokan bersenjata di antara pengikut kedua belah pihak. Pertempuran antara kedua golongan ini terjadi di berbagai tempat. Di antara kaum Padri yang paling kuat adalah yang berkedudukan di Bonjol. Tokoh Tuanku Imam Bonjol muncul sebagai pemimpin kaum Padri yang terkenal setelah ia menggantikan kedudukan Datuk Badaro. Dalam pertempuran-pertempuran tersebut kaum adat banyak yang terdesak.

Pertentangan antara kedua golongan masyarakat di Minangkabau ini kemudian menjadi berubah ke arah yang baru setelah datangnya campur-tangan pihak ketiga, yaitu kekuasaan asing. Pernah Letnan Gubernur (dari pihak Inggris) Stamford Raffles, sewaktu berkuasa di bagian daerah ini ingin mencampuri pertentangan itu, tetapi gagal. Kaum adat mau bekerjasama dengan Raffles, bahkan meminta bantuannya dalam melawan kaum Padri. Sebaliknya kaum Padri menolak untuk melakukan kerjasama dengan Inggris.

Demikian juga setelah daerah Sumatra Barat oleh Inggris diserahkan kembali ke tangan Belanda, maka kaum Padri melakukan penentangan. Kaum Padri mengangkat senjata secara umum untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Belanda yang hendak ditanamkan di daerah Minangkabau sampai ke pelosok-pelosok. Perlawanan dimulai pada tahun 1821 dengan serbuan ke berbagai pos Belanda dan pencegahan terhadap patroli Belanda. Sasaran-sasaran dalam gelombang serangan awal itu, antara lain pos-pos Belanda yang ada di Semawang, Sulit Air, Sipinang dan tempat lainnya. Dalam suatu pertempuran pada tahun itu Tuanku Pasaman mengerahkan tidak kurang dari 20.000 sampai 25.000 orang untuk melawan pasukan Belanda yang terdiri dari 200 orang pasukan Eropa dengan 8.000 atau 10.000 orang pasukan pribumi. Pasukan Padri bersenjatakan senjata-senjata tradisional, seperti tombak, parang dan lain-lainnya; sedangkan pihak musuh menggunakan meriam dan jenis senjata lainnya. Pertempuran berlangsung demikian serunya sehingga banyak menimbulkan korban pada kedua belah pihak. Pada per-

tempuran itu pula Tuanku Pasaman terpaksa harus mundur ke daerah Lintau, setelah menderita korban yang banyak. Pasukan Belanda setelah berhasil menguasai lembah Tanah Datar, mereka kemudian mendirikan benteng pertahanan di Batusangkar (kemudian diberi nama Fort Van Der Capellen).

Benteng-benteng pertahanan kaum Padri dibangun di berbagai tempat dan diperkuat dengan pasukan-pasukan yang banyak jumlahnya. Benteng-benteng pertahanannya, antara lain, Bonio, di daerah Agam, Bonjol, dan di beberapa tempat lainnya. Pertempuran-pertempuran secara berturut-turut berlangsung dari tahun 1821 sampai tahun 1825. Seringkali Belanda menggunakan taktik membujuk pemimpin-pemimpin Padri supaya mau berunding atau berdamai dengan pihak Belanda, tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Selama itu boleh dikata perlawanan berkobar di berbagai tempat. Dalam pertempuran itu kaum adat cenderung kepada pihak Belanda, dan memang kaum adat meminta pihak Belanda untuk melawan kaum Padri.

Pada tahun 1825 di Jawa mulai berkobar Perang Diponegoro. Pasukan Belanda yang bertugas di Sumatra Barat harus dikurangi untuk dikerahkan ke Jawa. Dalam kesempatan itu kaum Padri semula melakukan serangan-serangan yang gencar terhadap sisa pasukan yang masih ditinggalkan di daerah itu. Tetapi sementara itu pihak Belanda menggunakan taktik berdamai dengan pihak Padri. Perdamaian dapat diadakan pada tahun 1825. Tetapi perdamaian itu tidak berlangsung lama karena pihak Belanda banyak melakukan tekanan-tekanan kepada penduduk setempat, sehingga akhirnya meletuslah perlawanan kembali dari pihak kaum Padri diikuti oleh rakyat setempat. Perlawanan segera menjalar kembali ke berbagai tempat. Tuanku Imam Bonjol, dengan teman seperjuangannya Tuanku nan Gapuk, Tuanku Hitam dan Tuanku nan Cerdik memimpin pertempuran-pertempuran. Berkali-kali pasukan Belanda harus dikerahkan untuk menghadapi serbuan kaum Padri dari berbagai daerah. Berkali-kali pula jatuh korban di kedua belah pihak. Dari tahun 1826 sampai 1833 pergulatan tampak menanjak. Pasukan Belanda sesudah selesainya Perang Diponegoro pada tahun 1830 mulai dikerahkan kembali untuk menghadapi serangan Padri. Pasukan bantuan di-

datangkan lagi dari Jawa. Salah satu benteng pertahanan kaum Padri yang ada di dekat Tanjong Alam mulai diserang dengan sejumlah pasukan Belanda. Pertempuran sengit berkobar pada tahun 1833. Dalam pertempuran ini tidak kurang dari 2000 pasukan Padri harus berhadapan dengan pasukan Belanda, yang banyak meminta korban dikedua belah pihak. Pertempuran ini rupanya telah melemahkan kaum Padri yang ada di markas Tanjong Alam, dan Tuanku nan Cerdik terpaksa menyerah kepada pihak Belanda. Semenjak itu perlawanan-perlawanan dipimpin sendiri oleh Tuanku Imam Bonjol.

Dalam menghadapi perlawanan pihak musuh, sudah barang tentu Imam Bonjol sudah tidak sekuat seperti semula, yaitu sewaktu teman-teman seperjuangannya masih gigih berjuang bersama-sama secara lengkap. Setelah sebagian banyak dari mereka menyerah, maka kekuatan Tuanku Imam Bonjol menjadi berkurang. Sementara itu pihak musuh semakin memusatkan kekuatannya untuk melakukan pukulan-pukulan berat kepada pihak kaum Padri. Jatuhnya berbagai daerah ke tangan Belanda juga menciutkan gerak pasukan Padri untuk melakukan serangan-serangan yang lebih luas. Sekalipun demikian sampai tahun 1836 kekuatan Padri belum dapat dikalahkan samasekali oleh kekuatan militer Belanda. Untuk memukul benteng kaum Padri di Bonjol pimpinan Belanda menyerahkan pasukan gabungan yang terdiri dari orang Belanda, orang Afrika, orang pribumi dan orang Eropa lainnya.

Setelah mengalami tekanan-tekanan berat dari pihak musuh maka Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837 bersedia untuk mengadakan perundingan perdamaian. Tetapi perundingan perdamaian itu oleh Belanda hanyalah dipakai untuk mengetahui kekuatan yang terakhir di pihak Padri, yang ada di benteng Bonjol, sementara mengharapkan Tuanku Imam Bonjol mau menyerahkan diri. Perundingan gagal karena pihak Belanda memang telah melakukan persiapan untuk mengepung benteng tersebut. Pertempuran segera meledak. Dengan susah payah pasukan Padri menghadapi kekuatan musuh yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya benteng kaum Padri jatuh ke tangan musuh. Tuanku Imam Bonjol beserta sisa-sisa pasukannya tertawan pada tanggal 25 Oktober 1837. Menyerahnya Tuanku Imam Bonjol memang tidak berarti berhentinya perlawanan-perlawanan, tetapi penyerahan itu cukup melumpuhkan kegiatan

kaum Padri. Secara kecil-kecilan pertempuran masih dilakukan oleh tokoh pimpinan lainnya, diantaranya oleh Tuanku Tambusi.

4. Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825 - 1830)

Sejak akhir abad ke-17 sampai menjelang perlawanan Diponegoro, kerajaan Mataram mengalami kemerosotan. Wilayah kerajaan makin menciut karena banyak daerah yang diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya. Daerah-daerah di pantai utara Jawa berangsur-angsur diambil-alih oleh Belanda. Daerah Karawang dan Semarang dikuasai Belanda pada tahun 1677, dan pada tahun 1743 daerah Cirebon, Rembang, Jepara, Surabaya, Pasuruhan dan Madura. Dengan hilangnya daerah-daerah pesisir, kerajaan Mataram makin melepaskan kegiatan pelayaran dan perdagangannya dan memusatkan kegiatannya pada bidang pertanian di pedalaman.

Makin menyempitnya wilayah kerajaan tidak hanya menyebabkan mengecilnya kekuasaan raja, tetapi juga menyebabkan kecilnya penghasilan kerajaan. Raja makin lama makin tergantung kepada Belanda. Untuk membiayai pemerintahan kerajaan saja ia semakin tergantung pada uang pengganti dari Belanda di samping dari hasil pajak penghasilan dari daerah yang masih dikuasainya. Untuk menambah penghasilan, banyak dilakukan penarikan cukai sebagai sumber penghasilan tertentu yang diborongkan kepada orang Cina. Pemborongan itu misalnya terjadi pada cukai jalan, jembatan dan sarang burung. Akibat dari sistem pemborongan ini beban rakyat makin menjadi berat. Pemborong banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Perpecahan di kalangan keluarga kerajaan di Mataram tidak saja melemahkan kerajaan, tetapi juga menyebabkan pengaruh Belanda makin menjadi kuat. Setiap pertentangan antar keluarga bangsawan di kraton akan mengundang campur tangan pihak Belanda, yang pada akhirnya merugikan kerajaan itu sendiri sebagai keseluruhan. Pada permulaan abad ke-19 pengaruh keadaan Belanda pada kerajaan Surakarta dan Yogyakarta makin kuat. Pada masa Daendels terdapat usaha mencampuri urusan tatacara di istana. Misalnya, Daendels menghendaki persamaan derajat dengan Sultan pada waktu upacara kunjungan resmi diadakan di kraton. Dalam upacara tersebut pembesar Belanda supaya diijinkan duduk sejajar dengan raja, dan sajian

sirih supaya dihapuskan. Raffles juga meneruskan usaha yang sama terhadap kehidupan kraton. Keadaan yang demikian itu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidak-senangan di antara beberapa golongan bangsawan. Mereka menganggap bahwa martabat kerajaan menjadi merosot akibat tindakan Belanda tersebut. Tambahan lagi setelah kebiasaan minum-minuman keras beredar di kalangan kaum bangsawan atau rakyat umum, kekecewaan dan kekhawatiran di kalangan golongan agama di istana makin meningkat. Kebiasaan yang timbul dari pergaulan dengan orang Barat semacam itu dianggap akan membahayakan kehidupan agama. Sultan di mata golongan agama tidak lagi dipandang sebagai khalifah.

Dalam keadaan yang demikian itu timbullah kelompok bangsawan dan kaum ulama di istana yang aktif menentang keadaan tersebut. Mereka berusaha untuk melakukan penentangan terhadap penyebab dari kemerosotan itu, yaitu Belanda. Salah seorang tokoh yang anti Belanda dari kelompok ini ialah Pangeran Diponegoro. Sebagai seorang yang taat menjalankan agama Islam dan pernah menjadi Wali pendamping Sultan yang masih muda, Diponegoro menganggap pengaruh Belanda sangat membahayakan. Oleh karena itu ia ingin membatasinya. Diponegoro juga kecewa terhadap sikap raja dan beberapa pejabat kesultanan lainnya. Ia menjadi bersikap acuh tak acuh terhadap urusan kraton, dan bersikap membangkang terhadap kekuasaan Belanda.

Kekecewaan tidak hanya terdapat di lingkungan kraton, tetapi juga terdapat di lingkungan rakyat. Kaum petani di pedesaan makin berat bebannya setelah pemerintah kerajaan mengizinkan perusahaan asing menyewa tanah sawah kerajaan untuk kepentingan perusahaan. Sering tanah disewa bersama dengan para penduduknya. Tanah persawahan juga ikut terdesak oleh adanya penyewaan sawah oleh perusahaan swasta asing. Lebih-lebih dengan adanya praktek-praktek pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh para pejabat maupun pemborong asing, sehingga sebagian besar rakyat merasa tertekan hidupnya. Ibarat api dalam sekam, kebencian rakyat sewaktu-waktu dapat meledak, bila sumbu letupnya telah terbakar.

Kebencian meningkat menjadi kemarahan ketika Belanda mencoba untuk memasang jalan kereta api yang akan melintasi tanah

makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Pembuatan jalan tersebut yang dilakukan tanpa seijin Diponegoro sudah tentu mendapat tantangan keras. Pihak Belanda yang telah lama mencurigai Diponegoro, bersikap keras ingin melanjutkan usahanya itu, sekalipun mendapat penentangan dari pihak Diponegoro. Sebaliknya Pangeran Diponegoro yang telah lama benci terhadap Belanda menjadi hilang kesabarannya, dan pada tanggal 20 Juli 1825 mengangkat senjata melawan Belanda. Dalam waktu singkat rakyat petani di sekitar Tegalrejo menyambut gembira pecahnya perlawanan Diponegoro terhadap Belanda. Dengan bersenjatakan tombak, lembing, keris, umban pelembar, rakyat bergerak melakukan pertempuran melawan pasukan musuh.

Setelah pertempuran di Tegalrejo ini, Diponegoro dengan pasukannya menyingkir ke bukit Selarong untuk mengatur siasat perlawanan selanjutnya. Keluarganya diungsikan ke Dekso. Kabar mengenai pecahnya perang melawan Belanda meluas ke berbagai daerah. Rakyat petani yang telah lama menderita dalam kehidupannya, banyak yang segera datang untuk ikut serta dalam perlawanan. Demikian pula para ulama dan beberapa bangsawan yang setuju dengan Diponegoro menggabungkan diri ke markas Diponegoro. Daerah-daerah lain juga menyambut baik seruan perlawanan Diponegoro. Dengan serta-merta beberapa daerah lain bangkit melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang ada di tempat tersebut. Kyai Mojo, seorang ulama dari daerah Surakarta, datang untuk bergabung dengan Diponegoro. Bersama dengan Kyai ini dibentuklah berbagai kelompok pasukan. Semboyan Perang Sabil dikumandangkan ke segenap pengikutnya, baik yang ada di daerah Selarong maupun yang ada di daerah lain. Malahan seorang Kyai yang bernama Hasan Besari diutus Diponegoro untuk menyebarkan Perang Sabil di daerah Kedu.

Pada tahun-tahun pertama, pertempuran meluas sampai ke daerah Pacitan dan Purwodadi, dan dalam waktu berikutnya meluas sampai ke daerah Banyumas, Pekalongan, Semarang, Rembang dan Madiun. Di daerah Kertosono pertempuran dipimpin oleh Bupati Kertosono, dan di daerah Banyumas dipimpin oleh Pangeran Surojo. Di daerah Madiun perlawanan dilakukan di bawah pimpinan Bupati Kertodirjo, dan Pangeran Serang. Di daerah Plered pasukan

Diponegoro dipimpin oleh Kertopengalasan yang memiliki kemampuan yang cukup kuat. Pada tahun 1826 serangan-serangan yang dilancarkan oleh pihak Belanda terhadap pasukan Diponegoro yang ada di Plered berhasil dapat ditangkis. Sementara itu di daerah lain pertempuran-pertempuran banyak dilakukan oleh pasukan Alibasah Sentot Prawirodirjo, yaitu salah seorang panglima yang terkemuka dalam tentara Diponegoro. Berkali-kali pasukan Sentot berhasil memukul pasukan Belanda. Dalam pertempuran di dekat daerah Lengkong (1826), pasukan Diponegoro juga berhasil menghancurkan pasukan musuh. Dalam pertempuran itu seorang letnan Belanda dan dua orang bangsawan tinggi tewas. Di Delanggu dalam tahun yang sama juga terjadi medan pertempuran melawan pasukan musuh yang sama. Pasukan Diponegoro berhasil mendesak pihak lawan dan menduduki daerah tersebut.

Dalam pertempuran-pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826 pasukan Belanda banyak terpukul dan terdesak. Oleh karena itu pihak Belanda berusaha mencari taktik baru dalam menghadapi perlawanan pasukan Diponegoro. Pada tahun 1827 Jenderal De Kock membuat siasat perang baru yang terkenal *Benteng Stelsel* yaitu membuat sistem benteng. Sistem ini dilakukan dengan tujuan pokok mempersempit ruang-gerak dari pasukan Diponegoro. Caranya ialah dengan jalan mendirikan benteng pertahanan di daerah-daerah yang telah dikuasainya. Dengan sistem ini pula Belanda bermaksud untuk dapat melakukan penekanan terhadap Diponegoro agar mau menghentikan perlawanannya. Selain itu Belanda juga berusaha untuk melunakkan pihak Diponegoro dengan jalan mengajaknya untuk melakukan perundingan perdamaian. Perundingan semacam itu pernah dilakukan di Klaten pada tahun 1827, tetapi gagal. Pertempuran berkobar kembali.

Dalam pertempuran-pertempuran berikutnya pasukan Diponegoro mengalami kemunduran akibat banyaknya pemimpin pasukan mereka yang tertangkap oleh pihak musuh. Pangeran Suryomataram dan Ario Prangwadono tertangkap, sedangkan Pangeran Serang dan Pangeran Notoprodjo menyerah dengan pasukannya. Hal itu disebabkan karena pihak Belanda terus mendatangkan bala bantuan dari daerah lain untuk melakukan perlawanannya. Perlawanan rakyat Tuban yang semula kuat pada akhirnya dapat dipatahkan oleh pihak lawan.

Sentot Prawirodirdjo masih terus melakukan pertempuran di daerah barat Kali Progo. Tetapi taktik Belanda dalam menggunakan orang lain untuk melunakkan pendirian Sentot berhasil, sehingga akhirnya tokoh yang ulung itupun mau menyerah kepada Belanda dengan berbagai syarat (1829). Tokoh lainnya seperti Pangeran Ario Papak dan Sosrodilogo (Rembang) telah menyerah lebih dahulu (1828). Sementara itu Pangeran Djoyokusumo yang banyak membantu Diponegoro dalam menyusun taktik, gugur dalam pertempuran. Kesemuanya ini bagi Diponegoro merupakan pukulan yang berat.

Dalam situasi yang demikian itu pihak Belanda semakin mempercepat usahanya untuk menyelesaikan perang dengan berbagai jalan. Selain desakan-desakan terhadap pihak Diponegoro untuk mau berunding, Belanda juga melancarkan usaha untuk menangkap Diponegoro. Dengan berbagai usahanya akhirnya usaha Belanda berhasil. Melalui Kolonel Kleerens pada tanggal 16 Februari 1830 Diponegoro bersedia untuk diajak berunding di desa Romo Kamal. Perundingan dilanjutkan pada hari berikutnya di Magelang atas desakan pihak Belanda. Dijanjikan bahwa Belanda akan berlaku jujur, dalam pengertian bahwa apabila perundingan gagal, Diponegoro diperbolehkan kembali ke tempat pertahanannya. Dengan dasar kepercayaan kepada janji Belanda yang demikian itu pada tanggal 21 Februari 1830 Diponegoro beserta dengan pasukannya datang ke bukit Manoreh, dan pada tanggal 8 Maret tiba di kota Magelang. Sementara itu Jenderal De Kock telah mengatur siasat untuk menangkap Diponegoro, bila perundingan gagal. Perundingan diadakan di rumah Residen Kedu di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Perundingan itu gagal, dan dengan tidak menduga-duga Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Dengan tertangkapnya Diponegoro perlawanan-perlawanan di daerah semakin menurun. Diponegoro kemudian dibawa ke Manado dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Ujungpandang. Pada 8 Januari 1855 Diponegoro meninggal di tempat pembuangan di kota tersebut.

Perlu diketahui bahwa Sentot Prawirodirdjo yang menyerah kepada Belanda dikirim ke Sumatra Barat untuk memerangi Kaum Padri. Tetapi di daerah ini Sentot dicurigai karena mengadakan perundingan dengan Kaum Padri, oleh karenanya ia segera ditarik kembali untuk diasingkan ke Jawa dan kemudian dibuang ke Bengkulu

sampai akhir hayatnya (17 April 1855). Tokoh lainnya, yaitu Kyai Mojo juga diasingkan ke Minahasa dan meninggal pada tanggal 20 Desember 1849 serta dimakamkan di Tondano.

Perlawanan Diponegoro ternyata mempunyai pengaruh yang besar dan luas daerah pendukungnya. Bagi Belanda perlawanan Diponegoro cukup berat dan membawa korban yang tidak sedikit. Dalam usaha untuk melawan Diponegoro Belanda telah kehilangan pasukannya sebanyak 8.000 orang Eropa, dan 7.000 orang serdadu pribumi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai perang itu tidak kurang dari 20 juta gulden, lain dari pada itu tidak sedikit kerusakan-kerusakan yang harus diderita oleh pihak perkebunan-perkebunan swasta asing yang dibakar atau dirusak.

5. Perlawanan-perlawanan di Sulawesi Selatan (sampai ± 1907), Kalimantan Selatan (1859 - 1905) dan di Bali (sampai 1909).

Perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terhadap perluasan kekuasaan Belanda bermaksud akan menghancurkan kekuasaan kerajaan-kerajaan yang belum mengakui kekuasaannya pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan. Di antara kerajaan-kerajaan yang tidak mau berhubungan dengan pemerintah Belanda ialah Tanete, Suppa, dan kerajaan Bone. Untuk menundukkan kerajaan-kerajaan tersebut pemerintah Belanda mengirimkan ekspedisi militernya, di samping menggunakan pertentangan antara kerajaan satu dengan yang lain sebagai jalan untuk ikut campur ke dalam pertentangan tersebut.

Pada tahun 1824 kerajaan Suppa dan Tanete menyiapkan diri untuk menghadapi ekspedisi Belanda yang dikirimkan untuk menundukkan daerah tersebut. Dengan kekuatan kurang-lebih 3.000 orang pasukan, Tanete bertempur melawan pasukan ekspedisi Belanda. Untuk menduduki daerah pertahanan Suppa, Belanda harus berkali-kali mengerahkan pasukannya dan mengorbankan sejumlah pasukannya, termasuk seorang perwiranya. Suppa dapat diduduki setelah mengalami perlawanan yang cukup sengit dengan pasukan bantuan dari berbagai tempat.

Setelah Tanete dan Suppa jatuh ke tangan musuh, maka Bone menyiapkan diri untuk menghadapi datangnya musuh ke wilayahnya.

Pada waktu pasukan musuh tiba pada tahun 1825, Bone telah siap dengan pasukannya. Pasukan Bone mati-matian mempertahankan benteng pertahanannya terhadap serangan pasukan Belanda. Berkali-kali serangan musuh dapat ditangkis tetapi setelah perlawanan berlangsung lama, pada akhirnya benteng pertahanan Bone jatuh ke tangan Belanda. Sekalipun demikian perlawanan rakyat di lain tempat masih diteruskan sampai awal abad ke-20, walaupun dalam bentuk yang kecil.

Di Kalimantan Selatan, Belanda telah beberapa lama dapat melakukan campur-tangan dalam kericuhan dan pertentangan yang terjadi di kalangan keluarga raja Banjar. Penentangan terhadap pengaruh Belanda tidak saja datang dari lingkungan istana, tetapi juga datang dari luar kraton, yaitu rakyat biasa. Hal ini terjadi karena Belanda telah lama berusaha untuk melaksanakan monopoli perdagangan di daerah tersebut. Sebagian besar rakyat menentang karena hal itu mematikan penghidupan mereka. Di lingkungan kraton terdapat golongan yang anti Belanda, di antaranya ialah Pangeran Hidayat. Pengangkatan Pangeran Tamjidillah yang tidak disenangi rakyat menjadi Sultan telah memperuncing keadaan. Pada hal rakyat lebih menyukai dan menganggap Pangeran Hidayat lebih berhak untuk menaiki takhta kerajaan. Tetapi Belanda tetap menobatkan Pangeran Tamjidillah dan mengesampingkan Pangeran Hidayat yang tidak menyukai Belanda.

Dengan adanya campur-tangan Belanda dalam penggantian sultan, maka rakyat mengadakan perlawanan terhadap sultan baru dan kemudian perlawanan diarahkan pula kepada Belanda. Dalam perlawanan ini Pangeran Hidayat berpihak kepada rakyat yang mengadakan perlawanan. Perlawanan rakyat terhadap Belanda berkobar pada tahun 1859 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Tokoh-tokoh lain yang membantu memimpin pertempuran pasukan Antasari tersebut, antara lain adalah Kyai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Buyasin dan Kyai Langlang. Penyerangan pertama dilakukan dengan menyerbu pos-pos Belanda. Tidak kurang dari 3.000 orang pasukan Antasari menyerang kedudukan Belanda yang ada di pos-pos tersebut. Setelah itu pasukan yang sama juga digerakkan untuk menyerbu benteng Belanda yang ada di Tabanio. Benteng ini berhasil diduduki oleh pasukan rakyat setelah mengadakan pertempuran

beberapa kali. Dalam pertempuran-pertempuran ini Pangeran Hidayat juga ikut aktif memimpin pasukan.

Sementara pertempuran-pertempuran terus berlangsung, pemerintah Belanda memecat Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi, karena ia menolak untuk menghentikan perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1860 jabatan sultan kosong dan jabatan mangkubumi dihapuskan, sehingga akhirnya kerajaan Banjar pun dihapuskan dan daerah tersebut secara langsung diperintah oleh pemerintah Belanda.

Perlawanan berjalan terus di berbagai tempat, seperti di Tanah Laut, Barito, Hulu Sungai dan Kapuas Kahayan. Dalam menghadapi serangan-serangan itu Belanda banyak mengalami kesulitan. Tetapi setelah mengerahkan balabantuan pasukan dari luar, Belanda setapak demi setapak dapat memukul pasukan-pasukan perlawanan rakyat. Akibat tekanan-tekanan yang berat dari pihak musuh, maka akhirnya beberapa orang pemimpin perlawanan tertangkap dan ada yang menyerah. Pangeran Hidayat tertangkap pada tahun 1862 dan dibuang ke Jawa. Kyai Demang Leman tertawan, tetapi beberapa waktu kemudian melarikan diri untuk kemudian meneruskan perlawanan kembali. Pangeran Antasari meneruskan perlawanannya dengan kawan-kawan seperjuangannya yang lain, sampai ia meninggal pada tahun 1861. Sepeninggal Antasari, memang kekuatan di pihak rakyat menurun tetapi perlawanan-perlawanan masih juga dilakukan oleh rakyat di bawah teman-teman Antasari yang masih hidup, di antaranya ialah Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Arsat, dan Antung Durrachman. Secara kecil-kecilan perlawanan itu masih terjadi sampai awal abad ke-20.

Di daerah Bali timbul perlawanan setelah Belanda berulang-kali hendak memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan hak-hak kekuasaan kerajaan-kerajaan Bali atas daerahnya. Salah satu hak yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Bali di daerah pantai ialah hak untuk menjalankan hukum *tawan karang*. Menurut hukum *tawan karang*, raja Bali berhak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya. Telah berulang kali kapal Belanda terdampar di salah satu pantai dari kerajaan Bali dan muatannya dirampas oleh Raja. Belanda telah mengajukan protes dan

mengadakan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pembebasan kapal-kapal Belanda. Tetapi raja-raja Bali sering tidak mengindahkannya. Di antara raja-raja Bali yang pernah diajak untuk mengadakan perjanjian pada tahun 1841 itu ialah raja-raja dari Kelungkung, Buleleng, Badung dan Karangasem. Dalam perjanjian itu sesungguhnya raja Bali telah dipaksa untuk mengakui kedaulatan pemerintah Belanda, dan mengizinkan pengibaran bendera Belanda di kerajaannya.

Tetapi kesemuanya itu tidak dilaksanakan oleh raja-raja Bali karena mereka dipaksa. Sehingga Belanda memutuskan untuk memakai kekerasan dalam usaha untuk menundukkan raja-raja Bali tersebut. Pada tahun 1846 Belanda mengirimkan ekspedisi militernya ke daerah kerajaan Buleleng. Karena itu Gusti Ktut Jelantik, yaitu patih kerajaan Buleleng, menyiapkan pasukan untuk menghadapi kedatangan musuh. Setelah ultimatum pihak Belanda yang ditujukan kepada Buleleng tidak diindahkan, maka pecahlah pertempuran antara pasukan Belanda dengan pasukan Buleleng di bawah pimpinan Gusti Jelantik. Ultimatum yang tidak diindahkan oleh Buleleng antara lain menyatakan bahwa raja Buleleng harus mengakui kekuasaan pemerintah Belanda, hak tawan karang harus dihapuskan, dan harus memberi perlindungan kepada perdagangan Belanda. Selain kerajaan Buleleng, kerajaan Karangasem juga mengobarkan perlawanan terhadap Belanda.

Dalam menghadapi perlawanan rakyat Bali, pihak Belanda terpaksa mengerahkan ekspedisi militer secara besar-besaran sebanyak tiga kali. Ekspedisi pertama dilakukan pada tahun 1846 dengan kekuatan 1700 orang pasukan darat, dengan persenjataannya lengkap yang tidak dimiliki oleh orang Bali. Dalam ekspedisi pertama ini pasukan Belanda tidak mampu untuk samasekali menundukkan pasukan rakyat Bali. Sekalipun Belanda berhasil mengajak raja berunding, tetapi raja tidak sepenuhnya tunduk. Ternyata raja Bali mau diajak berunding hanyalah sebagai taktik untuk dapat mengatur kekuatannya untuk mengadakan perlawanan kembali. Pertahanan disiapkan di benteng di Jagaraga. Setelah siap, Gusti Jelantik mengadakan serangan kembali. Karena serangan-serangan itu Belanda terpaksa harus mengirimkan ekspedisi militernya yang kedua kalinya, yaitu pada tahun 1848. Pertempuran yang sengit berkobar di Jagaraga.

Pasukan Bali bertahan sedangkan pasukan Belanda berusaha menyerbu dari luar. Korban banyak berjatuhan. Di antaranya lima perwira dan 75 orang serdadu tewas, sedangkan 7 orang perwira dan 98 orang prajurit luka-luka berat. Sekalipun salah satu bagian benteng Bali jatuh ke tangan Belanda, tetapi pasukan Belanda tidak dapat menduduki benteng Jagaraga. Balabantuan dari Batavia dikirimkan ke Bali. Dengan tambahan pasukan baru sebesar 1.000 orang, Belanda membuka serangan kembali. Sementara itu Gusti Jelantik telah memperkuat benteng Jagaraga dengan menyempurnakan bangunan dan persenjataannya. Serangan Belanda yang terakhir dapat ditangkis.

Pihak Belanda mengirimkan ekspedisi militemya yang ketiga kalinya dari Batavia pada tahun 1849. Ekspedisi militer yang terakhir ini berkekuatan 4177 orang pasukan, dengan peleton kavaleri, pasukan artileri dengan membawa 24 pucuk meriam dan juga dilengkapi sepasukan zen. Pasukan ini masih ditambah dengan tenaga pengangkut 3.000 orang. Dengan demikian pihak Belanda benar-benar mengerahkan kekuatan yang melimpah-limpah untuk menundukkan orang Bali. Kedatangan pasukan musuh ini disambut oleh pasukan Bali. Gusti Jelantik menyiapkan 3.000 orang pasukannya sebagian bersenjatakan tombak dan sebagian bersenjatakan senapan. Sementara itu pasukan dari Karangasem dan Buleleng juga telah siap dengan 10.000 sampai 20.000 pasukannya dengan persenjataan yang sama. Pertempuran meletus kembali di sekitar benteng Jagaraga. Prajurit yang mengadakan pertahanan di Jagaraga berjumlah sekitar 15.000 orang, di antaranya yang bersenapan hanya ada 2.000 orang. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari, sehingga memayahkan kedua belah pihak. Korban banyak yang jatuh pada kedua pihak. Pasukan Gusti Jelantik pada akhirnya terdesak dan banyak yang mengundurkan diri ke daerah luar benteng Jagaraga, sehingga benteng tersebut akhirnya dapat diduduki oleh Belanda. Raja Buleleng menyinkir. Jatuhnya Buleleng ke tangan Belanda mempengaruhi beberapa penguasa lain untuk bersikap lunak kepada Belanda.

Pertempuran juga masih berlangsung di daerah Karangasem dan Klungkung, yang masih juga dipimpin oleh raja Buleleng dan Gusti Jelantik dengan tokoh pimpinan lainnya. Perlawanan berakhir setelah sebagian besar kerajaan Bali dapat ditaklukkan samasekali

oleh pihak Belanda, yakni pada akhir abad ke-19. Tetapi baru pada tahun 1909 seluruh Bali masuk dalam wilayah kekuasaan Belanda.

6. Perlawanan di Aceh (1873-1904)

Sekalipun kesultanan Aceh pada abad ke 19 sudah tidak sebesar kesultanan pada abad ke 17, tetapi sampai tahun 1817 masih memiliki kebebasan sebagai kerajaan yang merdeka. Perjanjian 1824 yang mengatur daerah pengaruh Inggris dan Belanda di Indonesia, menyebutkan bahwa Belanda setelah memperoleh kembali daerah jajahannya dari tangan Inggris, tidak dibenarkan untuk mengganggu kemerdekaan kerajaan Aceh. Dengan demikian kerajaan Aceh tetap berdaulat, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Situasi berubah setelah Belanda dan Inggris pada tahun 1871 mengadakan perjanjian mengenai masalah daerah pengaruh di Sumatra. Dalam perjanjian tersebut Belanda mendapat kebebasan untuk mengadakan perluasan kekuasaannya ke daerah lain di Sumatra, termasuk daerah Aceh. Sudah barang tentu bagi Aceh hal itu merupakan ancaman besar. Oleh sebab itulah Aceh segera memperkuat diri untuk menghadapi kemungkinan datangnya Belanda ke wilayahnya. Hubungan dengan luar negeri segera dilakukan, antara lain dengan Turki, dan pendekatan dengan perwakilan Amerika Serikat serta Italia dilakukan di Singapura.

Dalam pada itu Belanda memang melakukan persiapan untuk mengirimkan ekspedisi militernya ke Aceh. Karena Belanda tidak menghendaki adanya campur-tangan dari negara asing di kawasan itu, mereka berusaha untuk bertindak cepat. Pada tahun 1873 Belanda mengirimkan pasukan terdiri dari 168 orang perwira dan 3193 orang prajurit. Pasukan Aceh yang telah menantikan pendaratan pasukan musuh tersebut mengadakan perlawanan. Setelah beberapa lama terjadi tembak-menembak di daerah pantai, pasukan Aceh mengundurkan diri dan berkubu di sekitar Mesjid Raya. Pertahanan laskar Aceh segera diperkuat. Pertempuran dilanjutkan di sekitar Mesjid Raya. Perlawanan dilakukan dengan perkelahian orang-seorang. Tembakan meriam diarahkan ke Mesjid Raya sehingga akhirnya terbakar. Pasukan Aceh terpaksa mundur, dan Mesjid Raya diduduki oleh Belanda. Tetapi pasukan Aceh berhasil menembak Jenderal Kohler sehingga ia tewas ketika pergulatan di Mesjid itu masih

berlangsung.

Pasukan Aceh kemudian diperkuat dan berpangkalan di sekitar istana Sultan Mahmudsyah. Pasukan-pasukan terus digerakkan untuk melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda yang ada di daerah lain. Dalam pertempuran di Mesjid Raya, tentara Belanda telah banyak kehilangan anak buah, sementara pasukan lainnya mengundurkan diri ke daerah pantai. Usaha Belanda untuk menundukkan Aceh dengan serangan terbuka ternyata tidak berhasil. Aceh kemudian diblokade dari luar.

Dalam Perang Aceh muncullah tokoh-tokoh pemimpin seperti Panglima Polim, Teuku Imam Lueng Bata, Cut Banta, Teungku Ci' Di Tiro, Teuku Umar, dan isterinya Cut Nya' Din, dan masih banyak lagi panglima-panglima lainnya yang memimpin perlawanan di daerahnya masing-masing.

Pada waktu berikutnya pihak Belanda mendaratkan ekspedisi militernya lagi dengan kekuatan yang lebih besar, dengan pimpinan Jenderal J. Van Switen. Tidak kurang dari 8.000 orang serdadu didaratkan di Aceh. Pertempuran meletus kembali. Pertempuran yang terjadi pada awal tahun 1874 ini kembali mengambil tempat di sekitar Mesjid Raya. Panglima Polim memimpin usaha menangkis setiap usaha Belanda untuk mendekati Mesjid Raya. Setelah perlawanan berlangsung beberapa lama, pasukan Belanda berhasil mendesak pasukan Aceh untuk mengundurkan diri dari Mesjid Raya, sehingga pihak Belanda dapat menduduki Mesjid tersebut. Dari tempat ini serangan Belanda mulai diarahkan ke pertahanan yang ada di Istana. Dengan melalui pertempuran sengit Istana Sultan dapat diduduki oleh pihak musuh. Sultan dan para panglima lainnya meninggalkan istana untuk terus melakukan perlawanan di luar kota. Belanda mengira bahwa dengan menduduki istana maka ia telah berkuasa di Aceh. Tetapi apa yang dibayangkan Belanda meleset. Proklamasi Belanda tentang penguasaan Aceh oleh Belanda, tidak dihiraukan oleh rakyat Aceh. Sementara itu Sultan Muhammad Daudsyah, yang masih berumur 6 tahun, dibantu oleh dewan mangkubumi dalam pemerintahannya berpusat di tempat lain.

Penyerangan-penyerangan Belanda terus terjadi di berbagai tempat, seperti di Luengbata, Ketapang Dua, Bukit Sibin, Kuala

Gigieng, Tibeng, Langkruk, Kuta Alam dan lainnya. Dalam suatu penyerangan terhadap pos Belanda di Tunga, pasukan Aceh berhasil menembak Jenderal Pel, sehingga ia tewas.

Sementara itu ketika utusan Aceh yang dikirim ke Turki, yaitu Habib Abdurrahman, telah pulang pada tahun 1879, maka kegiatan penyerangan kepada kubu-kubu Belanda diperhebat. Ia bersama dengan Teungku Ci' Di Tiro dan Imam Lueng Bata, pernah mengatur taktik bagi pasukan Aceh. Taktik penyerangan terutama ditujukan kepada usaha mengacaukan dan memperlemah pos-pos musuh. Selain itu dilakukan juga pengrusakan-pengrusakan bangunan-bangunan militer, pengrusakan jembatan, pembakaran gudang-gudang dan tindakan lainnya yang dapat mempersulit gerak pasukan lawan. Berkali-kali diadakan penyerbuan ke berbagai pos Belanda dengan melakukan pengrusakan dan blokade bahan makanan dari daerah luar, sehingga tidak jarang pihak musuh mengalami kesulitan.

Teungku Ci' Di Tiro memimpin perlawanan pasukan Aceh di daerah Pidie, sedangkan Teuku Umar dengan isterinya Cut Nya' Din memimpin perlawanan di daerah Aceh bagian barat. Pada tahun 1882 Teuku Umar melancarkan serangan besar terhadap pasukan Belanda yang ada di Aceh Besar, sehingga Belanda terpaksa harus meninggalkan beberapa posnya. Perlawanan terus berlangsung, sementara itu Sultan Muhammad Daudsyah telah dewasa dan telah dapat melakukan fungsinya sebagai Sultan yang berkedudukan di Keumala.

Karena sulitnya usaha mematahkan perlawanan laskar Aceh, pihak Belanda mencari jalan lain. Belanda berusaha mengetahui rahasia kekuatan dari Aceh, terutama yang menyangkut kehidupan sosial-budayanya. Oleh karena itu pemerintah Belanda mengirim Dr. Snouck Hurgronje untuk mempelajari rakyat Aceh. Ia adalah seorang yang ahli mengenai Islam. Dengan jalan menyamar, ia berhasil bergaul dan bertempat tinggal di tengah-tengah rakyat Aceh. Dari hasil penelitiannya akhirnya dapat diketahui bahwa sebenarnya Sultan Aceh itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa persetujuan dari para kepala-kepala yang ada di bawahnya. Selain itu juga dijelaskan bahwa pengaruh kaum ulama pada rakyat adalah sangat besar. Karena itu dirasa sulit untuk menundukkan rakyat yang berkeyakinan agama .

yang kuat seperti rakyat Aceh itu. Dari hasil penelitiannya itu akhirnya dapat diambil langkah-langkah yang jitu, yaitu dengan menggunakan taktik memecah-belah kekuatan yang ada di kalangan rakyat Aceh. Salah satu caranya ialah bahwa kaum ulama yang memimpin pertempuran dihadapi dengan kekuatan militer. Sementara itu anak-anak bangsawan dibuka kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok pamong-praja di lingkungan pemerintahan Belanda. Dengan cara demikian akan terpisahkan kelompok itu dari hubungannya dengan kaum ulama. Politik memecah-belah itu merupakan pola dalam kegiatan Belanda di Indonesia. Tindakan itu disebut *divide et impera* (dipisah dan dikuasai).

Dalam pada itu Teungku Ci' Di Tiro Muhammad Saman meninggal pada tahun 1891 dan diganti oleh putranya sendiri. Di lain pihak Teuku Umar pada tahun 1893 menyatakan tunduk pada pemerintah Belanda. Oleh Belanda malahan ia dimasukkan dalam dinas militer dan mendapat gelar Teuku Umar Johan Pahlawan. Ia memiliki pasukan sebesar 250 orang, dan ia diberi tugas untuk mengamankan daerah Aceh Besar dan sekitarnya. Tetapi hal itu tidak lama, karena kemudian Teuku Umar ke luar dari dinas militer Belanda, dan kembali memimpin perlawanan bersama dengan Panglima Polim. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel J.B. Van Heutsz melakukan pukulan-pukulan berat kepada perlawanan Teuku Umar dan Panglima Polim pada tahun 1898, sehingga Pidie dapat diduduki. Teuku Umar menyingkir ke Aceh Barat dan Panglima Polim ke arah Timur. Pada tahun 1899 Teuku Umar mengadakan serangan terhadap kubu Belanda di Meulaboh. Tetapi malang bagi Teuku Umar, dalam pertempuran itu ia terkena peluru musuh, sehingga akhirnya ia gugur.

Panglima Polim terus melakukan perlawanan di daerah bagian timur. Pihak Belanda berusaha untuk menangkapnya tetapi sulit. Oleh karena itu Belanda menggunakan taktik baru, yakni dengan mengadakan penculikan isteri Sultan. Dengan jalan mengadakan tekanan-tekanan yang keras, maka akhirnya Sultan menyerah pada tahun 1903. Siasat yang sama juga dilakukan oleh Belanda terhadap Panglima Polim. Isteri, ibu dan anak-anak Panglima Polim diculik dan ditangkap. Selain itu tekanan dilakukan sementara penyerbuan terhadap Panglima Polim dilakukan pula. Setelah mengalami tekanan

yang berat, maka akhirnya Panglima Polim menyerah pula pada tahun yang sama. Dengan hilangnya pemimpin-pemimpin yang tangguh itu, maka perlawanan rakyat Aceh makin kendor, dan di lain pihak Belanda dapat memperkuat kekuasaannya di daerah itu. Sekalipun demikian perlawanan di Aceh boleh dikata merupakan perlawanan yang paling lama dan yang paling besar selama abad ke 19. Tidak sedikit korban yang telah jatuh di antara kedua belah pihak.

Sebenarnya perlawanan terhadap Belanda untuk menguasai daerah-daerah lain di seluruh Indonesia mendapat perlawanan yang cukup gigih dari setiap rakyat di daerah masing-masing. Selain perlawanan-perlawanan yang tersebut di atas masih banyak perlawanan yang terjadi di daerah lain, seperti di daerah Batak oleh Si Singamangaraja XII (1878-1907), di Sumatra Selatan oleh Raden Intan, dan di daerah-daerah lainnya oleh rakyat dengan pemimpin-pemimpin setempat.

Berkuasanya pemerintah Belanda setelah berhasil menaklukkan daerah-daerah Indonesia, tidak berarti sekaligus menghilangkan perlawanan rakyat Indonesia. Dengan berbagai cara, rakyat di berbagai daerah berusaha terus untuk bertahan. Bila semula raja-raja Indonesia memiliki armada-armada niaga yang besar, maka setelah kerajaannya ditundukkan oleh Belanda, maka armada-niagaanya segera ditumpas oleh pihak penjajah. Kapal-kapal yang cukup besar ditenggelamkan, sehingga tinggal jung-jung dan perahu-perahu. Namun pelaut-pelaut Indonesia itu tidak dapat samasekali dibinasakan.

Dalam pada itu peraturan perdagangan Belanda yang monopolistis telah mengakibatkan terdesaknya ke sudut kebebasan perdagangan rakyat Indonesia. Karena berjuang untuk kelangsungan hidupnya, rakyat yang hidup di pantai-pantai selalu berusaha menerobos monopoli Belanda itu. Perdagangan yang mereka lakukan lalu disebut "perdagangan gelap" oleh pihak penjajah. Atau lebih buruk lagi disebut: penyelundup. Dengan jalan memasukkan barang-barang yang mereka bawa dari daerah luar ke daerah pedalaman melalui pantai-pantai secara diam-diam, mereka dapat melangsungkan kehidupannya sebagai pedagang yang bebas. Tidak jarang pula mereka bersekutu dengan para perampok atau bajak laut, dan bergerak

dengan melalui organisasi yang cukup rapih. "Penyelundupan" dan "perdagangan gelap" selama abad ke 19 juga merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan asing.

7. Struktur Perlawanan

Dalam perlawanan rakyat terhadap kekuasaan asing yang terjadi dari abad ke 17 sampai 19, dapat dilihat adanya para pemimpin dan para pengikut yang sering kali berasal dari golongan yang berbeda. Sesuai dengan lingkungannya, maka perlawanan-perlawanan yang terjadi di lingkungan kerajaan dipimpin oleh kaum bangsawan atau rajanya sendiri. Pertempuran-pertempuran di daerah Maluku pada jaman VOC sering dipimpin oleh rajanya atau para bangsawan kraton. Demikian pula dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan sebagainya. Selain bangsawan juga para pejabat pemerintah, seperti para bupati dalam Perang Diponegoro, atau para panglima di daerah Aceh.

Selain para bangsawan kepemimpinan juga dipegang oleh ulama. Hampir di semua daerah Indonesia pada abad ke 19, terdapat pemimpin perlawanan dari golongan ulama. Dalam Perang Diponegoro, misalnya, di samping Diponegoro sendiri, terdapat tokoh Kyai Mojo, Haji Badaruddin, Haji Mustopo, dan Kyai Hasan Besari. Dalam Perang Banjar, Perang Aceh, dan Perang Padri hal ini jelas kelihatan. Dalam Perang Padri tampak para ulama yang memimpin langsung pertempuran-pertempuran dan melakukan berbagai kegiatan perlawanan.

Para pengikutnya, selain terdiri dari para anggota keluarga bangsawan atau para pejabat kraton yang ikut menentang penguasa asing, sebagian besar terdiri dari rakyat petani di pedesaan. Perang di daerah Sumatra, Perang Diponegoro, Perang Banjar dan lainnya didukung oleh rakyat biasa yang hidup di daerah luar istana. Dalam Perang Diponegoro, misalnya, sebagian besar laskarnya adalah terdiri dari pemuda dari daerah pedesaan. Selain para petani biasa juga para petani santri menjadi pendukung-pendukung perlawanan rakyat yang dipimpin oleh kaum ulama atau para bangsawan-ulama.

Dalam melakukan perlawanan sering semboyan-semboyan tertentu menjadi penting. Sebagai contoh, diserukannya semboyan Perang Sabil dalam berbagai perang, seperti dalam Perang Diponegoro,

Perang Aceh, mempunyai pengaruh yang besar dalam mengobarkan semangat juang rakyat.

Dalam sistem pertahanannya Rakyat Indonesia juga telah mengenal sistem perbentengan. Hal ini terlihat dalam berbagai daerah perlawanan. Di Sumatra Barat, misalnya, pasukan Padri memiliki benteng pertahanan yang dibangun sesuai dengan alam sekitarnya. Bentengnya dibuat sedemikian rupa sehingga tampak terlindung dalam semak-semak. Di sekeliling benteng itu dibangun pagar berduri, dan di bagian belakang terdapat tebing yang tinggi. Di dalamnya terdapat bangunan mesjid, dan rumah-rumah yang dibuat dari kayu. Selain itu bagian luarnya diperlengkapi dengan meriam-meriam dan dibangun pula parit-parit yang dalam di seputar bagian luar pagar. Untuk sebagian pagarnya sering juga dipakai batang bambu berduri yang tebal sekali. Benteng semacam ini juga terdapat di daerah Batak dalam perlawanan Si Singamangaraja XII. Salah satu benteng Padri yang terkenal ialah benteng yang terletak di Ujung Raya.

Di daerah Kalimantan juga terdapat benteng yang semacam benteng Sumatra Barat. Benteng di daerah ini dibuat dari batang-batang pohon. Di dalam benteng terdapat galian berupa kolam. Dindingnya dibuat dua; di sela-sela antara kedua dinding itu diisi dengan potongan kayu. Benteng ini juga diperlengkapi dengan meriam.

Di Bali yang terkenal adalah benteng Jagaraga. Benteng Jagaraga dibangun di atas bukit. Benteng ini dikelilingi dengan jurang-jurang yang dalam, sehingga sulit didekati musuh. Benteng lainnya dibangun dengan atap yang miring dan dengan dinding yang kuat. Di bagian belakang dibangun parit yang berisi lumpur atau air. Hal ini dipakai untuk mengamankan peluru meriam musuh yang ditembakkan dari atas terhadap benteng tersebut. Dalam perlawanan Diponegoro, antara lain, gua dan bukit digunakan sebagai benteng pertahanan. Misalnya, Gua Selarong pernah dipakai sebagai tempat pertahanan.

Pihak musuh, yaitu Belanda, juga banyak membuat benteng. Sejak abad ke 18 Belanda membuat benteng-benteng untuk pertahanan di berbagai tempat. Di antaranya terlihat di kota Surakarta, Yogyakarta, Klaten, Salatiga dan Ungaran. Selain itu juga dibangun benteng yang baru, seperti di Karangturi, Malangiwa, Minggir, Panjer, dan lain-lain. Selain perbentengan, pihak Belanda juga memiliki pos-

pos pertahanan. Pos pertahanan ini biasanya terpencar di berbagai daerah. Biasanya pos pertahanan ini berupa kubu pertahanan yang berbentuk segi empat, berpagar batang pohon kelapa setinggi 2.30 m, dengan pagar yang diperkuat dengan gundukan tanah. Di depan sepanjang pagar diberi parit. Pos-pos pertahanan semacam ini dibangun di berbagai daerah perlawanan untuk menghadapi gerakan pihak rakyat setempat yang melakukan perlawanan. Dalam Perang Diponegoro pihak Belanda membangun benteng-benteng semacam itu untuk melumpuhkan pasukan Diponegoro. Sistem yang digunakan tersebut terkenal dengan nama *benteng stelsel*.

Peralatan pasukan pribumi terdiri atas senjata tradisional, seperti tombak, keris, pedang, dan panah. Tombak panjangnya biasanya 10 a 15 kaki. Senjata senapan ada yang telah dibuat sendiri. Tetapi jenis-jenis meriam kebanyakan berasal dari luar, baik dari pembelian ataupun rampasan dari pihak musuh.

Dalam perang Padri, banyak digunakan berbagai bentuk klewang, umban tali pelempar batu, dan senapan lantak buatan sendiri. Pasukan di Kalimantan Selatan sebagian besar menggunakan tombak, parang atau mandau, sumpitan, panah dan pedang. Biasanya juga dipakai perisai. Di Aceh banyak digunakan senjata rencong, pedang, dan tombak. Di samping senjata-senjata tersebut digunakan juga meriam-meriam sebagai hasil rampasan atau pembelian dari luar.

Salah satu taktik yang dipakai pasukan pribumi dalam perlawanan terhadap musuh, ialah dengan mengadakan serangan pendadakan. Musuh dihadang pada suatu tempat persembunyian setelah dekat maka dilakukan penyerangan atau serangan. Taktik lain ialah dengan mengadakan rintangan-rintangan di jalan-jalan yang diduga akan dikuasai oleh musuh. Rintangan dibuat dari pohon-pohon yang dipasang di jalan-jalan, atau batu-batu besar, ataupun bahan lainnya. Cara lain dilakukan dengan mengadakan pengepungan. Musuh dikepung secara ketat sehingga akhirnya pihak musuh menyerah. Sering juga dipraktekkan dengan memasang jerat-jerat dari tali-temali di jalan-jalan. Di daerah Kalimantan atau di Sumatra sering juga dipakai ranjau-ranjau yang dipasang di jalan-jalan yang akan dilalui musuh. Ranjau berupa potongan kayu yang runcing dipasang di tanah atau di lumpur ditutup dengan daun-daun berduri, sehingga akan melukai musuh yang menginjaknya.

Pemutusan jalur pemasukan bahan pangan juga merupakan taktik yang sering digunakan untuk melumpuhkan pihak musuh. Ada juga dipakai isyarat untuk memberitahukan kepada teman seperjuangan, apabila pasukan musuh datang. Di antaranya ialah kentongan, yang dibuat dari bambu atau pohon.

Ada lagi cara mengamuk. Di Bali sering disebut *puputan*. Biasanya hal ini telah direncanakan sebelumnya. Dengan membawa tombak terhunus para pasukan menyerbu musuh secara serentak. Pasukan tersebut mengamuk menyerang setiap lawan yang dijumpai dengan sorak-sorai bersama-sama. Sorak-sorai ini dilakukan sebagai tanda kemenangan atau memang dipakai untuk membuat pihak lawan menjadi takut atau kebingungan. Cara mengamuk ini biasanya dilakukan dengan keyakinan akan mati.

VOC / perusahaan asuransi

1992-1993

1993

1993 - 1994 / perusahaan asuransi / perusahaan asuransi

1994

1. 1994 - 1995 / perusahaan asuransi

2. 1995 - 1996 / perusahaan asuransi

VOC / perusahaan asuransi / perusahaan asuransi / perusahaan asuransi

1996 - 1997 / perusahaan asuransi

1997 - 1998 / perusahaan asuransi

1998 - 1999 / perusahaan asuransi

1999 - 2000 / perusahaan asuransi

2000 - 2001 / perusahaan asuransi

2001 - 2002 / perusahaan asuransi

2002 - 2003 / perusahaan asuransi

2003 - 2004 / perusahaan asuransi

2004 - 2005 / perusahaan asuransi

2005 - 2006 / perusahaan asuransi

2006 - 2007 / perusahaan asuransi

2007 - 2008 / perusahaan asuransi

2008 - 2009 / perusahaan asuransi

2009 - 2010 / perusahaan asuransi

2010 - 2011 / perusahaan asuransi

2011 - 2012 / perusahaan asuransi

2012 - 2013 / perusahaan asuransi

2013 - 2014 / perusahaan asuransi

2014 - 2015 / perusahaan asuransi

2015 - 2016 / perusahaan asuransi

2016 - 2017 / perusahaan asuransi

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN POLITIK DALAM ABAD KE 19

A. SISTEM SEWA-TANAH

1. *Gagasan Baru Dalam Kebijakan Politik Ekonomi*

Sejak VOC dibubarkan pada tahun 1799, Indonesia diserahkan kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Meskipun VOC merupakan badan yang setengah resmi, namun mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab. Di antaranya ialah adanya korupsi yang merajalela, kecurangan-kecurangan di bidang administrasi, banyaknya pegawai yang tidak cakap, menimbulkan hutang-hutang akibat banyaknya perang yang dilakukan, baik dengan rakyat Indonesia maupun dengan Inggris dalam memperebutkan hegemoni (keunggulan) dalam perdagangan. Sebab lain adalah kemorosotan moral di kalangan para penguasa akibat sistem monopoli dan sistem paksa dalam pengumpulan hasil-hasil bumi dari penduduk tanah jajahan.

Pindahannya kekuasaan pemerintahan dari VOC ke tangan pemerintah Belanda tidak berarti dengan sendirinya membawa perbaikan. Kemerosotan, moral di lingkungan para penguasa dan penderitaan pada pihak penduduk tidak berubah. Usaha perbaikan bagi penduduk tanah jajahan tidak dapat dilaksanakan, karena Negeri Belanda sendiri terseret dalam perang dengan negara-negara besar tetangganya. Hal itu terjadi karena Negeri Belanda pada waktu itu diperintah oleh pemerintah boneka dari Kemaharajaan Perancis di bawah Napoleon, sehingga ikut terlibat dalam pertentangan-pertentangan yang dilakukan oleh Perancis dengan negara-negara lain. Dalam situasi yang demikian itu Inggris dapat memperluas daerah kekuasaannya dengan jalan merebut jajahan Belanda.

Dalam menentukan kebijakan pemerintahan di tanah jajahan itu, ada dua golongan politik yang berpengaruh di kalangan elite Belanda. Golongan pertama adalah kaum konservatif, dan yang kedua adalah golongan liberal. Kaum liberal mengajukan gagasan baru bagi kebijakan kolonial di Indonesia, yang ditujukan kepada kebebasan dan kesejahteraan penduduk. Gagasan dan cita-cita liberal ini adalah hasil pengaruh dari Revolusi Perancis yang ikut masuk dan ber-

kembang di Negeri Belanda karena ada di bawah pengaruh Perancis. Jurubicara dari kaum liberal adalah Dirk van Hogendorp. Mereka menganjurkan agar pemerintah Belanda menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak. Mereka tidak menyetujui cara pemerintahan yang dilakukan oleh VOC, karena dianggap tidak menguntungkan. Pada waktu VOC berkuasa, pemerintahan tidak dilakukan secara langsung, melainkan dilakukan melalui para penguasa pribumi sebagai perantaranya. Sistem ini dipandang banyak menimbulkan kerugian, baik bagi pemerintah maupun bagi rakyat. Mereka menghendaki agar pemerintah secara langsung berhubungan dengan rakyat tanah jajahan melalui para pejabat pemerintah yang diangkat dan diawasi oleh pemerintah pusat. Sistem pengambilan kekayaan tanah jajahan yang dilakukan oleh VOC juga tidak disetujui. Dalam penggalian kekayaan, VOC menjalankan sistem penyerahan paksa hasil-hasil bumi dari penduduk melalui para penguasa pribumi. Hasil-hasil yang dimintanya adalah bahan-bahan yang laku dalam perdagangan dunia. Cara ini selain menimbulkan kecurangan-kecurangan pada pihak para pelaksananya, juga menyebabkan penduduk tidak dapat mengenyam keuntungan hasil tanamannya. Penduduk disuruh menanam, tetapi tidak dapat menikmati hasilnya, malahan sebaliknya mengalami penderitaan. Kaum liberal mengusulkan agar sistem penyerahan paksa itu dihapuskan dan diganti dengan sistem penyerahan pajak. Sistem ini dianggap akan lebih menguntungkan pihak pemerintah maupun pihak penduduk.

Sebaliknya kaum konservatif ingin mempertahankan sistem politik dan sistem ekonomi yang dilakukan oleh VOC. Mereka menganggap bahwa sistem itu lebih cocok dengan keadaan di tanah jajahan yang belum mengenal ekonomi uang. Menurut mereka gagasan liberal sulit untuk dilaksanakan pada masyarakat pertanian yang belum maju. Dalam pertentangan dua paham politik yang demikian itu, maka pada akhirnya keadaan di Negeri Belanda sendiri yang menentukan. Negeri Belanda pada waktu itu masih merupakan negeri pertanian. Kegiatan industri belum maju. Oleh karena itu tanah jajahan merupakan sumber penting bagi negeri induk, yaitu sebagai penghasil bahan-bahan hasil tanaman yang laku dalam pasaran dunia. Dibandingkan dengan Inggris, Negeri Belanda masih terbelakang dalam industrinya, sehingga tidak mampu bersaing. Karena

kemajuan industrinya, Inggris mampu menjadikan tanah jajahannya sebagai pasaran barang-barang hasil industrinya. Sementara itu Negeri Belanda dirundung perang yang berturut-turut yang menyebabkan kemunduran dalam perdagangannya dan menimbulkan keadaan ekonomi yang sangat sulit. Keadaan yang demikian itu mendorong pemerintah untuk mengambil jalan tengah. Di satu pihak pemerintah condong kepada anggapan kaum konservatif karena kebijaksanaan yang mereka anjurkan itu akan mendatangkan keuntungan yang cepat lagi pula mudah dilaksanakan. Di lain pihak pemerintah juga ingin menjalankan pembaharuan seperti yang dianjurkan oleh kaum liberal. Karena itulah maka politik kolonial Belanda semenjak tahun 1800 sampai tahun 1870, terpengaruh oleh gagasan untuk menjalankan sistem dagang dan sistem pajak. Gagasan pembaharuan dalam politik kolonial dimulai semenjak Daendels dan Raffles memerintah di Indonesia pada awal abad ke 19.

Sebagai Gubernur Jenderal pemerintahan Belanda di Indonesia, Daendels banyak melakukan langkah-langkah baru dalam pemerintahannya. Sekalipun masa pemerintahannya tidak lama (1808 - 1811), tetapi pengaruhnya cukup mendalam. Langkah-langkah yang diambil oleh Daendels dimulai dengan mengadakan perombakan sistem pemerintahan secara radikal, dengan meletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistem Barat. Pemerintahan kolonial dipusatkan di Batavia di tangan Gubernur Jenderal. Pulau Jawa yang pada waktu itu dikuasainya, dibagi atas daerah-daerah yang disebut prefektur sebanyak 9 buah. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda di bawah pemerintah prefect, dan mendapat penghasilan dari tanah dan tenaga di daerahnya sesuai dengan hukum adat. Mereka diberi pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda. Dalam bidang pengadilan, Daendels membentuk pengadilan berkeliling dan pengadilan untuk orang pribumi di setiap daerah prefektur. Prefect ditunjuk sebagai ketua pengadilan, dan sebagai anggotanya duduk para bupati. Secara tegas diadakan pemberantasan terhadap korupsi dan penyelewengan-penyelewengan dalam soal pemungutan kontingen dan penyerahan-paksa, maupun kerja-paksa. Sementara itu Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dijadikan daerah pemerintah Belanda, disebut pemerintah gubernemen. Berbagai upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan.

Banyak tindakan pembaharuan Daendels gagal karena keadaannya tidak memungkinkan. Karena itu pada akhirnya ia banyak melakukan tindakan-tindakan yang pada mulanya ditentangnya. Pada awal pemerintahannya ia menentang sistem kerja-paksa dan merombak sistem feodal. Tetapi karena pemerintahannya bertugas untuk memperhatikan Jawa dari serangan Inggris, maka Daendels terpaksa harus mengadakan pengerahan kerja-paksa secara besar-besaran (dengan menggunakan pengaruh penguasa pribumi) untuk membangun jalan-jalan dan benteng-benteng bagi pertahanan. Demikian pula karena kas negara kosong, maka banyak pula ditempuh cara-cara lama untuk mengisi kas negara. Kehidupan rakyat pribumi akhirnya tidak sempat diperhatikan.

Ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, Daendels sudah dipanggil kembali ke Eropa. Penggantinya tidak mampu menahan serangan musuhnya itu, sehingga terpaksa menyerah. Dengan demikian dimulailah babak baru dalam sejarah kolonial di Indonesia.



Sebagian jalan raya Anyer - Banyuwangi di pantai utara pulau Jawa dekat Lasem, yang dibangun pada jaman Daendels.

2. Sistem Sewa-tandh Sebagai Kebijakan Ekonomi Baru

Oleh pemerintah Inggris Jawa dijadikan bagian dari jajahannya di India. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Wakil Gubernur (*Lieutenant Governor*) di Indonesia untuk mewakili rajamuda (viceroi) Lord Minto yang berkedudukan di India. Sebagai orang yang beraliran liberal, Raffles ingin mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selain dalam bidang pemerintahan, perubahan-perubahan yang hendak dilakukannya adalah dalam bidang ekonomi. Ia hendak melaksanakan kebijakan ekonomi yang didasarkan kepada dasar-dasar kebebasan sesuai dengan ajaran liberalisme. Maka dalam masa pemerintahannya (1811-1816) Raffles mencoba untuk melaksanakan kebijakan sebagai berikut. Pertama, menghapus segala bentuk penyerahan-wajib dan kerja-paksa atau rodi. Rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanahnya dengan tanaman-tanaman yang dianggap menguntungkan. Kedua, mengadakan penggantian sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan dari kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-temurun; mereka menjadi pegawai pemerintah kolonial yang langsung ada di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Dengan demikian mereka bukan lagi menjadi penguasa daerah seperti dalam pemerintahan kerajaan tetapi hanyalah sebagai pegawai yang menjalankan tugas atas perintah dari atasannya. Ketiga, Raffles menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik semua tanah yang ada di daerah jajahan. Karena itu Raffles menganggap bahwa yang menggarap sawah adalah penyewa dari tanah pemerintah. Oleh karena itu para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah. Sewa tanah atau *landrent* itu harus diserahkan sebagai suatu pajak atas pemakaian tanah pemerintah oleh penduduk.

Sistem sewa tanah semacam itu oleh pemerintah Inggris dijadikan suatu pegangan dalam menjalankan kebijakan ekonominya selama berkuasa di Indonesia. Sistem ini kemudian juga diteruskan oleh pemerintah Belanda setelah Indonesia diserahkan kembali kepada mereka dan berlaku sampai tahun 1830.

Sesungguhnya sistem sewa yang diperkenalkan oleh Raffles itu mengandung maksud yang luas. Sistem tersebut dimaksudkan

untuk membebaskan beban kehidupan dari pundak penduduk, dan memberikan kebebasan serta kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh petani. Sistem itu dimaksudkan juga agar pemerintah memiliki cara pemasukan pendapatan negara secara tetap dan cukup terjamin. Dibayangkan bahwa apabila para petani memiliki kebebasan untuk menanam tanamannya dan menjual hasil tanamannya secara bebas, maka mereka akan terangsang untuk bekerja giat demi hasil yang akan dinikmatinya sendiri. Semakin mereka giat berusaha semakin besar hasil yang akan mereka peroleh. Dengan kata lain kegairahan bekerja meningkat sesuai dengan adanya harapan akan menikmati hasilnya. Berbeda dengan sistem tanam wajib sistem ini akan menguntungkan. Sistem tanam-wajib membuat petani tidak mau bekerja giat karena apa yang dikerjakannya tidak sepenuhnya dapat dinikmatinya. Hasil-hasil tanaman harus diserahkan kepada pemerintah. Akibatnya orang akan enggan untuk bekerja keras mengolah tanamannya. Selanjutnya sebagai pengganti kewajiban itu penduduk dipungut uang sewa atau pajak berupa uang. Hal ini dapat dilakukan karena dibayangkan, bahwa penduduk telah memiliki uang dari penjualan hasil tanamannya. Selain itu diharapkan bahwa dengan cara demikian pendapatan penduduk akan meningkat dan berarti kesejahteraan hidup mereka akan naik pula. Kemampuan daya-beli juga akan naik, sehingga dengan demikian akan mampu membeli barang-barang industri Inggris yang akan membanjiri tanah jajahan. Dengan demikian negeri induk akan ikut memperoleh keuntungan pula.

Menurut peraturannya, pemungutan pajak tanah itu dikenakan pada semua hasil penanaman sawah, sebesar $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$ atau $\frac{1}{3}$ dari hasil panen yang diwujudkan dalam bentuk uang atau beras. Bersamaan dengan sistem pemungutan pajak tanah ini juga diadakan pembatasan kekuasaan para bupati. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah. Tugasnya lebih banyak mengurus soal pemungutan pajak tanah tersebut. Pemungutannya dilakukan secara perseorangan.

Gagasan sistem sewa-tanah ini dalam pelaksanaannya membawa akibat yang jauh. Sistem sewa-tanah telah menimbulkan perubahan-perubahan penting. Unsur-unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan, sukarela dan hubungan perjanjian atau kontrak. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat didasari oleh sifat kontrak. Sistem

kontrak tersebut merupakan hal yang baru bagi penduduk tanah jajahan. Perubahan juga terasa dalam kehidupan sosial dan budaya. Ikatan adat-istiadat yang secara turun-temurun telah berjalan menjadi semakin longgar karena pengaruh adat kehidupan yang bercorak Barat. Demikian pula kehidupan ekonomi-barang hendak diganti dengan ekonomi-uang.

Sistem sewa-tanah ini dalam pelaksanaannya tidak berlaku di seluruh daerah Jawa. Hanya di beberapa daerah saja yang dapat dilakukan, sedangkan daerah lainnya masih dibiarkan menjalankan sistem lama. Sebagai contoh misalnya ialah daerah-daerah milik swasta (tanah partikelir) yang ada di sekitar Jakarta, dan daerah Parahiyanan yang masih tetap melaksanakan sistem tanam-wajib. Di tanah Parahiyanan, Inggris rupanya enggan untuk menghapuskan sistem penanaman kopi yang telah berjalan semenjak jaman VOC dan merupakan sumber keuntungan yang besar bagi kas negara. Oleh sebab itu daerah ini tidak pernah mengalami perubahan kepada sistem sewa tanah. Sampai tahun 1870 daerah ini hanya mengenal sistem lama yang bersifat feodal.

Berhasilkah usaha Raffles itu? Masa pemerintahan Raffles di tanah jajahan ini tidak lama. Dalam masa pemerintahannya itu ia menghadapi banyak kesulitan. Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya terbatas. Masyarakat Indonesia pada waktu itu berbeda dengan masyarakat India, sehingga berbeda dengan yang digambarkannya semula. Masyarakat India telah mengenal perdagangan export yang ramai dan mengenal ekonomi uang. Masyarakat Jawa pada abad ke 19 masih menunjukkan sifat kehidupan desa yang hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak banyak kegiatan dalam perdagangan. Ekonomi desa belum memungkinkan petani untuk memperoleh uang sebagai pengganti hasil bumi. Di lain pihak waktu itu belum ada pengukuran tanah milik penduduk secara tepat. Kebanyakan pemilikan tanah masih didasarkan pada warisan adat setempat. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak tanah atau sewa tanah mengalami kesulitan. Pungutan terpaksa tidak dilakukan secara perseorangan tetapi secara kelompok desa. Pungutan itu dilakukan oleh para pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup. Usaha Raffles untuk menjalankan sistem sewa-tanah akhirnya gagal.

Sekalipun demikian pengaruh dari usaha Raffles cukup berarti pula. Usaha untuk mengurangi kekuasaan para bupati terhadap penduduk pribumi menjadi dasar untuk masa pemerintahan berikutnya. Demikian pula sistem sewa-tanah, sekalipun gagal dilakukan, dilanjutkan oleh pemerintah Belanda pada masa berikutnya.

Pada tahun 1816 Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda. Pemerintahan Belanda kembali menghadapi persoalan sistem pemerintahan yang harus dijalankan di tanah jajahannya itu. Masalah pokok ialah sistem manakah yang dapat membawa keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negeri induk. Pertentangan antara kaum liberal dengan kaum konservatif tetap berlangsung. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberi keuntungan kepada negeri induk apabila urusan penggalian ekonomi diserahkan kepada orang-orang swasta Barat, sedangkan pemerintah hanyalah memungut pajak dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah tidak perlu campur-tangan dalam urusan perdagangan hasil-bumi tanah jajahan. Urusan perdagangan biarlah diurus oleh kaum pengusaha swasta. Kaum konservatif sebaliknya menekankan bahwa sistem pemungutan hasil bumi oleh pemerintah secara langsung akan menguntungkan negeri induk. Sistem liberal diragukan oleh kaum konservatif karena keadaan tanah jajahan belum memenuhi syarat.

Dalam menghadapi pemilihan sistem politik yang demikian itu para Komisaris Jenderal yang pada waktu itu memegang pimpinan pemerintahan kolonial di Indonesia, mengambil jalan tengah. Di satu pihak pemerintah tetap berusaha menangani penggalian kekayaan tanah jajahan bagi keuntungan negeri induk, di lain pihak berusaha mencari jalan untuk melaksanakan dasar-dasar kebebasan. Setelah itu Gubernur Jenderal Van der Capellen, salah seorang Komisaris Jenderal, melaksanakan politik yang di satu pihak melindungi hak-hak kaum pribumi, di lain pihak memberi kebebasan kaum pengusaha swasta Barat untuk mengadakan usahanya selama tidak mengancam kedudukan kehidupan penduduk. Dengan demikian pemerintah di bawah Komisaris Jenderal mencampurkan dua sistem politik konservatif dan liberal. Pada satu pihak pemerintah mempertahankan sistem pungutan hasil tanaman melalui para pengusaha pribumi dengan pengawasan yang ketat. Pada pihak lain pemerintah memberikan ijin kepada para pengusaha di tanah jajahan.

Karena pemerintah memberikan keleluasaan kepada kaum swasta Barat untuk membuka perkebunan atau perusahaan pertanian lainnya, maka timbul masalah penggunaan tanah bagi pengusaha-pengusaha. Pemerintah memahami, apabila kaum swasta diberi keleluasaan menggunakan tanah-tanah penduduk, maka penduduk akan banyak dirugikan. Untuk menghindari hal tersebut maka pada tahun 1823, pemerintah melakukan penghapusan sewa tanah yang berlaku di tanah kerajaan (Yogyakarta - Surakarta).

Akibat dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh kaum pengusaha yang telah menyewa tanah di daerah itu, tetapi juga para bangsawan yang telah menerima uang sewa untuk jangka panjang. Keadaan ini menyebabkan timbulnya kegelisahan dan situasi yang buruk di lingkungan kaum bangsawan. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila golongan ini menjadi salah satu pendukung kuat dari gerakan Pangeran Diponegoro di samping golongan rakyat petani pada waktu pecah perang melawan Belanda pada tahun 1825.

B. SISTEM TANAM-PAKSA

1. Latarbelakang Sistem Tanam-paksa

Selama masa antara 1816 dan 1830 pemerintah Belanda gagal dalam usahanya untuk mempraktekkan gagasan-gagasan liberal. Hal itu disebabkan karena tujuan utama yang harus dilakukannya adalah mengeksploatasi tanah jajahan untuk dapat memberikan keuntungan terhadap negeri induk. Di samping itu juga karena kurangnya pengertian terhadap suasana masyarakat Jawa.

Sementara itu pada tahun 1830 keadaan di tanah jajahan dan di Negeri Belanda sangat buruk, Pemberontakan Belgia dan Perang Diponegoro telah banyak memakan biaya, sehingga beban hutang Negeri Belanda semakin besar. Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan, maka Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas mencari cara untuk mengisi kekosongan kas negara. Jawa dalam hubungan ini dianggap dapat mengisi kekosongan kas negara tersebut. Untuk melaksanakan tugas berat itu Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada soal peningkatan produksi tanaman export yang selama sistem pajak tidak berjalan. Mengingat Negeri Belanda pada waktu itu tidak

mempunyai perdagangan, perkapalan dan pabrik, maka yang perlu dilakukan adalah mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman yang hasil-hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Penanaman itu bukan dilakukan secara bebas, tetapi dengan sistem paksa. Hal ini dilakukan oleh Van den Bosch setelah melihat kegagalan sistem pajak-tanah. Apa yang kemudian dilakukan Van den Bosch itu kemudian terkenal dengan Sistem Tanam-paksa atau dengan nama resminya *cultuurstelsel*.



Kerja rodi untuk membuat jalan di Flores.

Sumber : Prof. D.G. Stibbe, *Neerlands Indië* ...

Sistem tanam-paksa yang diperkenalkan itu pada dasarnya berisi suatu keharusan bagi penduduk Jawa untuk membayar pajak kepada pemerintah dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil tanaman pertanian, untuk diexport ke pasaran dunia. Pusat perdagangan dunia tersebut adalah Negeri Belanda sendiri, yaitu pusat perdagangan bagi hasil-hasil tanaman dari daerah tropis. Dengan cara demikian pemerintah memungut pajak dalam bentuk hasil tanaman dagangan secara besar-besaran yang dapat dikirim ke Negeri Belanda. Di Negeri Belanda

barang-barang dagangan itu dapat dijual kepada para pembelinya dari Eropa dan Amerika dengan keuntungan yang besar. Industri di Negeri Belanda perlu dihidupkan agar hasilnya dapat dijual ke Indonesia. Selain itu hubungan perdagangan antara Indonesia dan Negeri Belanda akan menghidupkan pelayaran dan perkapalan, karena pengangkutan barang-barang dari kedua negeri itu harus diselenggarakan oleh kapal-kapal Belanda sendiri. Keuntungan tidak hanya akan dipetik oleh pihak pemerintah, tetapi juga oleh para pengusaha Belanda sendiri.

2. Gagasan Pelaksanaannya dan Tanam-Paksa

Sistem tanam-paksa yang diajukan oleh Van den Bosch itu pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem VOC yang diajukan di Parahiyan dengan sistem pajak-tanah. Menurut ketentuannya sistem tanam-paksa itu dilakukan atas dasar ketentuan sebagai berikut :

1. Penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya atau lebih, untuk ditanami tanaman-dagangan yang dapat dijual di pasaran dunia.
2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman-dagangan itu dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
3. Tanaman-dagangan itu hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Setiap kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak yang harus dibayar, akan dibayarkan kembali kepada rakyat.
4. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman-dagangan tidak boleh melebihi dari pekerjaan yang diperlukan dalam penanaman padi.
5. Wajib tanam-paksa dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk pengangkutan dan pekerjaan di pabrik.
6. Kegagalan panen akan menjadi tanggungan pemerintah.
7. Penggarapan penanaman tanaman-dagangan itu di bawah pengawasan langsung dari kepala-kepala pribumi. Pegawai-pegawai Eropa mengawasi secara umum jalannya penggarapan sampai pengangkutannya.

Bila melihat bunyi peraturannya, tanam-paksa memang kelihatannya tidak terlalu menekan rakyat. Malahan Van den Bosch sendiri

menyatakan bahwa, jika kewajiban pembayaran pajak-pajak diganti dengan kewajiban untuk menyediakan sebagian dari waktu kerjanya untuk menanam tanaman-dagangan, misalnya 66 hari dalam setahun, maka kewajiban membayar pajak tanah dapat dianggap lunas. Tetapi dalam pelaksanaannya, sistem tanam-paksa itu banyak mengandung penyimpangan-penyimpangan yang memberatkan rakyat. Banyak kali terjadi bahwa penyediaan tanah untuk tanaman-dagangan melebihi dari $\frac{1}{5}$, yaitu $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{2}$. Malahan tidak jarang seluruh desa tanahnya dipergunakan untuk tanam-paksa itu. Kegagalan panen sering ditanggung oleh petani. Banyak tenaga yang semestinya dibayar, tidak dibayar. Pembayaran penyerahan gula banyak yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Pekerjaan yang harus dikerjakan di pabrik-pabrik gula ternyata lebih berat daripada pekerjaan di sawah. Penetapan pohon kopi yang harus ditanam sering dilakukan secara sewenang-wenang. Banyak penduduk dikerahkan untuk pekerjaan yang berat-berat, seperti pengangkutan, pengolahan gula di pabrik, membuat jalan-jalan, saluran air, jembatan, yang semuanya tanpa dibayar. Penduduk yang diperkerjakan itu sering dipindah-pindah ke tempat-tempat yang jauh. Sebagai contoh, ketika tanaman nila diwajibkan untuk ditanam di daerah Parahiyan, maka beberapa desa di daerah Simpur dipaksa untuk mengerahkan orang laki-lakinya dalam pengerahan perkebunan yang letaknya jauh dari desa tersebut. Pengerahan tenaga itu dilakukan selama tujuh bulan dan mereka tidak terurus. Mereka tidak bisa menghindarkan diri dari pekerjaan di perkebunan nila karena diancam dengan sangsi-sangsi yang berat.

Keadaan yang sama juga dialami oleh penduduk Rembang. Pada suatu ketika, sebanyak 34.000 keluarga selama 8 bulan dalam satu tahun diharuskan mengerjakan tanaman dagangan dengan menerima upah yang kecil sekali setiap harinya. Tambahan lagi rakyat masih harus menyerahkan balok, bambu, dan kayu untuk pembuatan bangunan untuk tanaman tembakau.

Tanaman-tanaman terpenting yang diwajibkan untuk ditanam selama itu adalah kopi, gula, dan nila. Tanah yang dipakai untuk tanaman tersebut ternyata luas sekali dan telah meminta pengerahan tenaga rakyat yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai contoh pada tahun 1858 sebanyak 450.000 orang telah dikerahkan untuk mengerjakan penanaman kopi, kurang lebih 300.000 orang untuk

penanaman gula, dan 110.000 orang dipaksa untuk bekerja di perkebunan nila.

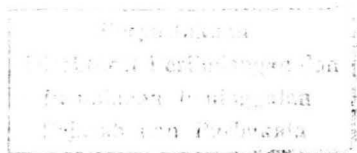
Sistem tanam-paksa yang semula dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang didasarkan atas sukarela, dalam prakteknya menjadi suatu paksaan. Adanya sistem pemberian prosenan bagi pengumpulan hasil tanaman yang melebihi jatah kepada para petugas, mendorong para petugas berusaha mempertinggi hasil dengan menggunakan kekuasaannya. Untuk tujuan itu rakyat pada akhirnya ditindas untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya.

Apabila ditentukan bahwa tanah yang dipakai untuk penanaman wajib itu tidak dikenakan pajak tanah, dalam kenyataannya dikenakan juga. Demikian juga kelebihan dari nilai taksir dari hasil yang diserahkan dari luas tanah yang harus dikenakan pajak, yang semestinya dibayarkan kembali kepada rakyat, dalam prakteknya tidak dibayarkan. Pendek kata, dalam praktek tanam-paksa dilaksanakan dengan jauh menyeleweng dari peraturannya.

3. Akibat-akibat Tanam-paksa

Akibat langsung yang diterima oleh penduduk Indonesia dari sistem tanam-paksa jelas sekali. Kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan adalah nasib pahit yang harus diderita oleh penduduk dari sistem tanam-paksa. Beban pajak yang berat, panen yang gagal, dan pemaksaan bekerja yang sewenang-wenang telah membawa malapetaka penduduk di berbagai tempat. Di Cirebon keadaan yang demikian itu telah menimbulkan bahaya kelaparan, sehingga ribuan penduduk terpaksa harus mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan hidupnya. Demikian juga penduduk di Demak (1848) dan Grobogan (1849), mengalami bahaya kelaparan, yang mengakibatkan kematian secara besar-besaran. Jumlah penduduk di kedua daerah itu menurun secara tajam. Bahaya kelaparan dan wabah penyakit yang banyak membawa korban juga terjadi di daerah lainnya, sehingga disebutkan pula bahwa penduduk Jawa Tengah menjadi berkurang jumlahnya.

Kemelaratan dan kesengsaraan yang diderita oleh rakyat di Jawa itu pada umumnya tidak diketahui oleh rakyat Belanda. Mereka hanya mengakui bahwa tanam-paksa telah membawa kemakmuran



rakyat Belanda. Perhubungan Jawa dan Negeri Belanda pada waktu itu belumlah sebaik sekarang, sehingga berita keadaan di Jawa tidak cepat sampai di Negeri Belanda. Baru setelah tahun 1850, lambat-laun rakyat Belanda mulai mendengar berita-berita tentang keadaan yang sebenarnya di Jawa. Berita-berita tentang tindakan sewenang-wenang dari pegawai pemerintah kolonial dan penderitaan yang dipikul penduduk mulai sampai di negeri induk. Demikian juga berita tentang malapetaka yang terjadi di Cirebon, Demak, dan Grobogan mulai diketahui. Akibatnya timbullah perhatian dari kelompok orang-orang yang maju untuk mengajukan kritik dan kecaman terhadap pemerintah. Mereka juga melancarkan gerakan untuk menentang dan menghapuskan sistem paksa. Mereka itu sebagian besar kaum penganut paham liberalisme. Perdebatan di Negeri Belanda mengenai sistem tanam-paksa menjadi hangat. Tokoh-tokoh yang menentang sistem tanam-paksa itu, antara lain Baron van Hœvell, Vitalis, dan lainnya. Kaum penentang sistem tanam-paksa semakin keras dalam menentang pemerintah Belanda, setelah adanya penerbitan karangan yang membeberkan penderitaan penduduk Jawa yang disebabkan oleh penyelewengan dan penyalahgunaan-kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah di bawah sistem tanam-paksa. Karangan itu adalah buku *Max Havelaar* yang ditulis oleh E. Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Pengarang adalah seorang bekas pegawai kolonial yang pernah bertugas di Jawa. Penulis-penulis lain juga menerbitkan karangan yang senada.

Berkat kecaman dari kaum liberal tersebut, maka pemerintah terpaksa harus membuka mata untuk memperhatikan penderitaan penduduk di Jawa. Pada akhirnya pemerintah harus menghapus sistem tanam-paksa, sekalipun secara berangsur-angsur. Penghapusan sistem tanam-paksa dimulai semenjak tahun 1850.

Apabila sistem tanam-paksa telah mendatangkan malapetaka kepada penduduk Indonesia, maka sebaliknya bagi rakyat Belanda di negeri induk, sistem itu telah mendatangkan keuntungan dan kemakmuran yang besar. Dengan cepat penghasilan pemerintah meningkat semenjak tahun 1831, sehingga kas negara yang semula kosong cepat terisi. Hutang-hutang Negeri Belanda dapat dilunasi. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran pengeluaran negara, sehingga membawa kenaikan kemakmuran Negeri Belanda. Pendek

kata, kesulitan keuangan Negeri Belanda dapat diatasi. Sementara itu perkapalan dan perdagangan di Negeri Belanda meningkat. Kota Amsterdam dibangun sebagai pusat pasaran dunia bagi hasil tanaman dari daerah tropika.

Pada umumnya sistem tanam-paksa berhasil, bagi pihak penjajah, sehingga memperoleh saldo untung (batig slot) yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai contoh pada tahun 1832 dan 1867 saldo untung mencapai jumlah 967 juta *gulden*, jumlah yang amat tinggi.

Sekalipun pada dasarnya sistem tanam-paksa sama dengan sistem yang dijalankan oleh VOC sebelumnya, pengaruh sistem tanam-paksa lebih dalam dari pada sistem VOC. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kedua sistem tersebut. Dalam penggalan kekayaan, VOC hanya sampai berhubungan dengan para raja-raja atau bupati-bupati, sedangkan dalam sistem tanam-paksa pemerintah dapat berhubungan sampai ke tingkat kepala desa, sehingga pengaruh pemerintah kolonial sampai di daerah pedesaan. Oleh karena itu tanam-paksa menimbulkan berbagai perubahan dalam peri kehidupan di kalangan masyarakat Jawa. Perubahan-perubahan itu di antaranya ialah berubahnya pelapisan sosial masyarakat Jawa. Sementara itu lalu lintas ekonomi-uang mulai meresap di daerah pedesaan, sistem pekerja upahan mulai dikenal, serta sistem penyewaan tanah kepada pengusaha Barat yang dibayar dengan uang mulai dikenal pula. Perubahan-perubahan semacam itu semakin meluas setelah politik kolonial liberal dijalankan oleh pemerintah Belanda. Masa itu disebut juga zaman liberalisme, yang berlangsung dari tahun 1870 sampai 1900.

C. JAMAN LIBERALISME (1870 - 1900)

1. Gagasan Politik Liberal

Sesudah tahun 1850 kaum liberal memperoleh kemenangan politik di Negeri Belanda. Golongan ini mempunyai suara yang kuat untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Mereka juga ingin menerapkan azas-azas liberalisme di daerah tanah jajahan. Seperti telah disebutkan di depan, kaum liberalis berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak campur-tangan dalam urusan ekonomi. Tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta. Agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya, maka mereka harus diberi

keleluasaan berusaha. Dengan demikian maka pemerintah harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kaum pengusaha swasta dan modal swasta Belanda untuk mengembangkan kegiatannya di berbagai bidang kegiatan ekonomi.

Mengapa mereka berpendapat demikian? Karena sebagian besar pendukung aliran liberal adalah kaum pengusaha swasta Belanda. Mereka adalah kaum bermodal, yang pada masa-masa sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam menarik keuntungan dari tanah jajahan. Pada masa lampau mereka tidak memiliki kedudukan politik yang kuat di pemerintahan. Pemegang kekuasaan politik lebih banyak dipegang oleh kaum bangsawan dan keluarga raja, yang berpegang pada paham konservatif. Golongan itulah yang telah lama menikmati keuntungan dan manfaat tanah jajahan di Indonesia. Baru setelah kaum bermodal menang dalam perwakilan pemerintah di Negeri Belanda, mereka berusaha untuk ikut mengambil bagian.

Oleh sebab itulah maka sesudah sistem tanam-paksa dihapuskan, kaum liberal menghendaki agar diganti dengan usaha swasta. Untuk itu perlu adanya kebebasan bekerja bagi kaum pengusaha dan disediakan kesempatan untuk menggunakan tanah bagi usaha-usahanya. Sesungguhnya tujuan pokok mereka bukanlah ingin mengatur tanah jajahan sebaik-baiknya. Yang penting adalah bagaimana mengatur tanah jajahan agar dapat menghasilkan uang. Untuk itulah maka mereka berusaha keras agar memperoleh tempat di Indonesia.

2. Penanaman Modal Swasta Barat di Indonesia

Sesuai dengan tuntutan kaum liberal, maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk sepenuhnya menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha dan kegiatan di Indonesia, terutama sekali di perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun di daerah-daerah luar Jawa. Selama periode tahun 1870 dan 1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat, karena itulah maka masa ini sering disebut jaman liberalisme. Selama masa itu modal swasta Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah membuka perkebunan-perkebunan seperti kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatra Timur.

Pembukaan perkebunan besar itu dapat diadakan karena didukung oleh adanya Undang-undang Agraria yang dikeluarkan pada tahun 1870. Undang-undang Agraria itu dikeluarkan untuk dua tujuan. Tujuan pertama ialah untuk melindungi petani-petani di tanah jajahan agar terjaga hak-hak miliknya atas tanahnya terhadap usaha penguasaan oleh orang-orang asing. Tujuan yang kedua ialah memberikan peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Pemerintah memang hanya memberikan kebebasan untuk menyewa tanah rakyat dalam kegiatan usahanya, tetapi melarang untuk usaha-usaha pembelian tanah penduduk. Hal ini dilakukan karena pemerintah juga khawatir kalau-kalau banyak tanah penduduk akan jatuh ke tangan kaum pengusaha asing. Karena itulah pemerintah mengadakan peraturan pada satu pihak menjamin kepentingan kaum modal swasta, dan di pihak lain melindungi kepentingan hak-hak kaum pribumi.

Mengenai jenis tanah yang dapat disewa oleh pengusaha asing pemerintah telah menetapkan dalam Undang-undang Agraria tersebut. Di dalam Undang-undang Agraria telah dibedakan adanya dua golongan tanah. Pertama tanah-tanah milik negara, yaitu tanah yang tidak secara langsung menjadi hak-milik penduduk pribumi, misalnya, hutan-hutan dan semua tanah yang ada di luar wilayah milik desa dan penduduknya. Sudah barang tentu semula tanah-tanah tersebut secara adat adalah milik orang pribumi, tetapi oleh pemerintah Hindia Belanda ditetapkan menjadi milik pemerintah. Tanah tersebut dapat disewa oleh kaum pengusaha selama 75 tahun. Golongan tanah yang kedua, adalah tanah-tanah milik penduduk pribumi. Tanah-tanah itu misalnya, semua sawah-ladang dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Untuk menetapkan hak milik atas tanah itu secara jelas, pemerintah telah memberikan kepastian hukum atas semua tanah yang menjadi hak-milik semua penduduk. Sejalan dengan usaha itulah maka diadakan pengukuran dan penetapan kelompok-kelompok tanah oleh pemerintah. Kemudian penduduk menerima surat bukti atas hak-milik tanahnya, seperti sawah, ladang dan pekarangannya. Tanah semacam ini boleh disewa oleh pengusaha swasta asing selama 5 tahun. Semua persewaan dilakukan dengan perjanjian (kontrak) dan didaftarkan kepada pemerintah. Ada pula tanah hak-milik penduduk pribumi yang dapat

disewa selama 30 tahun. Perlu diketahui pula, bahwa dengan adanya penetapan hak-milik atas tanah penduduk secara jelas, maka penetapan pajak tanahpun kemudian dapat dilakukan secara pasti. Apabila pada masa Raffles pemungutan pajak gagal dilakukan, maka pada akhir abad ke 19 pemerintah Belanda dapat melaksanakannya. Kemajuan industri dan perdagangan di Negeri Belanda yang telah bangun pada masa itu telah mendorong kaum liberal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu perhubungan antara Negeri Belanda dan Indonesia mulai lancar karena Terusan Suez telah dibuka pada tahun 1869. Perdagangan antara kedua negeri itu akan terjamin kelancarannya dan makin meningkat mengingat jarak perhubungan makin lebih dekat dari pada sebelumnya, yaitu harus mengelilingi Tanjung Harapan. Baik perhubungan pos (1862) dan telegraf (1856), juga telah terselenggara.

Harapan kaum liberal untuk membuka tanah jajahan bagi perkembangan ekonomi Hindia Belanda ternyata tercapai. Perkebunan-perkebunan gula, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya dibangun secara luas dan meningkat secara pesat. Misalnya, perkebunan gula semenjak tahun 1870 mengalami perluasan dan kenaikan produksi yang pesat, terutama di daerah Jawa. Demikian juga kemajuan-kemajuan teknis ikut diperkenalkan oleh adanya kemajuan perusahaan ini. Berbagai mesin dan perlengkapan pengolahan bahan industri ini diimport oleh pengusahanya, sehingga dapat meningkatkan produksi perkebunan gula. Sudah barang tentu hal ini sejalan dengan tersedianya modal swasta dalam jumlah besar yang mengalir ke tanah jajahan. Selain itu perkebunan teh juga mengalami perkembangan yang meningkat. Demikian juga perkebunan tembakau menjadi lebih berkembang secara pesat semenjak masa ini. Sejak semula tembakau telah banyak ditanam di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Semenjak zaman liberalisme ini perkebunan itu diperluas sampai di daerah Besuki (Jawa Timur) dan di daerah Deli (Sumatra Timur).

Untuk melancarkan perkembangan produksi tanaman export itu maka pemerintah Hindia Belanda membangun waduk-waduk dan saluran-saluran irigasi. Irigasi dibangun demi kelancaran usaha perkebunan gula atau lainnya. Tetapi penduduk yang ada di sekitar perkebunan gula dapat memperoleh manfaatnya dengan dasar giliran

dari pihak perkebunan. Karena itulah maka tidak mengherankan apabila pada waktu sekarang terdapat peninggalan bangunan irigasi di daerah bekas perkebunan gula pada abad 19.

Selain irigasi juga dibangun jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, jalan kereta-api. Pembangunan jalan itu dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan itu dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan meneruskannya ke dunia luar. Jalan kereta-api yang pertama dibangun adalah di Jawa-Tengah antara Semarang dan Daerah Kerajaan, yaitu Yogyakarta. Selain itu ialah antara Batavia dan Bogor. Jalan kereta-api di daerah itu dibangun pada tahun 1873. Dalam tahun yang sama juga dibangun jalan kereta-api antara Surabaya-Malang. Jalan kereta-api itu dibangun ke arah daerah pusat perkebunan-perkebunan. Dengan demikian pembangunan jalan kereta-api di Jawa dilakukan dengan dasar pertimbangan ekonomi. Baru pada akhir abad ke 19 jalan kereta-api juga dibangun di Sumatra. Pembangunan jalan kereta-api di daerah luar Jawa direncanakan untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya atau daerah yang ingin dikuasainya, misalnya di Aceh. Selain pertimbangan politik dan militer, pembangunan jalan kereta-api di daerah ini ditujukan juga untuk kepentingan pertambangan, seperti batubara di Sumatra Barat.

Pembangunan jalan-jalan, jembatan dan jalan kereta-api itu dilakukan dengan melalui pengerahan tenaga rakyat secara paksa. Pengerahan kerja rodi atau kerja-paksa untuk pembangunan jalan-jalan, jembatan, jalan kereta-api, irigasi dan benteng-benteng selama masa abad ke 19 telah membawa penderitaan bagi penduduk Indonesia. Perlu ditambahkan pula bahwa pengangkutan laut juga mengalami peningkatan yang cepat pula. Perhubungan laut di Kepulauan Indonesia dikuasai oleh perusahaan pengangkutan Belanda, yaitu KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*).

3. Akibat-akibatnya Terhadap Kehidupan Rakyat Indonesia

Bagaimana keadaan kehidupan penduduk Indonesia pada masa pemerintahan kolonial di bawah politik liberal itu? Perkembangan perkebunan-perkebunan besar yang dibuka di Indonesia di satu pihak memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Kekayaan bumi Indonesia

berupa hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Tetapi dilain pihak bagi penduduk pribumi perkembangan itu justru membawa kemunduran tingkat kesejahteraan hidup. Pertumbuhan penduduk Jawa yang meningkatnya lebih cepat dari pada pertumbuhan jumlah bahan makanan, telah menyebabkan menurunnya konsumsi bahan makanan, yaitu terutama beras. Adanya krisis yang dialami perkebunan pada tahun 1885, telah membawa akibat buruk pada penduduk. Uang sewa-tanah, upah bekerja di pabrik dan di perkebunan menurun. Hasil usaha-usaha kerajinan menurun akibat banyaknya barang-barang luar yang diimport. Pengangkutan dengan grobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya jalan kereta-api.

Menurut suatu penyelidikan mengenai kemakmuran penduduk, di tanah jajahan terjadi kemerosotan kemakmuran. Disebutkan bahwa di Jawa misalnya, pada awal abad ke 20 hasil pendapatan penduduk tiap keluarga untuk satu tahun f.80,-. Dari jumlah itu masih dikurangi untuk membayar pajak kepada pemerintah sebesar f.16,-. Dengan demikian penduduk tanah jajahan hidup dalam kemiskinan. Merosotnya kemakmuran penduduk Indonesia pada abad ke 19 pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, adanya pertambahan penduduk yang meningkat dalam abad ke 19. Sementara itu jumlah produksi pertanian menurun. Kedua, karena adanya sistem tanam-paksa dan pekerjaan rodi yang banyak menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak penguasa sehingga membawa korban di pihak penduduk. Sebab ketiga adalah dalam mengurus pemerintahan di daerah luar Jawa selama abad ke 19, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangannya dari daerah Jawa, sehingga tidak secara langsung Jawa harus menanggung beban keuangan untuk pembiayaan pemerintah Belanda terutama dalam perang-perang kolonial untuk menguasai daerah tersebut. Sebab yang keempat adalah karena sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk. Sebab yang terakhir adalah karena kritis yang dialami perkebunan pada tahun 1885, yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengadakan penghematan, misalnya dengan jalan menekan uang sewa-tanah dan upah-kerja di perkebunan dan di pabrik-pabrik.

Perlu diketahui bahwa pada masa pembukaan daerah luar Jawa untuk perkebunan-perkebunan swasta timbul masalah tenaga kerja. Untuk melayani tenaga-kerja untuk pekerjaan pembukaan dan pengolahan perkebunan penguasa swasta di Sumatra Timur, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang hubungan kerja. Pekerja-pekerja banyak didatangkan dari Jawa yang dilakukan secara kontrak, disebut kuli-kontrak. Pemerintah Belanda menjamin kepada para majikan perusahaan, untuk menghukum para kuli atau buruh yang melarikan diri sebelum kontraknya habis masanya. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap para pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan-ketentuan kontrak kerja itu kemudian terkenal sebagai *poenale sanctie*. Praktek-praktek dari sistem kerja-kontrak ini telah membawa kehidupan yang buruk pada para pekerjanya dan tindakan-tindakan pemerasan dan penekanan.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa masa kebijaksanaan kolonial liberal telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan penduduk Indonesia. Di antaranya yang terasa pada masa tersebut adalah mulai meresapnya ekonomi-uang ke lingkungan penduduk pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu mulailah muncul sistem kerja-upahan. Kerja-upahan yang diperkenalkan terutama oleh perkebunan-perkebunan atau perusahaan-perusahaan itu menyebabkan banyak orang yang mulai menggantungkan kehidupannya pada upah pekerjaan di perusahaan itu. Terutama ialah orang-orang pedesaan yang dekat pada perkebunan atau pabrik-pabrik. Banyak yang mulai meninggalkan pekerjaan di tanah pertaniannya dan bekerja di pabrik-pabrik sebagai buruh. Dengan demikian maka lahirlah golongan buruh di lingkungan penduduk Indonesia. Selain itu perkembangan ini juga membawa pertumbuhan kota-kota baru di sekitar perusahaan.

Praktek kolonial yang dijalankan pemerintah Belanda dari tahun 1870 sampai 1900, telah membawa kemerosotan kehidupan penduduk Indonesia, terutama di Jawa. Oleh sebab itu maka timbullah kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintah. Kritik-kritik itu mirip dengan kritik-kritik yang dilancarkan kepada sistem tanam-paksa. Pada dasarnya kritik itu tidak menyetujui praktek-praktek dari kebijaksanaan yang telah dilakukan itu, yang telah membawa keuntungan hanya di pihak pemerintah Belanda. Pihak penduduk Indonesia sebaliknya

tetap hidup dalam kesengsaraan, pada hal mereka telah bekerja keras untuk menghasilkan keuntungan bagi Negeri Belanda. Mereka tidak diperbaiki kehidupannya, padahal telah berjasa. Memang demikian nasib rakyat jajahan.

Usaha-usaha untuk sedikit memperbaiki nasib rakyat Indonesia baru dilaksanakan pada peralihan abad 19 – abad 20. Kebijakan yang melandasinya dikenal dengan sebutan Politik Etis. Kebijakan itu didasarkan atas gagasan-gagasan "Golongan Etis", yang menyatakan bahwa tanah jajahan perlu perbaikan dalam bidang pertanian, yaitu pembangunan dalam soal irigasi, peningkatan pendidikan atau edukasi dan mengadakan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah lain yang masih kosong tanahnya, yakni transmigrasi. Segala usaha itu harus dilaksanakan karena menurut mereka, Negeri Belanda mempunyai hutang kehormatan kepada rakyat Indonesia.

4. Pertumbuhan Masyarakat Keristen

Salah satu perkembangan penting dalam abad ke-19 adalah pertumbuhan masyarakat Keristen di beberapa tempat di kepulauan Indonesia. Sebenarnya sudah sejak abad ke-16 agama Keristen telah masuk di Indonesia. Malahan ada berita bahwa pada awal abad ke-14 beberapa anggota ordo Fransiskan telah singgah di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan dalam perjalanannya ke negeri Cina dan dalam perjalanan pulang. Berita ini menyebutkan bahwa pada kunjungan tersebut sejumlah penduduk Indonesia telah dibaptiskan. Akan tetapi apa yang terjadi sesudahnya tentang masyarakat Keristen yang pertama ini kita tidak mempunyai data-data lebih lanjut. Kita juga tidak mengetahui apakah agama Keristen menurut aliran-aliran yang telah diperkembangkan di daerah Timur Tengah (seperti Nestorianisme, Manichaeisme, dan sebagainya) yang sudah tersebar sampai ke pantai barat India dan ke negeri Cina pernah masuk ke Indonesia.

Agama Keristen yang dikenal di Indonesia adalah dalam bentuk seperti yang telah berkembang di Eropa Barat. Data-data yang pasti mengenai penyebarannya baru muncul pada abad ke-16, yakni bersama dengan kedatangan orang Portugis. Setelah menduduki kota Malaka pada tahun 1511, orang Portugis berusaha pula untuk menyebarkan agamanya di daerah ini. Pendorong utama dalam usaha

ini adalah Franciscus Xaverius yang pada tahun 1546-47 bekerja di Ambon, Ternate, dan Halmahera. Di pulau-pulau Maluku lainnya para misionaris berhasil pula mendapat penganut, demikian pula di Sulawesi Selatan. Namun demikian perkembangan kemudian tidak memenuhi harapan-harapan Portugis. Pertentangan yang dihadapinya dari penguasa pribumi setempat merupakan faktor penting, di samping itu pembaptisan secara massal tanpa diikuti dengan pengajaran agama yang lebih mendalam oleh misionaris yang sangat kecil jumlahnya tidak memungkinkan perkembangan yang pesat. Kedatangan orang Belanda – musuh Portugis dan Spanyol pada waktu itu – menghentikan usaha-usaha Portugis tersebut. Seperti diketahui, perang antara Belanda dan Spanyol (1568-1648) tidak hanya merupakan perang kemerdekaan Belanda, tetapi juga merupakan perang agama antara Belanda yang beragama Protestan dan Spanyol yang beragama Katolik.



Suatu hari Minggu di Minahasa
Sumber : Prof. D.G. Stibbe, *Neerlands Indië* ...

Jadi pada awal abad ke-17 usaha Portugis untuk menyebarkan agamanya dihentikan oleh Belanda. Hanya di daerah yang dikuasai Spanyol (sejak 1605), yakni di Maluku Utara, Sulawesi Utara dan kepulauan Sangir, misionaris Katolik masih dapat bekerja terus

Akan tetapi daerah-daerah ini lambat laun jatuh pula ke tangan Belanda, dan pada tahun 1677 pulau Siau (kep. Sangir) sebagai wilayah terakhir pun harus ditinggalkan oleh orang Spanyol.

Suatu pengecualian adalah daerah Nusatenggara Timur. Di bagian timur Flores, pulau Solor dan pulau-pulau kecil sekitarnya kekuasaan Portugis dapat bertahan sampai 1859, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa agama Katolik telah ada selama lebih dari empat abad.

Masyarakat Keristen yang mendiami wilayah yang telah dikuasai oleh VOC dimasukkan dalam gereja Protestan. Akan tetapi, walaupun ada pegawai Kompeni yang berusaha untuk memperluas agama Keristen di wilayah kekuasaannya, pada umumnya perhatian VOC hanya ditujukan kepada usaha perdagangan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sampai abad ke-19 agama Keristen di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan. Juga di wilayah Portugis dalam periode yang sama para misionaris tidak menunjukkan kegiatan besar.



Gereja di Balige

Sumber : Prof. D.G. Stibbe, *Neerlands Indië ...*

Keadaan ini berubah dalam abad ke-19. Pada tahun 1814 tiga orang penginjil pertama tiba di Maluku. Mereka ini dikirim oleh *Nederlandsch Zendingengenootschap* (NZG) suatu perkumpulan Protestan yang khusus didirikan untuk usaha-usaha penyebaran agama. Kegiatan mereka ditujukan terutama kepada pendidikan anak-anak pribumi. Dengan demikian banyak sekolah yang didirikan-nya, dan untuk memperoleh guru-guru yang terlatih, pada tahun 1835 NZG membuka sekolah guru yang pertama (*kweek-school*) di Ambon. Selain NZG banyak perkumpulan *zending* yang didirikan selama abad ke-19. Di samping Maluku daerah penyebarannya terutama ditujukan ke daerah pedalaman yang pada waktu itu masih menganut kepercayaan pribumi, seperti di Kalimantan, di Sulawesi Utara (Minahasa dan Bolaang-Mongondou), Tana Toraja, kepulauan Sangir-Talaut, di tanah Batak (oleh *Rhennische Missions Gesellschaft*), di Nusatenggara Timur, dan di Irian Jaya.

Baru sejak Gubernur-Jenderal Daendels (awal abad ke-19) agama Katolik mendapat hak yang sama dengan agama Protestan di wilayah Hindia-Belanda, sehingga mulai abad ini para misionaris Katolik pun menunjukkan kegiatan-kegiatan dalam penyebaran agama-nya.

B A B VI

GERAKAN SOSIAL DALAM ABAD KE-19

A. GERAKAN SOSIAL DAN GERAKAN MELAWAN PEMERASAN PADA KHUSUSNYA

1. Sebab-sebab Timbulnya dan Ciri-ciri Gerakan Sosial

Masuknya kekuasaan Barat ke Indonesia telah membawa perubahan dan bahkan kegoncangan dalam kehidupan rakyat Indonesia. Semenjak awal abad ke-19 penguasa Belanda mulai mengadakan pembaharuan politik kolonial. Selain pembaharuan dalam politik pemerintahan, pemerintah Belanda juga mulai mempraktekkan sistem ekonomi baru. Akibat dari tindakan pemerintah itu timbul perubahan tatakahidupan di kalangan rakyat Indonesia. Tindakan pemerintah Belanda untuk menghapus kedudukan menurut adat penguasa pribumi dan menjadikan mereka pegawai pemerintah, meruntuhkan kewibawaan tradisionil penguasa pribumi. Kedudukan mereka menjadi merosot. Secara administratif para bupati atau penguasa pribumi lainnya adalah pegawai pemerintah Belanda yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Hubungan rakyat dengan para bupati terbatas pada soal administratif dan pemungutan pajak. Hak-hak yang diberikan oleh adat telah hilang. Pemilikan tanah lungguh atau tanah jabatan dihapus dan diganti dengan gaji. Upacara dan tatacara yang berlaku di istana kerajaan juga disederhanakan. Dengan demikian ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi menjadi lemah.

Dengan masuknya sistem ekonomi-uang, maka beban rakyat bertambah berat. Ekonomi-uang memudahkan bagi pelaksana pemungutan pajak, peningkatan perdagangan hasil bumi, lahirnya buruh upahan, masalah pemilikan tanah dan penggarapannya. Sistem penyewaan tanah, dan praktek-praktek kerja-paksa juga telah memperberat kehidupan penduduk pedesaan. Sementara itu kesejahteraan hidup semakin merosot sehingga mencapai tingkat kemiskinan yang tinggi. Praktek-praktek pemerasan dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan pemungutan pajak, kerja-paksa, penyewaan tanah dan penyelewengan-penyelewengan lainnya, telah menjadikan rakyat di pedesaan menjadi lemah. Mereka tidak memiliki

tempat berlindung, dan tempat untuk menyatakan keberatan-keberatan yang dirasakannya.

Dalam menghadapi pengaruh kekuasaan Barat yang membawa penderitaan hidup itu rakyat pedesaan memiliki caranya sendiri untuk melawan, yaitu dalam bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial ini dalam perwujudannya merupakan gerakan untuk menentang atau memprotes kepada pihak penguasa, baik pemerintah kolonial maupun penguasa setempat yang dianggap telah menjadi penyebab kesengsaraan atau penderitaan. Sifat dari gerakan itu masih sederhana. Gerakan-gerakannya tidak disusun dalam bentuk organisasi yang rapih seperti organisasi gerakan yang modern. Dalam melancarkan aksi penentangannya mereka juga tidak mendasarkannya kepada rencana-rencana atau program.

Oleh sebab itu pemberontakan-pemberontakan yang dilakukannya mudah sekali ditindas oleh pihak pemerintah Belanda. Umumnya gerakan yang dilakukan oleh kelompok rakyat pedesaan itu tidak dapat lama umurnya. Sebentar muncul dan sebentar hilang. Bila pimpinannya telah ditumpas, maka hilanglah gerakan itu. Gerakan rakyat ini bersifat setempat, yang tidak mempunyai kerjasama dengan daerah lainnya. Aksi-aksi pemberontakannya tidak bersifat luas seperti yang terjadi dalam perlawanan-perlawanan besar, sebagaimana yang terjadi dalam Perang Diponegoro, Perang Aceh, atau perang-perang lainnya. Aksi-aksi perlawanannya diwujudkan dalam bentuk, "kerusuhan-kerusuhan", "huru-hara", atau "gangguan-gangguan ketenteraman".

Dapat dikatakan bahwa sifat gerakan rakyat itu tradisional. Tujuan dari gerakan itu sering kabur, tidak seperti tujuan yang dilakukan dalam pergerakan politik. Pergerakan politik memiliki tujuan yang jelas, dan pengikutnya juga secara jelas memiliki gambaran masyarakat yang hendak dituju. Pengikut gerakan ini tidak demikian halnya. Mereka hanya memiliki harapan-harapan akan datangnya keadaan yang tenteram, adil dan makmur. Tetapi mereka tidak mengetahui caranya untuk melaksanakan keadaan yang diharapkan itu. Biasanya yang diharapkan adalah kedatangan tokoh-tokoh juru selamat atau ratu adil yang dianggap akan membawa jaman-keemasan yang diimpikan itu. Karena itulah gerakan-gerakan rakyat

sering didasari oleh segi-segi kepercayaan keagamaan dan magis. Dapat dipahami betapa besar daya-tarik ajaran-ajaran keagamaan dan kepercayaan kepada rakyat. Atas dasar itu, sering kali yang dilancarkan untuk menentang pengaruh Barat sangat keras dan bercorak keagamaan.

Selama abad ke-19 dan abad ke-20 gerakan-gerakan rakyat telah terjadi di mana-mana. Hampir setiap daerah mengenal munculnya gerakan rakyatnya sendiri. Lahirnya gerakan ini menunjukkan bahwa rakyat di pedesaan tidak tinggal diam dalam menghadapi keadaan yang ditimbulkan oleh penjajahan. Sekalipun perlawanan-perlawanan besar yang berujud Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh dan lainnya telah berhasil ditindas, tetapi tidak berarti bahwa rakyat Indonesia telah patah semangatnya. Hal ini ternyata dari adanya gerakan sosial rakyat di pedesaan yang masih memiliki kekuatan untuk menentang kekuasaan Barat, meskipun dengan caranya sendiri.



*Lukisan Raden Saleh : Perkelahian dengan singa.
Sumber : Koleksi Istana Presiden.*

Pada dasarnya gerakan-gerakan rakyat itu dapat dibedakan atas : gerakan melawan pemerasan, gerakan ratu adil dan gerakan golongan keagamaan. Gerakan yang pertama adalah gerakan rakyat yang bertujuan untuk menentang peraturan atau keadaan yang tidak adil. Aksi-aksinya didorong oleh rasa dendam dan kebencian terhadap keadaan kehidupan sosial dan ekonomi yang jelek. Gerakan ratu adil adalah gerakan rakyat yang dalam melaksanakan aksi penentangannya didasarkan atas kepercayaan akan datangnya tokoh juruselamat, Ratu Adil atau Imam Mahdi. Tokoh itu dianggap akan membebaskan rakyat dari kesengsaraan. Berbeda dengan kedua gerakan tersebut, gerakan golongan keagamaan kegiatannya lebih tertuju kepada ikhtiar supaya para penganutnya menjalankan perintah-perintah agamanya secara cermat.

2. Gerakan Melawan Pemerasan

Gerakan rakyat melawan pemerasan banyak terjadi di tanah partikelir (swasta). Dapat dikatakan bahwa sepanjang abad ke-19 di daerah-daerah semacam itu terjadi pergolakan rakyat menentang penindasan. Malahan kerusuhan-kerusuhan semacam itu masih terus terjadi pada abad ke-20. Hampir semua kerusuhan yang terjadi di tanah partikelir itu disebabkan oleh adanya pemungutan pajak yang tinggi dan beban pengerahan tenaga kerja-paksa yang sangat berat. Kerusuhan itu dilakukan oleh rakyat petani di pedesaan tanah partikelir. Mereka berontak karena mereka telah ditindas dan diperas oleh penguasa tanah partikelir. Karena itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pengikutnya banyak didorong oleh perasaan dendam dan kebencian.

Daerah-daerah yang banyak tanah partikelirnya semacam itu antara lain adalah di sekitar Jakarta, di pedalaman antara Jakarta dan Bogor, di daerah Banten, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Timbulnya tanah partikelir di daerah itu adalah sebagai akibat dari praktek penjualan tanah yang dilakukan oleh orang Belanda semenjak zaman VOC, dan berjalan sampai abad ke-19. Semula tanah partikelir ada yang berasal dari pemberian dari VOC terhadap orang-orang yang telah berjasa dalam menjaga ketenteraman suatu daerah, seperti yang terjadi di daerah sekitar Jakarta. Ada pula yang semula berasal dari milik pribadi seorang Gubernur Jenderal

dan berturut-turut dimiliki oleh penggantinya. Daerah partikelir semacam itu terdapat di sekitar Bogor. Di tempat-tempat lainnya tanah partikelir banyak yang berasal dari penjualan dari pihak penguasa kepada orang-orang swasta. Kebanyakan orang yang menguasai tanah partikelir semacam itu adalah orang-orang asing, baik orang Eropa maupun orang Cina. Mereka yang memperoleh tanah dengan cara demikian itu kemudian bertindak sebagai seorang tuan-tanah yang mempunyai hak untuk menguasai penduduk yang diam di atas tanah yang dikuasainya itu. Sebagai penguasa tanah itu mereka juga mempunyai hak untuk menuntut penyerahan tenaga dan hasil tanahnya dari semua penghuninya. Malahan para tuan-tanah dapat meminta apa saja yang mereka kehendaki. Pemerintah memang berhak untuk mengawasi daerah itu, tetapi dalam prakteknya pemerintah tidak dapat mencegah praktek-praktek penindasan dan perbudakan yang dilakukan oleh para tuan-tanah. Pemerintah pada waktu itu terlalu lemah untuk bertindak tegas terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Berbagai peraturan telah diadakan untuk melindungi para penduduknya dari tindakan-tindakan yang memberatkan. Sekalipun demikian perbuatan sewenang-wenang tetap terjadi juga. Tindakan semacam itu rupanya telah mendarah-daging di lingkungan tanah partikelir, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian timbul kegelisahan di kalangan para penduduknya. Akibatnya adalah timbulnya kerusuhan-kerusuhan yang terus-menerus terjadi.

Tindakan-tindakan sewenang-wenang dari kaum tuan-tanah itu selalu terjadi karena mereka berusaha untuk mengeduk keuntungan sebesar-besarnya dari tanah yang dikuasainya. Biasanya cara untuk memperoleh penghasilan dari tanahnya itu, antara lain ialah dengan jalan menarik hasil secara langsung dari petani yang menggarapnya. mengumpulkan uang sewa dan bagian dari hasil panen, dan juga ada yang menarik pajak beserta pengerahan tenaga para penduduk. Untuk menjalankan tugas pemungutan hasil tanah, pajak dan pengawasannya, para tuan-tanah mengangkat petugas-petugas yang khusus mengurus pekerjaan tersebut. Tanah partikelir itu selain menghasilkan padi, juga ditanami kopi, teh, ataupun coklat. Tanaman itu juga merupakan tanaman bahan export.

Penduduk yang diam di daerah partikelir menurut hukum

masih tetap bebas. Tetapi dalam kenyataannya mereka tidak lagi memiliki kebebasan dalam kehidupan ekonomi dan kehilangan hak-hak azasnya. Boleh dikatakan mereka tidak berbeda dari budak-belian. Hidup mereka tergantung sekali pada tuan-tanahnya. Mereka banyak dibebani kewajiban yang berat-berat. Petani-petani berke-wajiban untuk membayar "cuke" (pajak), antara lain berupa pembayaran sebesar seperlima dari hasil panennya. Selain itu para penduduk masih diharuskan menyerahkan tenaganya, untuk melakukan kerja-paksa selama lima hari setiap bulan. Kerja-paksa di tanah partikelir itu sering disebut kerja "kompenian". Pekerjaan itu dibebankan kepada penduduk, karena para tuan-tanah menganggap dirinya sebagai pengganti dari pemerintah Belanda. Dalam daerah yang dikuasai pemerintah penduduk juga mempunyai kewajiban untuk melakukan kerja-paksa.

Sebaliknya para tuan-tanah dapat berbuat sewenang-wenang. Mereka dapat memaksakan segala macam kehendaknya, menuntut penyerahan tenaga kerja tanpa upah, dan dapat mengusir para penduduk yang tidak dapat membayar pajak, hutang atau memenuhi pekerjaan yang dimintanya. Karena adanya tindakan-tindakan yang demikian itulah maka keadaan tanah partikelir sangat buruk. Di mana-mana timbul rasa benci dan dendam terhadap praktek-praktek pungutan cuke atau pajak, serta kerja-paksa. Oleh sebab itu rakyat sering bangkit untuk menentang praktek-praktek yang dilakukan oleh tuan-tanah dan kakitangannya yang telah menyeret mereka ke jurang kesengsaraan yang sedalam-dalamnya. Pergolakan terjadi di mana-mana dalam bentuk kerusuhan-kerusuhan atau kericuhan-kericuhan. Karena kerusuhan itu banyak terjadi pada waktu pemungutan cuke, maka sering kerusuhan-kerusuhan itu disebut "kerusuhan cuke". Kerusuhan semacam itu terjadi secara berturut-turut, misalnya pada tahun 1845, 1886 dan 1892, yaitu di daerah Candi Udik, Ciomas dan Campea. Kiranya kisah daripada beberapa di antara kerusuhan itu dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai gejala sejarah ini.

Penduduk di tanah partikelir Ciomas yang terletak di lereng Gunung Salak bagian utara (Jawa Barat), telah lama mengalami beban berat dalam pembayaran cuke, pekerjaan rodi, berbagai penyerahan hasil-hasil pekarangan, berbagai tindakan perbudakan,

seperti memaksa rakyat untuk mengangkut padi dari tempat panen ke lumbung tuan-tanah yang jauhnya 15 atau 18 km tanpa upah, dan praktek-praktek penindasan lainnya. Malahan tak sedikit wanita dan anak-anak diwajibkan pula untuk bekerja selama sembilan hari sebulan. Banyak orang yang tidak tahan memikul beban berat itu pindah ke tempat lain, untuk menghindarkan diri. Setelah kesengsaraan dan ketidakpuasan memuncak, maka meletuslah pemberontakan yang terbuka pada tahun 1886. Sejumlah besar rakyat, di bawah pimpinan seorang yang bernama Mohammad Idris, beramai-ramai melakukan penyerangan terhadap tempat kediaman tuan-tanah, yang kebetulan sedang mengadakan pesta. Pesta itu dihadiri oleh banyak pegawai dan kakitangan tuan-tanah itu. Melihat adanya kakitangan tuan-tanah (yang telah menjadi biang-keladi penindasan) hadir dalam pesta itu, timbullah kemarahan gerombolan rakyat yang datang berbondong-bondong ke tempat itu. Dengan secara serentak mereka menyerbu orang yang berada di dalam ruangan pesta. Secara membabi-buta mereka menangkapi sasarannya dan membunuhnya dengan kejam. Tidak kurang dari empatpuluh orang terbunuh dan tujuh puluh orang lainnya luka-luka. Tuan-tanah dan keluarganya kebetulan tidak hadir di tempat pesta itu. Mereka berhasil menyembunyikan diri. Para perusuh juga tidak puas dengan mengadakan serbuan ke tempat itu, tetapi juga menyerbu ke tempat lainnya. Dalam kerusuhan itu pula seorang camat Ciomas terbunuh. Sasaran dari penyerbuan rakyat pada waktu itu adalah para pegawai pemerintah, baik orang Belanda maupun orang pribumi, para tuan-tanah, pedagang-pedagang dan para lintah-darat yang telah memeras mereka.

Selain di Ciomas pemberontakan rakyat yang semacam itu juga terjadi di Campea pada tahun 1913. Pada suatu ketika segerombolan rakyat petani sebesar 400 orang beramai-ramai datang ke tempat Bupati Purwakarta (Jawa Barat). Mereka datang untuk menyampaikan permintaan agar pemerintah turun-tangan dalam meringankan beban penarikan cuke yang dirasakan sangat berat oleh rakyat. Mereka juga mengajukan penentangan terhadap praktek-praktek pengukuran tanah yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap tidak adil. Gerombolan rakyat ini juga berbondong-bondong datang ke tempat pejabat Belanda, yaitu kontrolir, untuk menuntut tindakan-tindakan terhadap keliruan dalam melaksanakan pengukuran tanah. Situasi menjadi

gawat. Karena itu polisi segera mengadakan penangkapan dan penggeledahan. Dalam penggeledahan itu ternyata dapat disita beberapa senjata.

Di tanah partikelir Condet di daerah Surabaya juga timbul kerusuhan-kerusuhan pada tahun 1916. Kerusuhan ini dipimpin oleh seorang yang bernama Enteng Gendut. Dengan sekelompok pengikutnya, Enteng Gendut mengadakan serbuan ke tempat kediaman tuan-tanah. Kebetulan di situ sedang diadakan pertunjukan topeng. Para perusuh segera mengadakan penyerangan dengan melempari tempat pertunjukan itu dengan batu. Pertunjukan dipaksa untuk segera berhenti dan pertemuan bubar. Pada waktu mereka dipanggil untuk menghadap wedana, mereka tidak datang. Segera mereka dikejar untuk ditangkap. Pergulatan terjadi ketika pasukan pemerintah datang ke tempat kediaman para perusuh. Dalam perkelahian itu akhirnya Enteng Gendut terbunuh, sedang para pengikutnya lari menyelamatkan diri.

Pemberontakan terjadi juga di daerah Tangerang pada tahun 1924. Sejumlah besar rakyat di bawah pimpinan seorang yang bernama Kaiin beramai-ramai datang ke tempat tuan-tanah di Pangkalan. Mereka menyerbu dan menyerang para penghuni serta merampok harta-miliknya. Kantor tuan-tanah yang ada di dekatnya juga dirampok dan buku-bukunya dibakar. Sesudah itu gerombolan menuju ke tempat camat daerah itu. Dalam perjalanannya menuju Jakarta gerombolan rakyat itu diserang oleh pihak polisi yang sebelumnya telah diberitahu akan kedatangan mereka. Pertempuran segera terjadi. Dalam pertempuran itu sembilan orang pemberontak terbunuh, lainnya bubar menyelamatkan diri, sebagian tertangkap.

Kerusuhan-kerusuhan itu semuanya memiliki sebab-sebab yang sama, yaitu menentang penindasan dan pemerasan yang telah dilakukan oleh para penguasa. Mereka menginginkan perbaikan sistem dan keringanan beban. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pengikutnya juga sering digerakkan oleh para pemimpinnya dengan dasar-dasar kepercayaan akan datangnya tokoh-tokoh Ratu Adil, dan dasar ajaran keagamaan.

B. GERAKAN RATU ADIL DAN GERAKAN KEAGAMAAN

1. Gerakan Ratu Adil

Ada juga gerakan rakyat yang timbul atas kepercayaan bahwa seorang tokoh akan datang untuk membebaskan orang dari segala penderitaan dan kesengsaraan. Tokoh itu digambarkan sebagai seorang Raja Adil atau Imam Mahdi. Zaman keemasan yang penuh keadilan dan kemakmuran segera akan datang bila tokoh tersebut telah tiba di tengah-tengah mereka. Tokoh-tokoh pemimpin dari gerakan itu biasanya muncul dari seorang yang mengaku menerima panggilan sebagai pemimpin agama, nabi atau juruselamat. Tokoh-tokoh semacam itu memperoleh kepercayaan para pengikutnya. Pegangan yang diajarkan kepada para pengikutnya adalah soal-soal yang bersifat gaib, dan soal-soal yang berhubungan dengan ramalan akan datangnya hari akhir atau zaman keemasan.

Pada pokoknya orang-orang yang menjadi pengikut gerakan itu memiliki kehendak untuk mengubah keadaan buruk yang sedang mereka alami. Biasanya keadaan yang dialami itu digambarkan sebagai keadaan yang serba jelek, tidak ada keadilan, penuh penderitaan, banyak penyelewengan, dan kemiskinan. Oleh karenanya mereka menghendaki keadaan yang serba jelek itu dimusnahkan dan diganti dengan keadaan yang penuh keadilan dan kemakmuran, tidak adanya pemerasan dan penindasan. Karena sifatnya hendak mengandalkan perubahan, maka tidak jarang tindakan-tindakan pengikut gerakan ini sangat radikal.

Harapan-harapan itu sering diikuti oleh keadaan baru dalam kehidupan keagamaan. Bersama dengan itu timbul pula impian-impian akan kembalinya tatakehidupan yang pernah berlaku pada jaman-jaman lampau. Mereka merindukan akan berdirinya kembali kerajaan-kerajaan Majapahit, Mataram, dan lainnya, yang digambarkan sebagai masa keemasan. Mitos-mitos lama hidup kembali, dan diperkuat dengan ramalan-ramalan tentang akan kembalinya zaman yang bahagia itu pada masa yang akan datang. Dalam harapan itu tersalur rasa dendam rakyat terhadap penguasa asing yang dianggap sebagai penyebab kejelekan kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan gerakan Ratu Adil sering memusuhi orang asing dan berusaha mengusir pemerintah asing.

Sementara itu pengaruh lingkungan kehidupan Islam pada rakyat pedesaan cukup besar. Pengaruh itu terutama dalam mengadakan reaksi terhadap pemerintah Belanda. Sikap permusuhan terhadap penguasa asing sering dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu dalam bentuk pemberontakan melawan kekuasaan. Api semangat Islam semakin berkobar semenjak abad ke-19, yaitu sewaktu pengaruh Barat makin mendalam. Panggilan untuk menghidupkan kembali kehidupan agama sering menjadi alat yang baik untuk mempersatukan rakyat. Melalui ajaran agama semangat menentang pemerintah Belanda dapat dikobarkan. Kekuatan-kekuatan yang terhimpun dalam lingkungan Muslimin ini terutama terpusat pada ajaran *jihad* atau perang sabil, dan terbina dalam *pesantren-pesantren*, serta ajaran-ajaran tarekat. Sementara itu kyai menjadi tokoh-tokoh pemimpin yang ampuh dalam menggerakkan pengikutnya.

Dalam keadaan yang demikian itu pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan agama saja, tetapi juga sebagai tempat pendidikan kader pemimpin agama. Pesantren tersebar di seluruh Jawa semenjak abad ke-19. Tidak sedikit para pemimpin agama merasa terpanggil untuk memimpin perlawanan terhadap perluasan pengaruh Barat yang semakin mendalam. Lembaga pesantren digerakkan untuk menentang pengaruh Belanda yang merembes sampai ke pedesaan. Perlawanan kaum Muslimin terhadap pemerintah kolonial didasarkan pada faktor politik dan agama. Pertama, kaum Muslimin menolak pemerintahan kaum kafir. Kedua, kedudukan mereka terancam oleh kekuasaan Belanda. Oleh karena itu rasa kebencian yang dilancarkan itu tidak hanya tertuju pada orang-orang Belanda, tetapi juga kepada para pegawai yang bekerja untuk pemerintah Belanda. Di bawah pengaruh para pemimpin agama beserta pesantren-pesantrennya serta ajaran agamanya rakyat pedesaan Islam dipersatukan untuk melawan.

Pada tahun 1903 terjadilah pemberontakan di kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), yang dipimpin oleh seorang kyai yang bernama Kasan Mukmin. Kasan Mukmin mengaku sebagai orang yang telah menerima wahyu dari Yang Maha Kuasa, untuk memimpin rakyat di lingkungannya. Ia juga mengaku sebagai penjelmaan dari Imam Mahdi. Menurut pengakuannya ia akan mendirikan sebuah kerajaan baru di Jawa. Dalam khotbah-khotbahnya ia mengajak untuk me-

lakukan perang jihad melawan pemerintah Belanda. Dengan melalui ajaran-ajaran itu ia mengumpulkan para pengikutnya untuk merencanakan penyerangan terhadap pemerintah. Setelah pihak pemerintah mendengar desas-desus akan terjadinya pemberontakan, maka segera dikirimkan pasukan untuk mencegahnya. Kedatangan pasukan pemerintah ke tempat pemberontakan disambut dengan serangan sengit dengan menggunakan senjata tajam. Pertempuran berakhir dengan korban yang tidak sedikit. Dalam pertempuran tersebut residen Belanda menderita luka-luka. Sejumlah 40 orang mati terbunuh dan 20 orang lainnya luka-luka. Sementara itu sebagian dari para pemberontak ditangkap. Pemimpin pemberontakan itu sendiri mati terbunuh dalam pertempuran tersebut. Kerusuhan padam setelah peristiwa tersebut.

Pemberontakan itu ternyata memiliki latarbelakang yang luas. Di antaranya ialah pelampiasan rasa dendam dan ketidak-puasan rakyat terhadap penguasa. Alasan itu terutama karena banyaknya penyelewengan dalam masalah penyewaan tanah untuk perkebunan tebu, berbagai pengerahan buruh, serta penarikan pajak yang berat.

Di desa Bendungan wilayah karesidenan Kediri pada tahun 1907 juga meletus pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Dermojoyo. Dalam gerakannya itu Dermojoyo juga mengaku dirinya telah mendapat wahyu untuk menjadi seorang Ratu Adil. Diceriterakan bahwa menurut dia para pengikutnya harus bersedia untuk melakukan perjuangan melawan musuh. Pengikutnya dikatakan akan mengalami kemenangan besar. Dengan melalui ajaran-ajarannya ia dapat mengumpulkan sejumlah pengikut untuk melakukan pemberontakan. Mereka berkeyakinan bahwa dalam perang itu pengikutnya tidak akan kalah karena adanya kesaktian yang dibawa pemimpinnya yang bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Setelah mendapat banyak pengikut maka Dermojoyo merencanakan untuk melancarkan serangan terhadap pemerintah. Suasana menjadi panas ketika tersebar berita akan terjadinya pemberontakan tersebut. Pihak pemerintah segera menyiapkan pasukan untuk menumpas gerakan yang ada di daerah tersebut. Pada waktu bantuan militer yang datang dari Surabaya sampai di tempat pengikut Dermojoyo, maka berkobarlah pertempuran yang sengit. Pergulatan demikian serunya sehingga 18 orang meninggal, sembilan luka-luka, dan 49 orang lagi

ditawan. Dermojoyo sendiri tewas beserta anaknya dalam perkelahian yang sengit.

Selain kerusuhan-kerusuhan tersebut di atas masih banyak lagi peristiwa-peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat di bawah gerakan Ratu Adil.

2. Gerakan Keagamaan

Selain dua jenis gerakan rakyat seperti yang tersebut di atas, masih ada lagi gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh rakyat pedesaan yang tergabung dalam kelompok-kelompok aliran-aliran agama. Tidak berbeda dengan gerakan yang terdahulu, gerakan rakyat yang terakhir ini juga timbul sebagai akibat dari rasa ketidak-puasan dan kebencian terhadap keadaan kehidupan pada masa itu. Kelompok ini juga menghendaki perubahan keadaan yang jelek dan tatakehidupan yang sedang berlaku. Dengan demikian gerakan rakyat pedesaan ini lebih merupakan suatu perwujudan sikap keagamaan yang mengandung rasa tidak puas terhadap keadaan kehidupan yang sedang dialami. Ketidak-puasan itu dinyatakan dalam sikap memberontak terhadap keadaan yang tidak disenangi itu. Mereka umumnya benci terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kehidupan rakyat. Selain itu mereka juga benci dan menentang terjadinya kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat perkembangan budaya Barat. Masuknya budaya Barat yang diikuti oleh kemerosotan moral menimbulkan kekeruhan dan kekacauan.

Golongan penganut aliran keagamaan itu memandang pemerintah kolonial dan para pengikutnya sebagai lawannya. Mereka menentang kekuasaan yang telah mengekang kehidupannya. Kebencian terhadap Belanda dan para priyayi tertanam dalam hati rakyat penganut aliran ini.

Di antara gerakan-gerakan itu ada yang lebih menekankan usaha untuk menggiatkan kembali kehidupan keagamaan dengan cara yang ketat. Gerakan semacam itu dapat digolongkan sebagai "gerakan pemurnian". Kaum pemurni ini juga berusaha untuk memperkuat kembali tatahidup yang telah berlaku bagi rakyat semenjak masa lampau. Dengan melalui ajakan yang demikian itu para kyai dan haji di daerah pedesaan berhasil membakar semangat rakyat petani untuk

menjalankan seruannya itu. Kebanyakan gerakan semacam ini terwujud dalam perkumpulan-perkumpulan tarekat yang banyak dianut oleh petani Islam di pedesaan. Ada juga gerakan lain yang bersifat setengah Islam atau bukan Islam.

Apa yang sesungguhnya diidamkan oleh gerakan keagamaan ini adalah suatu kehidupan dunia yang penuh kebahagiaan dan ketenteraman. Keadaan itu dapat berwujud sebagai suatu kerajaan yang akan diperintah secara adil, damai dan penuh kebahagiaan, serta dalam bentuk masyarakat agama yang murni yang tidak dikotori oleh orang kafir. Selain itu mereka menggambarkan keadaan itu bebas dari kekuasaan kelompok-kelompok yang menindas. Oleh sebab itulah arah tujuannya adalah mengadakan perubahan atau penggantian dalam lingkungan kehidupan mereka.

Gerakan permurnian di lingkungan pemeluk agama Islam, bersifat keras dalam usaha menentang kekendoran dalam menjalankan ajaran agama. Gerakan ini sekaligus menganjurkan untuk melakukan ibadah agama secara ketat kepada para pengikutnya. Kebenciannya terhadap penguasa asing dari pengikut gerakan ini sekaligus tertuju kepada agama yang dianut oleh penguasa asing. Biasanya antara pemimpin dan anggotanya terdapat hubungan yang kuat. Ikatan persatuannya sangat kuat karena diikat oleh sumpah-sumpah prasetya pada ajarannya. Selain itu hubungan dan ajarannya sering bersifat rahasia. Mereka mengikat tali persaudaraan di antara anggotanya seperguruannya. Sering mereka memandang dunia kehidupan di luar kelompoknya sebagai kehidupan yang telah rusak.

Oleh karena sifat-sifat gerakan golongan keagamaan semacam itu, maka pemerintah Belanda menganggapnya sebagai gerakan anti Belanda. Lebih-lebih dalam peristiwa pemberontakan sering beberapa aliran tarekat itu terlibat. Peristiwa pemberontakan di Banten Utara misalnya, yang terjadi pada tahun 1880-an, aliran tarekat Naqsyabandiah dan Qadiriyyah menjadi alat pemersatu dari rakyat pedalaman untuk menyebarkan gerakan pemberontakan itu.

Salah satu contoh dari gerakan golongan keagamaan semacam itu ialah gerakan yang dipimpin oleh Haji Mohamad Rifangi di desa Kalisalak daerah karesidenan Pekalongan. Aliran yang dipimpinnya itu disebut Budiah. Budiah ini merupakan suatu aliran ajaran pe-

inurnian Islam. Menurut Kyai Haji Mohamad Rifangi, gerakannya itu ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap kebobrokan agama yang telah meresap di lingkungan rakyat Islam di Jawa pada abad ke-19. Gerakan itu lahir pada sekitar tahun 1850-an. Tujuan dari gerakan itu ialah untuk mengadakan pembaharuan Islam dengan jalan kembali kepada ajaran agama yang murni. Pengikut dari gerakan ini tersebar di daerah karesidenan Pekalongan dan Kedu. Menurut pandangan pemimpin Budiah, kehidupan agama di kalangan rakyat, dan juga di kalangan pemimpin-pemimpinnya, telah menyimpang dari petunjuk-petunjuk Tuhan. Ditegaskan pula bahwa banyak penguasa negara, bupati-bupati, camat-camat, dan kepala desa telah berdosa. Demikian pula para penghulu banyak yang bodoh dan melanggar kebenaran hukum dan amalan agama. Banyak pula orang-orang yang telah mengabaikan kaidah agama dan tunduk kepada kebiasaan kafir. Oleh sebab itulah mereka harus disadarkan dan dituntun kembali ke arah jalan yang benar. Pemuka Budiah ini juga menentang kepada kebiasaan yang banyak dilakukan oleh orang-orang di pedesaan, seperti: kebiasaan menanggap wayang dan menabuh gamelan, pertemuan-pertemuan yang membolehkan pria dan wanita duduk bersama, wanita bepergian tanpa kerudung kepala, dan lain-lainnya.

Karena Haji Rifangi menganggap pemimpin-pemimpin masyarakat telah bobrok, maka menurut dia rakyat tidak perlu mengikut pemimpin tersebut. Ia melarang pengikutnya untuk setia atau mengikuti penguasa atau kepala daerah setempat. Para kyai dan guru agama yang bekerja untuk pemerintah Belanda dikutuk dan disebut kafir. Rakyat hanya dianjurkan agar setia kepada pemimpin yang benar-benar sebagai khalifah dari Nabi yang suci. Para pengikutnya dianjurkan untuk menjalankan ajaran dan rukun agama yang ketat.

Akibat dari ajaran-ajaran yang radikal semacam itu maka timbulah pertentangan antara pihak pengikut Budiah dengan kelompok rakyat lainnya. Tetapi pertentangan ini yang lebih tajam ialah antara golongan itu dengan pihak pejabat pemerintah. Dengan tersiarnya berita tentang adanya usaha Haji Rifangi akan memberontak, maka akhirnya pemerintah menindas gerakan itu. Haji Rifangi ditangkap dan kemudian dibuang ke daerah luar Jawa. Pemerintah pada waktu itu telah khawatir kalau-kalau gerakan itu akan menimbulkan pem-

berontakan. Lebih-lebih mengingat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh pemimpinnya cukup mengobarkan semangat perlawanan dan kebencian terhadap pihak yang berkuasa.

Setelah pemuka gerakan Budiah dibuang, gerakan itu tidaklah hilang tetapi masih hidup, sekalipun secara rahasia dan malahan masih dapat hidup sampai abad ke-20. Gerakan-gerakan lainnya yang sejenis juga pernah terjadi di daerah lain di Jawa. Gerakan-gerakan itu semuanya menunjukkan suatu pencerminan dari perasaan melawan dan menentang serta protes rakyat di pedesaan terhadap pengaruh kekuasaan Belanda.



Sgt popess - Misteri four

D'CURRZ

C.V. JASANKU Offset
JAKARTA

PERPUST

Perpustakaan
Jenderal Ke

959.

NU

S